



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Simeulue memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat Maju, Islami dan Berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor...

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata

Cara...

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4590);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
23. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

24. Qanun...

24. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);
25. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 9);
26. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI KABUPATEN SIMELUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025 – 2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.

5. Rencana...

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Kabupaten Simeulue adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Simeulue untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
14. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk mencapai tujuan;

BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian Arah kebijakan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran qanun ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

Pasal 3

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah.

Pasal 4

Berpedoman kepada RPJP Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 pada setiap periode jangka waktu 5 (lima) tahunan sejalan dengan pergantian Bupati Kabupaten Simeulue akan disusun RPJM Kabupaten Simeulue.

Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berisi:

BAB...

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
BAB IV	: VISI DAN MISI DAERAH
BAB V	: ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
BAB VI	: PENUTUP

Pasal 6

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran qanun ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Simeulue, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun berikutnya.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD

Sebagaimana...

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJPD

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Qanun ini, Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Simeulue yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentang dengan Qanun ini.

BAB...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Qanun ini mulai berlaku Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Simeulue Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 121) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di Simeulue
pada tanggal 12 September 2025 M
19 Rabiul Awal 1447 H


BUPATI SIMEULUE,

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Diundangkan di Simeulue
pada tanggal 12 September 2025 M
19 Rabiul Awal 1447 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

ASLUDIN

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025 NOMOR 87
NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH (1/84/2025)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki.

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045 memiliki nilai strategis di dalam perencanaan pembangunan daerah sebab menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program bagi calon kepala daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 265 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045 dijabarkan lebih lanjut tiap 5 (lima) tahunannya ke dalam RPJMD selama 4 (empat) periode.

RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 disusun dengan pendekatan proses, meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan atas-bawah (*top-down*) serta bawah-atas (*bottom-up*), dengan mengedepankan proses evaluasi, prediksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah. Selain pendekatan sebagaimana tersebut diatas, penyusunan RPJPD juga dilakukan melalui pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial agar dokumen RPJPD yang disusun dapat mengakomodir semua kebijakan pada aspek perencanaan pembangunan secara makro.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 mengalami berbagai dinamika terkait dengan proses penyusunan yang menyebabkan beberapa perubahan pedoman teknis serta perubahan target dan sasaran pembangunan tahun 2025-2045 yang tentu saja akan berdampak pada terhadap proses penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045. Selanjutnya memperhatikan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023 dan perkembangan-perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi seperti perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pemerintah pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembarah kebiang, maka harus dilakukan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045.

Akhirnya, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 ini disusun dengan tetap menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta menjadi pedoman penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045.

Sinabang, 12 September 2025

BUPATI SIMEULUE,

MOHAMMAD NASRUL MIKARIS, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya.....	9
1.3.1 Keterkaitan dengan RPJPN Tahun 2025-2045.	10
1.3.2 Keterkaitan dengan RPJPA Tahun 2025-2045.	10
1.3.3 Keterkaitan dengan RTRW Nasional Tahun 2025-2045.	11
1.3.4 Keterkaitan dengan RTRWA	11
1.3.5 Keterkaitan dengan RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034.....	12
1.3.6 Keterkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	12
1.3.7 Keterkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	12
1.3.8 Keterkaitan dengan Evaluasi RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2007-2027	12
1.3.9 Keterkaitan dengan RPJMD.....	13
1.4. Maksud dan Tujuan.....	13
1.5. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN SIMEULUE.....	15
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	15
2.1.1. Kondisi Geografi.....	15
2.1.1.1. Letak dan Wilayah Administrasi	15
2.1.1.2. Kondisi Topografi.....	17
2.1.1.3. Kondisi Klimatologi	18

2.1.1.4.	Kondisi Geologi.....	20
2.1.1.5.	Kondisi Hidrologi.....	20
2.1.1.6.	Penggunaan Lahan.....	23
2.1.1.7.	Daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	24
2.1.1.8.	Jasa Ekosistem.....	35
2.1.1.9.	Dampak Resiko Lingkungan	48
2.1.2.	Demografi	60
2.1.2.1.	Distribusi Penduduk	60
2.1.2.2.	Kepadatan Penduduk	62
2.1.2.3.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	63
2.1.2.4.	Komposisi Penduduk.....	64
2.1.2.5.	Kondisi Sosial Penduduk.....	64
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	65
2.2.1.	Kesejahteraan Ekonomi	65
2.2.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi	65
2.2.1.2.	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini).....	67
2.2.1.3.	Nilai Tukar Petani.....	68
2.2.1.4.	Kemiskinan.....	69
2.2.1.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	70
2.2.1.6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71
2.2.1.7.	Laju Inflasi.....	72
2.2.2.	Kesejahteraan Sosial Budaya	73
2.2.2.1.	Indeks Perlindungan Anak.....	73
2.2.2.2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	73
2.2.2.3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74
2.2.2.4.	Indeks Pembangunan Pemuda	75
2.2.2.5.	Usia Harapan Hidup	78
2.2.2.6.	Angka Kematian Ibu.....	78
2.2.2.7.	Angka Kematian Bayi	79
2.2.2.8.	Prevalensi Balita Gizi Buruk	80

2.2.2.9.	Prevalensi Stunting	80
2.3.	Aspek Daya Saing.....	81
2.3.1.	Daya Saing Ekonomi Daerah	81
2.3.1.1.	Pertumbuhan PDRB	81
2.3.2.	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	86
2.3.2.1.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah.....	86
2.3.2.2.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).....	87
2.3.2.3.	Indeks Pendidikan.....	88
2.3.2.4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja & Tingkat Pengangguran Terbuka	88
2.3.3.	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	89
2.3.3.1.	Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas.....	89
2.3.3.2.	Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal Tahun 2024...	90
2.3.3.3.	Fasilitas Bank dan non Bank	91
2.3.3.4.	Ratio Ketersediaan Daya Listrik.....	91
2.3.3.5.	Jumlah Penginapan /Losmen /Wisma /Resort /Hotel	92
2.3.3.6.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak	92
2.3.3.7.	Persentase Rumah Tangga dengan Menggunakan Telepon	93
2.3.4.	Daya Saing Iklim Investasi	93
2.3.4.1.	Indeks Demokrasi	94
2.3.4.2.	Indeks Daya Saing Daerah	94
2.4.	Aspek Pelayanan Umum.....	95
2.4.1.	Fokus Layanan urusan Keistimewaan Aceh	96
2.4.1.1.	Penyelenggaraan Kehidupan Beragama	96
2.4.2.	Fokus Layanan Urusan Wajib	99
2.4.2.1.	Layanan Urusan Wajib Dasar.....	99
2.4.2.2.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar	122
2.4.2.3.	Fokus Layanan Umum Urusan Pilihan.....	148
2.4.2.4.	Penunjang Urusan.....	165

2.5.	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.	176
2.6.	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik..	179
2.6.1.	Analisis Proyeksi Kependudukan	179
2.6.1.1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	180
2.6.1.2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	182
2.6.1.3.	Kepadatan Penduduk	183
2.6.1.4.	Penduduk Usia Produktif.....	184
2.6.1.5.	Angka Ketergantungan	184
2.6.1.6.	Penduduk dengan Disabilitas.....	185
2.6.2.	Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan	185
2.6.2.1.	Proyeksi Kebutuhan Perumahan.....	185
2.6.2.2.	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih.....	186
2.6.2.3.	Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik.	188
2.6.2.4.	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan.....	188
2.6.2.5.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan.....	188
2.6.2.6.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan	189
2.7.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	189
2.7.1.	Pusat – Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Simeulue	189
2.7.2.	Prioritas Pemanfaatan Ruang	191
2.7.2.1.	Dasar Penyusunan Arah Pemanfaatan Ruang.....	191
2.7.2.2.	Perwujudan Rencana Struktur Ruang.....	193
2.7.2.3.	Perwujudan Rencana Pola Ruang.....	195
2.7.3.	Indikasi Program/Proyek Strategis yang dapat Mempengaruhi Perkebangan Daerah Simeulue berdasarkan RTRWK Simeulue.....	203
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	205
3.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah	205
3.1.1.	Sumber Daya Manusia masih rendah.....	205
3.1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simeulue masih Rendah....	209
3.1.3.	Daya Saing Daerah.....	216

3.1.4.	Masih belum optimalnya Transformasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Simeulue.....	219
3.1.5.	Lingkungan Sosial Masyarakat.....	224
3.1.6.	Masih Rendahnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar Di Kabupaten Simeulue	226
3.1.7.	Kualitas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Simeulue.....	228
3.2.	Isu Strategis.....	230
3.2.1.	Isu strategis nasional	230
3.2.1.1	Produktivitas rendah.....	230
3.2.1.2	IPTEKIN dan Riset Lemah.....	230
3.2.1.3	Deindustrial Dini	231
3.2.1.4	Pariwisata dibawah Potensi	232
3.2.1.5	Ekonomi Laut Belum Optimal	233
3.2.1.6	Kontribusi Koperasi dan UMKM rendah	234
3.2.1.7	Insfrastruktur dan literasi rendah	235
3.2.1.8	Pembangunan belum berkelanjutan.....	236
3.2.1.9	Integrasi domestik terbatas	236
3.2.1.10	Kualitas SDM masih rendah.....	237
3.2.1.11	Tata kelola pemerintahan belum optimal	237
3.2.1.12	Kepastian dan penegakan hukum masih lemah.....	237
3.2.1.13	Demokratisasi belum optimal.....	238
3.2.1.14	Kesenjangan Jawa dan luar Jawa.....	238
3.2.2.	Isu Strategis Aceh	239
3.2.2.1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting	239
3.2.2.2	Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat.	240
3.2.2.3	Penanggulangan Kemiskinan.	240
3.2.2.4	Peningkatan Pendapatan Perkapita dengan Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh	240
3.2.2.5	Optimalisasi Riset dan Inovasi serta Teknologi Digital	240

3.2.2.6	Membuka Lapangan Kerja dan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat.	241
3.2.2.7	Memperkuat Industri Pengolahan dan Eksport	241
3.2.2.8	Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau.....	241
3.2.2.9	Memperkuat Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	241
3.2.2.10	Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Berkesinambungan	242
3.2.2.11	Memperkuat Otonomi Khusus.....	242
3.2.2.12	Kemandirian Ruang Fiskal	243
3.2.2.13	Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh	243
3.2.2.14	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Disablitas, Memperkuat Gender dan Keluarga.....	243
3.2.2.15	Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Batu bara serta Migas yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan	244
3.2.2.16	Pengurangan Risiko Bencana	244
3.2.2.17	Memperkuat Pembangunan Kewilayahan	244
3.2.2.18	Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas	245
3.2.3.	Isu Strategis Berdasarkan KLHS RPJPD Simeulue.....	245
3.2.4.	Isu Strategis Kabupaten Simeulue	245
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH.....	253
4.1.	Visi dan Misi Nasional.....	253
4.2.	Visi dan Misi Provinsi Aceh	254
4.2.1.	Visi Provinsi Aceh	254
4.2.2.	Misi Provinsi Aceh.....	255
4.3.	Visi Pemerintah Kabupaten Simeulue	257
4.4.	Sasaran Visi	258

4.5. Misi	261
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....	267
5.1. Arah Kebijakan Daerah.....	267
5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap I (Periode 2025 – 2029)	267
5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Periode 2030 - 2034	277
5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Periode 2035 – 2039	287
5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Periode 2040 – 2045	298
5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045.....	322
5.2.1. Arah Pembangunan Daerah.....	322
5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi Daerah	325
5.2.3. Indikator Utama Pembangunan (IUP).....	425
5.2.4. Perumusan Sasaran Pokok	457
BAB VI PENUTUP	498
6.1. Kaidah Pelaksanaan	498
6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan.....	498
6.1.1.1. Keterkaitan RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya.....	498
6.1.1.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan	500
6.1.1.3. Skema Pendanaan dan Penganggaran.....	500
6.1.2. Kerangka Pengendalian.....	501
6.1.3. Analisis Risiko Pembangunan	502
6.1.4. Sistem Intensif.....	503
6.1.5. Mekanisme Perubahan	503
6.1.6. Komunikasi Publik.....	504
6.2. Pembiayaan Pembangunan	504

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Administrasi Kabupaten Simeulue	16
Tabel 2.2	Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Ketinggian Tempat	17
Tabel 2.3	Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Kelerengan.....	17
Tabel 2.4	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Tahun 2010-2024.....	18
Tabel 2.5	Daerah Aliran Sungai Kabupaten Simeulue.....	21
Tabel 2.6	Hasil analisis ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Simeulue	26
Tabel 2.7	Ketersediaan Air di Kabupaten Simeulue	27
Tabel 2.8	Produktivitas Lahan untuk Kebutuhan Pangan di Kabupaten Simeulue...	29
Tabel 2.9	Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Lahan Pangan (Ha)	30
Tabel 2.10	Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Lahan	32
Tabel 2.11	Luasan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih.....	36
Tabel 2.12	Luasan Penyedia Pangan di Kabupaten Simeulue	38
Tabel 2.13	Luasan Jasa Ekosistem Kehati di Kabupaten Simeulue.....	42
Tabel 2.14	Luasan Jasa Ekosistem Pengatur Air di Kabupaten Simeulue.....	44
Tabel 2.15	Luasan Ekoregion di Kabupaten Simeulue	47
Tabel 2.16	Luas Ancaman Bencana Tsunami di Kabupaten Simeulue	53
Tabel 2.17	Luas Ancaman Bencana Banjir di Kabupaten Simeulue	55
Tabel 2.18	Luas Ancaman Bencana Gempa di Kabupaten Simeulue.....	56
Tabel 2.19	Luas Ancaman Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Simeulue	58
Tabel 2.20	Luas Ancaman Bencana kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Simeulue.....	59
Tabel 2.21	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012-2024	61
Tabel 2.22	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2011-2024	62
Tabel 2.23	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2024 Per Kecamatan.....	62
Tabel 2.24	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Simeulue Tahun 2024.....	63
Tabel 2.25	Rasio Ketergantungan (dependency rasio) Penduduk di Kabupaten Simeulue Tahun 2019-2024	64

Tabel 2.26	Distribusi PDRB ADHB Kab. Simeulue Menurut lapangan Usaha 2012-2024	67
Tabel 2.27	Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh dan Kabupaten/Kota Se Aceh Tahun 2013-2024 (Maret)	70
Tabel 2.28	Perkembangan Jumlah Pemuda, Oraganisasi Pemuda, Kegiatan Kepemudaan dan Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2024	76
Tabel 2.29	Jumlah Cabang Olah Raga Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2024	76
Tabel 2.30	Perolehan Mendali Dalam Pekan Olahraga Tingkat Provinsi Tahun 2022	77
Tabel 2.31	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Simeulue, Tahun 2016-2024	79
Tabel 2.32	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2024	79
Tabel 2.33	PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2023 (dalam jutaan rupiah).....	82
Tabel 2.34	PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2023 (dalam jutaan rupiah).....	83
Tabel 2.35	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut lapangan Usaha Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2023 (%)	84
Tabel 2.36	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut lapangan Usaha	85
Tabel 2.37	Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Kabupaten Simeulue Tahun 2022.....	90
Tabel 2.38	Ratio Kelistrikan Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2024	91
Tabel 2.39	Perkembangan Jumlah Penginapan/losmen/wisma/resort/hotel di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022	92
Tabel 2.40	Perkembangan BTS Terbangun, Desa Terakses jaringan HP dan Jumlah Rumah Tangga memiliki HP di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022	93
Tabel 2.41	Jumlah pelanggaran Syariat Islam Tahun 2016- 2024	96
Tabel 2.42	Jumlah Rumah Ibadah di Kabupaten Simeulue berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2024	97
Tabel 2.43	Jumlah Pendapatan dan Penyaluran Zakat dan Infaq Tahun 2018 – 2024	98
Tabel 2.44	Jumlah Dayah Yang Mendapatkan Bantuan Sarana dan Prasaranan Fungsional Dari Provinsi Aceh Tahun 2013 – 2022	99
Tabel 2.45	Perkembangan Dayah Dalam Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 – 2022	99

Tabel 2.46	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik di Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2021.....	103
Tabel 2.47	Perkembangan Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2021	104
Tabel 2.48	Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2021.....	105
Tabel 2.49	Perkembangan Angka Melanjutkan Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2019	105
Tabel 2.50	Capaian Angka Kemampuan Literasi Tahun 2019-2023	106
Tabel 2.51	Capaian Angka Kemampuan Numerasi Tahun 2019-2023.....	106
Tabel 2.52	Capaian Indeks Iklim Keamanan Tahun 2019-2023.....	107
Tabel 2.53	Capaian Indeks Iklim Kebinekaan Tahun 2019-2023	108
Tabel 2.54	Capaian Indeks Iklim Inklusivitas Tahun 2019-2023	108
Tabel 2.55	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses terhadap Jamban Sehat di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2021	109
Tabel 2.56	Persentase Rumah Tangga PHBS Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2021	110
Tabel 2.57	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2022 ...	111
Tabel 2.58	Data Puskesmas Berdasarkan Tingkat Terakreditasi di Kabupaten Simeulue Tahun 2022.....	111
Tabel 2.59	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2022.....	112
Tabel 2.60	Rasio Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2022.....	113
Tabel 2.61	Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2022	113
Tabel 2.62	Persentase Panjang Jalan Nasioanl, Provinsi dan Kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2012-2022.....	115
Tabel 2.63	Jembatan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2016-2024.....	117
Tabel 2.64	Persentase Kesesuaian pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRWK Simeulue Tahun 2017-2022	118
Tabel 2.65	Panjang Saluran Irigasi, Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	119
Tabel 2.66	Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2022 .	120
Tabel 2.67	Persentase Luasan Permukiman Perkotaan Kabupaten Simeulue.....	120

Tabel 2.68	Penegakkan dan Penindakan Pelanggaran Qanun Daerah terkait Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Simeulue Tahun 2018–2022	121
Tabel 2.69	Data Penerima Bantuan Sosial Tahun 2018-2022.....	122
Tabel 2.70	Perkembangan Desa Rawa Pangan Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022	124
Tabel 2.71	Perkembangan Bidang dan Luas Tanah Aset Pemda Bersertipikat Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2023 (bidang)	125
Tabel 2.72	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2023	126
Tabel 2.73	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan HidupnKabupaten Simeulue Tahun 2017-2022	126
Tabel 2.74	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2022	127
Tabel 2.75	Perkembangan Armada dan Kapasitas Angkut Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue Tahun 2023	127
Tabel 2.76	Perkembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2022	128
Tabel 2.77	Perkembangan Penerbitan e-KTP dan Akta Kelahiran Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022	129
Tabel 2.78	Perkembangan Jumlah PKK Aktif dan Pembinaan PKK di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022	131
Tabel 2.79	Perkembangan Jumlah BUMDes yang Aktif di Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2022	131
Tabel 2.80	Jumlah Pelabuhan/bandara/Terminal di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022.....	132
Tabel 2.81	Rute dan Frekwensi Penyeberangan Kapal pada Pelabuhan Kolok Sinabang Tahun 2022.....	133
Tabel 2.82	Rute dan Frekwensi Penerbangan pada Bandara Lasikin Tahun 2022	133
Tabel 2.83	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022	134
Tabel 2.84	Perkembangan BTS Terbangun, Desa Terakses jaringan HP dan Jumlah Rumah Tangga memeiliki HP di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022	135
Tabel 2.85	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2018-2022	135
Tabel 2.86	Kriteria Predikat SPBE.....	136

Tabel 2.87	Perkembangan Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2018-2022.....	139
Tabel 2.88	Perkembangan Koperasi di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022.....	139
Tabel 2.89	Perkembangan Jumlah UMKM Aktif di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022.....	140
Tabel 2.90	Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2022...	142
Tabel 2.91	Perkembangan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2022	143
Tabel 2.92	Perkembangan Jumlah Pemuda, Organisasi Pemuda, Kegiatan Kepemudaan dan Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022	143
Tabel 2.93	Jumlah Cabang Olah Raga Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2022	144
Tabel 2.94	Perolehan Mendali Dalam Pekan Olahraga Tingkat Provinsi Tahun 2022	145
Tabel 2.95	Perkembangan Layanan Perpustakaan Kabupaten Simeulue.....	146
Tabel 2.96	Perkembangan Layanan Perpustakaan Kabupaten Simeulue.....	147
Tabel 2.97	Kontribusi Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB ADHB, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penginapan dan Rata-rata Lama Waktu Menginap di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2024.....	149
Tabel 2.98	Objek Wisata Kabupaten Simeulue Tahun 2021	150
Tabel 2.99	Luas Tanam dan Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan Selain Padi di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2021.....	152
Tabel 2.100	Luas Panen dan Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2021	153
Tabel 2.101	Produksi Komoditas Buah-Buahan di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2021 (ton).....	154
Tabel 2.102	Panjang Jalan Usaha Tani Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022 (dalam meter)	154
Tabel 2.103	Perkembangan Infrastruktur Pertanian Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2020.....	155
Tabel 2.104	Luas Tanam Komoditas Perkebunan Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2020 (Ton).....	157
Tabel 2.105	Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2020 (Ekor).	159
Tabel 2.104	Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kabupaten Simeulue Tahun 2012 – 2022.....	160

Tabel 2.105	Perkembangan Jumlah Armada Penangkapan Ikan Kabupaten Simeulue Tahun 2012–2022.....	160
Tabel 2.106	Perkembangan Jumlah Alat Tangkap Ikan Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022.....	161
Tabel 2.107	Perkembangan Ketersediaan Fasilitas Pendukung Perikanan Kabupaten Simeulue Tahun 2012 - 2021	162
Tabel 2.108	Perkembangan PNS Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Simeulue Tahun 2015-2020 (orang).....	166
Tabel 2.109	Perkembangan PNS Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Simeulue Tahun 2015-2020 (orang).....	166
Tabel 2.110	Perkembangan PNS Menurut Golongan Kabupaten Simeulue Tahun 2015 – 2020 (orang)	167
Tabel 2.111	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan.....	168
Tabel 2.112	Presentase Pendapatan 2012-2022	169
Tabel 2.113	Indeks Inovasi Daerah Tahun 2018-2024	170
Tabel 2.114	Pemeriksaan, Evaluasi dan Review Tahun 2018-2022	175
Tabel 2.115	Nilai SPIP untuk Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2022....	176
Tabel 2.116	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045	180
Tabel 2.117	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045	181
Tabel 2.118	Proyeksi Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis kelamin Laki-laki dalam Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045	181
Tabel 2.119	Proyeksi Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis kelamin Perempuan dalam Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045	181
Tabel 2.120	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045	182
Tabel 2.121	Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045	184
Tabel 2.122	Angka Penduduk Disabilitas di Kabupaten Simeulue Tahun 2023	185
Tabel 2.123	Jumlah Kebutuhan Tempat Tinggal Di Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue (Unit)	186
Tabel 2.124	Jumlah Tempat Tinggal Yang Terpenuhi Dari Jumlah Kebutuhan Per Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue (Unit).....	186
Tabel 2.125	Proyeksi Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (L/dt)	187

Tabel 2.126	Jumlah Air Minum Yang Terpenuhi Dari Jumlah Kebutuhan Per Kecamatan (L/dt).....	187
Tabel 2.127	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Simeulue (L/dt)	187
Tabel 2.128	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Simeulue (SR)	187
Tabel 2.129	Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik (GWh).....	188
Tabel 2.130	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan	188
Tabel 2.131	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan (unit).....	189
Tabel 2.132	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan (unit).....	189
Tabel 4.1	Sasaran Visi RPJPD Simeulue Tahun 2025 – 2045	258
Tabel 4.2	Penyelarasan Sasaran Visi RPJPN dan RPJPD Tahun 2025 – 2045.....	260
Tabel 4.3	Penyelarasan Misi RPJPN dan RPJPD Tahun 2025-2045	265
Tabel 5.1.	Arah Kebijakan	309
Tabel 5.2.	Penyelarasan Arah Pembangunan Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045	322
Tabel 5.3.	Penyelarasan Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045	325
Tabel 5.4	Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045	425
Tabel 5.5.	Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok	457
Tabel 5.6.	Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045.....	490

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pembagian Administrasi Kabupaten Simeulue	16
Gambar 2.2	Peta Ketersediaan Air di Kabupaten Simeulue.....	28
Gambar 2.3	Peta Ketersediaan Lahan Pangan di Kabupaten Simeulue	31
Gambar 2.4	Peta Ketersediaan Lahan Pemukiman di Kabupaten Simeulue	34
Gambar 2.5	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Simeulue...	37
Gambar 2.6	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Simeulue.....	40
Gambar 2.7	Peta Jasa Ekosistem Kehati di Kabupaten Simeulue	42
Gambar 2.8	Peta Jasa Ekosistem Pengatur Air di Kabupaten Simeulue	44
Gambar 2.9	Peta Ekoregion Kabupaten Simeulue.....	48
Gambar 2.10	Persentasi jenis bencana berdasarkan jumlah kejadian.....	50
Gambar 2.11	Persentasi jenis bencana berdasarkan jumlah korban jiwa	51
Gambar 2.12	Beberapa jenis bencana seperti banjir, gempa bumi, longsor, dan kebakaran gedung	51
Gambar 2.13	Persentasi jenis bencana berdasarkan total kerugian	52
Gambar 2.14	Peta potensi Bencana Tsunami di Kabupaten Simeulue.....	53
Gambar 2.15	Peta potensi Bencana Banjir di Kabupaten Simeulue.....	55
Gambar 2.16	Peta potensi Bencana Gempa di Kabupaten Simeulue	57
Gambar 2.17	Peta potensi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Simeulue	58
Gambar 2.18	Peta potensi Bencana Kebakaran Lahan di Kabupaten Simeulue	60
Gambar 2.18	Piramida Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2024	63
Gambar 2.19	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simeulue, Aceh dan Nasional Tahun 2011-2024.....	66
Gambar 2.21	Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2024.....	69
Gambar 2.20	Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2024.....	68
Gambar 2.25	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2024	71
Gambar 2.23	IPM, AHH, RLS dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Simeulue 2014-2024	72

Gambar 2.24	Indikator Perkembangan Harga Kondisi Januari – Februari Tahun 2024.....	72
Gambar 2.25	Indeks Perlindungan Anak.....	73
Gambar 2.26	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) antara Simeulue, Aceh dan Nasional Tahun 2010 - 2024.....	74
Gambar 2.27	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Simeulue, Aceh dan Nasional Tahun 2010 - 2024.....	75
Gambar 2.28	Usia Harapan Hidup Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh dan Nasional, Tahun 2012-2024.....	78
Gambar 2.29	Kondisi Status Gizi Balita Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2021.....	80
Gambar 2.30	PDRB Kabupaten Simeulue Perkapita Tahun 2012-2024.....	86
Gambar 2.31	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2023	87
Gambar 2.32	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022	88
Gambar 2.33	Perkembangan Indeks Pendidikan di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022	88
Gambar 2.34	Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2021.....	89
Gambar 2.35	Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum an Sanitasi Layak Kabupaten Simeulue Tahun 2016-20224.....	93
Gambar 2.36	Skor Pilar dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Simeulue Tahun 2024	95
Gambar 2.37	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2024	100
Gambar 2.38	Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2020	101
Gambar 2.39	Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2020	101
Gambar 2.40	Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022	102
Gambar 2.41	Perkembangan Prasarana Pendidikan Umum Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2020	102
Gambar 2.42	Perkembangan Prasarana Pendidikan Agama Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022	103
Gambar 2.43	Kondisi Jalan Lingkar Kabupaten Simeulue.....	116

Gambar 2.44	Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum an Sanitasi Layak Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2021.....	118
Gambar 2.45	Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2021.....	123
Gambar 2.46	Perkembangan Status Desa di Kabupaten Simeulue Tahun 2012 – 2023.....	130
Gambar 2.47	Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2012-2024.....	148
Gambar 2.48	Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2023 (PDRB ADHB)....	151
Gambar 2.49	Perkembangan Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Tahun 2013-2023 (PDRB ADHK)....	151
Gambar 2.50	Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2023.....	152
Gambar 2.51	Grafik Luas Tanam Komuditas Perkebunan Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2020.....	158
Gambar 2.52	Grafik Jumlah Produksi Komuditas Perkebunan Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2020 (dalam Ton)	158
Gambar 2.53	Grafik Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2020.....	159
Gambar 2.54	Kontribusidan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022.....	163
Gambar 2.55	Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Simeulue Tahun 2013-2024.....	164
Gambar 2.56	Peta Kawasan Transmigrasi Latiung	165
Gambar 2.57	Grafik Perbandingan antara PAD dengan Pendapatan Daerah.....	169
Gambar 2.58	Peta Sitem Pusat Kegiatan Kabupaten Simeulue.....	190
Gambar 5.1	Gambaran Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Simeulue Tahu 2025-2045.....	267

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah harus selaras dengan Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 point 4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP adalah salah satu dari tiga dokumen dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Pasal 10). RPJP harus ada dalam setiap tingkatan pemerintahan baik nasional dan daerah. RPJP Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional yang harus dipedomani dalam penyusunan dokumen lima tahunan dan satu tahunan (Pasal 4). Sementara itu, RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN (Pasal 5).

RPJP Kabupaten Simeulue disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 12 menyatakan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari 1) visi, 2) misi, 3) arah kebijakan, dan 4) sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RTRWN, RPJPA, RTRWA dan RTRWK.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 16, maka RPJP Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan RPJP Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045, yang meliputi:
 1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD.
 2. Orientasi mengenai RPJPD.
 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD
 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

- b. Penyusunan Rancangan Awal RPJP Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045, meliputi:
1. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 2. Analisis permasalahan pembangunan daerah;
 3. Penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
 4. Analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
 5. Perumusan visi dan misi daerah;
 6. Perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah;
 7. Penelaahan KLHS;
 8. Pembahasan ranwal RPJPD dengan OPD;
 9. Berita acara kesepakatan substansi Ranwal antara Kepala Bappeda dan Kepala OPD;
 10. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
 11. Konsultasi Ranwal RPJPD Tahun 2025-2045 ke Gubernur Aceh melalui Bappeda Aceh.
- c. Penyusunan Rancangan RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045.
- d. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045.
- e. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045, meliputi:
1. Penyampaian Rancangan Qanun tentang RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 ke DPRK;
 2. Pembahasan Rancangan Qanun tentang RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 dengan DPRK;
 3. Persetujuan bersama antara DPRK dan Bupati tentang Rancangan Qanun tentang RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045.
- f. Penetapan.

Dalam proses penyusunan Rancangan Awal RPJP Kabupaten Simeulue, Bappeda Kabupaten Simeulue bersama dengan stakeholder lainnya telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan SK Tim Penyusun RPJPD dan sudah di legalisasi oleh Bupati Simeulue tanggal. 21 Juni 2023;
2. Rapat Tim Penyusun untuk menyepakati Jadwal penyusunan Ranwal RPJP Kabupaten Simeulue 2025-2045 tanggal 13 September 2023;
3. Rapat Orientasi Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 tanggal 5 Oktober 2023;
4. Legalisasi dan penyampaian surat Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 050/2757/2023 tanggal 12 Oktober 2023 perihal Permintaan data dukung penyusunan

Rancangan Awal RPJP Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 kepada Para Kepala OPD Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue;

5. Pembagian Tugas Tim Penyusun Ranwal RPJPD tanggal 15 Oktober 2023;
6. Rapat Tim Penyusun Ranwal RPJP Kabupaten Simeulue tanggal 20 Oktober 2023;
7. Melakukan analisis gambaran umum kondisi daerah, permasalahan pembangunan daerah dan Analisis isu strategis pembangunan jangka panjang oleh tim Penyusun tgl 21 Oktober s.d. 03 November 2023;
8. Rapat Tim Penyusun dengan Narasumber/Tenaga Ahli tanggal 07 November 2023 di Banda Aceh;
9. Rapat Tim Penyusun dengan Narasumber/Tenaga Ahli tanggal 16 Desember 2023 sampai 17 Desember 2023 di Banda Aceh;
10. Pelaksanaan Desk Ranwal RPJPD dengan OPD tanggal 28 Nopember s/d. 01 Desember 2023;
11. Surat Kepala Bappeda tanggal 29 Nopember 2023 perihal Permintaan Data ke BPS;
12. Rapat Konsultasi Tim Penyusun dengan Narasumber/Tenaga Ahli RPJPD tanggal 14, 15 Desember 2023;
13. Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045, Kamis 21 Desember 2023;
14. Perbaikan draf ranwal RPJPD oleh Tim Penyusun tanggal 22 s/d. 28 Desember 2023;
15. Pengajuan Ranwal RPJPD Kab. Simeulue 2025-2045 dari Bappeda ke Bupati Simeulue melalui Surat Kepala Bappeda Nomor 000.7.2/68 / 2024 tanggal 17 Januari 2024;
16. Pengajuan Ranwal RPJPD Kab. Simeulue 2025-2045 dari Bupati Simeulue ke DPRK melalui Surat Bupati Nomor 000.7.2/128/2024 tanggal 18 Januari 2024;
17. Pembahasan Ranwal RPJPD Kab. Simeulue 2025-2045 dengan DPRK Simeulue tanggal 24 Januari 2024. di Ruang Aula DPRK Simeulue;
18. Fasilitasi Ranwal RPJPD Kab. Simeulue 2025-2045 di Bappeda Aceh tanggal 26 Januari 2024;
19. Rapat Tim Penyusun finalisasi Indikator Ranwal RPJPD Kab. Simeulue 2025-2045 tanggal 01 Februari 2024;
20. Rapat Tim Penyusun Bersama OPD finalisasi Ranwal RPJPD Kab. Simeulue 2025-2045 tanggal 02 Februari 2024.
21. Hasil Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 di Bappeda Aceh tanggal 4-7 Februari 2024.
22. Musrenbang RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 tanggal 03 Mei 2024.

23. Rapat dan Konfirmasi Rancangan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 bersama Inspektorat Kabupaten Simeulue tanggal 27 Mei 2024 terkait Rekomendasi Hasil Reviu RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045.
24. Berita Acara Tindak Lanjut Bappeda Simeulue Terkait Laporan Hasil Reviu APIP Terhadap Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 tanggal 15 Juli 2024.
25. Penyerahan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 ke DPRK Simeulue tanggal 15 Juli 2025.
26. Melakukan sinkronisasi dokumen rancangan akhir RPJPD Simeulue tahun 2025-2045 dengan draf dokumen KLHS RPJPD Simeulue Tahun 2025-2045 tanggal 20 Desember 2024.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Simeulue. Perhatian dan dukungan semua pemangku kepentingan diperlukan agar penyusunan RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 tepat waktu sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Apabila RPJPD Tahun 2025-2045 tidak dapat diselesaikan, maka resiko yang akan dihadapi adalah sebagai berikut:

1. **Tidak Memiliki Pedoman.** Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak mempunyai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dibawahnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Calon Kepala Daerah tidak mempunyai pedoman dalam penyusunan Visi dan Misi RPJMD;
2. **Sanksi Administratif.** Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, anggota DPRD dan gubernur/ bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama 3 (tiga) bulan.
3. **Menimbulkan ketidakpastian.** Tanpa adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang, akan sulit untuk memprediksi arah dan tujuan dan sasaran pokok pembangunan daerah, dan akan menciptakan ketidakpastian di kalangan investor, pelaku bisnis, dan masyarakat umum yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
4. **Ketimpangan pembangunan.** Tanpa panduan yang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, ada risiko terjadinya ketimpangan dalam pembangunan antarwilayah. Beberapa daerah mungkin mendapatkan lebih banyak sumber daya dan perhatian daripada yang lain, mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih besar.

5. **Inefisiensi sumber daya.** Rencana Pembangunan Jangka Panjang membantu pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dengan efisien dan efektif. Tanpa rencana tersebut, risiko terjadinya penggunaan yang tidak efisien dan pengabaian sumber daya menjadi lebih besar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan berdampak negatif pada keberlanjutan lingkungan.
6. **Ketidakseimbangan sektor:** Rencana Pembangunan Jangka Panjang membantu dalam menetapkan prioritas pembangunan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Tanpa rencana tersebut, risiko terjadinya ketidakseimbangan dalam pengembangan sektor-sektor tersebut menjadi lebih besar. Misalnya, jika fokus hanya pada sektor ekonomi tanpa memperhatikan sektor pendidikan atau lingkungan, dapat terjadi ketimpangan dan masalah jangka panjang.
7. **Kurangnya koordinasi:** Rencana Pembangunan Jangka Panjang memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan berbagai sektor pemerintah dan lembaga terkait. Tanpa rencana tersebut, risiko terjadinya kurangnya koordinasi antarlembaga dan sektor menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih kebijakan, penyalahgunaan sumber daya, dan hambatan dalam pelaksanaan program-program pembangunan.
8. **Kurangnya daya saing:** Rencana Pembangunan Jangka Panjang dapat membantu dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan daya saing suatu daerah di tingkat regional maupun global. Tanpa rencana tersebut, risiko terjadinya stagnasi ekonomi, kurangnya inovasi, dan penurunan daya saing dapat meningkat.
9. **Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok.** Pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah untuk memberikan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun sehingga mudah menetapkan prioritas program, dan koordinasi dalam upaya pembangunan suatu negara dan daerah. Tanpanya, risiko-risiko yang disebutkan diatas dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketidakseimbangan pembangunan.

Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJP Kabupaten Simeulue 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. **Pendekatan RPJPN Tahun 2025-2045.** Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sedang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), RPJPN 2025-2045 akan menjadi arah Indonesia untuk bergerak dan membangun strategi di tengah ketidakpastian global. Sasaran visi dalam RPJPN berjumlah lima poin karena disesuaikan dengan jumlah butir Pancasila. Visi RPJPN 2025-2045 adalah “negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan” dan negara

nusantara yang mampu memanfaatkan potensi negara kepulauan untuk ketangguhan geopolitik, ekonomi, pertahanan, keamanan, serta budaya atau peradaban bahari.

2. **Menganalisis Kondisi dan Permasalahan Daerah.** RPJP Kabupaten Simeulue 2025-2045 dibangun dengan melakukan analisis gambaran umum kondisi Daerah, permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya, analisis isu strategis pembangunan jangka Panjang, perumusan visi dan misi Daerah, perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah dan sinkronisasi dengan RTRW dan KLHS Aceh dan nasional serta kabupaten/kota.
3. **Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.** Penyusunan RPJP Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 disusun menggunakan analisa yang bersifat kualitatif deskriptif juga akan ditetapkan target-target penting dari sasaran pembangunan selama 20 tahun ke depan. Visi RPJPN 2025-2045 terdiri dari lima poin sesuai dengan Pancasila, 8 misi, 17 arah kebijakan, 45 indikator.
4. **Scenario Planing.** RPJP Kabupaten Simeulue 2025-2045 menggunakan perencanaan scenario sebagai alat perencanaan strategis praktis untuk perencanaan jangka menengah dan panjang dalam kondisi ketidakpastian. Perencanaan skenario dapat membantu mempertajam strategi, merencanakan hal-hal yang tidak terduga, dan menjaga kehati-hatian pada arah kebijakan dan permasalahan yang benar.
5. **Partisipatif.** Penyusunan RPJP Kabupaten Simeulue 2025-2045 akan melibatkan banyak stakeholders/pemangku kepentingan dengan melaksanakan desk dan forum konsultasi serta FGD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berskala nasional maupun lokal antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tanggal 10 Januari 2023;

25. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 tanggal 10 Januari 2024.
26. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
27. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
28. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
29. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambah Lembaran Aceh Nomor 137);
30. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
31. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambah Lembaran Daerah Aceh Nomor 151);
32. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034 (lembaran Daerah Kabupaten Simeulue tahun 2014 Nomor 9);
33. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (lembaran Daerah Kabupaten Simeulue tahun 2015 Nomor 14).

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

Sebagai sebuah dokumen perencanaan teknis dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka RKPA tahun 2026 mempunyai hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

1.3.1 Keterkaitan dengan RPJPN Tahun 2025-2045.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, menyatakan bahwa penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. Selanjutnya, untuk menciptakan integrasi, keselarasan, konsistensi dan sinergi antara RPJPA Tahun 2025-2045 dengan RPJMN Tahun 2025-2045, maka RPJPA Tahun 2025-2045 wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Periode RPJPA mengikuti periode RPJPN Tahun 2025-2045;
- b. RPJPN 2025-2045 menjadi acuan penyusunan RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045;
- c. Memastikan 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi pembangunan, 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 sudah memuat dalam RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045;
- d. Memastikan keselarasan muatan RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 dengan arah kebijakan kewilayahan dan sarana prasarana dalam RPJPN Tahun 2025-2045;
- e. Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045.

1.3.2 Keterkaitan dengan RPJPA Tahun 2025-2045.

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 tentunya tetap mengacu kepada RPJPN Tahun 2025-2045 dengan pertimbangan antara lain:

- a. Periode RPJPA mengikuti periode RPJPN Tahun 2025-2045;
- b. RPJPA 2025-2045 menjadi acuan penyusunan RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045;

- c. Memastikan 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi pembangunan, arah pembangunan dan indikator utama pembangunan dalam RPJPA Tahun 2025-2045 sudah memuat dalam RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045;;
- d. Memastikan keselarasan muatan RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 dengan arah kebijakan kewilayahan dan sarana prasarana dalam RPJPA Tahun 2025-2045;
- e. Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPA Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045.

1.3.3 Keterkaitan dengan RTRW Nasional Tahun 2025-2045.

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 tetap memperhatikan rencana tata ruang nasional dikarenakan:

- a. Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer;
- b. Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a). pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- c. Sebagaimana yang dinyatakan dalam penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan: ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah; keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

1.3.4 Keterkaitan dengan RTRWA

RTRWA merupakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Aceh dalam melaksanakan pembangunan. RTRWA dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pokok dalam RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 2045.

1.3.5 Keterkaitan dengan RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034

RTRW Kabupaten Simeulue merupakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Simeulue dalam melaksanakan pembangunan. RTRW Kabupaten Simeulue menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pokok dalam RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045.

1.3.6 Keterkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS merupakan sebuah bentuk tindakan strategi dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan, sehingga penyusunan RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 harus mengacu pada dokumen KLHS terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan.

1.3.7 Keterkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

PPLH Kabupaten Simeulue berfungsi sebagai instrumen perencanaan lingkungan yang memuat potensi, daya dukung, daya tampung, serta isu-isu strategis lingkungan hidup yang harus dijaga. Dokumen ini menjadi acuan penting dalam merumuskan arah kebijakan RPJPD, khususnya dalam bidang pembangunan berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengelolaan pesisir dan laut, konservasi hutan, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang tercermin dalam tiga aspek utama berikut.

- a. Integrasi Visi Pembangunan berkelanjutan, di mana RPJPD 2025–2045 menempatkan perlindungan lingkungan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang;
- b. Sinkronisasi kebijakan sektoral, yaitu memastikan bahwa program pembangunan di bidang infrastruktur, pariwisata, kelautan, perikanan, maupun energi tetap mengacu pada analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana diatur dalam PPLH;
- c. Pencegahan dan pengendalian risiko lingkungan, di mana PPLH memberikan rekomendasi strategis agar pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem, sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan dan lestari.

1.3.8 Keterkaitan dengan Evaluasi RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2007-2027

Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD 2007–2027 memberikan gambaran mengenai capaian pembangunan selama dua dekade terakhir, baik dari aspek keberhasilan maupun kendala yang dihadapi. Beberapa capaian pembangunan yang berhasil diwujudkan perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam RPJPD 2025–2045, sementara berbagai permasalahan dan tantangan yang belum tuntas harus menjadi perhatian utama untuk diatasi pada periode perencanaan berikutnya.

- a. Kestinambungan pembangunan, di mana RPJPD 2025–2045 tetap mengacu pada visi pembangunan jangka panjang nasional serta provinsi, sekaligus menyelaraskan dengan arah pembangunan daerah yang telah berjalan;
- b. Perbaikan kebijakan, dengan memasukkan rekomendasi dari evaluasi RPJPD sebelumnya agar perencanaan ke depan lebih adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan;
- c. Penajaman prioritas pembangunan, yakni mengidentifikasi sektor-sektor strategis yang masih memerlukan perhatian khusus berdasarkan hasil evaluasi, seperti peningkatan kualitas SDM, pemerataan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta penguatan ketahanan wilayah kepulauan Simeulue.

1.3.9 Keterkaitan dengan RPJMD

RPJP Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Simeulue terutama dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahunan.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJP Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud menjadikan pedoman dalam menyusun RPJMD serta menjadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan 20 tahun sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan terintegrasi.

RPJP Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan gambaran umum kondisi Kabupaten Simeulue, analisis isu-isu strategis, visi dan misi Kabupaten Simeulue, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas berdasarkan fungsi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah, ruang dan waktu;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Simeulue, Aceh dan Nasional;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan;

6. Mewujudkan tercapainya target tujuan pembangunan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian dokumen Rancangan Awal RPJP Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisikan data dan informasi terkini berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum, Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2007-2027, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan pembangunan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode Pembangunan Jangka Panjang disertai isu-isu strategis pembangunan daerah terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintah yang lebih tinggi (provinsi dan nasional).

Bab IV Visi dan Misi Daerah

Bab ini menguraikan Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Bab ini menjelaskan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah untuk setiap tahapan pembangunan.

Bab VI Penutup

Bab ini menjelaskan tentang kaidah pelaksanaan sampai akhir periode pembangunan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

Gambaran umum kondisi wilayah Kabupaten Simeulue diuraikan dalam beberapa aspek yang meliputi refleksi pembangunan, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi dan Demografi wilayah Kabupaten Simeulue yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan Pembangunan antara lain adalah peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan dan perubahan iklim serta karakteristik demografi daerah.

2.1.1. Kondisi Geografi

2.1.1.1. Letak dan Wilayah Administrasi

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat dengan dasar hukum Undang-undang nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue pada tanggal 04 Oktober 1999. Berdasarkan Undang-Undang tersebut luas wilayah daratan Kabupaten Simeulue beserta pulau-pulau kecil disekitarnya adalah 2.125,12 km², sedangkan berdasarkan Digitasi Bappeda Kabupaten Simeulue dan Data BPS Kabupaten Simeulue luas wilayah Simeulue adalah 1.838,09 km².

Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan beberapa pulau-pulau kecil disekitarnya. Terdapat sekitar 147 buah pulau- pulau besar dan kecil antara lain Pulau Siumat, Pulau Panjang, Pulau Batu Berlayar, Pulau Teupah, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut, Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langgeni, Pulau Linggam, Pulau Lekon, Pulau Silaut Besar, Pulau Silaut Kecil, Pulau Tepi, Pulau Ina, Pulau Alafula, Pulau Penyau, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau Khala-khala, Pulau Asu, Pulau Babi, Pulau Lasia, Pulau Simanaha dan pulau-pulau kecil lainnya. Panjang Pulau Simeulue 100,2 km dan lebarnya antara 8 - 28 km.

Secara geografis Kabupaten Simeulue berada pada posisi astronomi antara 02° 15' 03''- 02° 55' 04'' Lintang Utara dan 95° 40' 15'' - 96° 30' 45'' Bujur Timur, dan secara administrasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Selat Simeulue;
- b. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Selat Simeulue;

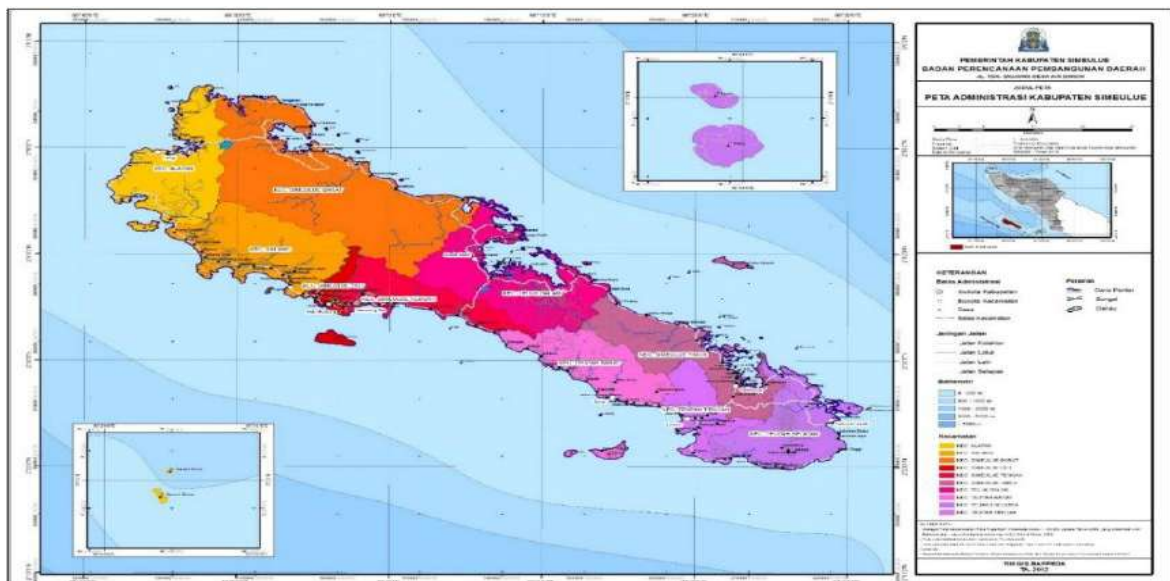
- c. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Samudera Hindia.

Secara kewilayahan, Kabupaten Simeulue sebagai kabupaten secara administrasi pemerintahan terbagi atas 10 (sepuluh) wilayah kecamatan dengan Sinabang sebagai ibu kota kabupatennya, dan terbagi menjadi 29 wilayah mukim dan 138 desa seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1. dan Gambar 2.1.

Tabel 2.1 Pembagian Administrasi Kabupaten Simeulue

No	Kecamatan	Luas Menurut Digitasi Peta Dasar Kabupaten (km ²)	Luas Menurut Undang-Undang Pembentukan Kabupaten (km ²)	Jumlah	
				Mukim	Desa
1	Teupah Selatan	222,24	271,53	4	19
2	Simeulue Timur	175,97	381,73	4	17
3	Teupah Tengah	83,69	-	2	12
4	Teupah Barat	146,73	193,95	3	18
5	Simeulue Tengah	112,48	265,28	3	16
6	Simeulue Cut	35,40	-	2	8
7	Teluk Dalam	224,68	138,79	2	10
8	Salang	198,96	222,73	3	16
9	Simeulue Barat	446,07	415,99	4	14
10	Alafan	191,87	235,12	2	8
Jumlah		1.838,09	2.125,12	29	138

Sumber: RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034, Data Diolah



Sumber: RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034, Data Diolah

Gambar 2.1 Pembagian Administrasi Kabupaten Simeulue

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Keadaan topografi Pulau Simeulue dengan titik terendah terletak pada nol Meter Dari Permukaan Laut (MDPL) dan titik tertinggi 600 meter di atas permukaan laut (MDPL), dimana sebagian besar wilayah Pulau Simeulue terletak pada ketinggian diantara 0 – 300-meter dari permukaan laut dan bagian yang lain merupakan daerah berbukit-bukit dengan kemiringan di bawah 18° terletak di bagian tengah pulau terutama pada daerah pegunungan di sebelah Utara dan Selatan. Secara umum sebaran ketinggian dan lereng wilayah Kabupaten Simeulue terlihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

Tabel 2.2 Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Ketinggian Tempat

No	Kecamatan	Klasifikasi Ketinggian (m-dpl)					Jumlah	
		0-50	50-100	100-200	200-300	>300	Ha	%
1	Teupah Selatan	13.496,73	7.664,06	1.004,15	58,85	-	22.223,79	12,09
2	Simeulue Timur	7.339,62	3.226,32	3.736,34	2.079,07	1.215,92	17.597,25	9,57
3	Teupah Tengah	3.972,14	2.424,30	1.824,76	148,35	-	8.369,55	4,55
4	Teupah Barat	4.579,50	2.865,18	3.803,99	2.059,01	1.365,38	14.673,06	7,98
5	Simeulue Tengah	6.007,90	2.742,29	2.198,37	294,20	5,58	11.248,33	6,12
6	Simeulue Cut	2.650,82	671,42	191,32	26,37	-	3.539,92	1,93
7	Teluk Dalam	10.798,69	5.739,08	5.027,65	872,18	30,14	22.467,75	12,22
8	Salang	10582,66	4.937,09	3.920,09	430,55	25,15	19.895,55	10,82
9	Simeulue Barat	16.892,45	14.357,76	10.110,13	3.110,62	136,44	44.607,40	24,27
10	Alafan	9.566,25	6.144,13	3.134,28	339,41	2,84	19.186,91	10,44
Jumlah		85.886,75	50.771,63	34.950,08	9.418,85	2.781,46	183.809,50	100,00
Persentase Sebaran		46,73	27,62	19,01	5,12	1,51	100,00	

Sumber: RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034

Tabel 2.3 Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Kelerengan

No.	Kecamatan	Klas Lereng (%)					Jumlah	
		0-8	18-15	15-25	25-40	>40	Ha	%
1	Teupah Selatan	21.730,19	475,94	17,24	0,42	-	22.223,79	12,09
2	Simeulue Timur	9.975,63	5.596,42	1.792,73	214,13	18,34	17.597,25	9,57
3	Teupah Tengah	6.102,42	2.025,54	239,81	1,78	-	8.369,55	4,55
4	Teupah Barat	2,3	6.247,72	1.507,86	97,96	2,41	14.673,06	7,98
5	Simeulue	8.615,69	2.425,55	206,38	0,72	-	11.248,33	6,12
6	Simeulue Cut	3.164,37	353,75	21,80	-	-	3.539,92	1,93
7	Teluk Dalam	16.707,54	5.098,59	613,06	46,86	1,69	22.467,75	12,22
8	Salang	14.240,90	4.853,95	758,11	41,74	0,85	19.895,55	10,82
9	Simeulue Barat	30.805,31	12.109,49	1.649,46	41,86	1,27	44.607,40	24,27
10	Alafan	13.580,93	5.001,67	587,24	15,81	1,26	19.186,91	10,44

No.	Kecamatan	Klas Lereng (%)					Jumlah	
		0-8	18-15	15-25	25-40	>40	Ha	%
Jumlah		131.740,08	44.188,61	7.393,71	461,29	25,82	183.809,50	100,00
Persentase Sebaran		71,67	24,04	4,02	0,25	0,01	100,00	

Sumber: RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034

2.1.1.3. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Simeulue termasuk ke dalam zona iklim tropika basah dengan temperatur udara berkisar antara 23° – 34,5°C dan rata-rata harian antara 25 °C – 27°C. Berdasarkan data curah hujan yang ada menunjukkan bahwa curah hujan rata-rata cukup tinggi yaitu 3.449,5 mm/tahun. Musim hujan umumnya terjadi antara bulan September-Februari, sedangkan musim kemarau pada umumnya antara bulan Maret- Agustus. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret. Berdasarkan pada tipe iklim Oldeman, Pulau Simeulue memiliki tipe iklim A yaitu daerah dengan bulan basah selama 9 bulan berturut-turut dan selama dua bulan atau kurang mengalami musim kering. Bulan basah adalah curah hujan lebih dari 200 mm/bulan. Besarnya curah hujan di Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Keadaan cuaca di Kabupaten Simeulue ditentukan oleh penyebaran musim, dimana musim barat berlangsung sejak Bulan September sampai dengan Bulan Februari, ditandai dengan terjadinya musim badai dan gelombang besar yang berasal dari Samudera Hindia sehingga sangat berbahaya bagi pelayaran. Sedangkan pada musim Timur berlangsung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus ditandai dengan musim kemarau diselingi oleh hujan yang tidak merata dan keadaan laut sedikit tenang, Kelembaban udara berkisar antara 60% sampai 75% dan lamanya penyinaran rata-rata perhari adalah 13 – 14 jam. Kecepatan angin rata-rata di wilayah ini berkisar akumentara 50–65 knot/jam.

Tabel 2.4 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Tahun 2010-2024

Bulan	Tahun									
	2010		2011		2012		2013		2014	
	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januari	137	14	257,0	15	172,8	17	155,5	17	177,5	15
Februari	58,5	8	243,5	7	341	23	247	19	84	19
Maret	132,5	13	358,2	17	69,5	21	269	19	300,5	26
April	115	16	211,3	17	236,5	22	256,5	22	340	28
Mei	135	15	149,0	12	191,5	18	606	29	358,5	26
Juni	159	18	239,0	11	257	17	237	18	334	21
Juli	128	14	202,0	13	133	13	122	22	294,5	21
Agustus	158	15	333,5	18	381,5	20	184	17	370	28
September	289	19	265,0	13	265,0	16	368,5	25	234,5	20

Bulan	Tahun									
	2010		2011		2012		2013		2014	
	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Oktober	142,5	15	297,5	20	449,5	21	80	22	390,5	25
Nopember	591,5	22	345,5	19	320,5	24	278,5	25	485	24
Desember	240,7	14	573,5	17	477	19	286,5	28	199,5	22
Total	2.286,7	183	3.475,0	179	3.246,8	231	3.090,5	263	3.568,5	275

Lanjutan Tabel 2.4

Bulan	Tahun									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Januari	177,5	15	178,5	26	459,5	23	83	20	150	25
Februari	84,0	19	313	16	284	21	104,5	19	106	24
Maret	300,5	26	493	27	138,5	19	503	23	169,5	21
April	340,0	28	194,5	16	147,5	25	456	27	234,5	26
Mei	358,5	26	188,5	27	302	28	333,5	26	123	22
Juni	334,0	21	379	19	126,5	17	73	18	80,5	23
Juli	294,5	21	248,5	19	216,5	21	333	20	256,5	17
Agustus	370,0	28	371	24	281	21	228,5	18	259,5	22
September	234,5	20	222	26	384,5	25	152,5	25	258,5	21
Oktober	390,5	25	358	26	205,5	16	442,5	29	874,5	29
Nopember	485,0	24	574,4	28	550,5	30	324,5	28	484,5	26
Desember	199,5	22	419	26	275	25	244,5	27	271	28
Total	3.568,5	275	3.939,50	254	3.371,00	271	3.284,50	280	3.268,00	284

Lanjutan Tabel 2.4

Bulan	Tahun									
	2020		2021		2022		2023		2024*	
	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Januari	75,5	17	177,5	15	177,5	15	177,5	15	75,5	17
Februari	183	19	84	19	84	19	84	19	183	19
Maret	101	19	300,5	26	300,5	26	300,5	26	101	19
April	152	22	340	28	340	28	340	28	152	22
Mei	354	29	358,5	26	358,5	26	358,5	26	354	29
Juni	332	18	334	21	334	21	334	21	332	18
Juli	387	22	294,5	21	294,5	21	294,5	21	387	22
Agustus	320,5	17	370	28	370	28	370	28	320,5	17
September	202,5	25	234,5	20	234,5	20	234,5	20	202,5	25
Oktober	313	22	390,5	25	390,5	25	390,5	25	313	22
Nopember	199	25	485	24	485	24	485	24	199	25
Desember	479,5	28	199,5	22	199,5	22	199,5	22	479,5	28
Total	3.099,00	263	3.568,50	275	3.568,50	275	3.568,5	275	3099,00	263

Sumber: Kabupaten Simeulue Dalam Angka Tahun 2010- 2024 (olah)

Ket. Data sementara

2.1.1.4. Kondisi Geologi

Berdasarkan litologi Jenis batuan penyusun Pulau Simeulue dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Formasi Bancuh Kuala Makmur yang terdiri campuran beberapa bongkah batuan basal, gabro, sedimen malih, filit, batu sabak dan rijang.
- b. Formasi Sibigo yang terdiri dari batu gamping koral, kalkarenit dan kalsirudit
- c. Formasi Sigulai yang terdiri dari napal dan batu pasir kuarsa
- d. Formasi Layabaung yang terdiri dari batu pasir tufaan, tufa dan batu lempung
- e. Formasi Dihit yang terdiri dari arsenit dengan sisipan batu lanau dan batu lempung

Pulau pulau kecil dan teras disepanjang Pantai Pulau Simeulue terbentuk dari batu gamping terumbu berupa batu gamping koral, kalkarenit dan kalsiluit. Pulau Simeulue termasuk di deretan kepulauan busur luar. Struktur geologi Pulau Simeulue mencerminkan suatu kompleks yang dipengaruhi oleh adanya tumbukan dan penyusupan lempung dasar Samudera India-Australia ke bawah lempeng Benua Eurasia.

Struktur geologi yang berkembang di Pulau Simeulue di jumpai beberapa struktur patahan, lipatan, kekar dan perdaunan. Struktur patahan dijumpai berupa patahan geser, patahan bongkah dan patahan naik. Ketiga jenis patahan ini berkembang membentuk pola yang menyebar hampir diseluruh pulau dengan arah umum barat laut-tenggara dan timur laut barat daya. Patahan geser yang paling besar adalah Patahan Pagaja yang berarah barat laut-tenggara memanjang hampir sejajar dengan arah memanjang Pulau Simeulue. Patahan naik dan patahan bongkah dijumpai masing-masing disebelah timur dan selatan Teluk Dalam. Struktur lipatan berupa antiklin dan sinklin sumbu-sumbu lipatannya berarah barat laut-tenggara, dijumpai pada Formasi Layabaung dan Formasi Dihit. Struktur kekar dan perdaunan dijumpai pada batuan-batuan dari hampir seluruh formasi dengan arah dan ukuran yang beragam

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

Potensi hidrologi di Kabupaten Simeulue, sebagaimana kondisi hidrologi kepulauan sangatlah terbatas. Sumber air permukaan di kepulauan Simeulue berasal dari beberapa mata air, sungai dan danau. Di Pulau Simeulue banyak dijumpai sungai, baik sungai sepanjang tahun maupun sungai musiman, umumnya berpola dendritik, parallel dan sub parallel. Kualitas air, jernih sampai keruh dengan pH rata-rata 6.5.

Rawa umumnya dijumpai didaerah pantai, air berwarna jernih kecoklatan, umumnya payau dengan pH sekitar 6. Mata air dijumpai dibeberapa tempat, umumnya pada Formasi Dihit antara lain di Desa Labua, Desa Kuala Makmur, Desa Kampung Air dan dibanyak tempat

lainnya lagi. Debit air rata-rata < 1 liter/detik, jernih, tawar, tidak berbau dan tidak berasa, pH 6,5 dan dapat digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari masyarakat setempat.

Air tanah bebas adalah air tanah yang terdapat diantara permukaan tanah dan lapisan kedap air (akifer) dibawahnya, dapat muncul sebagai mata air. Air tanah bebas dapat diamati pada sumur-sumur gali penduduk, umumnya jernih sampai kecoklatan, tidak berbau dan tidak berasa. Didaerah sekitar pantai kedalam muka air sekitar 1-2 meter, fluktuasi 1–2-meter dengan debit sekitar 10 ltr/ detik. Biasa juga disebut air tanah dalam yaitu air tanah yang terdapat pada lapisan kedap air (akifer) yang terdapat dibawah permukaan tanah dengan kedalaman yang sangat bervariasi. Pengamatan hanya bisa dilakukan dengan metode pendugaan geolistrik dan hasil pemboran air didaerah Lasikin. Lapisan pembawa air terdapat pada lapisan batu pasir kedap air, pada kedalaman sekitar 120m dibawah permukaan tanah, kurang produktif dengan debit <2 ltr/detik, jernih, tidak berbau dan tidak berasa.

Kabupaten Simeulue memiliki beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, dan dapat terlihat pada tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5 Daerah Aliran Sungai Kabupaten Simeulue

No	Nama DAS	Luas (ha)
1	DAS Devayan	14.659
2	DAS Baby	4.590
3	DAS Lasia	1.495
4	DAS Teupah	691
5	DAS Leukon	429
6	DAS Siumat	397
7	DAS Sanggiran	26.535
8	DAS Along	10.473
9	DAS Ujung	5.310
10	DAS Lalla	3.966
11	DAS Sibusu	9.544
12	DAS Senivung	9.687
13	DAS Tula-Tula	4.472
14	DAS Ladon	8.332
15	DAS Layabaung	9.684
16	DAS Salit	4.451

No	Nama DAS	Luas (ha)
17	DAS Pagaja	8.139
18	DAS Amuren	4.025
19	DAS Air Pinang	3.963
20	DAS Seufulu	8.931
21	DAS Bota	10.725
22	DAS Sidolok Sibao	7.766
23	DAS Linggi	4.391
24	DAS Pucuk Anao	6.162
25	DAS Labuhan Bajau	5.231
26	DAS Suak Lamatan	6.839
Jumlah		180.887

Sumber: RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034

Di wilayah Kabupaten Simeulue terdapat empat buah danau kecil yang tersebar di dua kecamatan. Pemanfaatan danau ini akan diarahkan untuk pengembangan budidaya perikanan air tawar serta tujuan objek wisata lokal. Keempat danau tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- danau Mutiara Laut Tawar di Desa Buluhadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 56,95 ha;
- danau Lauulo Laut Tawar di Desa Amabaaan Kecamatan Simeulue Barat seluas 169,6 ha;
- danau Tirama di Desa Buluhadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 18,72 ha; dan
- danau Luan Boya di Desa Buluhadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 10,45 ha.

Di wilayah kabupaten Simeulue terdapat beberapa embung yang merupakan salah satu sumber daya air, dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bagi kebutuhan air untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan serta kebutuhan air bersih bagi penduduk. Embung yang ada di Kabupaten Simeulue, meliputi :

- Embung Sefuluh di Desa Sibuluh Kecamatan Simeulue Cut seluas 2,29 Ha;
- Embung Latitik di Desa Latitik Kecamatan Simeulue Tengah seluas 3,85 Ha;
- Embung Sefoyan di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur seluas 0,83 Ha;
- Embung Amarabu di desa Amarabu kecamatan Simeulue Cut seluas 0,25 Ha.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Berdasarkan peta hasil studi analisis kesesuaian lahan, kondisi existing penggunaan lahan Kabupaten Simeulue dapat dikelompokkan menjadi: hutan, kebun campuran/pertanian, permukiman, mangrove, danau dan kawasan terbangun. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan, lahan di Kabupaten Simeulue masih banyak yang belum dimanfaatkan dan cenderung terlantar. Kondisi ini dapat terlihat dari masih sedikitnya lahan yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Dari 10.927 hektar target lahan potensial untuk persawahan ternyata hanya 32% (3.500 ha) saja yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu penyebab rendahnya indeks penggunaan lahan adalah karena terbatasnya sarana air irigasi yang menyebabkan rendahnya produktivitas tanaman pertanian. Sementara itu, dari lahan seluas 30,979 Ha yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai perkebunan rakyat, kini ribuan hektar juga terlantar. Hal ini disebabkan oleh anjloknya harga cengkeh, tanaman perkebunan rakyat utama. Saat ini permukiman di Kabupaten Simeulue sebagian besar masih berada di sekitar pesisir pantai, mengingat aksesnya lebih mudah ke wilayah *main land* Sumatera. Konsentrasi permukiman memperlihatkan hirarki sistem kota-kota yang terbentuk. Pulau Simeulue yang menjadi *main land* untuk pulau-pulau sekitarnya merupakan pusat utama pertumbuhan kepulauan tersebut. Berdasarkan jumlah lahan yang dimanfaatkan sebagai hutan di Kabupaten Simeulue ini memiliki luas 105.875 ha atau seluas 57,6% dari luas lahan keseluruhan.

Kabupaten Simeulue yang merupakan daerah kepulauan memiliki potensi ketersediaan SDA Hayati laut seperti ekosistem pesisir, perikanan, biota laut dan fungsi ekologis lainnya. Saat ini penggunaan SDA hayati laut ini masih belum optimal terlebih lagi walaupun berbentuk wilayah kepulauan kabupaten ini lebih bercorak pertanian daripada perikanan. Bencana Gempa Bumi pada tanggal 26 Desember 2004 serta tanggal 28 Maret 2005 yang cukup kuat di Kabupaten Simeulue, telah mengakibatkan naiknya permukaan bumi di beberapa bagian wilayah kabupaten ini berkisar antara 0,5– 1,5 meter dpl. Kondisi demikian tentu saja akan berakibat langsung terhadap perubahan bentuk morfologi dan topografi di Kabupaten Simeulue. Perubahan yang cukup signifikan dapat dijumpai di wilayah Kecamatan Alafan yang daratannya mengalami kenaikan mencapai 1,5 meter DPL, telah terjadi pergeseran garis pantai yang mengakibatkan terumbu-terumbu karang yang pada awalnya tergenang air laut, pada saat ini sudah nampak diatas permukaan tanah/pantai.

Kondisi yang sama juga terjadi pada kawasan hutan-hutan bakau di beberapa bagian wilayah banyak yang mati/kering akibat tidak tergenang air laut, disebabkan naiknya daratan

yang ditumbuhi hutan bakau tersebut. Setelah bencana gempa dan tsunami permukiman penduduk di Kabupaten Simeulue sebagian besar masih berada di sekitar pesisir pantai namun dengan zona yang lebih jauh dari pinggir pantai dan cenderung bergeser kearah perbukitan. Konsentrasi permukiman masih memperlihatkan hirarki sistem kota-kota yang terbentuk seperti halnya di Sinabang dijadikan pusat konsentrasi kegiatan penduduk pada saat.

2.1.1.7. Daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam ekologi dan pengelolaan lingkungan. Daya dukung lingkungan mengacu pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup dan aktivitas manusia secara berkelanjutan, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam seperti air, tanah, udara, dan energi. Daya dukung mencerminkan jumlah maksimum populasi atau aktivitas yang dapat dipertahankan lingkungan tanpa mengalami kerusakan atau penurunan fungsi ekologisnya. Sementara itu, daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap dan mengelola dampak negatif dari aktivitas manusia, seperti pencemaran, limbah, dan emisi, tanpa menurunkan kualitas lingkungan atau merusak keseimbangan ekosistem. Jika daya dukung berkaitan dengan penyediaan sumber daya untuk mendukung kehidupan, daya tampung berfokus pada batas toleransi lingkungan terhadap tekanan atau beban aktivitas manusia.

Apabila kedua batas ini terlampaui, maka lingkungan akan mengalami degradasi, yang ditandai dengan kerusakan ekosistem, penurunan kualitas air, udara, serta tanah, yang pada akhirnya mengancam kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, memahami dan menjaga daya dukung serta daya tampung lingkungan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup di masa depan. Beberapa kategori yang termasuk dalam Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan meliputi Status Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air, Status Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan, Status Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Lahan Pemukiman.

A. Daya Dukung dan Daya Tampung Penyediaan Air

Daya dukung dan daya tampung penyediaan air merujuk pada kemampuan suatu ekosistem dalam menyediakan air bersih secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup dan aktivitas manusia. Sumber air ini dapat berasal dari ekosistem alami seperti hutan, sungai, danau, rawa, dan akuifer bawah tanah. Status daya dukung ini menunjukkan sejauh mana ekosistem mampu menyediakan air yang cukup secara kuantitas dan kualitas

sesuai dengan kebutuhan penduduk dan aktivitas manusia tanpa merusak keseimbangan lingkungan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Daya Dukung Jasa Penyediaan Air

1. Ketersediaan Sumber Air

Ketersediaan air bergantung pada keberadaan sumber daya air seperti curah hujan, sungai, dan akuifer. Ekosistem hutan yang berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan air memainkan peran penting dalam menjaga ketersediaan ini. Jika terjadi deforestasi, kemampuan ekosistem dalam menyediakan air akan berkurang.

2. Permintaan Air

Meningkatnya kebutuhan air akibat pertumbuhan populasi, industri, dan pertanian menekan daya dukung lingkungan. Jika permintaan melebihi kapasitas ekosistem, status daya dukung air akan menurun.

3. Degradasi Ekosistem

Kerusakan ekosistem seperti pencemaran air, sedimentasi sungai, dan kerusakan lahan basah menyebabkan penurunan kualitas dan kapasitas penyediaan air.

4. Variabilitas Iklim

Perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan yang tidak menentu, kekeringan, atau banjir, yang mempengaruhi daya dukung ekosistem dalam menyediakan air secara stabil.

Perhitungan dan analisis status jasa ekosistem penyediaan air diawali dengan menghitung ketersediaan air dari ekosistem, dilanjutkan dengan penghitungan kebutuhan air untuk keperluan domestik dan non-domestik. Kebutuhan air domestik dihitung merujuk pada ketentuan Permen LH Nomor 17 Tahun 2009, yang menetapkan standar pemakaian air minum dan rumah tangga sebesar 120 liter per orang per hari. Sementara itu, kebutuhan air non-domestik dihitung berdasarkan bobot untuk berbagai aktivitas pengelolaan lahan di wilayah Kabupaten Simeulue, seperti perkebunan kelapa sawit, kebun campuran, perladangan, dan sawah. Penentuan bobot ini disesuaikan dengan jumlah kebutuhan air dari setiap jenis aktivitas lahan.

Neraca air digunakan sebagai alat untuk menganalisis keseimbangan antara air yang masuk dan keluar di suatu kawasan. Jumlah penduduk dalam suatu daerah berpengaruh besar terhadap total kebutuhan air untuk berbagai keperluan seperti konsumsi harian, sanitasi, kegiatan industri, serta pertanian. Semakin padat populasi, semakin tinggi permintaan air yang dibutuhkan. Neraca air membantu dalam pengelolaan sumber daya air dengan melacak

pergerakan air di dalam suatu wilayah. Kepadatan penduduk yang tinggi biasanya disertai peningkatan kegiatan pertanian dan industri, yang keduanya memerlukan air dalam jumlah besar. Beberapa kecamatan memiliki ketersediaan air yang melampaui kebutuhannya. Namun, ketersediaan air di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tutupan vegetasi, jenis tanah, serta kondisi iklim di wilayah tersebut.

Tabel 2.6 Hasil analisis ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Simeulue

Kecamatan	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air	Selisih	Status
Alafan	196.482.553,83	2.224.000,00	194.258.553,83	Belum Terlampaui
Salang	94.156.937,68	617.600,00	93.539.337,68	Belum Terlampaui
Simeulue Barat	267.942.183,52	1.961.600,00	265.980.583,52	Belum Terlampaui
Simeulue Cut	24.825.945,89	513.600,00	24.312.345,89	Belum Terlampaui
Simeulue Tengah	123.748.858,78	1.232.000,00	122.516.858,78	Belum Terlampaui
Simeulue Timur	333.192.669,80	2.710.400,00	330.482.269,80	Belum Terlampaui
Teluk Dalam	188.374.599,87	1.529.600,00	186.844.999,87	Belum Terlampaui
Teupah Barat	244.216.783,17	2.124.800,00	242.091.983,17	Belum Terlampaui
Teupah Selatan	262.391.691,72	2.100.800,00	260.290.891,72	Belum Terlampaui
Teupah Tengah	78.987.440,85	984.000,00	78.003.440,85	Belum Terlampaui
Grand Total	1.814.319.665,11	15.998.400,00	1.798.321.265,11	Belum Terlampaui

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

Berdasarkan data ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Simeulue, seluruh kecamatan memiliki ketersediaan air yang jauh melebihi kebutuhan. Kecamatan Alapan memiliki ketersediaan air sebesar 196.482.553,83 m³, dengan kebutuhan air sebesar 2.224.000 m³, sehingga selisihnya mencapai 194.258.553,83 m³. Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Salang dengan ketersediaan air sebesar 94.156.937,68 m³ dan selisih positif 93.539.337,68 m³. Kecamatan Simeulue Barat mencatat ketersediaan tertinggi sebesar 267.942.183,52 m³, dengan kebutuhan 1.961.600 m³, meninggalkan selisih 265.980.583,52 m³.

Kecamatan lainnya seperti Simeulue Timur memiliki ketersediaan terbesar sebesar 333.192.669,80 m³, dengan selisih positif mencapai 330.482.269,80 m³. Kecamatan Teluk Dalam mencatat ketersediaan 188.374.599,87 m³, sedangkan kebutuhan air hanya 1.529.600 m³, menghasilkan selisih 186.844.999,87 m³. Kondisi yang sama terlihat di Teupah Barat, Teupah Selatan, dan Teupah Tengah, yang semuanya menunjukkan bahwa ketersediaan air masih belum terlampaui.

Secara keseluruhan, total ketersediaan air di Kabupaten Simeulue mencapai 1.814.319.665,11 m³, sedangkan total kebutuhan air hanya 15.998.400 m³, dengan selisih sebesar 1.798.321.265,11 m³. Hal ini menegaskan bahwa status daya dukung jasa ekosistem penyediaan air di Kabupaten Simeulue berada dalam kondisi aman dan belum terlampaui.

Tabel 2.7 Ketersediaan Air di Kabupaten Simeulue

Kecamatan	Status Penyedia Air (Ha)		Grand Total (Ha)
	Belum Terlampaui	Terlampaui	
Alafan	17.506,87	0,35	17.507,22
Salang	19.869,27	0,04	19.869,31
Simeulue Barat	39.943,54	0,75	39.944,29
Simeulue Cut	1.648,93	0,15	1.649,08
Simeulue Tengah	25.209,45	0,30	25.209,75
Simeulue Timur	16.482,67	0,29	16.482,96
Teluk Dalam	16.528,83	0,06	16.528,90
Teupah Barat	16.383,38	0,47	16.383,86
Teupah Selatan	24.484,42	0,17	24.484,59
Teupah Tengah	6.078,82	0,02	6.078,84
Grand Total	183.809,50	2,61	183.809,50

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

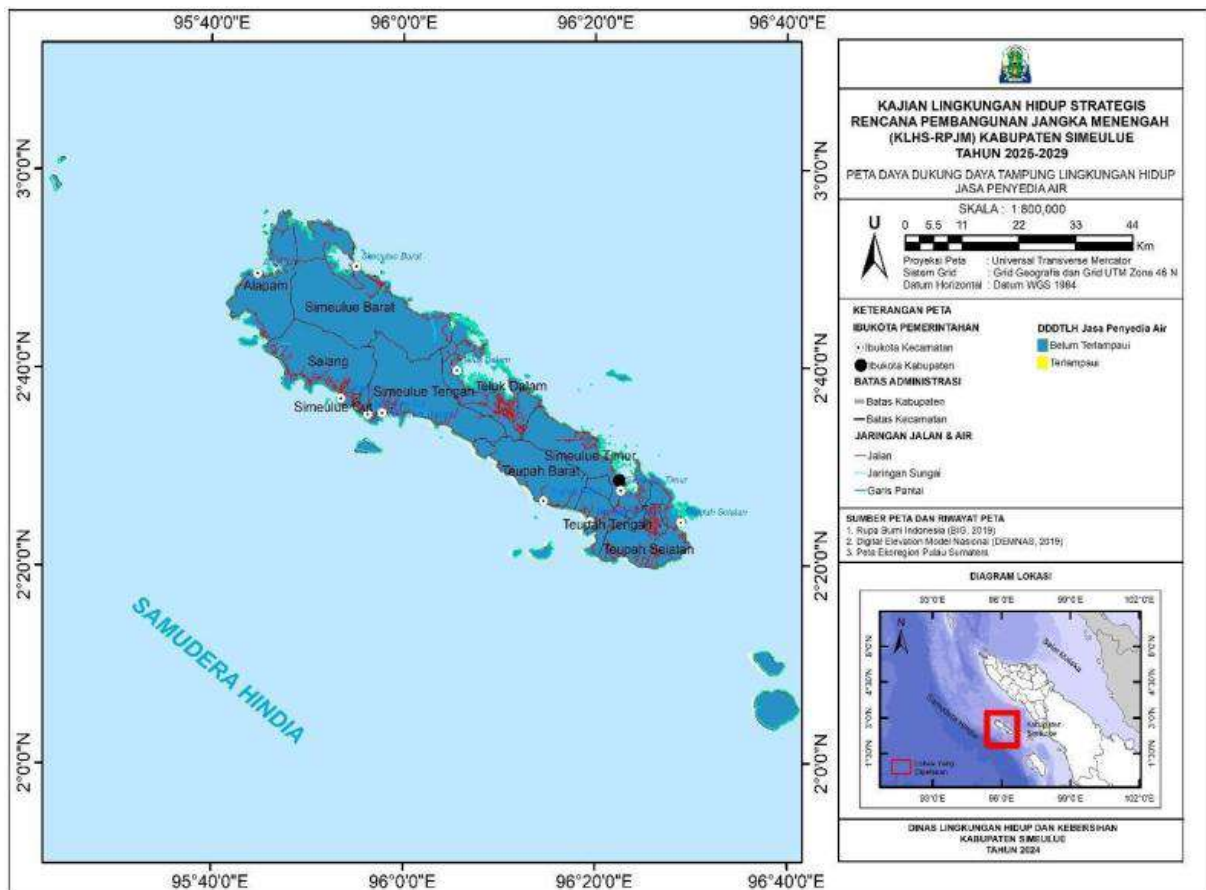
Berdasarkan data status penyediaan air di Kabupaten Simeulue, seluruh kecamatan menunjukkan dominasi luas lahan yang belum terlampaui dalam kapasitas penyediaan air, dengan angka 184.136,19 hektar atau hampir seluruh total wilayah. Hanya sebagian kecil wilayah dengan status terlampaui, yakni sebesar 2,61 hektar dari total 184.138,79 hektar.

Secara rinci, Kecamatan Alapam memiliki luas 17.506,87 hektar yang belum terlampaui, dengan hanya 0,35 hektar yang terlampaui. Di Kecamatan Salang, kondisi serupa terjadi dengan luas 19.869,27 hektar yang belum terlampaui dan 0,04 hektar terlampaui. Kecamatan Simeulue Barat mencatat total tertinggi, yaitu 39.943,54 hektar belum terlampaui, dengan 0,75 hektar terlampaui. Sementara itu, Simeulue Cut memiliki 1.648,93 hektar belum terlampaui dan 0,15 hektar terlampaui, mencerminkan area terkecil di antara kecamatan lainnya.

Kecamatan Simeulue Tengah memiliki 25.209,45 hektar belum terlampaui dan 0,30 hektar terlampaui. Di Kecamatan Simeulue Timur, dari total 16.482,96 hektar, sebanyak 16.482,67 hektar masih dalam status belum terlampaui, dengan 0,29 hektar terlampaui. Kondisi serupa terjadi di Teluk Dalam, dengan 16.528,83 hektar belum terlampaui dan hanya 0,06 hektar terlampaui.

Kecamatan Teupah Barat memiliki 16.383,38 hektar belum terlampaui, sementara 0,47 hektar sudah terlampaui. Kecamatan Teupah Selatan mencatat 24.484,42 hektar belum terlampaui dan 0,17 hektar terlampaui. Terakhir, Kecamatan Teupah Tengah memiliki 6.078,82 hektar belum terlampaui dan 0,02 hektar terlampaui, menjadi kawasan dengan luas terlampaui terkecil.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa 184.136,19 hektar lahan di Kabupaten Simeulue masih memiliki kapasitas penyediaan air yang belum terlampaui. Hanya 2,61 hektar atau sekitar 0,001% dari total luas wilayah yang mengalami kondisi terlampaui. Hal ini menunjukkan bahwa status daya dukung ekosistem penyediaan air di seluruh kecamatan masih berada dalam kondisi aman, dengan potensi penyediaan air yang mencukupi untuk mendukung kehidupan dan aktivitas di wilayah ini.



Gambar 2.2 Peta Ketersediaan Air di Kabupaten Simeulue

Ketersediaan air di Kabupaten Simeulue masih jauh di atas kebutuhan saat ini, sehingga daya dukung lingkungan dalam penyediaan air berada pada kondisi optimal. Hal ini memberikan peluang besar bagi perencanaan pembangunan berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan air domestik, pertanian, industri, dan pengembangan kawasan lainnya. Meski demikian, agar potensi ketersediaan air yang tinggi ini dikelola secara bijaksana untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air di masa depan. Faktor seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan ekspansi aktivitas ekonomi harus menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan sumber daya air. Upaya konservasi hutan, perlindungan daerah aliran sungai

(DAS), dan pengendalian pencemaran harus dimasukkan dalam perencanaan tata ruang agar ekosistem penyediaan air tetap terjaga.

B. Daya Dukung dan Daya Tampung Penyediaan Pangan

Daya dukung lahan pangan adalah kemampuan suatu lahan dalam menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung produksi pangan dalam jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan penduduk. Ini mencakup aspek kualitas tanah, luas lahan, ketersediaan air, dan teknologi yang digunakan. Sementara itu, daya tampung lahan pangan mengacu pada batas maksimum lahan dalam menampung aktivitas produksi pangan secara berkelanjutan, tanpa menurunkan produktivitas tanah dan merusak ekosistem.

Daya dukung dan daya tampung lahan pangan sangat berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan keseimbangan ekologi. Pemantauan rutin terhadap produktivitas lahan, kebutuhan pangan penduduk, serta penerapan teknologi pertanian berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga kemampuan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini dan di masa depan.

Tabel 2.8 Produktivitas Lahan untuk Kebutuhan Pangan di Kabupaten Simeulue

Kebutuhan Dasar	Produksi (Ton)	Luas Lahan Produksi (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)
Padi	25.805,55	10.911,10	2,3651
Jagung dan Terigu	28,00	23.487,46	0,0012
Umbi-umbian	30.693,04	23.487,46	1,3068
Daging dan Susu	2.364,00	559,70	4,2237
Unggas dan Telur	121.062,66	23.487,46	5,1544
Minyak dan Lemak	698,35	6.904,61	0,1011
Sayuran dan Buah	620,60	23.487,46	0,0264
Pemenuhan Kayu	755,92	131.338,87	0,0058

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

Berdasarkan data kebutuhan dasar, produksi, luas lahan, dan produktivitas berbagai komoditas di Kabupaten Simeulue, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kapasitas produksi dan efisiensi lahan. Padi menjadi salah satu komoditas utama dengan produksi sebesar 25.805,55 ton dari lahan seluas 10.911,10 hektar, dengan produktivitas mencapai 2,37 ton/ha, menunjukkan pemanfaatan lahan yang cukup baik. Sementara itu, jagung dan terigu hanya menghasilkan 28 ton dari lahan seluas 23.487,46 hektar, dengan produktivitas sangat rendah, yaitu 0,0012 ton/ha, mengindikasikan perlunya optimalisasi dalam pemanfaatan lahan tersebut.

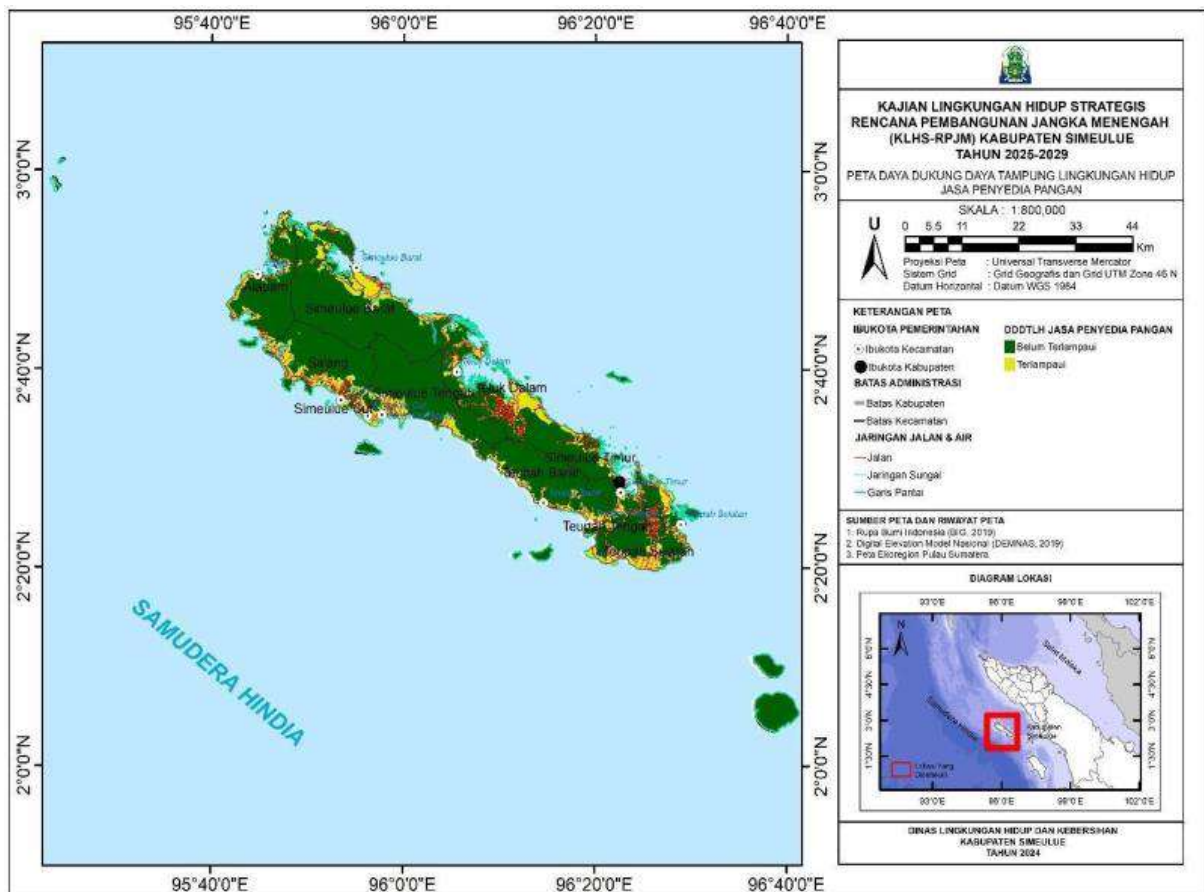
Komoditas umbi-umbian menghasilkan 30.693,04 ton dengan luas lahan yang sama, mencapai produktivitas 1,31 ton/ha, menunjukkan kontribusi yang lebih baik dibandingkan

jagung dan terigu. Daging dan susu memberikan hasil sebesar 2.364 ton dari 559,70 hektar, dengan produktivitas yang cukup tinggi, yakni 4,22 ton/ha, mencerminkan efisiensi yang baik dalam pemanfaatan lahan untuk produksi protein hewani. Sementara itu, unggas dan telur menjadi komoditas dengan produksi tertinggi, mencapai 121.062,66 ton dari 23.487,46 hektar, dengan produktivitas 5,15 ton/ha, menjadikannya komoditas paling efisien dalam pemanfaatan lahan. Untuk minyak dan lemak, produksi mencapai 698,35 ton dari 6.904,61 hektar, dengan produktivitas 0,10 ton/ha, menunjukkan potensi yang masih perlu dikembangkan. Sayuran dan buah memiliki produksi sebesar 620,60 ton dari lahan seluas 23.487,46 hektar, dengan produktivitas yang rendah, yaitu 0,0264 ton/ha, sehingga memerlukan upaya peningkatan hasil. Sementara itu, pemenuhan kayu memiliki produksi sebesar 755,92 ton dari lahan yang sangat luas, yakni 131.338,87 hektar, dengan produktivitas hanya 0,0058 ton/ha, menunjukkan perlunya pemanfaatan lahan yang lebih optimal. Secara keseluruhan, komoditas unggas dan telur memiliki produktivitas tertinggi, diikuti oleh daging dan susu serta padi. Sebaliknya, komoditas seperti jagung, minyak, sayuran, dan kayu memiliki produktivitas yang rendah meskipun luas lahan yang tersedia cukup besar. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan lahan, penerapan teknologi pertanian modern, dan diversifikasi komoditas sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi lahan di Kabupaten Simeulue.

Tabel 2.9 Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Lahan Pangan (Ha)

Kecamatan	Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Lahan Pangan (Ha)	
	Belum Terlampaui	Terlampaui
Alafan	13.877,87	3.629,35
Salang	14.826,05	5.043,26
Simeulue Barat	33.392,04	6.552,25
Simeulue Cut	337,17	1.311,91
Simeulue Tengah	21.484,11	3.725,65
Simeulue Timur	12.563,73	3.919,23
Teluk Dalam	10.681,83	5.847,06
Teupah Barat	14.068,80	2.315,06
Teupah Selatan	17.726,45	6.758,14
Teupah Tengah	3.756,12	2.322,71
Grand Total	183.809,50	41.424,62

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045



Gambar 2.3 Peta Ketersediaan Lahan Pangan di Kabupaten Simeulue

Berdasarkan data daya dukung dan daya tampung penyedia lahan pangan di Kabupaten Simeulue, dari total 183.809,50 hektar lahan yang tersedia, sekitar 142.714,18 hektar masih berada dalam kondisi belum terlampaui, sementara 41.424,62 hektar sudah dalam kondisi terlampaui. Secara rinci, Kecamatan Simeulue Barat memiliki luas lahan belum terlampaui tertinggi, yaitu 33.392,04 hektar, namun juga mencatat 6.552,25 hektar yang telah terlampaui. Hal ini menandakan adanya tekanan yang cukup besar terhadap lahan pangan di kecamatan ini. Di Kecamatan Teupah Selatan, terdapat 17.726,45 hektar belum terlampaui dan 6.758,14 hektar terlampaui, yang menunjukkan tingginya aktivitas pemanfaatan lahan yang berpotensi melebihi daya dukungnya. Sementara itu, Salang memiliki 14.826,05 hektar belum terlampaui dan 5.043,26 hektar terlampaui, menempatkannya di posisi kedua dalam tekanan terhadap lahan pangan.

Kecamatan Teluk Dalam memiliki 10.681,83 hektar belum terlampaui, tetapi 5.847,06 hektar sudah terlampaui, menunjukkan tekanan signifikan terhadap kapasitas penyediaan lahan pangan. Kondisi serupa terjadi di Simeulue Tengah, di mana 21.484,11 hektar belum terlampaui, sementara 3.725,65 hektar telah terlampaui. Simeulue Cut menunjukkan situasi

berbeda, dengan luas lahan yang terlampaui (1.311,91 hektar) lebih besar dibandingkan luas lahan belum terlampaui (337,17 hektar), menandakan keterbatasan daya dukung lahan di kecamatan ini. Kecamatan lainnya seperti Teupah Barat dan Teupah Tengah memiliki lahan belum terlampaui masing-masing 14.068,80 hektar dan 3.756,12 hektar, dengan lahan terlampaui sebesar 2.315,06 hektar dan 2.322,71 hektar. Sementara Simeulue Timur menunjukkan luas lahan belum terlampaui 12.563,73 hektar dan 3.919,23 hektar terlampaui.

Dalam konteks KLHS, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan di Kabupaten Simeulue masih memiliki daya dukung lahan pangan yang belum terlampaui, namun tekanan pada lahan di beberapa wilayah mulai meningkat. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk menghindari degradasi lahan dan memastikan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara produksi pangan dan kelestarian lingkungan melalui strategi seperti:

1. Optimalisasi Penggunaan Lahan: Memastikan lahan yang belum terlampaui dikelola dengan praktik pertanian berkelanjutan untuk mencegah kerusakan.
2. Pengendalian Alih Fungsi Lahan: Mencegah konversi lahan produktif menjadi nonpertanian yang dapat mempercepat lahan terlampaui.
3. Konservasi Lahan Terlampaui: Memulihkan lahan yang telah terlampaui agar produktivitasnya dapat dipertahankan.
4. Peningkatan Teknologi Pertanian: Menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas lahan tanpa merusak daya dukungnya.

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pemukiman

Daya dukung dan daya tampung lahan permukiman di Kabupaten Simeulue merupakan indikator penting dalam perencanaan tata ruang wilayah, yang mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk dapat bertempat tinggal secara layak. Analisis daya dukung (*Carrying Capacity Ratio/CCR*) memberikan informasi yang diperlukan oleh para perencana dalam menilai batas kemampuan lahan dalam mendukung segala aktivitas yang ada di wilayah yang bersangkutan.

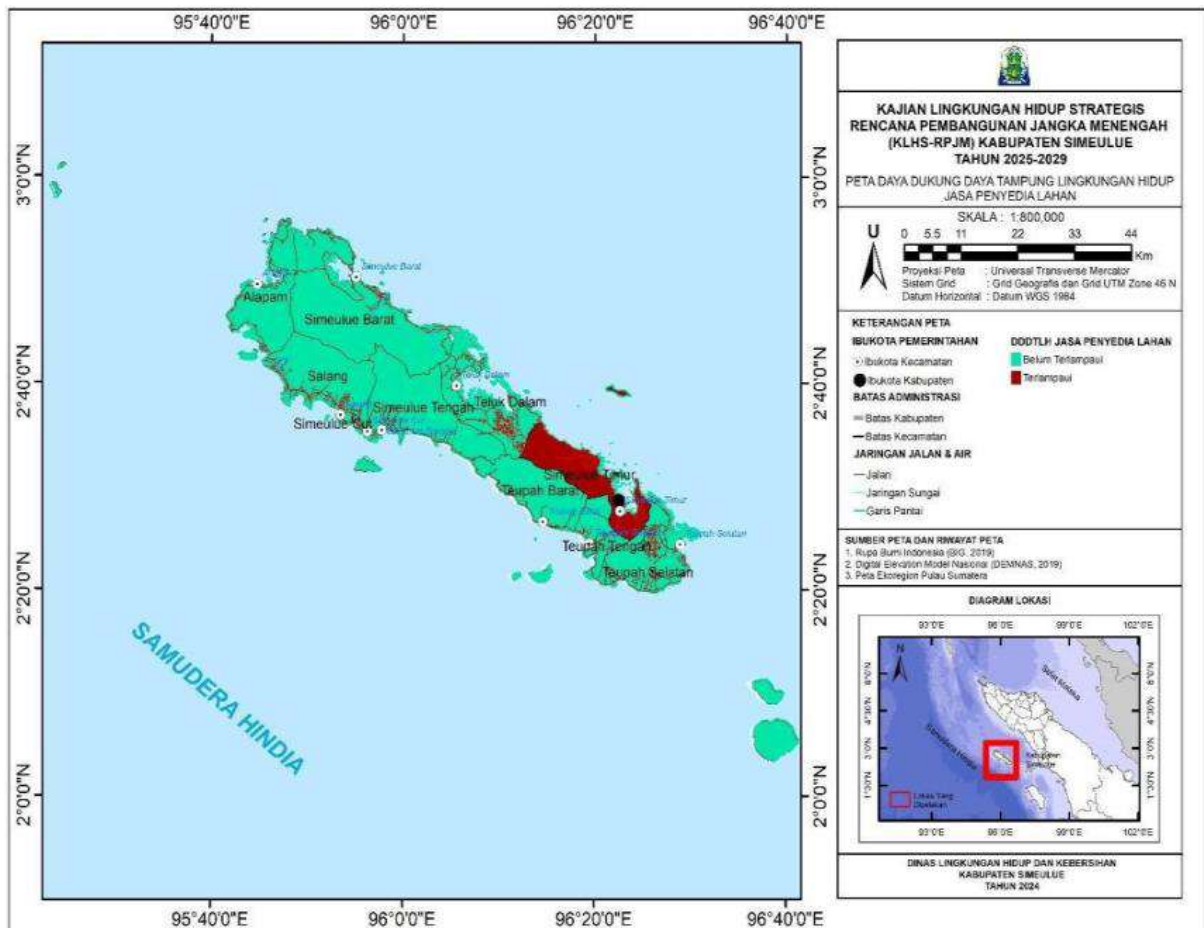
Tabel 2.10 Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Lahan

Kecamatan	Ketersediaan Lahan (Ha)	Kebutuhan Lahan (Ha)	Selisih (Ha)	Status
Teupah Selatan	321,08	237,27	83,80	Belum Terlampaui
Simeulue Timur	208,51	721,46	-512,95	Terlampaui
Teupah Barat	310,80	209,26	101,54	Belum Terlampaui
Teupah Tengah	224,45	164,78	59,66	Belum Terlampaui

Kecamatan	Ketersediaan Lahan (Ha)	Kebutuhan Lahan (Ha)	Selisih (Ha)	Status
Simeulue Tengah	260,29	177,08	83,21	Belum Terlampaui
Teluk Dalam	417,44	135,38	282,06	Belum Terlampaui
Simeulue Cut	433,78	82,24	351,54	Belum Terlampaui
Salang	383,88	220,32	163,56	Belum Terlampaui
Simeulue Barat	559,80	274,14	285,66	Belum Terlampaui
Alafan	347,35	121,22	226,13	Belum Terlampaui

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

Berdasarkan data ketersediaan lahan, kebutuhan lahan, dan selisih lahan di Kabupaten Simeulue, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kecamatan memiliki ketersediaan lahan yang masih memadai (belum terlampaui) untuk mendukung kebutuhan lahan permukiman dan kegiatan lainnya. Namun, terdapat satu kecamatan, yaitu Simeulue Timur, yang mengalami kondisi terlampaui, menunjukkan tekanan yang signifikan terhadap daya dukung dan daya tampung lahan. Teupah Selatan memiliki ketersediaan lahan sebesar 321,08 hektare, dengan kebutuhan lahan 237,27 hektare, menghasilkan surplus lahan sebesar 83,80 hektare. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan masih mampu mendukung aktivitas yang ada. Simeulue Timur menjadi satu-satunya kecamatan dengan status terlampaui, di mana ketersediaan lahan hanya 208,51 hektare, sedangkan kebutuhan lahan mencapai 721,46 hektare, sehingga terdapat defisit sebesar 512,95 hektare. Situasi ini menunjukkan tekanan tinggi terhadap lahan akibat pertumbuhan aktivitas penduduk dan penggunaan ruang yang tidak seimbang. Teupah Barat memiliki ketersediaan lahan 310,80 hektare dan kebutuhan 209,26 hektare, dengan kelebihan lahan sebesar 101,54 hektare, yang masih dalam kondisi aman. Teupah Tengah menunjukkan ketersediaan lahan sebesar 224,45 hektare, sementara kebutuhan lahan hanya 164,78 hektare, menghasilkan surplus 59,66 hektare. Simeulue Tengah memiliki ketersediaan lahan 260,29 hektare, dengan kebutuhan 177,08 hektare, menghasilkan selisih positif 83,21 hektare. Teluk Dalam menunjukkan surplus lahan terbesar setelah Simeulue Cut, dengan ketersediaan 417,44 hektare dan kebutuhan lahan hanya 135,38 hektare, menghasilkan surplus 282,06 hektare. Simeulue Cut mencatat ketersediaan lahan 433,78 hektare dan kebutuhan 82,24 hektare, dengan selisih positif 351,54 hektare, yang menunjukkan kapasitas lahan yang sangat mencukupi. Salang memiliki kelebihan lahan sebesar 163,56 hektare, dengan ketersediaan 383,88 hektare dan kebutuhan 220,32 hektare.



Gambar 2.4 Peta Ketersediaan Lahan Pemukiman di Kabupaten Simeulue

Berdasarkan konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan, wilayah yang memiliki surplus lahan seperti Simeulue Barat, Simeulue Cut, dan Teluk Dalam menunjukkan kemampuan lingkungan yang masih memadai untuk mendukung aktivitas penduduk secara berkelanjutan. Ketersediaan lahan yang mencukupi ini harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan lahan untuk permukiman, ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Sebaliknya, kondisi terlampaui di Simeulue Timur menunjukkan bahwa kebutuhan lahan sudah melebihi kapasitas yang tersedia, yang dapat menyebabkan tekanan lingkungan seperti degradasi lahan, alih fungsi lahan produktif, dan penurunan kualitas ekosistem. Hal ini memerlukan langkah mitigasi, seperti: membatasi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukungnya, menyusun kembali perencanaan tata ruang yang berfokus pada keberlanjutan, mendorong pemanfaatan lahan yang efisien dan ramah lingkungan untuk mendukung aktivitas permukiman.

Kondisi ini harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Simeulue. Surplus lahan di sebagian besar kecamatan memberikan peluang untuk

perencanaan yang lebih baik, sementara tekanan di Simeulue Timur memerlukan intervensi kebijakan yang tepat untuk menghindari kerusakan lingkungan lebih lanjut. Dengan demikian, pemanfaatan lahan harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan, selaras dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Sementara itu, kecamatan dengan status belum terlampaui, seperti Simeulue Barat, Simeulue Cut, dan Teluk Dalam, memiliki peluang untuk dikembangkan dengan lebih terencana dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, ketersediaan lahan yang ada dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan permukiman, dan keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan. KLHS berperan penting dalam memastikan bahwa pemanfaatan lahan di Kabupaten Simeulue tetap terkendali dan tidak melebihi kapasitas daya dukung yang tersedia.

Langkah-langkah pengendalian agar tidak terjadi degradasi lingkungan seperti optimalisasi tata ruang dengan mengatur kembali pemanfaatan lahan agar sesuai dengan daya dukung yang tersedia, Pengendalian Alih Fungsi Lahan dengan membatasi konversi lahan produktif untuk mencegah penurunan daya tampung. Rehabilitasi Lahan dengan mengembalikan fungsi lahan yang terdegradasi agar dapat mendukung kebutuhan di masa depan, dan pengembangan permukiman berbasis ekosistem dengan mendorong pengembangan kawasan permukiman yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

2.1.1.8. Jasa Ekosistem

A. Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih

Air bersih adalah kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap tetes air yang kita gunakan sehari-hari, entah untuk minum, memasak, mandi, atau keperluan lainnya, sebenarnya merupakan hasil dari sebuah proses alami yang melibatkan peran ekosistem. Proses inilah yang dikenal sebagai jasa ekosistem penyediaan air bersih. Jasa ekosistem ini merupakan manfaat yang diberikan alam melalui sistemnya dalam menyediakan air berkualitas yang layak digunakan. Hutan, lahan basah, sungai, danau, serta tanah memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan siklus air. Namun, jasa ekosistem ini tidak hanya pada penyediaan air bersih. Lebih dari itu, ekosistem juga menjaga kestabilan tanah dan mengurangi risiko erosi. Tanpa hutan atau vegetasi yang memadai, tanah akan mudah terkikis oleh air hujan, menyebabkan sedimentasi yang mencemari sungai dan danau. Akibatnya,

kualitas air menurun dan menjadi sulit digunakan. Berikut ditampilkan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Simeulue.

Tabel 2.11 Luasan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih

Kecamatan	Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih (Ha)					Total (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Alafan	183,54	4.049,28	12.386,36	51,24	0,00	16.670,42
Salang	319,00	6.813,71	12.329,53	0,00	0,00	19.462,23
Simeulue Barat	76,52	7.335,76	29.380,52	2.291,53	59,23	39.143,56
Simeulue Cut	91,33	976,80	549,57	0,00	0,00	1.617,70
Simeulue Tengah	251,81	3.710,95	20.274,97	668,85	0,00	24.906,58
Simeulue Timur	759,33	4.045,57	10.658,56	4,60	0,00	15.468,05
Teluk Dalam	304,91	6.486,41	8.556,27	585,39	0,00	15.932,98
Teupah Barat	227,39	2.719,28	12.972,81	0,00	0,00	15.919,47
Teupah Selatan	6.762,26	8.300,24	8.496,80	6.762,26	6.762,26	37.083,80
Teupah Tengah	133,02	1.098,10	4.633,49	0,00	0,00	5.864,60
Grand Total	9.109,11	45.536,08	120.238,86	10.363,86	6.821,48	183.809,50

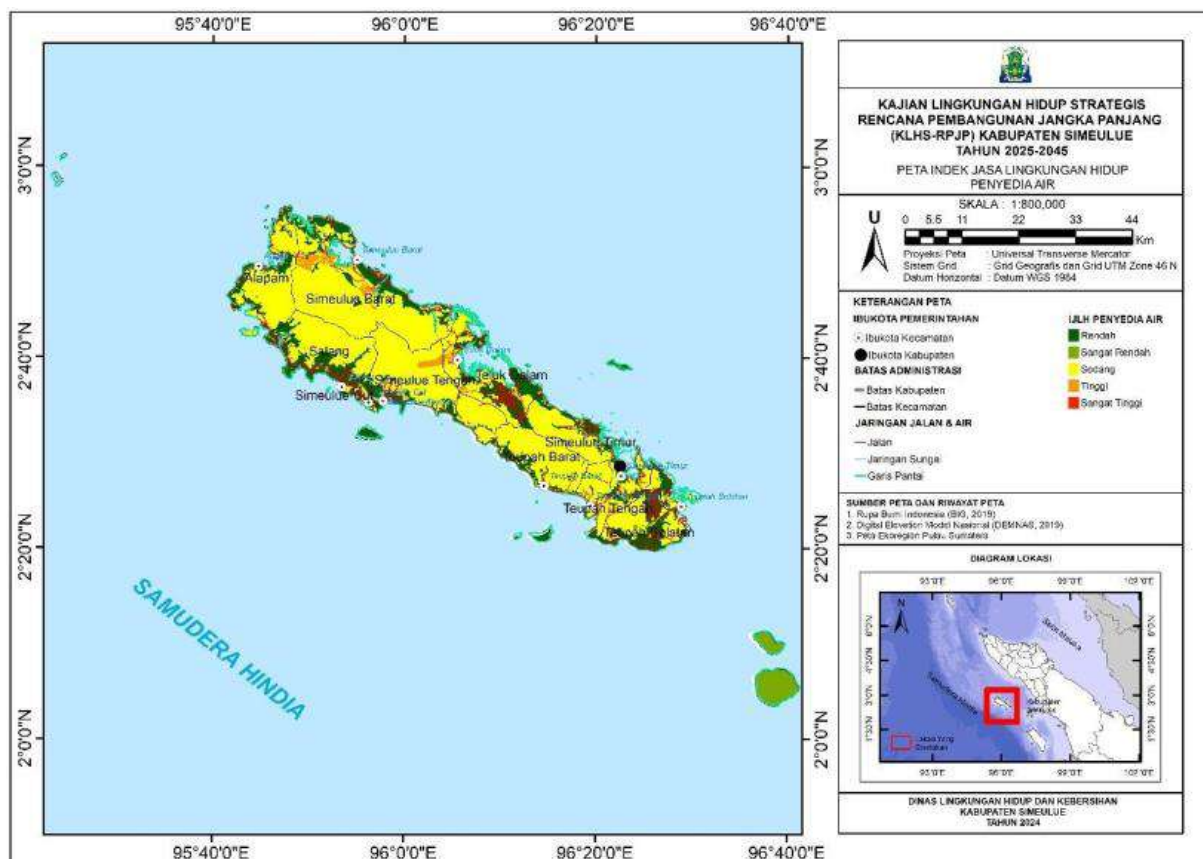
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

Kabupaten Simeulue memiliki ekosistem penyediaan air yang berperan penting dalam menjaga ketersediaan air bersih. Berdasarkan data luasan Indeks Jasa Lingkungan Hidup (IJLH), kategori penyediaan air Sedang mendominasi sebagian besar wilayah kecamatan. Kecamatan Simeulue Tengah mencatat luasan sebesar 20.274,97 hektar atau 81,40% dari total luas wilayahnya, diikuti oleh Teupah Barat dengan 12.972,81 hektar atau 81,49%, serta Teupah Tengah sebesar 4.633,49 hektar atau 79,01%. Kecamatan Simeulue Barat juga menunjukkan dominasi kategori Sedang dengan luas 29.380,52 hektar atau 75,06% dari total wilayahnya. Sementara itu, kategori Rendah menjadi dominan di beberapa kecamatan, terutama di Simeulue Cut yang mencatat 976,80 hektar atau 60,38% dari total luas wilayahnya. Selain itu, Teluk Dalam memiliki 6.486,41 hektar atau 40,71%, dan Salang mencatat 6.813,71 hektar atau 35,01%. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi kemampuan ekosistem dalam menyediakan air bersih di setiap kecamatan, dengan Simeulue Cut menjadi wilayah yang perlu perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas ekosistemnya.

Kecamatan Teupah Selatan memiliki keunikan tersendiri karena mencatat luasan signifikan pada kategori Sangat Tinggi dan Sangat Rendah, masing-masing sebesar 6.762,26 hektar atau 18,24% dari total luas wilayahnya. Hal ini menunjukkan potensi sekaligus tantangan dalam pengelolaan ekosistem penyediaan air di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, dominasi kategori Sedang di sebagian besar kecamatan menegaskan pentingnya peran ekosistem dalam penyediaan air bersih di Kabupaten Simeulue.

Kategori penyediaan air Sedang mendominasi sebagian besar kecamatan di Kabupaten Simeulue, dengan Simeulue Tengah, Teupah Barat, Teupah Tengah, dan Simeulue Barat mencatat persentase tertinggi (75% hingga 81%). Sementara itu, kategori Rendah lebih dominan di Simeulue Cut, dengan persentase mencapai 60,38%. Hasil ini menunjukkan pentingnya menjaga ekosistem penyediaan air, terutama di wilayah dengan dominasi kategori Sedang dan Sangat Tinggi, agar kualitas dan kuantitas air dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Upaya pelestarian ekosistem seperti reboisasi, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), dan pengurangan polusi air menjadi langkah penting untuk memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan. Kecamatan-kecamatan dengan dominasi kategori Rendah dan Sangat Rendah memerlukan perhatian lebih melalui perbaikan ekosistem agar kapasitas penyediaan air dapat ditingkatkan, sehingga mampu mendukung kehidupan dan aktivitas masyarakat secara optimal.



Gambar 2.5 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Simeulue

B. Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan adalah manfaat yang diberikan oleh ekosistem dalam menyediakan sumber pangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ekosistem alami dan buatan seperti hutan, lahan pertanian, padang rumput, dan perairan memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan pangan bagi manusia. Melalui ekosistem, berbagai sumber pangan seperti tanaman pangan, buah-buahan, ikan, daging, dan produk lainnya dapat diperoleh untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Selain sebagai sumber pangan utama, ekosistem juga mendukung ketahanan pangan dan menyediakan nutrisi yang beragam, sehingga berperan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara ekonomi, jasa ekosistem penyediaan pangan mendukung berbagai aktivitas produktif, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan pemanfaatan hasil hutan, yang membuka lapangan pekerjaan dan menjadi sumber pendapatan masyarakat. Keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem juga memainkan peran penting dalam menyediakan pangan yang berkelanjutan serta membantu adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Lahan pertanian yang menghasilkan padi, jagung, dan sayuran, perairan yang menjadi sumber ikan, udang, dan kerang, serta padang rumput yang menjadi lahan pakan ternak untuk produksi daging dan susu.

Tabel 2.12 Luasan Penyedia Pangan di Kabupaten Simeulue

Kecamatan	Luasan Penyedia Pangan (Ha)					Total (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Alafan	183,54	15.328,65	304,03	854,20	0,00	16.670,42
Salang	732,28	14.032,36	3.359,16	1.338,44	0,00	19.462,23
Simeulue Barat	147,53	28.396,84	4.631,86	5.311,12	656,21	39.143,56
Simeulue Cut	110,16	285,21	680,02	542,31	0,00	1.617,70
Simeulue Tengah	257,25	21.236,89	1.785,17	1.627,27	0,00	24.906,58
Simeulue Timur	1.782,89	12.291,73	528,09	865,34	0,00	15.468,05
Teluk Dalam	3.031,39	10.252,94	1.740,19	908,46	0,00	15.932,98
Teupah Barat	229,83	13.747,73	749,09	1.048,01	144,82	15.919,47
Teupah Selatan	8.179,29	8.612,22	6.762,26	6.767,78	6.762,26	37.083,80
Teupah Tengah	151,43	4.085,31	118,26	671,19	838,42	5.864,60
Grand Total	14.805,58	128.269,87	20.658,13	19.934,12	8.401,70	183.809,50

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

Secara umum, kategori Rendah mendominasi sebagian besar kecamatan dengan luasan total 128.269,87 hektar atau sekitar 66,8% dari total 183.809,50 hektar. Kecamatan Simeulue Barat memiliki luasan kategori Rendah terbesar, yaitu 28.396,84 hektar, diikuti oleh Simeulue

Tengah dengan 21.236,89 hektar dan Salang dengan 14.032,36 hektar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki produktivitas pangan yang masih terbatas atau memerlukan peningkatan kapasitas produksi melalui pengelolaan lahan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Kecamatan Teupah Selatan memiliki kontribusi tertinggi pada kategori Sangat Tinggi, dengan luasan sebesar 6.762,26 hektar atau 18,2% dari total wilayahnya seluas 37.083,80 hektar. Selain itu, kecamatan ini juga memiliki distribusi yang seimbang pada kategori Sedang dan Tinggi. Hal ini mencerminkan kapasitas ekosistem di Teupah Selatan dalam menyediakan pangan berada pada tingkat yang lebih baik dibandingkan kecamatan lainnya.

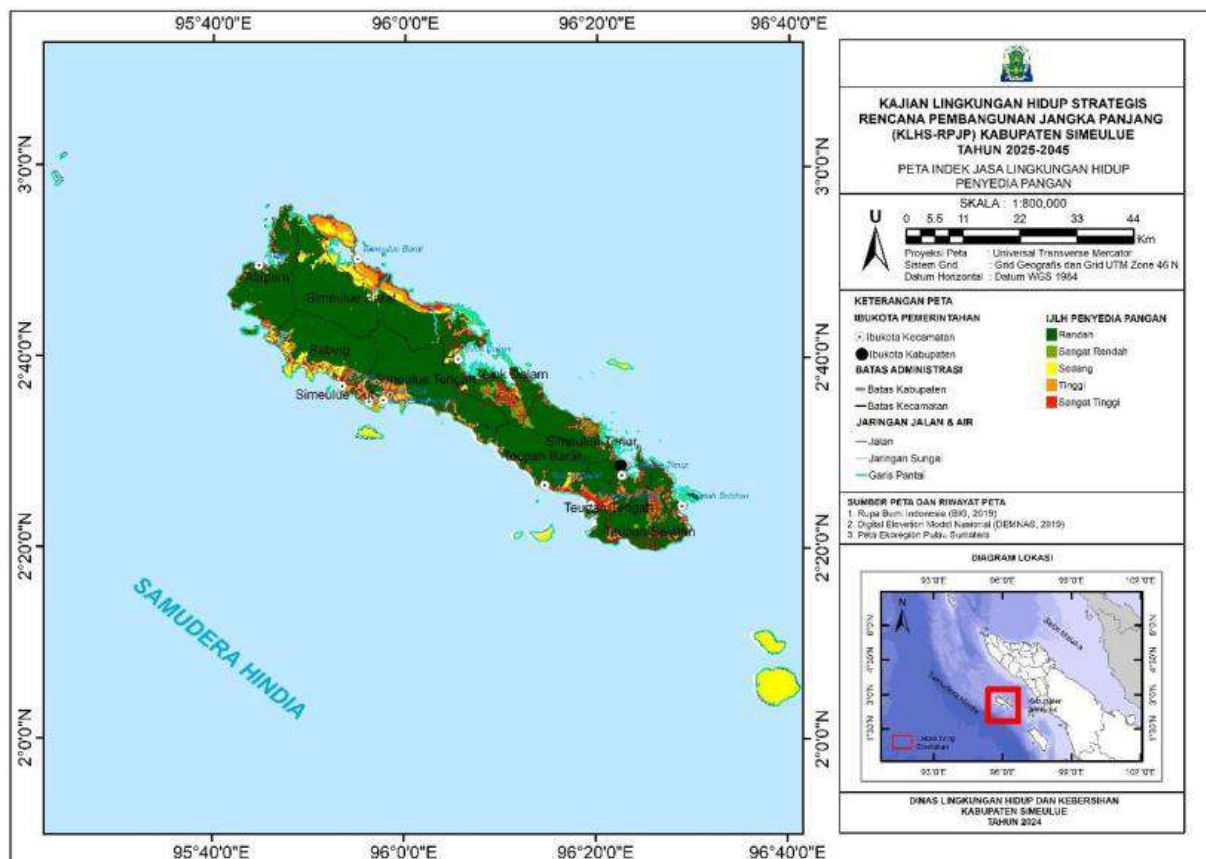
Kecamatan Simeulue Cut memiliki total luasan 1.617,70 hektar dengan dominasi pada kategori Rendah sebesar 285,21 hektar dan Sedang sebesar 680,02 hektar. Kategori Tinggi hanya mencapai 542,31 hektar, tanpa adanya kontribusi dari kategori Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan keterbatasan kapasitas ekosistem dalam menyediakan pangan di wilayah ini, yang memerlukan intervensi melalui kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan dan peningkatan praktik pertanian berkelanjutan.

Beberapa kecamatan lain, seperti Simeulue Timur dan Teluk Dalam, memiliki luasan signifikan pada kategori Sangat Rendah, masing-masing 1.782,89 hektar dan 3.031,39 hektar. Kondisi ini mengindikasikan potensi degradasi lahan atau rendahnya produktivitas ekosistem di wilayah tersebut. Untuk mengatasi hal ini, KLHS dapat mendorong kebijakan restorasi ekosistem, peningkatan kesuburan tanah, dan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan.

Dari analisis data, dominasi kategori Rendah di sebagian besar wilayah Kabupaten Simeulue menunjukkan perlunya intervensi kebijakan strategis untuk meningkatkan kapasitas ekosistem penyediaan pangan. Kecamatan Teupah Selatan dapat menjadi model karena memiliki luasan signifikan pada kategori Sangat Tinggi, yang mencerminkan pengelolaan lahan yang relatif lebih baik. Langkah-langkah yang direkomendasikan meliputi:

1. Restorasi lahan kritis di kecamatan dengan dominasi kategori Sangat Rendah dan Rendah.
2. Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas lahan.
3. Konservasi ekosistem alami, terutama di wilayah yang sudah menunjukkan kapasitas tinggi seperti Teupah Selatan.

4. Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian melalui teknologi dan manajemen lahan yang efektif.



Gambar 2.6 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Simeulue

C. Jasa Ekosistem Penyediaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Kabupaten Simeulue memiliki ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati baik di darat maupun perairan. Jasa ekosistem ini berperan penting dalam mendukung kehidupan masyarakat lokal, menjaga keseimbangan lingkungan, serta menjadi aset berharga bagi pembangunan berkelanjutan. Keanekaragaman hayati di Simeulue tersebar di berbagai ekosistem seperti hutan tropis, pesisir, perairan laut, dan sungai yang masih relatif terjaga. Ekosistem hutan di Kabupaten Simeulue menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna endemik serta spesies bernilai ekonomi. Pohon-pohon besar, seperti meranti, damar, dan berbagai jenis tumbuhan penghasil buah, berperan dalam mendukung keseimbangan ekosistem serta menyediakan bahan pangan dan obat-obatan tradisional bagi masyarakat. Selain itu, fauna khas seperti burung rangkong, monyet ekor panjang, dan berbagai jenis mamalia kecil menunjukkan bahwa ekosistem darat memiliki peran vital dalam mendukung keanekaragaman hayati.

Ekosistem hutan di Kabupaten Simeulue menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna endemik serta spesies bernilai ekonomi. Pohon-pohon besar, seperti meranti, damar, dan berbagai jenis tumbuhan penghasil buah, berperan dalam mendukung keseimbangan ekosistem serta menyediakan bahan pangan dan obat-obatan tradisional bagi masyarakat. Selain itu, fauna khas seperti burung rangkong, monyet ekor panjang, dan berbagai jenis mamalia kecil menunjukkan bahwa ekosistem darat memiliki peran vital dalam mendukung keanekaragaman hayati.

Keanekaragaman hayati di Kabupaten Simeulue juga memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat lokal. Hutan menjadi sumber bahan pangan berupa buah-buahan liar, madu, dan tanaman obat yang digunakan dalam praktik pengobatan tradisional. Perairan laut dan sungai menjadi sumber mata pencaharian utama melalui kegiatan perikanan tangkap dan budidaya. Selain itu, keanekaragaman spesies di Simeulue mendukung aktivitas ekowisata, seperti wisata pantai, selam, dan observasi satwa liar, yang menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat.

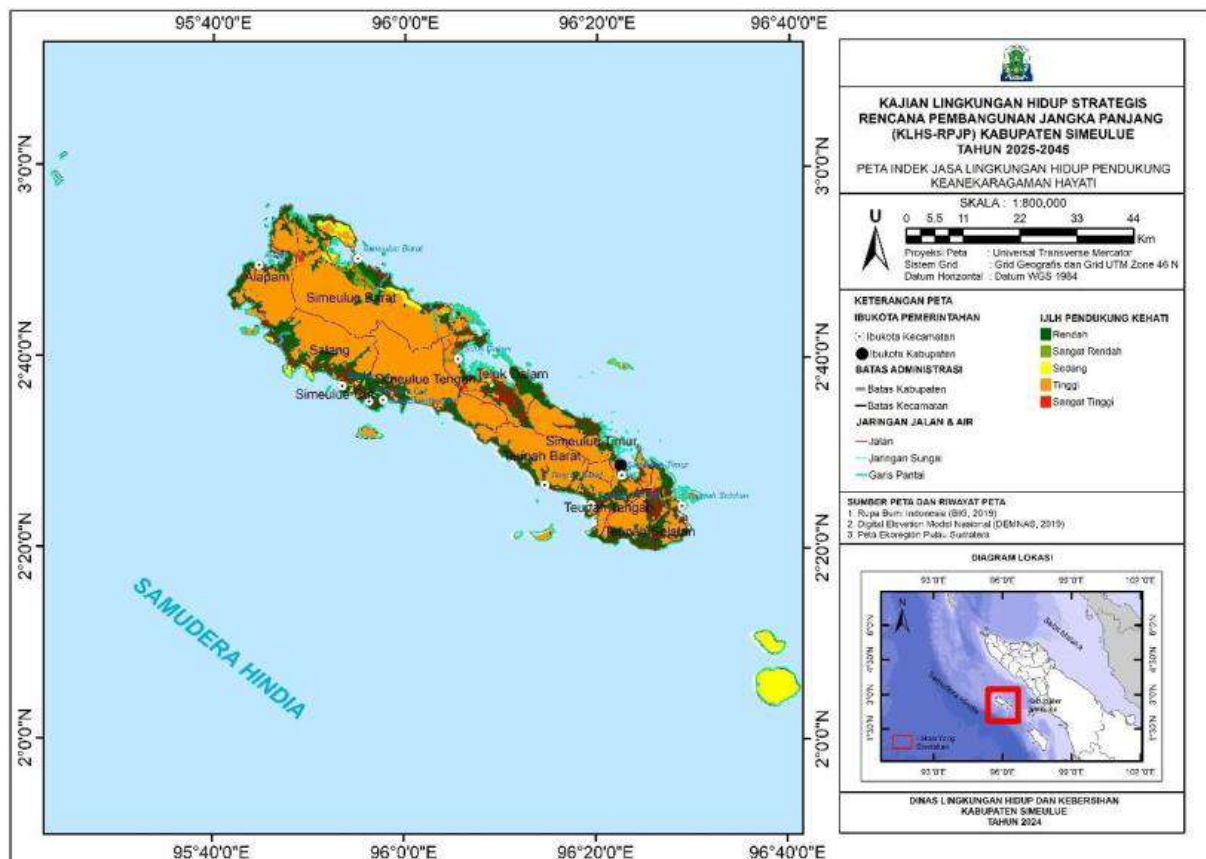
Namun, keanekaragaman hayati di Kabupaten Simeulue menghadapi berbagai ancaman, seperti deforestasi, konversi lahan untuk aktivitas pertanian, degradasi terumbu karang akibat praktik perikanan yang merusak, serta perubahan iklim. Kerusakan habitat ini dapat berdampak negatif terhadap spesies tumbuhan dan hewan, menurunkan kapasitas ekosistem dalam menyediakan jasa keanekaragaman hayati, serta mengancam ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Untuk menjaga jasa ekosistem penyediaan keanekaragaman hayati di Kabupaten Simeulue, upaya pelestarian harus dilakukan secara berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut meliputi perlindungan kawasan hutan, rehabilitasi ekosistem mangrove dan terumbu karang, penerapan perikanan berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Dengan menjaga ekosistem yang sehat, keanekaragaman hayati di Simeulue dapat terus memberikan manfaat bagi keseimbangan ekologi, ekonomi masyarakat, serta keberlanjutan kehidupan di masa depan.

Secara keseluruhan, jasa ekosistem penyediaan keanekaragaman hayati di Kabupaten Simeulue menjadi salah satu aset penting yang mendukung kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas ekosistem lokal. Pelestarian keanekaragaman hayati akan memastikan sumber daya alam dapat dikelola secara bijak dan berkelanjutan untuk generasi saat ini maupun mendatang.

Tabel 2.13 Luasan Jasa Ekosistem Kehati di Kabupaten Simeulue

Kecamatan	Luasan Jasa Ekosistem Kehati (Ha)					Total (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Alafan	2,90	5059,80	8,81	11.576,67	22,23	16.670,42
Salang	0,00	7.118,59	1.317,83	11.025,82	0,00	19.462,23
Simeulue Barat	1.868,23	6.832,82	2.642,05	27.490,32	310,14	39.143,56
Simeulue Cut	0,00	1.523,82	86,62	7,25	0,00	1.617,70
Simeulue Tengah	1,25	4.657,20	396,33	19.838,70	13,10	24.906,58
Simeulue Timur	0,00	5.335,43	43,84	10.084,18	4,60	15.468,05
Teluk Dalam	700,81	7.325,81	234,15	7.506,85	165,36	15.932,98
Teupah Barat	0,00	3.392,22	54,83	12.472,43	0,00	15.919,47
Teupah Selatan	6.762,26	8.305,76	6.762,26	8.491,27	6.762,26	37.083,80
Teupah Tengah	0,00	2.667,53	16,24	3.180,83	0,00	5.864,60
Grand Total	9.335,45	52.218,97	11.562,95	111.674,33	7.277,68	183.809,50

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045



Gambar 2.7 Peta Jasa Ekosistem Kehati di Kabupaten Simeulue

Berdasarkan analisis luasan jasa ekosistem penyediaan keanekaragaman hayati (Kehati) di Kabupaten Simeulue, terlihat bahwa kategori Tinggi mendominasi sebagian besar wilayah kecamatan. Kecamatan Simeulue Barat memiliki persentase kategori Tinggi tertinggi, yaitu 70,23% dari total luas wilayahnya sebesar 39.143,56 hektar, diikuti oleh Simeulue Tengah

dengan 79,65% dari total 24.906,58 hektar. Kecamatan lainnya, seperti Alapam (69,44%) dan Teupah Barat (78,35%), juga menunjukkan dominasi kategori Tinggi dalam penyediaan jasa ekosistem Kehati. Kategori Rendah menonjol di Kecamatan Simeulue Cut, dengan luasan mencapai 94,20% dari total 1.617,70 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem di Simeulue Cut memiliki kapasitas penyediaan keanekaragaman hayati yang relatif terbatas, yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya restorasi dan pengelolaan berkelanjutan.

Sementara itu, Kecamatan Teupah Selatan menunjukkan distribusi yang lebih merata di berbagai kategori. Persentase kategori Tinggi mencapai 22,90%, sedangkan kategori Sangat Tinggi dan Sangat Rendah masing-masing mencatat 18,24%. Hal ini menunjukkan dinamika ekosistem yang kompleks di wilayah ini, dengan potensi tinggi pada penyediaan keanekaragaman hayati yang memerlukan pengelolaan cermat.

Kategori Sangat Tinggi secara keseluruhan memiliki kontribusi kecil, dengan Kecamatan Teupah Selatan mencatat luasan terbesar untuk kategori ini, yaitu 18,24% dari total 37.083,80 hektar. Sebaliknya, Kecamatan seperti Salang dan Teupah Tengah tidak memiliki kontribusi pada kategori Sangat Tinggi, menunjukkan perlunya intervensi untuk meningkatkan kapasitas ekosistem di wilayah tersebut. Secara umum, dominasi kategori Tinggi di sebagian besar kecamatan menunjukkan potensi ekosistem Kabupaten Simeulue dalam mendukung keanekaragaman hayati. Namun, wilayah dengan dominasi kategori Rendah dan Sangat Rendah memerlukan strategi pengelolaan yang lebih intensif melalui program konservasi, rehabilitasi lahan, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keanekaragaman hayati. Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Simeulue dapat memastikan keberlanjutan jasa ekosistem Kehati untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

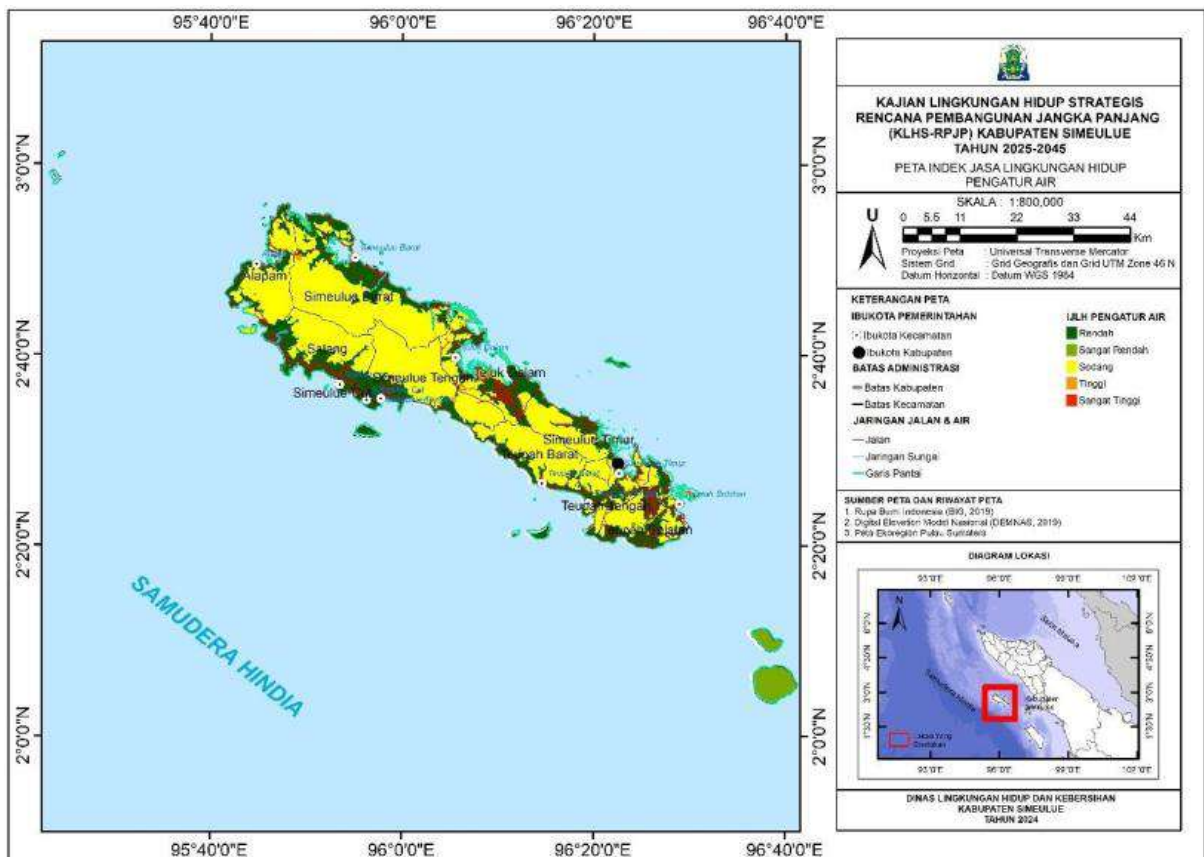
D. Jasa Ekosistem Pengatur Air

Jasa Ekosistem Pengatur Air adalah manfaat yang diberikan oleh ekosistem dalam mengatur ketersediaan, kualitas, dan pergerakan air di dalam lingkungan. Jasa ini mencakup berbagai proses alami seperti pengendalian banjir, pengisian air tanah, penyaringan air, dan pengaturan aliran air permukaan. Fungsi ini sangat bergantung pada keberadaan ekosistem alami seperti hutan, lahan basah, sungai, dan danau.

Tabel 2.14 Luasan Jasa Ekosistem Pengatur Air di Kabupaten Simeulue

Kecamatan	Luasan Jasa Ekosistem Kehati (Ha)					Total (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Alafan	183,54	4908,26	11556,38	22,23	0,00	16670,42
Salang	319,00	8152,15	10991,09	0,00	0,00	19462,23
Simeulue Barat	76,52	11286,63	27443,84	277,34	59,23	39143,56
Simeulue Cut	91,33	1519,11	7,25	0,00	0,00	1617,70
Simeulue Tengah	251,81	5338,21	19303,46	13,10	0,00	24906,58
Simeulue Timur	759,33	4908,02	9796,10	4,60	0,00	15468,05
Teluk Dalam	304,91	8046,38	7140,64	441,06	0,00	15932,98
Teupah Barat	227,39	3709,21	11982,87	0,00	0,00	15919,47
Teupah Selatan	6762,26	8305,76	8491,27	6762,26	6762,26	37083,80
Teupah Tengah	133,02	2550,75	3180,83	0,00	0,00	5864,60
Grand Total	9109,11	58724,47	109893,75	7520,58	6821,48	183.809,50

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045



Gambar 2.8 Peta Jasa Ekosistem Pengatur Air di Kabupaten Simeulue

Jasa ekosistem pengatur air di Kabupaten Simeulue menunjukkan variasi kapasitas dalam mengatur ketersediaan dan pergerakan air berdasarkan kategori Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi. Dari total luasan 183.809,50 hektar, kategori Sedang mendominasi dengan 109.893,75 hektar atau sekitar 59,8%. Kecamatan Simeulue Barat

memiliki luasan terbesar untuk kategori ini, yaitu 27.443,84 hektar (70,1%), diikuti oleh Simeulue Tengah dengan 19.303,46 hektar (77,5%). Dominasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah masih memiliki ekosistem yang cukup berfungsi dalam pengaturan air, meskipun mulai menghadapi tekanan akibat aktivitas manusia seperti konversi lahan dan degradasi hutan. Kategori Rendah juga cukup signifikan dengan luasan 58.724,47 hektar atau sekitar 31,9% dari total wilayah, dengan kontribusi terbesar dari kecamatan Salang (8.152,15 hektar) dan Teluk Dalam (8.046,38 hektar). Kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan fungsi ekosistem pengatur air di wilayah-wilayah tersebut akibat degradasi lahan, pengurangan tutupan vegetasi, dan alih fungsi hutan untuk pertanian dan pemukiman. Di sisi lain, kategori Tinggi dan Sangat Tinggi tercatat signifikan hanya di Teupah Selatan, dengan luasan masing-masing 6.762,26 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem di wilayah ini relatif masih terjaga, didukung oleh tutupan hutan yang lebih baik dan vegetasi yang mendukung infiltrasi serta penyimpanan air.

Kategori Sangat Rendah tersebar di beberapa kecamatan, seperti Alapam (183,54 hektar) dan Simeulue Cut (91,33 hektar). Kondisi ini menunjukkan keterbatasan kapasitas ekosistem di wilayah tersebut dalam mengatur air, kemungkinan akibat deforestasi dan degradasi lahan yang signifikan. Faktor-faktor seperti topografi, curah hujan yang tinggi, keberadaan hutan, dan tekanan aktivitas manusia memainkan peran besar dalam menentukan kapasitas ekosistem pengatur air di Kabupaten Simeulue. Pembukaan lahan untuk pertanian dan permukiman di wilayah dataran rendah telah menyebabkan berkurangnya vegetasi alami, sementara di wilayah seperti Teupah Selatan, ekosistem yang masih terjaga mampu memberikan fungsi optimal dalam pengaturan air.

Secara keseluruhan, dominasi kategori Sedang dan Rendah menunjukkan pentingnya upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem, terutama di wilayah yang mengalami penurunan fungsi pengatur air. Langkah-langkah seperti pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), restorasi hutan, dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan perlu dioptimalkan. Dengan menjaga fungsi ekosistem pengatur air, Kabupaten Simeulue dapat mengurangi risiko banjir, memastikan ketersediaan air bersih, dan mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

E. Wilayah Ekoregion

Wilayah ekoregion merujuk pada suatu kawasan geografis yang memiliki kesamaan karakteristik lingkungan, baik dari segi iklim, jenis tanah, vegetasi, maupun pola hidrologi. Ekoregion merupakan bagian dari konsep ekologi yang digunakan untuk menggambarkan area yang memiliki kesamaan dalam hal ekosistem atau lingkungan alami, yang mendukung kehidupan spesies tertentu dan proses-proses ekologis yang terjadi di dalamnya. Secara lebih rinci, wilayah ekoregion dapat mencakup berbagai jenis ekosistem seperti hutan hujan tropis, sabana, pegunungan, atau ekosistem pesisir yang memiliki karakteristik yang sama. Pembagian wilayah ekoregion ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan pengelolaan sumber daya alam serta konservasi keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.

Beberapa ciri yang biasa digunakan untuk menentukan batasan ekoregion antara lain:

1. Iklim: Termasuk suhu, curah hujan, dan musim yang mempengaruhi jenis vegetasi dan organisme yang dapat bertahan hidup di wilayah tersebut.
2. Vegetasi dan Flora: Jenis tanaman yang dominan di kawasan tersebut yang dipengaruhi oleh iklim dan tanah.
3. Tanah dan Geologi: Jenis dan struktur tanah serta kondisi geologi yang mempengaruhi kesuburan dan kemampuan tanah untuk mendukung kehidupan.
4. Biodiversitas: Kehadiran spesies tumbuhan dan hewan yang menjadi bagian dari ekosistem tersebut, yang biasanya memiliki adaptasi khusus terhadap kondisi lingkungan.

Ekoregion di Kabupaten Simeulue terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu ekoregion darat dan ekoregion laut, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem daerah ini. Kecamatan Simeulue Barat memiliki luas ekoregion terbesar, yaitu 7,3% dari total luas ekoregion di Kabupaten Simeulue, diikuti oleh Kecamatan Simeulue Tengah dengan kontribusi 4,7%. Kecamatan Teupah Selatan juga memiliki persentase yang cukup besar, yakni 4,5%. Sementara itu, kecamatan lainnya seperti Alapam dan Salang masing-masing berkontribusi sebesar 3,1% dan 3,7%, sedangkan kecamatan seperti Simeulue Timur, Teluk Dalam, dan Teupah Barat masing-masing menyumbang sekitar 3% dari total luas ekoregion. Kecamatan Simeulue Cut dan Teupah Tengah memiliki kontribusi yang lebih kecil, dengan masing-masing sebesar 0,3% dan 1,1%. Selain itu, ekoregion laut yang mencakup Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera memiliki kontribusi terbesar, yaitu 66,3%

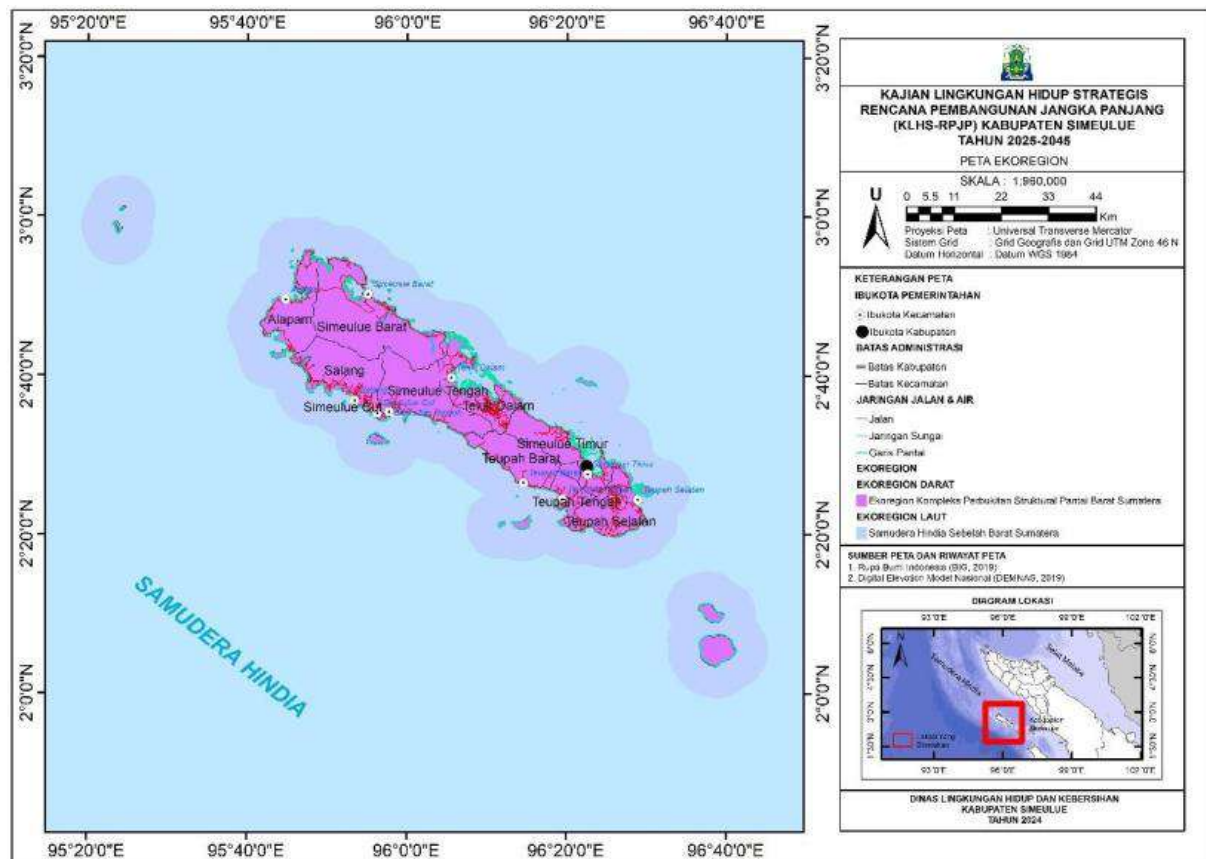
dari total luas ekoregion di Kabupaten Simeulue. Berikut ditampilkan luasan ekoregion di Kabupaten Simeulue.

Tabel 2.15 Luasan Ekoregion di Kabupaten Simeulue

Kecamatan	Jenis Ekoregion	Nama Ekoregion	Luasan Ekoregion (Ha)
Alafan	Ekoregion Darat	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Pantai Barat Sumatera	16.675,18
Salang			19.678,86
Simeulue Barat			39.251,46
Simeulue Cut			1.634,40
Simeulue Tengah			25.026,32
Simeulue Timur			16.052,25
Teluk Dalam			15.936,41
Teupah Barat			16.315,67
Teupah Selatan			24.101,18
Teupah Tengah			6.006,18
Area Laut	Ekoregion Laut	Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera	356.944,15
Grand Total			537.622,06

Sumber: BIG dan KLHK, 2023

Ekoregion darat di Kabupaten Simeulue mencakup sejumlah kecamatan yang memiliki luas total sekitar 180.677,91 Ha, yang terdiri dari beberapa ekoregion dengan karakteristik lingkungan yang khas. Di antaranya, Kecamatan Simeulue Barat memiliki luas ekoregion darat terbesar, yakni 39.251,46 Ha, yang berkontribusi sekitar 7,3% dari total luas ekoregion di Kabupaten Simeulue. Kecamatan lainnya seperti Simeulue Tengah dan Salang juga memiliki ekoregion darat yang luas, yaitu masing-masing 25.026,32 Ha dan 19.678,86 Ha, yang menyumbang sekitar 4,7% dan 3,7% dari total luas ekoregion. Sementara itu, kecamatan seperti Simeulue Cut dan Teupah Tengah memiliki ekoregion darat dengan luas lebih kecil, yakni masing-masing 1.634,40 Ha dan 6.006,18 Ha, dengan kontribusi yang lebih rendah terhadap total luas ekoregion darat. Ekoregion darat ini terdiri dari Kompleks Perbukitan Struktural Pantai Barat Sumatera, yang memiliki peran penting dalam mendukung keberagaman hayati dan kestabilan lingkungan.



Sumber: BIG dan KLHK 2023

Gambar 2.9 Peta Ekoregion Kabupaten Simeulue

Ekoregion laut mencakup wilayah yang sangat luas dengan 356.944,15 Ha, berkontribusi sekitar 66,3% dari total luas ekoregion di Simeulue. Ekoregion laut ini berada di Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera, yang merupakan kawasan penting bagi kehidupan laut, termasuk berbagai spesies ikan dan organisme laut lainnya. Luasnya ekoregion laut ini menunjukkan betapa signifikan peran laut dalam mendukung kehidupan dan perekonomian daerah, terutama terkait dengan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kombinasi ekoregion darat dan laut di Simeulue mencerminkan keberagaman ekosistem yang mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan di daerah ini. Upaya konservasi dan pengelolaan yang bijaksana terhadap kedua ekoregion ini sangat penting untuk menjaga kelestarian alam dan sumber daya yang ada.

2.1.1.9. Dampak Resiko Lingkungan

Dampak risiko lingkungan adalah potensi kerugian atau perubahan negatif pada ekosistem, manusia, dan sumber daya alam yang diakibatkan oleh aktivitas alam maupun manusia. Risiko lingkungan dapat berupa ancaman terhadap kualitas lingkungan hidup,

keberlanjutan sumber daya alam, kesehatan masyarakat, serta stabilitas sosial dan ekonomi. Pengertian ini mencakup dampak aktual yang sudah terjadi maupun potensi ancaman yang dapat muncul di masa depan jika tidak ada upaya mitigasi atau pengelolaan yang memadai.

Risiko lingkungan dapat berasal dari aktivitas manusia, seperti urbanisasi, industri, pertanian, dan pembangunan infrastruktur, atau dari kejadian alam, seperti gempa bumi, banjir, dan perubahan iklim. Kombinasi keduanya, seperti banjir akibat perubahan iklim yang diperparah oleh deforestasi, juga sering terjadi. Dampak risiko lingkungan sering mengakibatkan kerusakan ekosistem, seperti hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi tanah, pencemaran air, dan penurunan kualitas udara. Kerusakan ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi kapasitasnya untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

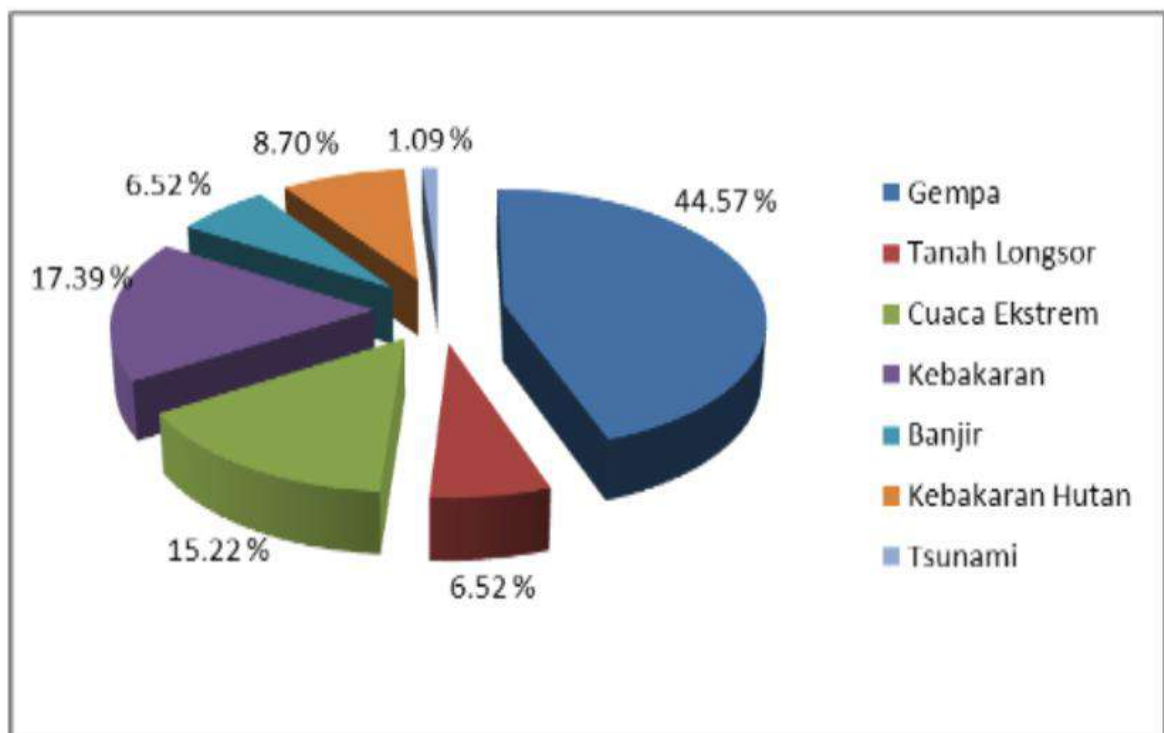
A. Kejadian Bencana

Kabupaten Simeulue telah mengalami berbagai bencana alam yang signifikan, termasuk gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan abrasi pantai. Gempa bumi dan tsunami pada 2004 serta gempa susulan pada 2005 menjadi peristiwa besar yang menandai kerentanan Simeulue terhadap bencana tektonik. Selain itu, banjir dan longsor kerap terjadi akibat hujan deras, seperti pada Oktober 2023 di Simeulue Timur dan Teluk Dalam, yang menggenangi pemukiman dan memicu longsor di area perbukitan. Abrasi pantai juga menjadi ancaman serius, diperparah oleh gelombang laut tinggi dan kurangnya vegetasi mangrove. Dengan kearifan lokal seperti pengetahuan tentang smong dan upaya mitigasi yang terus ditingkatkan, Simeulue berupaya mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan data dari BPBD, Kabupaten Simeulue merupakan daerah yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam dan non-alam, dengan frekuensi kejadian yang beragam. Berdasarkan data, gempa bumi menjadi bencana yang paling sering terjadi dengan jumlah 41 kejadian, mengingat posisi Simeulue yang berada di zona subduksi aktif lempeng tektonik. Kebakaran gedung dan pemukiman menempati urutan kedua dengan 16 kejadian, yang disebabkan oleh faktor teknis maupun kelalaian manusia. Cuaca ekstrem, seperti angin kencang dan badai, tercatat sebanyak 14 kejadian, mengindikasikan dampak perubahan iklim terhadap wilayah tersebut.

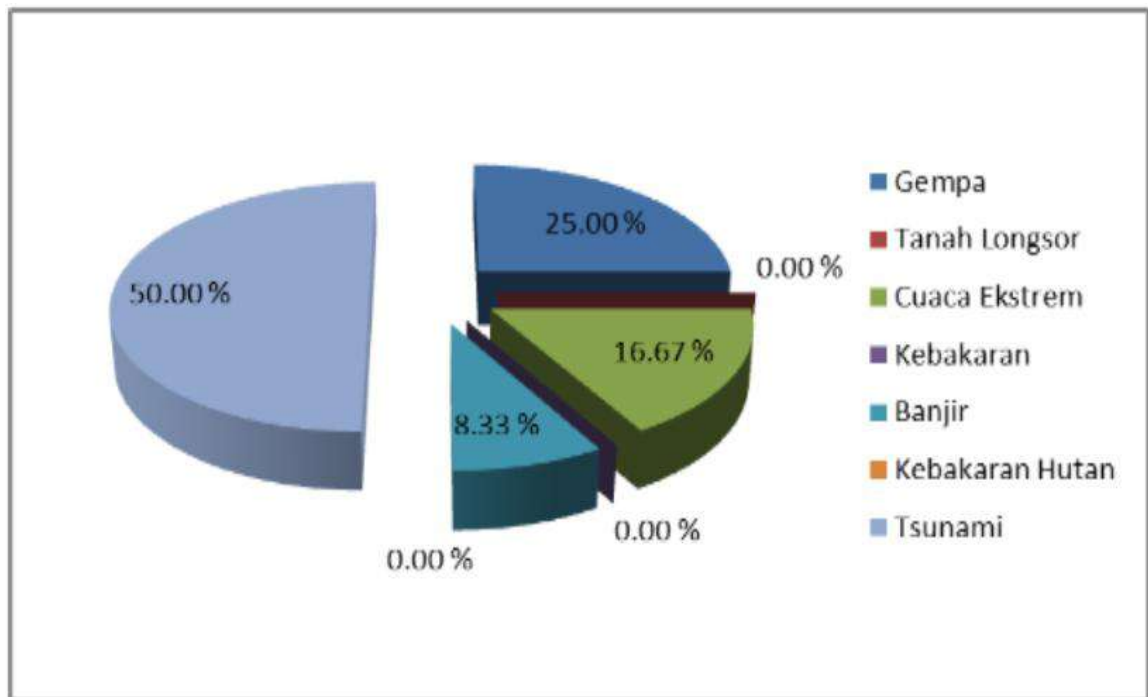
Selain itu, kebakaran lahan dan hutan terjadi sebanyak 8 kali, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan atau faktor cuaca kering. Banjir dan longsor, masing-masing tercatat 6 kejadian, terutama dipicu oleh curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang labil di beberapa kecamatan. Sementara itu, bencana tsunami tercatat satu kali, yakni pada kejadian besar 26 Desember 2004, yang berdampak signifikan bagi masyarakat Simeulue.

Frekuensi bencana ini menunjukkan pentingnya upaya mitigasi, termasuk penanganan risiko gempa dan tsunami, pengelolaan lahan yang berkelanjutan, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Dengan langkah strategis, dampak bencana di Simeulue dapat diminimalkan, sehingga keberlanjutan kehidupan masyarakat dapat terus terjaga.



Sumber: BPBD Kabupaten Simeulue, 2024

Gambar 2.10 Persentasi jenis bencana berdasarkan jumlah kejadian



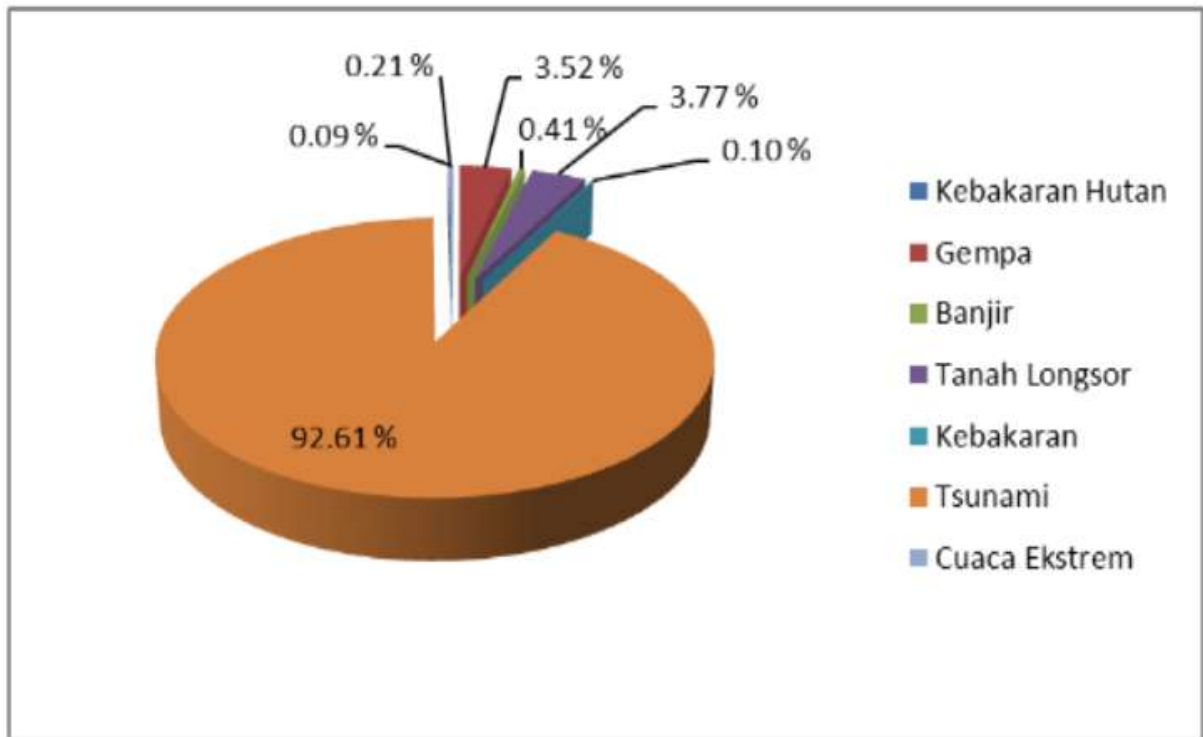
Sumber: BPBD Kabupaten Simeulue, 2024

Gambar 2.11 Persentasi jenis bencana berdasarkan jumlah korban jiwa



Sumber: simeulueneews.com, 2023

Gambar 2.12 Beberapa jenis bencana seperti banjir, gempa bumi, longsor, dan kebakaran gedung



Gambar 2.13 Persentasi jenis bencana berdasarkan total kerugian

B. Potensi Bencana

Kabupaten Simeulue, sebuah wilayah kepulauan di Provinsi Aceh, memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bencana alam karena letaknya yang strategis namun rentan. Karakteristik geografisnya, berupa garis pantai yang panjang, zona subduksi aktif, dan curah hujan yang tinggi, menjadikan Simeulue rawan terhadap gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, serta bencana hidrometeorologi lainnya. Berikut adalah potensi bencana utama di Kabupaten Simeulue.

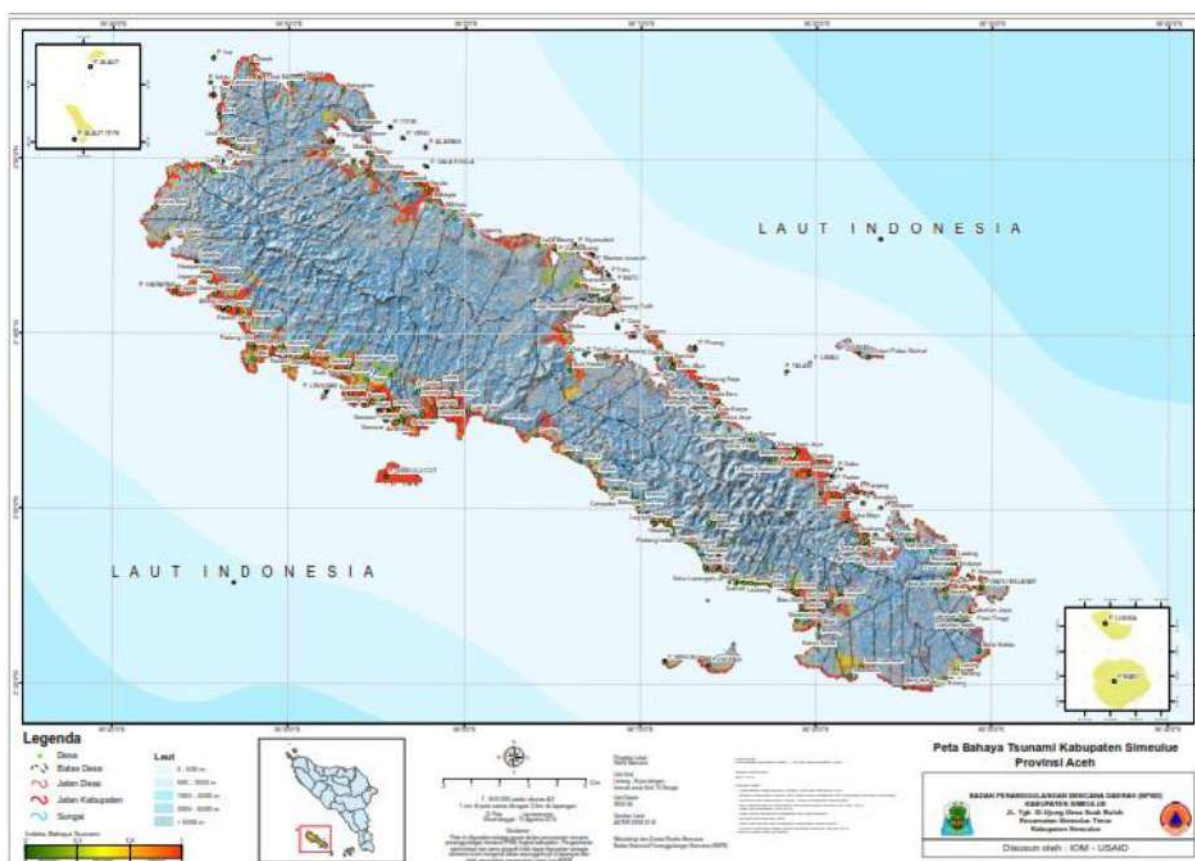
1. Bencana Tsunami

Kabupaten Simeulue memiliki potensi bencana tsunami yang tinggi karena lokasinya berada di dekat zona subduksi aktif di Samudera Hindia, tepatnya di pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Daerah ini termasuk dalam wilayah rawan gempa bumi megathrust, yang merupakan pemicu utama terjadinya tsunami besar. Sebagai kepulauan yang dikelilingi oleh laut, Simeulue juga memiliki garis pantai yang panjang, sehingga sebagian besar wilayahnya berpotensi terdampak jika tsunami terjadi. Kelas bahaya dominan untuk bencana tsunami adalah tinggi dengan luas total bahayanya 26.556 ha. Kecamatan yang paling terdampak terjadi di Kecamatan Simeulue Timur.

Tabel 2.16 Luas Ancaman Bencana Tsunami di Kabupaten Simeulue

Kecamatan	Luas Ancaman (ha)	Tingkat Ancaman Dominan
Alafan	1.688	Tinggi
Salang	1.177	Tinggi
Simeulue Barat	559	Tinggi
Simeulue Cut	391	Tinggi
Simeulue Tengah	5.442	Tinggi
Simeulue Timur	3.480	Tinggi
Teluk Dalam	1.036	Tinggi
Teupah Barat	4.997	Tinggi
Teupah Selatan	4.788	Tinggi
Teupah Tengah	2.998	Tinggi
Total Luas	26.556	Tinggi

Sumber: BPBD Kabupaten Simeulue, 2024



Sumber: BPBD Kabupaten Simeulue, 2024

Gambar 2.14 Peta potensi Bencana Tsunami di Kabupaten Simeulue

Kabupaten Simeulue memiliki potensi besar terkena dampak tsunami karena lokasinya yang strategis namun rentan di zona subduksi aktif. Meskipun kearifan lokal smong telah

terbukti menyelamatkan nyawa masyarakat pada tahun 2004, upaya mitigasi modern seperti sistem peringatan dini, rehabilitasi ekosistem pesisir, dan penguatan infrastruktur tetap diperlukan untuk mengurangi dampak bencana di masa depan. Kombinasi antara kearifan lokal dan teknologi modern akan menjadi kunci untuk menjaga keselamatan masyarakat Simeulue dari ancaman tsunami.

2. Bencana Banjir

Simeulue sering mengalami banjir, terutama di musim hujan. Banjir ini biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, buruknya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), dan berkurangnya tutupan hutan yang mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Beberapa kecamatan seperti Simeulue Timur, Teluk Dalam, dan Teupah Tengah menjadi wilayah yang sering terdampak banjir. Ketinggian air bisa mencapai lebih dari 1 meter, menggenangi rumah-rumah warga dan lahan pertanian.

Dari hasil pengkajian indeks bencana banjir di Kabupaten Simeulue didapat total wilayah yang terdampak akibat banjir adalah sebesar 34,57% dari luasan daerah kabupaten (73.470 ha). Luasan genangan banjir yang paling luas terjadi di Kecamatan Simeulue Timur.

Daerah Rawan Banjir

1. Simeulue Timur

Kecamatan ini sering terdampak banjir karena berada di daerah dataran rendah dengan penduduk yang cukup padat. Sistem drainase yang belum optimal dan curah hujan tinggi memperburuk kondisi.

2. Teluk Dalam

Teluk Dalam juga menjadi salah satu wilayah yang rawan banjir, terutama saat hujan deras berlangsung lama. Kecamatan ini memiliki beberapa daerah dengan sistem drainase yang kurang baik.

3. Teupah Tengah dan Teupah Selatan

4. Simeulue Barat

Meski lebih didominasi oleh perbukitan, daerah dataran rendah di Simeulue Barat dapat mengalami banjir jika terjadi hujan intensitas tinggi.

Dampak Bencana Banjir

1. Kerusakan Infrastruktur

Banjir sering menyebabkan kerusakan pada jalan, jembatan, dan fasilitas umum seperti sekolah dan kantor pemerintahan. Genangan air juga merusak sistem drainase yang sudah ada.

2. Terganggunya Aktivitas Masyarakat

Genangan air di pemukiman memaksa masyarakat mengungsi, terutama jika air menggenangi rumah hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Aktivitas ekonomi seperti pasar dan transportasi juga terhenti.

3. Kerugian di Sektor Pertanian

Air yang menggenangi lahan pertanian dapat merusak tanaman, seperti padi dan palawija, yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat Simeulue.

Tabel 2.17 Luas Ancaman Bencana Banjir di Kabupaten Simeulue

Kecamatan	Luas Ancaman (ha)	Tingkat Ancaman Dominan
Alafan	4.567	Tinggi
Salang	8.189	Sedang
Simeulue Barat	10.843	Tinggi
Simeulue Cut	2.890	Tinggi
Simeulue Tengah	17.594	Sedang
Simeulue Timur	8.530	Sedang
Teluk Dalam	2.206	Sedang
Teupah Barat	11.200	Tinggi
Teupah Selatan	12.075	Sedang
Teupah Tengah	6.565	Tinggi
Total Luas	73.470	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Simeulue, 2024



Sumber: BPBD Kabupaten Simeulue, 2024

Gambar 2.15 Peta potensi Bencana Banjir di Kabupaten Simeulue

3. Bencana Gempa

Kabupaten Simeulue memiliki potensi tinggi terhadap bencana gempa bumi karena letaknya berada di zona subduksi aktif, yaitu pertemuan Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia. Aktivitas tektonik di zona ini sering memicu gempa besar, seperti gempa berkekuatan 9,3 magnitudo pada 26 Desember 2004 yang memicu tsunami besar di Samudera Hindia. Selain itu, gempa berkekuatan 8,7 magnitudo pada 28 Maret 2005 juga mengguncang wilayah Simeulue, menyebabkan kerusakan infrastruktur dan perubahan elevasi tanah. Seiring waktu, Simeulue juga sering mengalami gempa berkekuatan sedang hingga kecil, yang memperkuat risiko kerusakan dan ancaman terhadap keselamatan masyarakat di wilayah ini.

Dampak gempa di Simeulue meliputi kerusakan infrastruktur, perubahan topografi, dan ancaman tsunami, terutama di wilayah pesisir. Untuk mengurangi risiko, langkah mitigasi seperti pembangunan infrastruktur tahan gempa, edukasi tentang kesiapsiagaan, dan penguatan sistem peringatan dini menjadi sangat penting. Masyarakat Simeulue juga memiliki kearifan lokal smong, yang terbukti menyelamatkan banyak nyawa saat tsunami 2004. Dengan kombinasi kearifan lokal dan upaya mitigasi modern, Simeulue dapat meningkatkan ketahanan terhadap gempa bumi dan melindungi masyarakat dari dampaknya.

Tabel 2.18 Luas Ancaman Bencana Gempa di Kabupaten Simeulue

Kecamatan	Luas Ancaman (ha)	Tingkat Ancaman Dominan
Alafan	9.568	Sedang
Salang	17.524	Sedang
Simeulue Barat	17.514	Tinggi
Simeulue Cut	6.300	Sedang
Simeulue Tengah	38.362	Sedang
Simeulue Timur	19.397	Sedang
Teluk Dalam	8.791	Sedang
Teupah Barat	22.367	Tinggi
Teupah Selatan	23.826	Sedang
Teupah Tengah	13.151	Sedang
Total Luas	136.151	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Simeulue, 2024

Kelas bahaya dominan untuk bencana gempabumi adalah Sedang dengan luas total bahayanya 136.919 ha. Kecamatan dengan luasan daerah terdampak paling luas adalah Kecamatan Simeulue Timur.



Sumber: BPBD Kabupaten Simeulue, 2024

Gambar 2.16 Peta potensi Bencana Gempa di Kabupaten Simeulue

4. Bencana Tanah Longsor

Kabupaten Simeulue memiliki potensi tinggi terhadap bencana tanah longsor karena karakteristik topografi yang terdiri dari perbukitan, curah hujan yang tinggi, dan perubahan penggunaan lahan yang intensif. Tanah longsor sering terjadi di daerah dengan kemiringan yang curam, tanah labil, dan minimnya vegetasi penahan tanah. Fenomena ini diperparah oleh aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan untuk pertanian, pembangunan infrastruktur, dan penggundulan hutan. Longsor di Simeulue umumnya dipicu oleh hujan deras yang berlangsung lama, yang menyebabkan infiltrasi air ke dalam tanah, meningkatkan bobot tanah, dan memicu pergerakan massa tanah. Kecamatan seperti Simeulue Timur, Teluk Dalam, dan Salang menjadi wilayah yang paling rawan longsor karena kombinasi topografi perbukitan dan tingginya curah hujan di daerah ini. Selain itu, aktivitas pembukaan lahan yang mengurangi tutupan vegetasi alami juga memperburuk stabilitas tanah, meningkatkan risiko longsor. Longsor tidak hanya mengancam pemukiman, tetapi juga merusak infrastruktur seperti jalan dan jembatan, sehingga menghambat mobilitas masyarakat.

Tabel 2.19 Luas Ancaman Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Simeulue

Kecamatan	Luas Ancaman (ha)	Tingkat Ancaman Dominan
Alafan	1.227	Sedang
Salang	7.396	Sedang
Simeulue Barat	6.423	Sedang
Simeulue Cut	3.325	Tinggi
Simeulue Tengah	9.770	Sedang
Simeulue Timur	9.207	Sedang
Teluk Dalam	6.455	Tinggi
Teupah Barat	11.048	Sedang
Teupah Selatan	10.478	Sedang
Teupah Tengah	6.019	Sedang
Total Luas	61.568	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Simeulue, 2024

Pengkajian indeks bencana tanah longsor di Kabupaten Simeulue didapat total wilayah yang terdampak akibat bencana tanah longsor adalah sebesar 37,81% dari luasan daerah kabupaten. Kelas bahaya bencana longsor dominan adalah sedang dengan luas total bahayanya 61.568 ha. Luasan daerah yang terdampak yang paling tinggi terjadi di Kecamatan Teupah Barat.

Untuk mengurangi potensi longsor, langkah mitigasi seperti penanaman kembali hutan, pengelolaan lahan berbasis konservasi, dan pembangunan infrastruktur pengendalian longsor sangat penting. Selain itu, edukasi masyarakat tentang bahaya longsor dan pemetaan zona rawan menjadi upaya yang diperlukan untuk mengurangi dampak bencana ini. Dengan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, potensi bencana longsor di Kabupaten Simeulue dapat diminimalkan, sehingga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan dapat lebih terjamin.



Sumber: BPBD Kabupaten Simeulue, 2024

Gambar 2.17 Peta potensi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Simeulue

5. Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan

Kabupaten Simeulue memiliki potensi kebakaran lahan dan hutan yang terjadi terutama selama musim kemarau panjang atau saat kondisi cuaca ekstrem seperti angin kencang. Meskipun Simeulue memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi, periode kemarau dapat mengeringkan vegetasi, meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Faktor utama penyebab kebakaran di wilayah ini adalah aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan dengan metode pembakaran, kelalaian, atau kurangnya pengelolaan yang baik di kawasan hutan dan lahan pertanian.

Wilayah yang paling rentan terhadap kebakaran adalah hutan sekunder, semak belukar, dan area pertanian yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Aktivitas pembukaan lahan untuk pertanian atau perkebunan sering kali menggunakan pembakaran sebagai metode murah dan cepat, meskipun praktik ini dilarang. Kebakaran lahan dan hutan tidak hanya merusak ekosistem lokal yang kaya keanekaragaman hayati, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas udara, memengaruhi kesehatan masyarakat, serta mengancam mata pencaharian petani dan nelayan jika dampaknya meluas hingga ke perairan pesisir.

Kelas bahaya dominan untuk bencana Kebakaran Hutan dan Lahan adalah Sedang dengan luas total bahayanya 23.392 ha dengan jumlah desa yang terdampak adalah sebanyak 370 desa. Kecamatan dengan luasan daerah terdampak paling luas adalah Kecamatan Simeulue Timur.

Tabel 2.20 Luas Ancaman Bencana kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Simeulue

Kecamatan	Luas Ancaman (ha)	Tingkat Ancaman Dominan
Alafan	3.529	Sedang
Salang	2.883	Tinggi
Simeulue Barat	1.956	Sedang
Simeulue Cut	1.899	Tinggi
Simeulue Tengah	7.853	Sedang
Simeulue Timur	5.968	Sedang
Teluk Dalam	1.524	Tinggi
Teupah Barat	7.161	Tinggi
Teupah Selatan	7.631	Sedang
Teupah Tengah	4.235	Sedang
Total Luas	23.392	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Simeulue, 2024

Untuk mengurangi risiko kebakaran lahan dan hutan, langkah mitigasi yang perlu dilakukan meliputi pemberlakuan larangan pembukaan lahan dengan cara pembakaran, patroli rutin di area rawan kebakaran, dan edukasi masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan. Selain itu, pengelolaan lahan berbasis konservasi, penanaman kembali pohon di area hutan yang rusak, serta penyediaan fasilitas seperti embung air dan pos pemantauan kebakaran dapat membantu mencegah kebakaran. Dengan pengelolaan yang baik dan kerja sama semua pihak, risiko kebakaran lahan dan hutan di Simeulue dapat diminimalkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: BPBD Kabupaten Simeulue, 2024

Gambar 2.18 Peta potensi Bencana Kebakaran Lahan di Kabupaten Simeulue

2.1.2. Demografi

2.1.2.1. Distribusi Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Simeulue pada tahun 2012 sebesar 84.724 jiwa dan pada tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 98.633 jiwa, selama kurun waktu 13 tahun terjadi peningkatan sebesar 13.909 jiwa atau 16,42 untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Teupah Selatan	8,788	8,885	8,983	9,041	9,108	8,974	9,232	9,335	9,030	9,054	9,098	9.444	9.591
2	Simeulue Timur	24,998	25,731	26,365	27,081	27,530	26,082	27,185	27,217	27,569	27,925	28,349	28.830	29.280
3	Teupah Barat	7,388	7,504	7,620	7,827	7,903	7,972	8,172	8,176	8,011	8,054	8,115	8.378	8.509
4	Teupah Tengah	5,927	5,995	6,063	6,162	6,294	6,314	6,622	6,676	6,593	6,649	6,720	6.895	7.003
5	Simeulue Tengah	6,461	6,570	6,679	6,765	6,880	7,026	7,360	7,442	7,312	7,409	7,523	7.647	7.766
6	Teluk Dalam	4,999	5,084	5,169	5,262	5,398	5,404	5,592	5,647	5,459	5,492	5,538	5.709	5.798
7	Simeulue Cut	3,051	3,088	3,126	3,145	3,162	3,201	3,378	3,419	3,382	3,420	3,466	3.537	3.592
8	Salang	8,029	8,173	8,318	8,416	8,476	8,361	8,835	8,938	8,818	8,907	9,016	9.222	9.366
9	Simeulue Barat	10,447	10,533	10,619	10,707	10,816	10,997	11,717	11,906	11,763	11,898	12,061	12.302	12.494
10	Alafan	4,636	4,643	4,656	4,711	4,724	4,728	4,884	4,968	4,928	4,954	4,990	5.154	5.234
	Jumlah	84,724	86,206	87,598	89,117	90,291	90,825	92,977	93,724	92,865	93,762	94,876	97.118	98.633

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Simeulue pada periode 2013–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi antar kecamatan maupun antar tahun. Pada awal periode (2013–2016), laju pertumbuhan penduduk relatif rendah dan terkendali dengan rata-rata di bawah 2%. Namun, pada tahun 2018 terjadi lonjakan signifikan di hampir semua kecamatan, misalnya di Simeulue Barat (6,55%), Simeulue Cut (5,53%), dan Salang (5,67%).

Setelah itu, tren pertumbuhan kembali menurun pada tahun 2019–2021, bahkan di beberapa kecamatan mencapai di bawah 1%. Sementara itu, pada tahun 2022–2023 terjadi variasi kembali dengan peningkatan di beberapa kecamatan, seperti Teupah Selatan (3,80% pada 2023) dan Alafan (3,29% pada 2023).

Pada tahun 2024, angka pertumbuhan penduduk tampak seragam di seluruh kecamatan, yaitu sekitar 1,55–1,57%, sehingga rata-rata Kabupaten Simeulue berada pada 1,56%. Kondisi ini mencerminkan bahwa secara umum pertumbuhan penduduk Simeulue bergerak fluktuatif, dengan puncak tertinggi pada 2018, namun cenderung kembali stabil pada tahun terakhir periode pengamatan, untuk lebih lanjut dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2011-2024

Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Teupah Selatan	1,10	1,10	0,65	0,74	- 1,47	2,87	1,12	- 3,27	0,27	0,49	3,80	1,56
Simeulue Timur	2,93	2,46	2,72	1,66	- 5,26	4,23	0,12	1,29	1,29	1,52	1,70	1,56
Teupah Barat	1,57	1,55	2,72	0,97	0,87	2,51	0,05	- 2,02	0,54	0,76	3,24	1,56
Teupah Tengah	1,15	1,13	1,63	2,14	0,32	4,88	0,82	- 1,24	0,85	1,07	2,60	1,57
Simeulue Tengah	1,69	1,66	1,29	1,70	2,12	4,75	1,11	- 1,75	1,33	1,54	1,65	1,56
Teluk Dalam	1,70	1,67	1,80	2,58	0,11	3,48	0,98	- 3,33	0,60	0,84	3,09	1,56
Simeulue Cut	1,21	1,23	0,61	0,54	1,23	5,53	1,21	- 1,08	1,12	1,35	2,05	1,55
Salang	1,79	1,77	1,18	0,71	- 1,36	5,67	1,17	- 1,34	1,01	1,22	2,28	1,56
Simeulue Barat	0,82	0,82	0,83	1,02	1,67	6,55	1,61	- 1,20	1,15	1,37	2,00	1,56
Alafan	0,15	0,28	1,18	0,28	0,08	3,30	1,72	- 0,81	0,53	0,73	3,29	1,55
Total	1,75	1,61	1,73	1,32	- 1,36	4,40	0,80	- 0,92	0,97	1,19	2,36	1,56

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue

2.1.2.2. Kepadatan Penduduk

Sampai akhir tahun 2024, distribusi penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Simeulue Timur dengan jumlah 29.280 jiwa (29,69%) dan Kecamatan Simeulue Cut berpenduduk terkecil yaitu 3.592 jiwa (3,64%). Kepadatan penduduk pada tahun 2024 di Kabupaten Simeulue yaitu 53,66 jiwa/Km², Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Simeulue Timur sebesar 166,39 jiwa/km², dan terendah Kecamatan Teluk Dalam dengan kepadatan penduduk sebesar 25,81 jiwa/km². Secara rinci Kepadatan Penduduk Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.23 Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2024 Per Kecamatan

Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Teupah Selatan	39,54	39,98	40,42	40,68	40,98	40,38	41,54	42,00	40,63	40,74	40,94	42,49	43,16
Simeulue Timur	142,06	146,22	149,83	153,90	156,45	148,22	154,49	154,67	156,67	158,69	161,10	163,83	166,39
Teupah Barat	50,35	51,14	51,93	53,34	53,86	54,33	55,69	55,72	54,60	54,89	55,31	57,10	57,99
Teupah Tengah	70,82	71,63	72,44	73,62	75,20	75,44	79,12	79,77	78,77	79,44	80,29	82,38	83,67
Simeulue Tengah	57,44	58,41	59,38	60,14	61,17	62,46	65,43	66,16	65,01	65,87	66,88	67,99	69,04
Teluk Dalam	22,25	22,63	23,01	23,42	24,03	24,05	24,89	25,13	24,30	24,44	24,65	25,41	25,81
Simeulue Cut	86,19	87,23	88,31	88,84	89,32	90,43	95,43	96,58	95,54	96,61	97,91	99,92	101,47
Salang	40,35	41,08	41,81	42,30	42,60	42,02	44,41	44,92	44,32	44,77	45,32	46,35	47,07
Simeulue Barat	23,42	23,61	23,81	24,00	24,25	24,65	26,27	26,69	26,37	26,67	27,04	27,58	28,01
Alafan	24,16	24,20	24,27	24,55	24,62	24,64	25,45	25,89	25,68	25,82	26,01	26,86	27,28
Total	46,09	46,90	47,66	48,48	49,12	48,45	50,58	50,99	50,52	51,01	51,62	52,84	53,66

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue (Data Diolah)

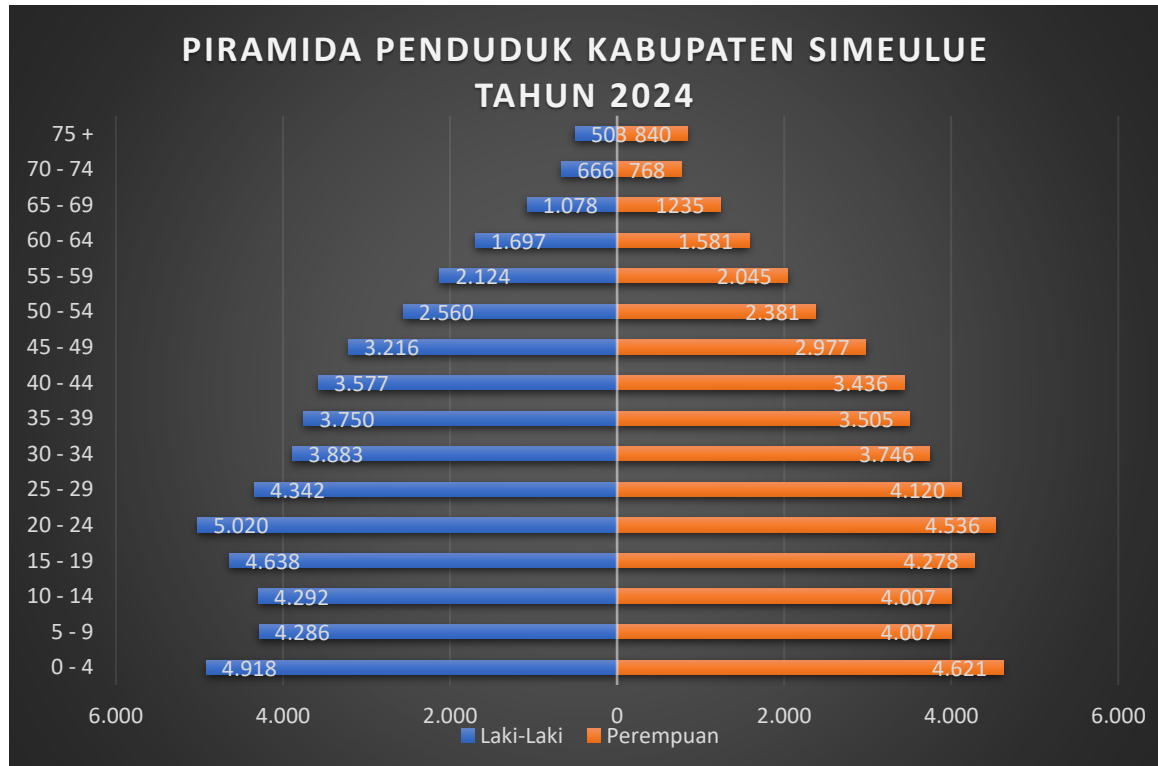
2.1.2.3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Simeulue pada tahun 2024, yaitu sebanyak 50.550 jiwa laki-laki (51,25%) dan perempuan sebanyak 48.083 jiwa (48,75%), dengan komposisi sex ratio sebesar 105. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Simeulue pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar Piramida Penduduk.

Tabel 2.24 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Simeulue Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	Teupah Selatan	4.860	4.731	9.591	103
2	Simeulue Timur	15.028	14.252	29.280	105
3	Teupah Barat	4.382	4.127	8.509	106
4	Teupah Tengah	3.519	3.484	7.003	101
5	Simeulue Tengah	3.951	3.815	7.766	104
6	Simeulue Cut	2.981	2.817	5.798	106
7	Teluk Dalam	1.834	1.758	3.592	104
8	Salang	4.771	4.595	9.366	104
9	Simeulue Barat	6.508	5.986	12.494	109
10	Alafan	2.716	2.518	5.234	108
	Jumlah	50.550	48.083	98.633	105

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Simeulue



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Simeulue

Gambar 2.18 Piramida Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2024

2.1.2.4. Komposisi Penduduk

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif dengan penduduk usia produktif, biasanya dinyatakan dalam persentase dengan rumus Rasio Ketergantungan sama dengan 100 dikali Usia nonproduktif dibagi Usia produktif. Dimana Usia nonproduktif sama dengan penduduk usia 0–14 tahun (anak-anak) dan 65 tahun ke atas (lansia) sedangkan Usia produktif sama dengan penduduk usia 15–64 tahun.

Rasio ketergantungan Kabupaten Simeulue pada periode 2019–2024 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan fluktuasi kecil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 rasio ketergantungan tercatat 46,44, kemudian sedikit menurun menjadi 46,25 di tahun 2020. Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 49,31, yang merupakan angka tertinggi dalam periode ini, seiring meningkatnya jumlah penduduk usia muda (0–14 tahun). Setelah itu, rasio kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 45,62, lalu bergerak stabil pada kisaran 46,09–46,31 di tahun 2023 dan 2024.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) menanggung sekitar 46–49 penduduk usia nonproduktif (0–14 tahun dan 65+ tahun). Kondisi ini mencerminkan beban ketergantungan penduduk Simeulue masih relatif moderat dan cukup stabil sepanjang periode pengamatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25 Rasio Ketergantungan (*depedency rasio*) Penduduk di Kabupaten Simeulue Tahun 2019-2024

Tahun	Usia 0-14	Usia 15-64	Usia 65+	Rasio Ketergantungan
2019	25.199	64.003	4.522	46,44
2020	25.270	63.496	4.099	46,25
2021	27.127	62.796	3.839	49,31
2022	25.199	65.155	4.522	45,62
2023	25.833	66.477	4.808	46,09
2024	26.131	67.412	5.090	46,31

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue Tahun 2024

2.1.2.5. Kondisi Sosial Penduduk

Secara sosiologi penduduk Simeulue sangat dipengaruhi dengan nilai Agama Islam baik dari sisi tata pemerintahan maupun sisi kehidupan bermasyarakat. Tata laksana pemerintahannya dipengaruhi dengan Syariat Islam dimana Simeulue memiliki kelembagaan Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dan Majelis

Permusyawaratan Ulama (MPU). Sedangkan secara adat budaya Simeulue memiliki lembaga Majeli Adat Aceh dengan tata nilai adatnya.

Simeulue memiliki khasanah budaya yang cukup tinggi dengan berbagai jenis kesenian tradisional. Salah satunya adalah nyayian yang dikenal dengan "*Simeulue Ate Fulawan*". Ada juga debus, tari angguk dan nandong. Dari sisi budaya, '*Smong*' merupakan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Simeulue yang terus dilestarikan hingga saat ini. Kearifan lokal inilah yang telah menyelamatkan masyarakat Simeulue dari bencana tsunami serta menjadi sarana paling efektif untuk peringatan dini dari bencana tsunami.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Simeulue yaitu ditinjau dari 2 aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Ekonomi dan Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

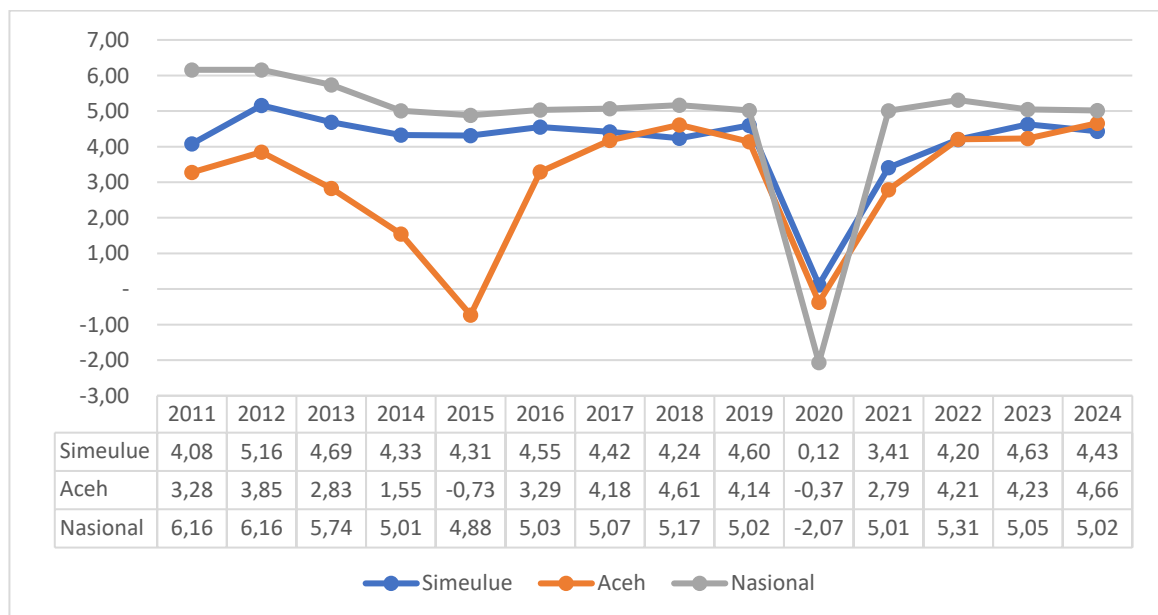
Kesejahteraan Ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi, indeks gini, NTP/NTN/NTPI, angka kemiskinan, TPT, dan IPM).

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan kondisi ekonomi yang terjadi dalam skala Nasional dan Aceh juga mempengaruhi perkembangan ekonomi di Kabupaten Simeulue. Kinerja perekonomian Kabupaten Simeulue mencerminkan kondisi yang membaik, namun masih rentan terhadap gejolak ekonomi ataupun dinamika yang terjadi secara eksternal. Kurun waktu 2011-2024, aktivitas ekonomi Kabupaten Simeulue tumbuh berfluktuasi serta tumbuh dibawah dari pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue sebesar 4,42 persen. Angka pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 4,13 persen, namun dibawah dari pertumbuhan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 5.07 persen.

Tahun 2020, aktivitas ekonomi Simeulue mengalami perlambatan dan implikasinya pertumbuhan ekonomi menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perlambatan ekonomi tidak hanya terjadi di Simeulue saja, ekonomi Aceh dan nasional juga mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2020. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Simeulue sebesar 2,85 persen tahun 2021, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2020) sebesar 0,12 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Aceh pada Tahun 2021 sebesar 2,79 persen dan Nasional sebesar 5,02 persen, Dan selanjutnya pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Simeulue meningkat mencapai angka 3,62 persen. maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi sudah membaik.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, 2025

Gambar 2.19 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simeulue, Aceh dan Nasional Tahun 2011-2024

Jika dilihat dari kontribusi pertumbuhan ekonomi persektoral, yaitu distribusi PDRB Aceh berdasarkan ADHB menurut Lapangan Usaha (Tabel 2.27), sektor primer masih mendominasi komposisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue. Kurun periode 2012-2024, penyumbang terbesar PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor tersebut tumbuh rata-rata 1,32 persen pertahun. Penyumbang kedua yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, menyusul sektor konstruksi dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sementara kontributor terkecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang serta sektor pengadaan listrik dan gas.

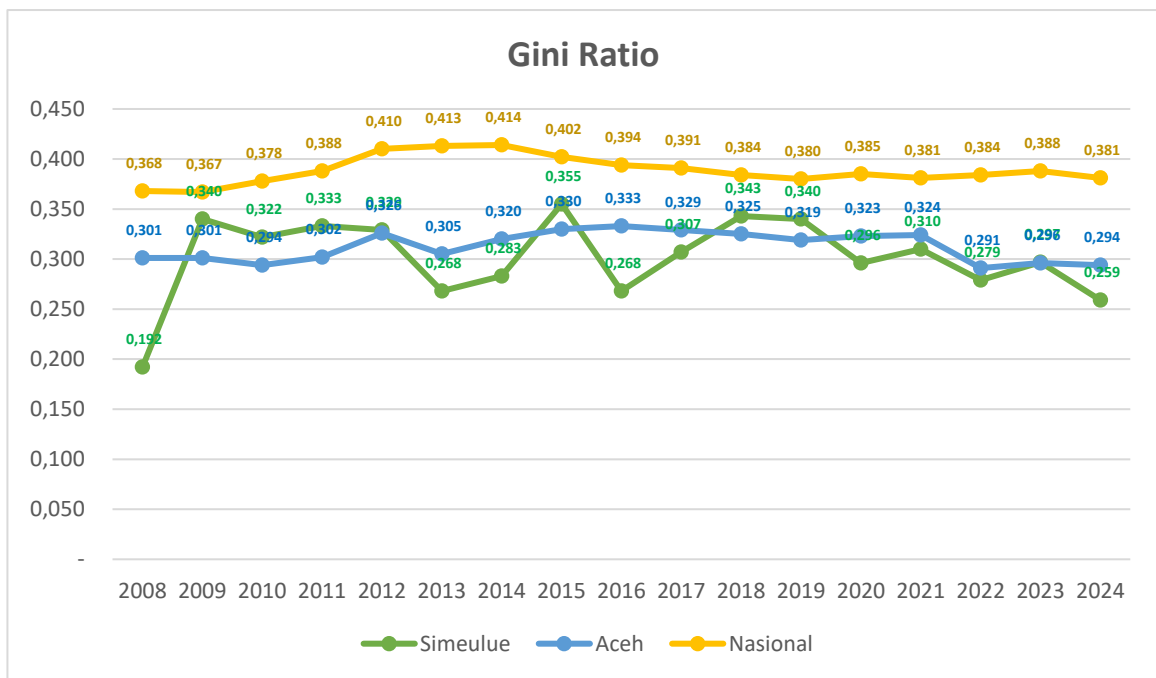
**Tabel 2.26 Distribusi PDRB ADHB Kab. Simeulue Menurut lapangan Usaha 2012-2024
(dalam jutaan rupiah)**

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	474.687,30	513.524,80	550.342,10	593.348,80	630.396,00	668.294,50	711.404,60	757.318,60	793.622,60	845.936,70	958.185,60	1.095.562,80	1.199.261,10
B	Pertambangan dan Penggalian	24.004,80	26.595,70	29.473,10	31.758,20	33.489,30	33.704,60	34.492,00	35.773,70	36.030,20	36.405,80	39.599,60	42.268,00	42.811,00
C	Industri Pengolahan	19.236,80	20.302,90	21.916,60	23.524,70	25.117,00	27.529,80	29.412,30	29.829,90	29.788,20	32.424,50	38.562,70	40.633,60	42.065,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.352,60	2.426,70	2.664,70	2.911,80	3.347,00	3.836,90	4.166,00	4.447,10	4.606,00	4.614,80	4.853,60	5.253,80	5.598,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	115,40	129,40	144,20	164,70	201,20	223,80	245,70	279,30	277,50	294,00	332,10	348,90	382,50
F	Konstruksi	110.902,70	121.668,30	135.259,30	141.952,20	149.933,50	164.959,90	177.430,20	192.746,30	214.056,00	222.463,00	234.159,40	254.474,90	262.198,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	154.327,30	168.501,60	187.597,40	203.455,10	229.709,80	247.855,90	271.430,00	292.902,30	284.856,90	320.916,90	349.999,90	384.731,30	417.821,80
H	Transportasi dan Pergudangan	42.590,50	46.895,60	50.534,50	53.186,70	55.965,40	55.937,10	58.738,20	62.133,40	47.641,20	54.387,20	61.192,50	72.698,70	79.150,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18.069,70	19.831,70	21.651,50	23.995,90	26.940,80	30.618,20	33.933,80	37.702,30	36.672,00	34.971,20	45.768,50	52.597,80	54.688,70
J	Informasi dan Komunikasi	766,40	839,50	935,80	62.618,30	65.949,60	69.849,40	71.062,80	75.552,60	84.370,10	95.278,80	109.721,80	116.145,70	123.206,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	17.303,30	18.992,10	20.715,70	30.750,40	33.162,00	36.357,20	39.427,50	44.365,70	44.412,20	46.341,50	50.437,50	45.366,40	51.855,40
L	Real Estat	52.960,10	56.590,40	58.620,60	59.858,10	65.496,20	68.949,20	74.481,60	81.784,10	83.915,00	89.595,50	95.720,70	100.327,20	103.160,40
M, N	Jasa Perusahaan	24.131,20	25.723,10	27.802,60	2.500,90	2.727,60	2.994,00	3.269,10	3.592,80	3.585,00	3.738,50	4.279,10	4.331,80	4.467,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	45.743,00	49.082,70	54.361,50	270.111,10	297.164,80	319.853,30	352.131,00	386.587,10	385.579,90	427.241,80	423.249,20	438.046,40	461.697,30
P	Jasa Pendidikan	1.916,00	2.117,20	2.290,60	51.515,20	57.397,90	63.606,90	70.435,20	81.272,00	87.405,50	94.155,90	97.230,20	100.108,00	109.861,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	194.870,00	222.947,20	246.314,80	73.574,90	79.478,80	85.107,50	92.060,50	103.984,00	114.819,30	126.909,10	146.829,30	151.415,60	161.094,30
R, S, T, U	Jasa lainnya	38.666,70	42.033,60	46.351,60	14.893,60	16.096,80	17.360,20	18.716,00	21.614,40	22.724,30	24.616,30	27.906,60	30.790,60	31.436,10
	Produk Domestik Regional Bruto	1.222.643,80	1.338.202,50	1.456.976,60	1.640.120,60	1.772.573,70	1.897.038,40	2.042.836,50	2.211.885,60	2.274.361,90	2.460.291,40	2.688.028,30	2.935.101,30	3.150.757,60

Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, 2024

2.2.1.2. Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai *gini ratio*, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien *gini ratio* 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30. Nilai Indeks Gini Kabupaten Simeulue selama kurun waktu 12 tahun berada pada kisaran 0,2 – 0,3, yang tergolong dalam kategori rendah, namun pada tahun 2023 tingkat pemerataan pendapatan masuk dalam kategori sedang. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan merupakan prestasi Pemerintah Kabupaten Simeulue yang terus ditingkatkan dan dipertahankan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber Badan Pusat Statistik Kabupate Simeulue, 2024 (data diolah)

Gambar 2.20 Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2024

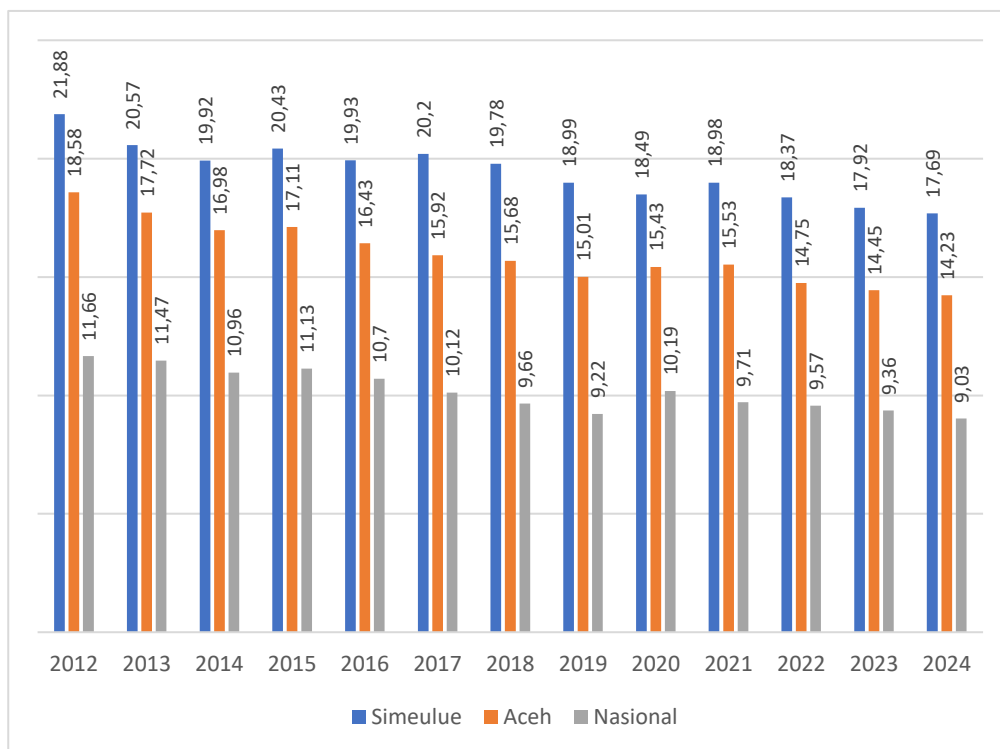
2.2.1.3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi indikator yang menunjukkan kesejahteraan di tingkat petani. Pada dasarnya nilai NTP ini juga merupakan gambaran sejauh mana pendapatan yang diperoleh petani dari hasil berproduksi dan yang dikeluarkannya untuk kebutuhan konsumsi. NTP tersebut dibagi kedalam beberapa sub sektor pertanian diantaranya: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Selain itu, NTP juga merupakan indikator yang memberikan gambaran bagaimana kehidupan petani ditopang oleh usaha sektor pertaniannya. Nilai tukar petani memperlihatkan dua sisi kehidupan petani yaitu yang pertama sisi pendapatan petani yang menopang seluruh pembiayaan hidup rumah tangga petani dari hasil penjualan produk pertaniannya. Sisi yang kedua adalah sisi pengeluaran untuk kelangsungan rumah tangga petani.

NTP Kabupaten Simeulue merujuk ke NTP Provinsi Aceh yaitu sebesar 119,25 pada tahun 2024. NTP Aceh melebihi dari 100, menandakan kondisi usaha tani di wilayah tersebut relatif menguntungkan.

2.2.1.4. Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Simeulue dari tahun 2012-2024 mengalami penurunan. Pada Tahun 2024 angka kemiskinan Kabupaten Simeulue terhitung sebesar 17,69 persen, menurun sebesar 0,23 persen dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 17,92 persen. Persentase angka kemiskinan Kabupaten Simeulue masih jauh diatas Provinsi Aceh dan Nasioanal dimana pada tahun 2024 angka kemiskinan Provinsi Aceh telah mencapai 14,23 persen dan nasional diangka 9,03 persen. Upaya penanggulangan kemiskinan baik oleh pemerintah daerah serta dukungan dari pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat terus dilakukan melalui pemulihan ekonomi daerah dan pemulihan ekonomi nasional



Gambar 2.21 Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2024

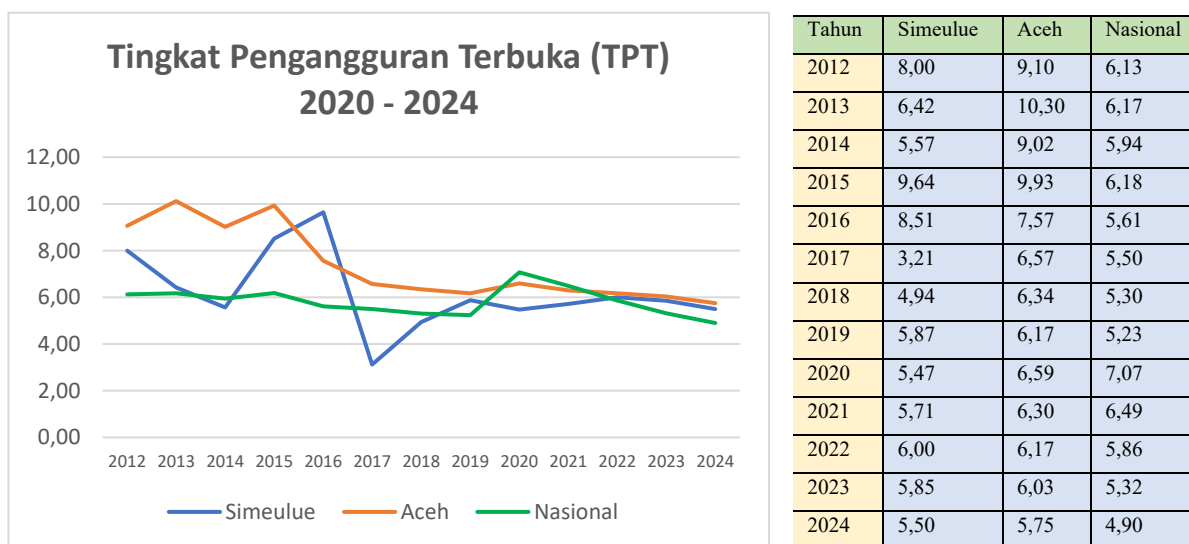
Tabel 2.27 Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh dan Kabupaten/Kota Se Aceh Tahun 2013-2024 (Maret)

Wilayah	Tahun											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	11,47	10,96	11,13	10,70	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36	9,03
Aceh	17,72	16,98	17,11	16,43	15,92	15,68	15,01	15,43	15,53	14,75	14,45	14,23
Simeulue	20,57	19,92	20,43	19,93	20,20	19,78	18,99	18,49	18,98	18,37	17,92	17,69
Aceh Singkil	18,73	17,77	21,72	21,60	22,11	21,25	20,78	20,20	20,36	19,18	19,15	19,06
Aceh Selatan	13,44	12,79	13,24	13,48	14,07	14,01	13,09	12,78	12,61	12,38	12,10	12,02
Aceh Tenggara	14,39	13,75	14,91	14,46	14,86	14,29	13,43	13,21	13,41	12,87	12,45	11,99
Aceh Timur	16,59	15,88	15,85	15,06	15,25	14,49	14,08	14,08	14,45	13,91	13,39	13,26
Aceh Tengah	17,76	16,99	17,51	16,64	16,84	15,58	15,55	15,08	15,26	14,59	14,38	14,27
Aceh Barat	23,70	22,97	21,46	20,38	20,28	19,31	18,79	18,34	18,81	17,93	17,86	17,60
Aceh Besar	16,88	16,13	15,93	15,55	15,41	14,47	13,92	13,84	14,05	13,80	13,38	13,21
Pidie	21,12	20,29	21,18	21,25	21,35	20,47	19,46	19,39	19,58	18,49	18,78	18,59
Bireuen	17,65	16,94	16,94	15,95	15,87	14,31	13,56	13,06	13,25	12,51	12,12	12,10
Aceh Utara	20,34	19,58	19,20	19,46	19,78	18,27	17,39	17,02	17,43	16,96	16,64	16,11
Aceh Barat Daya	18,92	17,99	18,25	18,03	18,31	17,59	16,59	15,93	16,34	15,86	15,43	15,32
Gayo Lues	22,33	21,43	21,95	21,86	21,97	20,70	19,87	19,32	19,64	18,87	18,82	18,30
Aceh Tamiang	15,13	14,58	14,57	14,51	14,69	14,21	13,38	13,00	13,34	12,69	12,51	12,17
Nagan Raya	21,75	20,65	19,53	19,54	19,40	19,07	17,97	17,87	18,23	17,13	17,25	16,94
Aceh Jaya	17,53	16,52	15,93	15,01	14,85	14,85	13,30	12,87	12,23	12,52	12,42	12,25
Bener Meriah	23,47	22,45	21,55	21,43	21,14	20,13	19,38	18,89	19,16	18,30	18,31	18,18
Pidie Jaya	22,70	21,78	21,40	21,18	21,82	20,17	19,17	18,29	19,55	18,45	18,40	18,28
Kota Banda Aceh	8,03	7,78	7,72	7,41	7,44	7,25	7,22	6,90	7,61	7,13	7,04	6,95
Kota Sabang	18,30	17,02	17,02	17,33	17,66	17,62	16,94	15,32	14,60	14,60	14,59	14,58
Kota Langsa	12,62	12,08	11,62	11,98	12,04	11,29	10,76	10,90	10,96	10,90	10,53	10,33
Kota Lhokseumawe	12,67	12,22	11,62	11,92	11,81	11,18	11,00	10,96	11,06	10,62	10,73	10,44
Kota Subulussalam	20,69	19,72	20,39	19,57	18,91	18,51	17,95	17,60	16,65	16,94	16,41	16,38

Dari data table 2.27. diatas terlihat bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Simeulue tahun 2024 berada diurutan ke 5 tertinggi se Provinsi Aceh. Disamping menyelesaikan angka kemiskinan yang masih tinggi, Kabupaten Simeulue harus berpacu menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang saat ini berada pada posisi 3,80 persen atau sebesar 3.700 jiwa.

2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Dalam 11 (sebelas) tahun terakhir TPT Kabupaten Simeulue mengalami fluktuatif. Angka TPT Kabupaten Simeulue terendah sempat terjadi pada tahun 2017 sebesar 3,12 persen, tetapi kembali mengalami kenaikan hingga tahun 2022 sebesar 6,00 persen, meskipun demikian TPT Kabupaten Simeulue masih lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT Provinsi Aceh sebesar 6,17 persen namun lebih tinggi dari TPT Nasional sebesar 5,86 persen. Capaian penurunan TPT Kabupaten Simeulue Tahun 2022 telah melebihi target akhir RPJMD Kabupaten Simeulue tahun 2022, yaitu sebesar 7 persen. TPT Kabupaten Simeulue tahun 2007-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.25.



Sumber: BPS Kab. Simeulue

Gambar 2.25 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2024

Antara pertumbuhan ekonomi dengan TPT pada kondisi normal adalah hubungan terbalik, yaitu semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka TPT semakin rendah, dan sebaliknya. Hal ini karena banyak sektor ekonomi mengalami kemajuan dan menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran berkurang. Dengan asumsi bahwa rasio antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tetap, artinya tidak ada pergeseran secara signifikan terhadap pola produksi dan teknologi yang digunakan. Dengan demikian, tidak ada perubahan pola produksi padat karya ke padat modal ataupun dengan penggunaan alat berteknologi yang menggunakan lebih sedikit tenaga kerja dalam berproduksi.

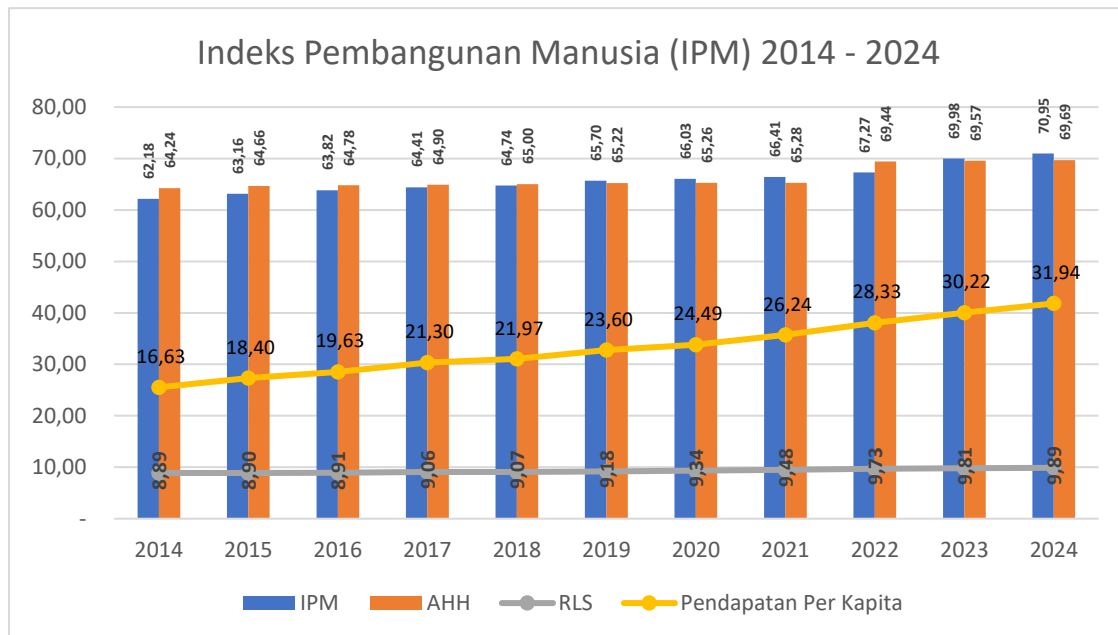
2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian kemajuan pembangunan suatu negara (daerah) yang dipresentasikan oleh dimensi Angka Harapan Hidup pada Waktu Lahir (*Life Expectancy at Birth*), Angka harapan sekolah sebagai pengganti dari variabel Melek Huruf Penduduk Dewasa (*Literacy Rate*), Rata-rata Lamanya Sekolah Penduduk Dewasa (*Mean Year of Schooling*), dan Kemampuan Daya Beli (*Purchasing Power Parity*).

Gambar 2.18 memperlihatkan bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2022 terus mengalami peningkatan dimana dari 62,18 pada tahun 2014 menjadi 67,27 pada tahun 2022 atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,09.

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Simeulue masih dibawah pencapaian rata-rata nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh dan

Nasional. Tahun 2022, IPM Provinsi Aceh sebesar 72,80, sedangkan IPM Nasional sebesar 72,91.



Gambar 2.23 IPM, AHH, RLS dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Simeulue 2014-2024

2.2.1.7. Laju Inflasi

Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Simeulue kondisi Maret 2023 yang diperoleh dari BPS Simeulue, terjadi kenaikan harga secara kumulatif sebesar 2,31%. Komoditas penyumbang kenaikan harga diantaranya Beras, Daging Sapi dan Cabe Merah. Perkembangan Inflasi Kabupaten Simeulue dari minggu ke-3 Februari s.d minggu ke-5 Maret mengalami fluktuasi. sebagaimana gambar 2.27 dibawah, kondisi Maret 2023 sebesar 0,43 persen lebih tinggi dari bulan februari 2023 yaitu sebesar -0,56 persen.



Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2024

Gambar 2.24 Indikator Perkembangan Harga Kondisi Januari – Februari Tahun 2024

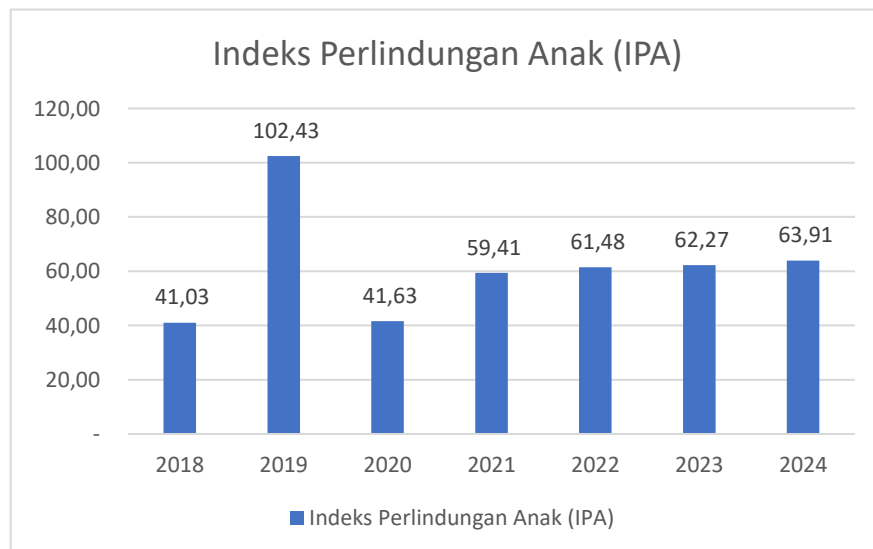
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Berdasarkan hasil analisis kinerja atas fokus aspek kesejahteraan sosial budaya dilakukan terhadap indikator-indikator antara lain :

1. Indeks Keluarga Sehat
2. Indeks Kualitas Keluarga
3. Indeks Perlindungan Anak
4. Indeks Pembangunan Gender/Indek Pemberdayaan Gender/Indeks Ketimpangan Gender
5. Indeks Pembangunan Pemuda
6. Indeks Pembangunan Kebudayaan
7. Indikator Lain-lainnya.

2.2.2.1. Indeks Perlindungan Anak

Angka Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Simeulue mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, IPA berada diangka 41,03 mengalami kenaikan yang fluktuatif dalam kurun waktu 7 tahun hingga ditahun 2024 IPA Kabupaten Simeulue mencapai angka 63,91. Perkembangan IPA tahun 2018 s.d. 2024 dapat terlihat pada gambar 2.28.



Sumber: BPS Kabupaten Simeulue 2024

Gambar 2.25 Indeks Perlindungan Anak

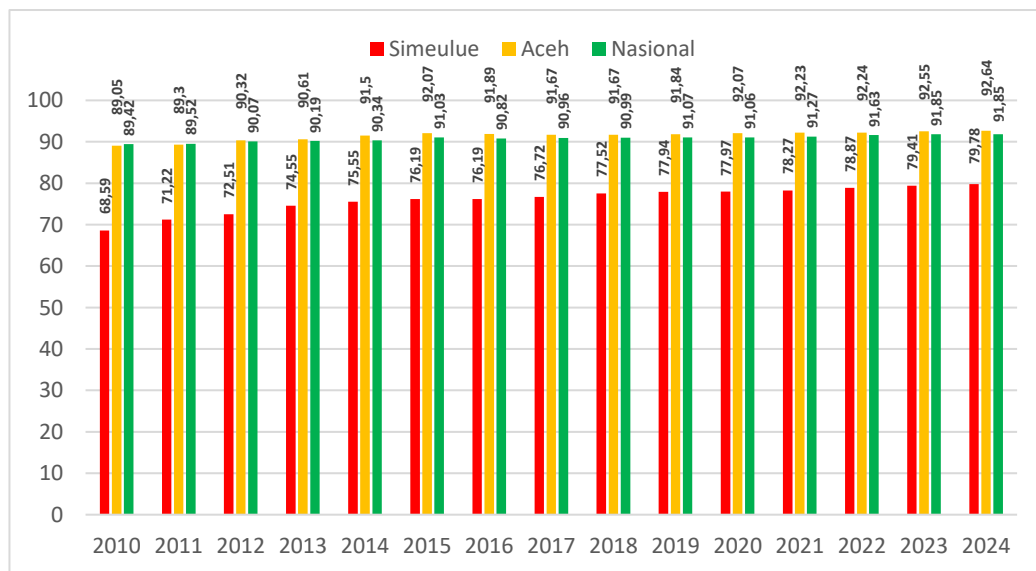
Indeks Pembangunan Gender/Indeks Pemberdayaan Gender/Indeks Ketimpangan Gender

2.2.2.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan tingkat kesetaraan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, di mana semakin mendekati angka 100 berarti kesenjangan gender semakin kecil. Pada periode 2010–2024, capaian IPG Kabupaten Simeulue konsisten berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh maupun nasional.

Meskipun demikian, IPG Simeulue menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2010 IPG tercatat sebesar 68,59, kemudian meningkat menjadi 79,78 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kesetaraan gender di Simeulue, meskipun laju pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan daerah lain di Aceh.

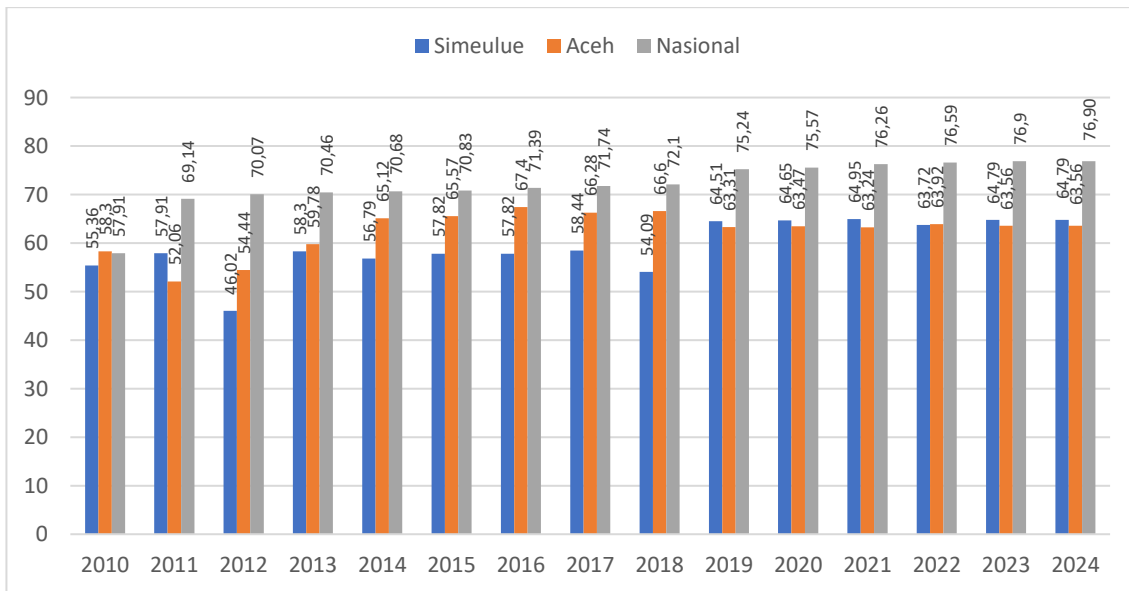
Jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, gap IPG Simeulue dengan Aceh pada 2024 adalah sekitar 12 poin, dan dengan nasional sekitar 12,86 poin. Berdasarkan perkembangan IPG kabupaten/kota di Aceh, capaian Simeulue masih berada di posisi terendah, sehingga memerlukan perhatian serius untuk mengejar ketertinggalan dan mempercepat peningkatan kesetaraan gender di wilayah ini.



Gambar 2.26 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) antara Simeulue, Aceh dan Nasional Tahun 2010 - 2024

2.2.2.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Simeulue, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan 3 (tiga) indikator, yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan



Gambar 2.27 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Simeulue, Aceh dan Nasional Tahun 2010 - 2024

Berdasarkan tren tahunan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Simeulue secara konsisten berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh maupun nasional, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.21. Pada tahun 2012, capaian IDG Simeulue sebesar 46,02 persen, kemudian meningkat menjadi 63,72 persen pada tahun 2022, atau mengalami kenaikan sekitar 17,70 poin dalam satu dekade.

Meskipun terjadi peningkatan, capaian tersebut masih terpaut cukup jauh dibandingkan dengan IDG Aceh (69,45 persen) maupun nasional (68,41 persen) pada tahun yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan gender di Simeulue terus mengalami kemajuan, namun laju peningkatannya masih perlu dipercepat agar dapat mendekati capaian provinsi dan nasional..

2.2.2.4. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks pembangunan pemuda adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Ini merupakan salah satu indikator atau barometer pembangunan kepemudaan. Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP) diukur melalui 5 dimensi yaitu 1) Pendidikan, 2) Kesehatan dan Kesejahteraan, 3) Lapangan dan Kesempatan Kerja, 4) Partisipasi dan Kepemimpinan, serta 5) Gender dan Diskriminasi. Angka IPP untuk Daerah Kabupaten Simeulue belum pernah diukur, oleh karena itu angkanya merujuk pada IPP provinsi Aceh yaitu sebesar 56,33 pada tahun 2020.

Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. Menghadapi kompleksnya permasalahan bangsa menghadapi era revolusi industri 4.0, peranan pemuda Indonesia Simeulue khususnya terlihat nyata melalui berbagai usaha-usaha kreatif yang

dilakukan dalam menggerakkan dan meningkatkan ekonomi bangsa melalui bisnis-bisnis startup, serta prestasi-prestasi yang dicapai.

Tabel 2.28 Perkembangan Jumlah Pemuda, Organisasi Pemuda, Kegiatan Kepemudaan dan Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2024

Organisasi Kepemudaan	Satuan	Tahun								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pemuda	orang	22.457	22.484	22.838	26.231	26.156	23.414	26.231	26.816	26.934
Jumlah Pemuda berprestasi	orang									
Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif	unit	20	n.a	20	20	20	20	17	17	17
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	keg.	4	n.a	2	4	4	3	5	5	5
Indeks Pembangunan Pemuda										

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kub. Simeulue, 2024

Keberadaan organisasi pemuda dan olahraga tentu tidak dapat dilihat secara mandiri saja, melainkan harus ada peran dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan peran pemuda. Sampai dengan tahun 2022, berbagai kegiatan dalam hal pembinaan terus dilaksanakan oleh pemerintah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Simeulue yang memiliki peran dalam pengembangan organisasi pemuda dan organisasi olahraga terus melakukan upaya – upaya dalam meningkatkan kapasitas pemuda tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah cabang olahraga yang dibina yang mampu menorehkan prestasi. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29 Jumlah Cabang Olah Raga Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2024

Keolahragaan	Satuan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
Cabang Olahraga Binaan	cabor					
Cabang Olahraga Berprestasi	cabor					
Atlit Olahraga Binaan	orang					
Atlit Berprestasi	orang					
Pelatih Berprestasi	orang					

Keolahragaan	Satuan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
Pelatih Olahraga Binaan	orang					
Gedung Pemuda	unit	0	0	0	0	0
Lapangan Olahraga	unit	348	248	348	353	276

Lanjutan Tabel 2.29

Keolahragaan	Satuan	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cabang Olahraga Binaan	cabor	27	28	28	28	28	28		
Cabang Olahraga Berprestasi	cabor	27	18	18	18	18	18		
Atlit Olahraga Binaan	orang								
Atlit Berprestasi	orang								
Pelatih Berprestasi	orang								
Pelatih Olahraga Binaan	orang								
Gedung Pemuda	unit	0	0	0	1	1	1		
Lapangan Olahraga	unit	n.a	278	276	276	276	276		

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Simeulue, 2024

Berdasarkan data diatas, sampai dengan tahun 2022, jumlah cabang olahraga yang dibina sebanyak 28 cabor, dan yang berprestasi sebanyak 18 cabor. Dari jumlah cabor yang dibina, jumlah cabor yang mewakili kabupaten sebanyak 22 cabor. Sedangkan data perolehan medali dapat dilihat pada tabel 2.30.

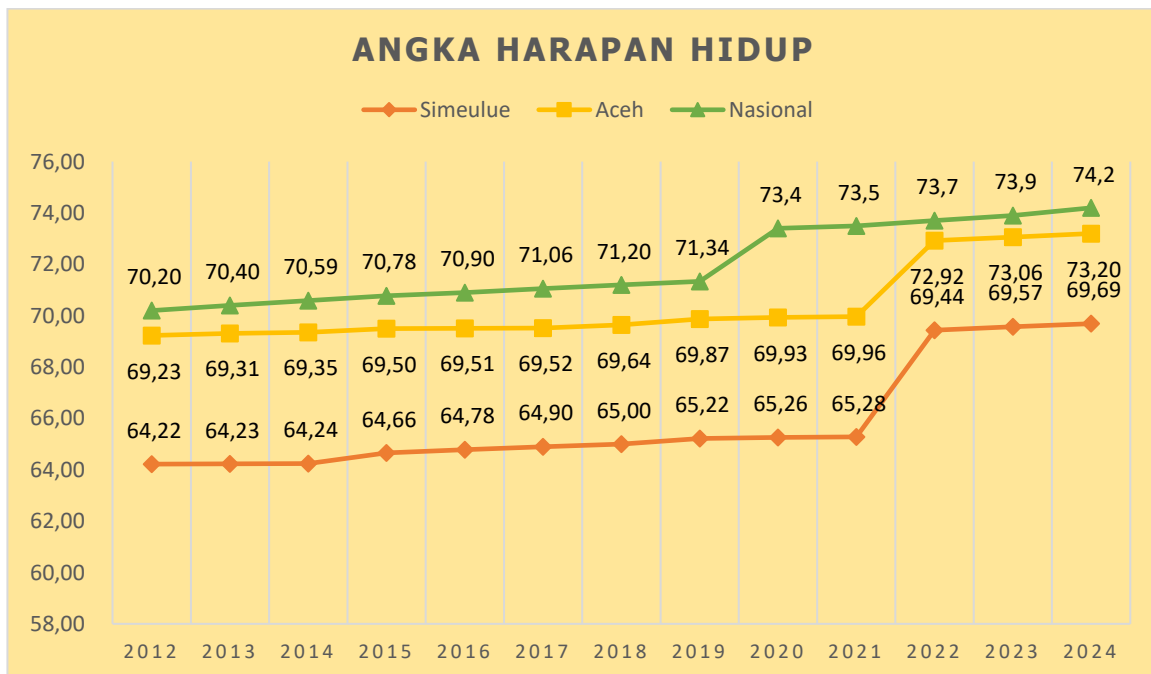
Tabel 2.30 Perolehan Mendali Dalam Pekan Olahraga Tingkat Provinsi Tahun 2022

No	Kejuaraan Tingkat Provinsi	Perolehan Mendali		
		Emas	Perak	Perunggu
1	PORDA 2022	1	0	2
2	PORA 2022	5	2	16
3	Kejurwil Piala PANGDAM	5	4	1

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kub. Simeulue, 2023

2.2.2.5. Usia Harapan Hidup

Pada tahun 2021 UHH di Kabupaten Simeulue telah mencapai 65,28 tahun dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Derajat Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan, penyehatan lingkungan, asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan pada umumnya.



Sumber : BPS Kab. Simeulue, 2025

Gambar 2.28 Usia Harapan Hidup Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh dan Nasional, Tahun 2012-2025

2.2.2.6. Angka Kematian Ibu

Masih adanya kasus kematian ibu menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya program-program yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil seperti gerakan sayang ibu, pemberian makanan tambahan ibu hamil, pelayanan kesehatan setelah melahirkan, desa siaga, dan deteksi dini ibu hamil resiko tinggi.

Untuk memperoleh angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup maka formula yang digunakan adalah Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama dikali 100.000. Angka kematian ibu di Kabupaten Simeulue dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Simeulue, Tahun 2016-2024

No	Uraian	Tahun								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1.	Jumlah kasus kematian ibu	7	4	5	5	4	5	4	5	5
2.	Jumlah kelahiran hidup	992	977	1.531	1.506	1.523	1.595	1.525	1.398	1.398
3	Angka kematian Ibu Simeulue	706	409	327	332	263	313	266	358	358
4	Angka kematian Ibu (Prov.Aceh)	167	143	139	172	n.a	223	141	132	98

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, 2024

2.2.2.7. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0- 11 bulan (termasuk neonatal) di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Untuk memperoleh angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup maka digunakan rumus sebagai berikut, jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama dikali 1.000. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Simeulue dari tahun 2016-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.32 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2024

No	Uraian	Tahun								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jumlah kasus kematian bayi	26	17	17	5	22	22	21	28	28
2.	Jumlah kelahiran hidup	992	977	1.531	1.506	1.523	1.595	1.525	1.398	1.398
3.	Angka kematian bayi (Per 1.000)	26	17	11	3	14	14	14	20	28

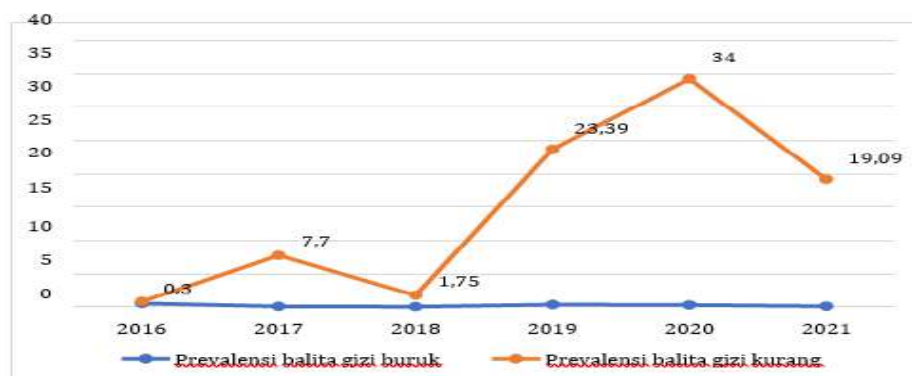
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, 2024

Angka kematian bayi pada tahun 2016-2023 cenderung fluktuatif sebagaimana tersebut pada tabel di atas. Pada tahun 2023 berada di angka 20, angka ini cenderung menurun sebesar 12 point dari tahun 2016 sebesar 26. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi angka kematian bayi senantiasa harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program gizi masyarakat serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil.

Penyebab terbesar Kematian Bayi di Kabupaten Simeulue adalah karena berat badan lahir rendah (BBLR), Asfiksia (kondisi ketika kadar oksigen di dalam tubuh berkurang) dan penyebab lain (aspirasi, Ispa, diare dll). Upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka kematian bayi dimulai dengan pola perbaikan nutrisi pada ibu hamil, peningkatan kualitas pelayanan persalinan dan peningkatan kualitas pelayanan bayi baru lahir.

2.2.2.8. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Gizi buruk pada balita dapat dilihat melalui kegiatan pemantauan status gizi (PSG). Setiap tahun dilakukan kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) dengan mengambil sejumlah sampel balita di tiap-tiap wilayah Puskesmas untuk mengetahui proporsi status gizi balita di Kabupaten Simeulue. Prevalensi balita gizi buruk dihitung dari perbandingan antara jumlah penderita gizi buruk pada anak balita (0-59 bulan) dibagi jumlah semua balita dikali 100 persen. Hasil kegiatan PSG yang ditampilkan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terlihat proporsi status gizi buruk berdasarkan berat badan berdasarkan umur (BB/U) tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,13 persen dari tahun 2016 yang sebesar 0,54 persen. Prevalensi gizi balita di Kabupaten Simeulue pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.29 Kondisi Status Gizi Balita Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2021

2.2.2.9. Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting Tahun 2021 Kabupaten Simeulue masih tinggi sebesar 25,90 persen. Lebih rendah dibandingkan dengan prevalensi Nasional sebesar 24,40 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian serius untuk menurunkan angka Stunting di Kabupaten Simeulue saat ini dan yang akan datang.

2.3. Aspek Daya Saing

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

A. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB – ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, yang dapat menggambarkan kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur perekonomian di suatu daerah.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2012-2023 selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2012 mencapai 1,22 miliar rupiah sedangkan pada tahun 2023 mencapai 2,94 miliar rupiah. Terjadi kenaikan sebesar 1.42 miliar selama kurun waktu 10 tahun.. Kontribusi terbesar diperoleh dari lapangan usaha (sektor) pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 1.095 juta rupiah atau 37,33 persen dari total PDRB. Sedangkan kontribusi terkecil diperoleh dari sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang hanya menghasilkan nilai tambah sebesar 0,35 juta rupiah atau sekitar 0,01 persen terhadap total PDRB Kabupaten Simeulue selama tahun 2023. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Simeulue dari tahun 2012 s.d 2023 disajikan dalam lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 2.33 PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2023 (dalam jutaan rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	474.687,30	513.524,80	550.342,10	593.348,80	630.396,00	668.294,50	711.404,60	757.318,60	793.622,60	845.936,70	958.185,60	1.095.562,80
B	Pertambangan dan Penggalian	24.004,80	26.595,70	29.473,10	31.758,20	33.489,30	33.704,60	34.492,00	35.773,70	36.030,20	36.405,80	39.599,60	42.268,00
C	Industri Pengolahan	19.236,80	20.302,90	21.916,60	23.524,70	25.117,00	27.529,80	29.412,30	29.829,90	29.788,20	32.424,50	38.562,70	40.633,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.352,60	2.426,70	2.664,70	2.911,80	3.347,00	3.836,90	4.166,00	4.447,10	4.606,00	4.614,80	4.853,60	5.253,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	115,40	129,40	144,20	164,70	201,20	223,80	245,70	279,30	277,50	294,00	332,10	348,90
F	Konstruksi	110.902,70	121.668,30	135.259,30	141.952,20	149.933,50	164.959,90	177.430,20	192.746,30	214.056,00	222.463,00	234.159,40	254.474,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	154.327,30	168.501,60	187.597,40	203.455,10	229.709,80	247.855,90	271.430,00	292.902,30	284.856,90	320.916,90	349.999,90	384.731,30
H	Transportasi dan Pergudangan	42.590,50	46.895,60	50.534,50	53.186,70	55.965,40	55.937,10	58.738,20	62.133,40	47.641,20	54.387,20	61.192,50	72.698,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18.069,70	19.831,70	21.651,50	23.995,90	26.940,80	30.618,20	33.933,80	37.702,30	36.672,00	34.971,20	45.768,50	52.597,80
J	Informasi dan Komunikasi	766,40	839,50	935,80	62.618,30	65.949,60	69.849,40	71.062,80	75.552,60	84.370,10	95.278,80	109.721,80	116.145,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	17.303,30	18.992,10	20.715,70	30.750,40	33.162,00	36.357,20	39.427,50	44.365,70	44.412,20	46.341,50	50.437,50	45.366,40
L	Real Estat	52.960,10	56.590,40	58.620,60	59.858,10	65.496,20	68.949,20	74.481,60	81.784,10	83.915,00	89.595,50	95.720,70	100.327,20
M, N	Jasa Perusahaan	24.131,20	25.723,10	27.802,60	2.500,90	2.727,60	2.994,00	3.269,10	3.592,80	3.585,00	3.738,50	4.279,10	4.331,80
O	Administrasi Pemerintahan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Wajib	45.743,00	49.082,70	54.361,50	270.111,10	297.164,80	319.853,30	352.131,00	386.587,10	385.579,90	427.241,80	423.249,20	438.046,40
P	Jasa Pendidikan	1.916,00	2.117,20	2.290,60	51.515,20	57.397,90	63.606,90	70.435,20	81.272,00	87.405,50	94.155,90	97.230,20	100.108,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	194.870,00	222.947,20	246.314,80	73.574,90	79.478,80	85.107,50	92.060,50	103.984,00	114.819,30	126.909,10	146.829,30	151.415,60
R, S, T, U	Jasa lainnya	38.666,70	42.033,60	46.351,60	14.893,60	16.096,80	17.360,20	18.716,00	21.614,40	22.724,30	24.616,30	27.906,60	30.790,60
	Produk Domestik Regional Bruto	1.222.643,80	1.338.202,50	1.456.976,60	1.640.120,60	1.772.573,70	1.897.038,40	2.042.836,50	2.211.885,60	2.274.361,90	2.460.291,40	2.688.028,30	2.935.101,30

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue Tahun 2024

B. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK)

PDRB harga konstan (riil) yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB berdasarkan harga konstan di Kabupaten Simeulue secara umum menunjukkan peningkatan pada periode 2012-2023. Pada tahun 2012 mencapai 1.180 miliar rupiah, pada tahun 2017 mencapai 1.467 miliar rupiah dan pada tahun 2023 mencapai 1.807 miliar rupiah. Kontribusi terbesar diperoleh dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 569,56 juta rupiah atau 33,33 persen dari total PDRB sedangkan kontribusi terkecil diperoleh dari sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang yaitu sebesar 0,18 juta rupiah atau 0,01 persen dari total PDRB. Untuk perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat lebih rinci dapat pada tabel 2.34.

Tabel 2.34 PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2024 (dalam jutaan rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	435.056,20	450.910,40	463.024,50	478.364,80	493.234,40	507.676,20	522.281,60	539.292,10	552.859,50	551.892,70	577.560,00	627.310,00
B	Pertambangan dan Penggalian	22.237,00	23.666,80	24.892,80	26.130,40	27.298,10	27.467,40	27.721,40	28.277,40	28.441,20	28.604,30	28.700,00	29.940,00
C	Industri Pengolahan	17.560,90	18.074,20	18.651,00	19.204,90	19.760,60	20.777,00	21.874,50	21.997,60	21.284,00	21.944,90	23.160,00	23.490,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.171,30	2.292,30	2.468,70	2.602,40	2.869,30	2.982,30	3.102,70	3.187,70	3.312,30	3.310,60	3.390,00	3.550,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	104,70	112,70	119,30	126,40	137,50	142,60	148,20	162,50	160,00	170,20	180,00	190,00
F	Konstruksi	101.985,40	109.511,90	115.984,10	118.883,70	123.892,80	133.768,50	140.629,70	148.569,60	162.583,90	163.014,50	163.080,00	171.300,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	147.058,00	155.749,20	164.555,40	172.867,60	182.764,60	191.730,10	201.957,30	211.371,60	198.175,40	214.238,00	226.650,00	237.630,00
H	Transportasi dan Pergudangan	39.700,50	41.669,60	43.073,30	45.188,70	47.281,00	45.804,60	47.243,80	49.492,60	37.145,20	41.690,60	43.850,00	46.430,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17.444,60	18.504,00	19.486,80	20.546,60	21.699,10	23.089,50	24.403,50	25.875,50	24.231,40	22.220,00	26.440,00	29.400,00
J	Informasi dan Komunikasi	50.550,30	52.627,90	54.233,00	57.267,60	59.483,90	63.368,70	64.380,40	67.890,60	76.059,20	84.880,00	95.100,00	99.360,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	20.801,80	21.053,10	21.610,90	23.088,90	24.307,60	25.669,30	26.774,80	28.948,40	29.065,00	28.470,10	28.490,00	25.390,00
L	Real Estat	43.298,20	45.263,90	47.798,70	50.271,70	51.458,60	53.268,70	55.482,00	58.538,60	58.909,60	60.940,10	63.020,00	64.990,00
M, N	Jasa Perusahaan	1.768,10	1.879,30	1.980,60	2.086,00	2.226,60	2.366,30	2.506,60	2.648,60	2.581,60	2.590,00	2.780,00	2.730,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	181.499,10	190.537,80	202.389,20	212.906,20	226.652,40	239.004,70	252.937,20	266.635,50	254.265,80	270.680,00	270.130,00	269.250,00
P	Jasa Pendidikan	36.742,40	38.572,10	40.585,60	43.282,00	46.183,40	49.477,80	52.655,60	56.397,00	58.455,00	59.300,00	60.450,00	61.260,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50.923,10	53.301,20	55.849,00	58.875,20	62.949,30	67.086,00	71.056,70	75.166,30	78.597,40	86.080,10	94.620,00	94.110,00
R, S, T, U	Jasa lainnya	11.249,60	11.816,60	12.393,30	12.965,90	13.645,40	14.298,80	14.996,90	16.069,20	16.284,70	17.020,00	19.030,00	20.280,00
Produk Domestik Regional Bruto		1.180.151,20	1.235.543,00	1.289.096,20	1.344.659,00	1.405.844,60	1.467.978,50	1.530.152,90	1.600.520,80	1.602.411,20	1.657.046,10	1.726.630,00	1.806.610,00

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue Tahun 2024

C. Distribusi Persentase PDRB ADHB

Distribusi PDRB menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan peranan kategori ekonomi suatu daerah. Dalam periode tahun 2012-2023, peran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menunjukkan sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Kabupaten Simeulue karena menunjukan peran terbesar terhadap PDRB. Berdasarkan data yang diperoleh, tidak terdapat perubahan peran yang signifikan dari kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB, namun terjadi penurunan dan peningkatan di beberapa sektor.

Peran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2018 sebesar 34,82 persen, menjadi 34,24 persen pada tahun 2019, pada tahun 2020 meningkat menjadi 34,89 persen, pada tahun 2021 meningkat menjadi 34,67 persen, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 35,78 persen. Kontribusi terbesar kedua diperoleh dari sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, pada tahun 2018 sebesar 17,24 persen, meningkat pada tahun 2019 menjadi 17,48 persen, pada tahun 2020 menurun menjadi 16,95 persen, pada tahun 2021 menjadi 17,20 persen, lalu menurun pada tahun 2022 menjadi 15,52 persen. Sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang masih menjadi yang terkecil yaitu 0,18 persen dan 0,01 persen. Secara keseluruhan, distribusi persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut lapangan Usaha Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2024 (%)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38,82	38,37	37,77	36,18	35,56	35,23	34,82	34,24	34,89	34,38	35,65	37,33
B	Pertambangan dan Penggalian	1,96	1,99	2,02	1,94	1,89	1,78	1,69	1,62	1,58	1,48	1,47	1,44
C	Industri Pengolahan	1,57	1,52	1,50	1,43	1,42	1,45	1,44	1,35	1,31	1,32	1,43	1,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,18	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,18	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	9,07	9,09	9,28	8,65	8,46	8,70	8,69	8,71	9,41	9,04	8,71	8,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,62	12,59	12,88	12,40	12,96	13,07	13,29	13,24	12,52	13,04	13,02	13,11
H	Transportasi dan Pergudangan	3,48	3,50	3,47	3,24	3,16	2,95	2,88	2,81	2,09	2,21	2,28	2,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,48	1,48	1,49	1,46	1,52	1,61	1,66	1,70	1,61	1,42	1,70	1,79
J	Informasi dan Komunikasi	0,06	0,06	0,06	3,82	3,72	3,68	3,48	3,42	3,71	3,87	4,08	3,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,42	1,42	1,42	1,87	1,87	1,92	1,93	2,01	1,95	1,88	1,88	1,55
L	Real Estat	4,33	4,23	4,02	3,65	3,69	3,63	3,65	3,70	3,69	3,64	3,56	3,42
M, N	Jasa Perusahaan	1,97	1,92	1,91	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,16	0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,74	3,67	3,73	16,47	16,76	16,86	17,24	17,48	16,95	17,37	15,75	14,92
P	Jasa Pendidikan	0,16	0,16	0,16	3,14	3,24	3,35	3,45	3,67	3,84	3,83	3,62	3,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,94	16,66	16,91	4,49	4,48	4,49	4,51	4,70	5,05	5,16	5,46	5,16
R, S, T, U	Jasa lainnya	3,16	3,14	3,18	0,91	0,91	0,92	0,92	0,98	1,00	1,00	1,04	1,05
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue Tahun 2024

D. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK

Laju pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja perekonomian secara riil, dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun berkenaan terhadap tahun sebelumnya. Stabilitas perekonomian merupakan prasyarat dasar dalam tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Pencapaian stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2018-2023, laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Simeulue mengalami fluktuasi, kondisi pandemi covid-19 yang terjadi diindonesia mulai tahun 2019 dan puncaknya pada tahun 2020 sangat mempengaruhi pencapaian PDRB Kabupaten Simeulue. Pada tahun 2018 pertumbuhan PDRB sebesar 4,24 persen, pada tahun 2019 meningkat menjadi 4,60 persen, puncak penurunannya terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,12 persen, hal ini terjadi akibat pembatasan aktivitas skala besar yang disebabkan oleh dampak pandemi covid-19. Pada pertengahan semester II tahun 2020 secara perlahan dibuka kembali ruang untuk beraktivitas kepada masyarakat sehingga berdampak pada laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Simeulue mulai tumbuh, hal ini dibuktikan dengan capaian pertumbuhan PDRB pada tahun 2021 sebesar 3,41 persen,

meningkat pada tahun 2022 yaitu sebesar 4,20 persen dan kembali meningkat pada tahun 2023 yaitu 4.63 persen. Laju pertumbuhan PDRB secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut lapangan Usaha Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2023 (%)

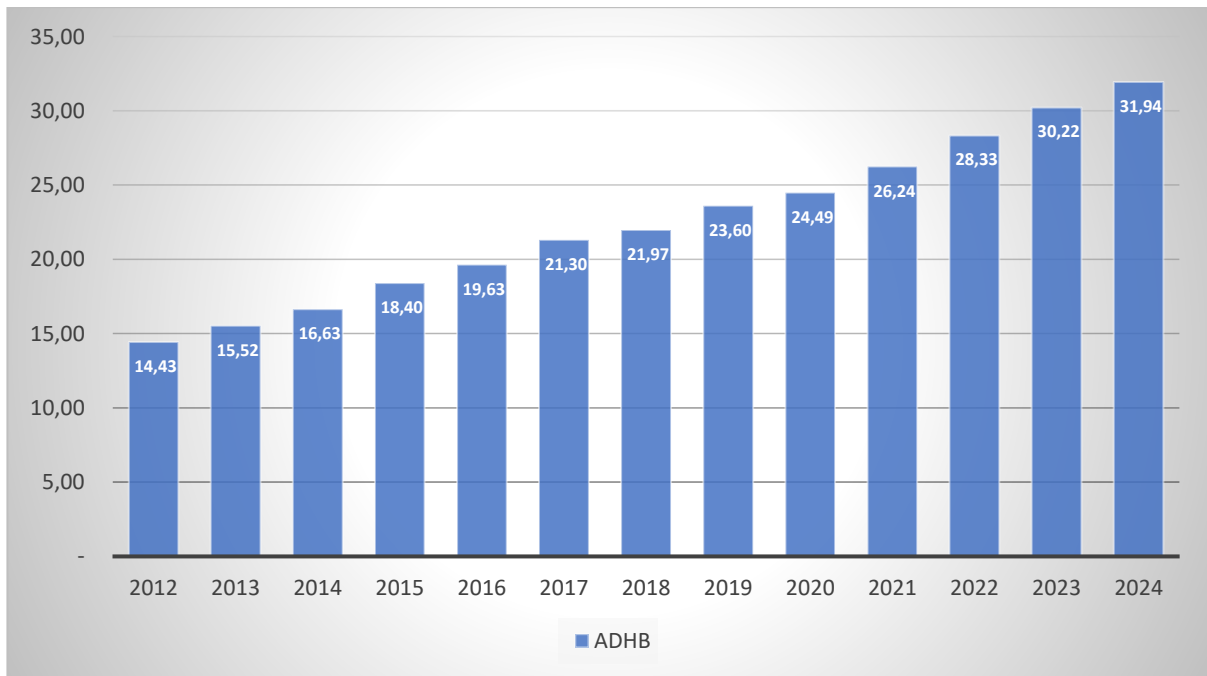
Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,64	2,69	3,31	3,11	2,93	2,88	3,26	2,52	-0,17	4,65	8,61
B	Pertambangan dan Penggalian	6,43	5,18	4,97	4,47	0,62	0,92	2,01	0,58	0,57	0,33	4,32
C	Industri Pengolahan	2,92	3,19	2,97	2,89	5,14	5,28	0,56	-3,24	3,11	5,54	1,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,57	7,70	5,42	10,26	3,94	4,04	2,74	3,91	-0,05	2,40	4,72
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,64	5,86	5,95	8,78	3,71	3,93	9,65	-1,54	6,37	5,76	5,56
F	Konstruksi	7,38	5,91	2,50	4,21	7,97	5,13	5,65	9,43	0,26	0,04	5,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,91	5,65	5,05	5,73	4,91	5,33	4,66	-6,24	8,11	5,79	4,84
H	Transportasi dan Pergudangan	4,96	3,37	4,91	4,63	-3,12	3,14	4,76	-24,95	12,24	5,18	5,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,07	5,31	5,44	5,61	6,41	5,69	6,03	-6,35	-8,30	18,99	11,20
J	Informasi dan Komunikasi	4,11	3,05	5,60	3,87	6,53	1,60	5,45	12,03	11,60	12,04	4,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,21	2,65	6,84	5,28	5,60	4,31	8,12	0,40	-2,05	0,07	-10,88
L	Real Estat	4,54	5,60	5,17	2,36	3,52	4,15	5,51	0,63	3,45	3,41	3,13
M, N	Jasa Perusahaan	6,29	5,39	5,32	6,74	6,27	5,93	5,67	-2,53	0,33	7,34	-1,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,98	6,22	5,20	6,46	5,45	5,83	5,42	-4,64	6,46	-0,20	-0,33
P	Jasa Pendidikan	4,98	5,22	6,64	6,70	7,13	6,42	7,11	3,65	1,45	1,94	1,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,67	4,78	5,42	6,92	6,57	5,92	5,78	4,56	9,52	9,92	-0,54
R, S, T, U	Jasa lainnya	5,04	4,88	4,62	5,24	4,79	4,88	7,15	1,34	4,52	11,81	6,57
Produk Domestik Regional Bruto		4,69	4,33	4,31	4,55	4,42	4,24	4,60	0,12	3,41	4,20	4,63

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue Tahun 2024

E. PDRB Per Kapita

Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Simeulue menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Simeulue rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Namun demikian secara umum, kurun periode 2012-2023, pendapatan perkapita Kabupaten Simeulue semakin menjauh dan di bawah rerata nasional, dan Provinsi Aceh sebagaimana terlihat pada Gambar 2.24 Gap tersebut semakin melebar mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Simeulue masih di bawah rata-rata penduduk Aceh dan di Indonesia.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, 2024

Gambar 2.30 PDRB Kabupaten Simeulue Perkapita Tahun 2012-2024

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Kondisi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Gambaran daya saing SDM ini dapat terlihat berdasarkan indikator-indikator antara lain: Indeks Pendidikan, Angka Literasi/Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Indeks Literasi Digital, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Angka Ketergantungan dan Indikator lainnya sesuai konteks daerah.

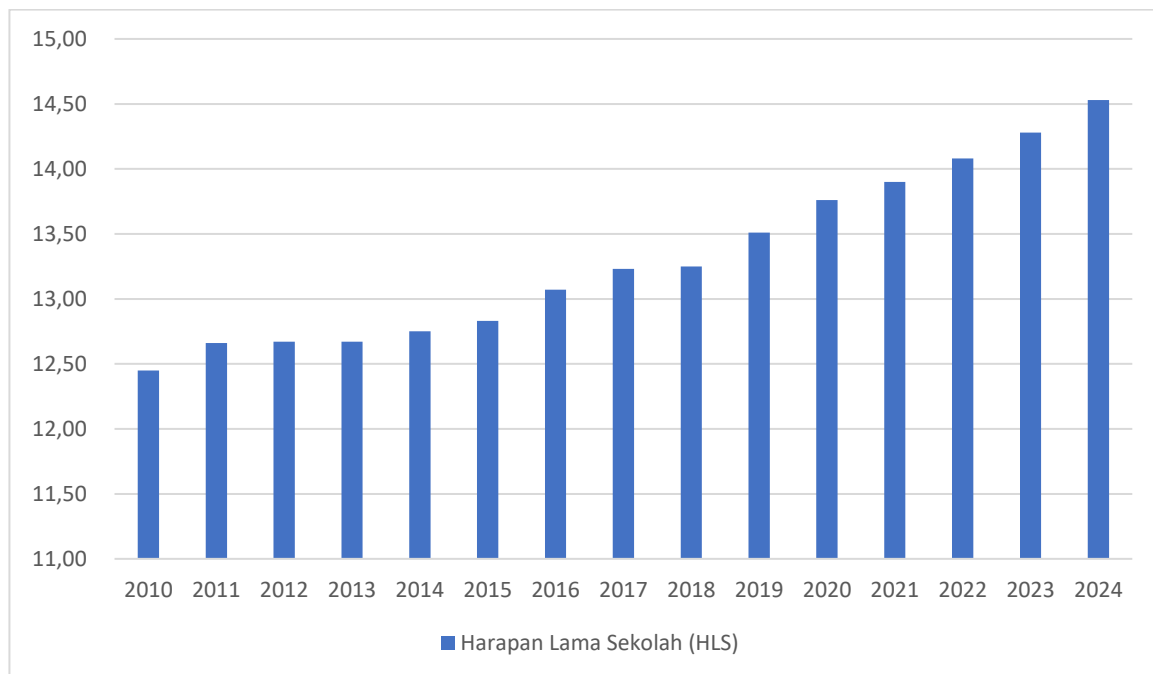
2.3.2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat pada suatu daerah atau lamanya pendidikan yang. Makin tinggi RLS berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.

Apabila ditinjau dari angka rata-rata lama sekolah Tahun 2022, Kabupaten Simeulue berada diatas rata—rata Aceh (9,44 tahun) dan nasional (8,69 tahun). Pemerintah Kabupaten Simeulue berupaya melakukan percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas antara lain dengan memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan antar jenjang pendidikan

Angka rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa, dalam kondisi

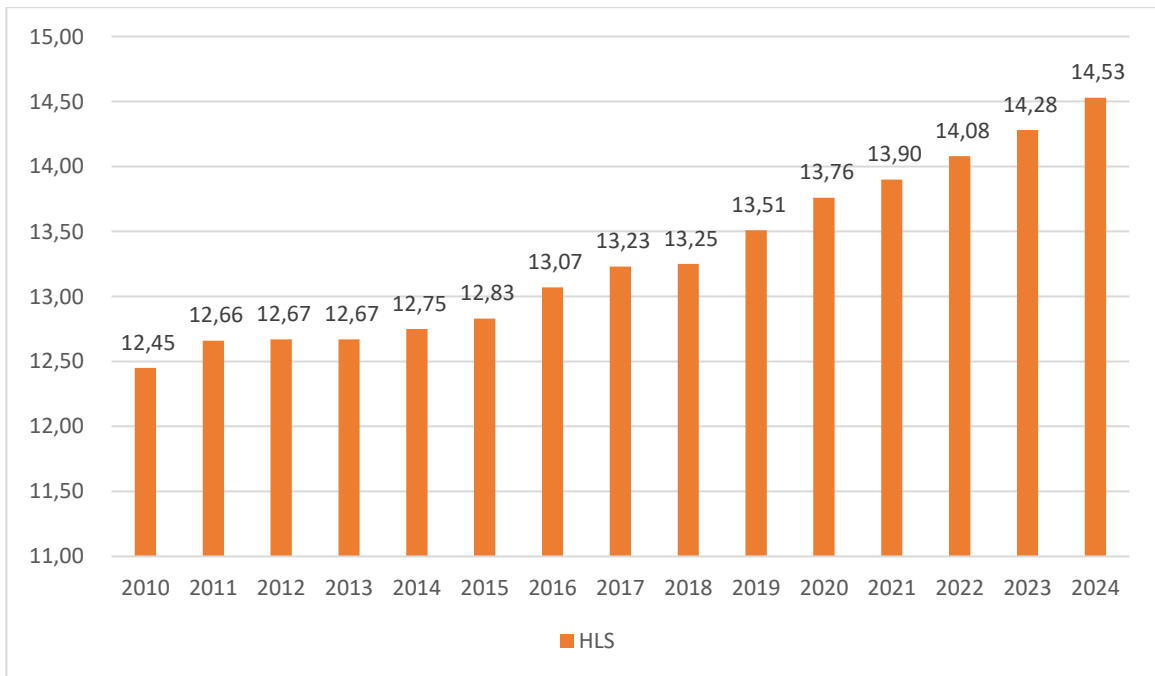
normal rata-rata lama sekolah satu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi usia penduduk 25 tahun sudah menyelesaikan pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022 dapat di lihat pada Gambar 2.9.



Gambar 2.31 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2024

2.3.2.2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

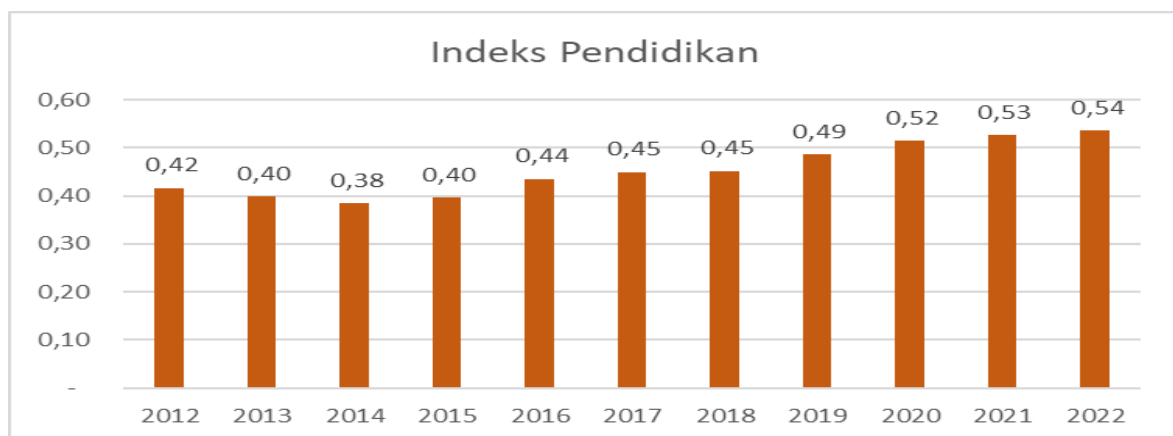
Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Simeulue dari tahun 2012 s.d. Tahun 2022 terus menunjukkan peningkatan untuk setiap tahunnya, namun masih tetap berada di bawah Aceh. Di tahun 2012 angka HLS Kabupaten Simeulue sebesar 12,67 secara periodik terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai angka 14.08. Capaian HLS ini berada di atas capaian HLS nasional yang sebesar 13,10.



Gambar 2.32 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2024

2.3.2.3. Indeks Pendidikan

Berdasarkan data perkembangan data Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata lama Sekolah, Indeks Pendidikan untuk daerah kabupaten Simeulue pada tahun 2022 berada diangka 0,53. Angka ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang berada diangka 0,41. Fluktuasi perkembangan indeks pendidikan dapat terlihat pada grafik gambar 2.36.

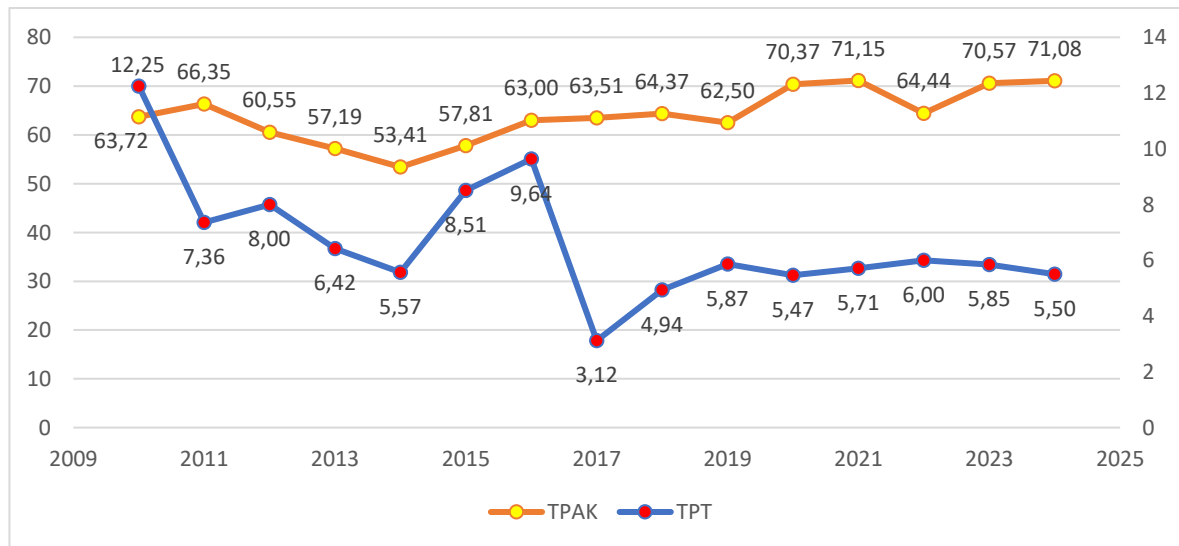


Gambar 2.33 Perkembangan Indeks Pendidikan di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022

2.3.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja & Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk tahun 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Simeulue sebesar 70,39 persen, sedikit lebih tinggi dari tahun 2012 yang sebesar 60,55 persen. Tingkat

pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan penurunan sebesar 2,29 persen dari tahun 2012 yang mencapai 8,00 persen, menjadi 5,71 persen di tahun 2021.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.34 Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2024

Kendala yang masih ada dalam hal ketenagakerjaan di Kabupaten Simeulue adalah belum tersedianya secara maksimal Data Base pencari kerja. Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada juga belum berfungsi secara optimal disebabkan kurangnya tenaga instruktur dan pelatih serta kurang sarana dan prasarana pendukung pada BLK tersebut.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Analisis kinerja atas daya saing fasilitas infrastruktur wilayah dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut: indeks aksesibilitas dan mobilitas, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) berakses air minum dan sanitasi layak, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

2.3.3.1. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas

Kondisi prasarana jaringan jalan mempengaruhi mobilitas masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks

mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya. Selain itu juga maka wilayah tersebut mudah dijangkau dari arah manapun. Indeks aksesibilitas dan mobilitas Kabupaten Simeulue dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37 Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Kabupaten Simeulue Tahun 2022

No	Uraian	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Panjang Jalan (km)	Indeks Aksesibilitas (Km/Km ²)	Indeks Mobilitas (Km/1000 jiwa)
1	Simeulue	2051,48	94.900	767,67	0,37	8,09

Sumber: Dokumen Ranwal RPJPA 2025-2045

2.3.3.2. Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal Tahun 2024

Selain infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara dan terminal menjadi infrastruktur strategis yang menjadi bagian aksesibilitas daerah. Kondisi geografis Kabupaten Simeulue yang berada ditengah – tengah samudera hindia, sehingga pelabuhan menjadi pintu utama terhadap pemenuhan kebutuhan terebut. Saat ini tersedia pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Simeulue yaitu Pelabuhan Kolok Sinabang yang pengelolaannya dibawah kewenangan Provinsi Aceh. Pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan pengangkutan orang dan barang. Saat ini terdapat beberapa rute penyebrangan yang tersedia yaitu Sinabang – Calang (PP), Sinabang–Meulaboh (PP), Sinabang - Labuhan Haji (PP) dan Sinabang – Singkil (PP).

Kabupaten Simeulue juga memiliki Bandara yaitu Bandara Lasikin dengan runway sepanjang 1200 m. Adapun rute jalur penerbangan yang dilayani antara lain:

1. Rute Kuala Namu (Deli Serdang) – Lasikin (Simeulue) dengan maskapay penerbangan Susi Air dan Wings Air,
2. Rute Sultan Iskandar Muda (Aceh Besar) – Lasikin (Simeulue) dengan maskapay penerbangan Susi Air.

Kabupaten Simeulue juga memiliki satu terminal type C yang saat ini digunakan untuk akses mobilitas masyarakat dari dan ke wilayah kecamatan dalam Kabupaten Simeulue. Terminal ini juga digunakan sebagai tempat bongkar muat barang yang akan dikirim ke wilayah kecamatan dalam Kabupaten Simeulue.

2.3.3.3. Fasilitas Bank dan non Bank

Ada 2 (dua) Bank yang beroperasi di Kabupaten Simeulue yaitu:

1. Bank Aceh Syariah dengan jumlah kantor sebanyak 2 unit dan fasilitas ATM sebanyak 6 unit.
2. Bank Syariah Indonesia dengan jumlah kantor sebanyak 2 unit dan fasilitas ATM sebanyak 5 unit.

2.3.3.4. Ratio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio ketersediaan daya listrik merupakan perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan daya listrik di suatu daerah (dalam MW). Indikator ini menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakatnya. Sistem penyediaan listrik di Kabupaten Simeulue terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel sebanyak 5 unit. Dengan dukungan mesin sebanyak 32 unit dan total kapasitas terpasang sebesar 22,2 MW. Hingga tahun 2022, telah terdapat total kapasitas pembangkit/daya mampu yang telah terpasang di seluruh wilayah Simeulue sebesar 22,2 MW. Sedangkan untuk kebutuhan daya listrik, PT. PLN Persero mencatat bahwa di tahun 2024 beban puncak sebesar MW. Rasio ketersediaan daya listrik di Simeulue periode 2017-2024 mengalami kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Rasio ketersediaan daya listrik sangat bergantung pada pengembangan dan pembangunan pembangkit yang dibangun oleh pihak ketiga, baik itu dari PT. PLN (Persero) ataupun investor-investor swasta. Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Simeulue Pada tahun 2017-2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah

Tabel 2.38 Ratio Kelistrikan Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2024

Uraian	Satuan	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pembangkit (PLTD)	Unit	5	5	5	5	5	5	5
Jumlah Unit Mesin	Unit	26	26	31	32	32	32	32
Daya Listrik Terpasang	KW	18.572	18.572	21.484	22.207	22.207	22.207	22.207
Kemampuan	KW	11.690	11.690	13.880	14.180	14.180	14.180	14.180
Jumlah Kebutuhan Daya Listrik (beban puncak)	KW							
Ratio								

2.3.3.5. Jumlah Penginapan /Losmen /Wisma /Resort /Hotel

Fasilitas penginapan/losmen/wisma/resort/hotel di kabupaten Simeulue mengalami berkembang setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jumlah fasilitas penginapan /losmen /wisma/resort/hotel sebanyak 45 unit. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 jumlah penginapan/losmen/wisma/resort/hotel meningkat sebanyak 21 unit.

Tabel 2.39 Perkembangan Jumlah Penginapan/losmen/wisma/resort/hotel di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022

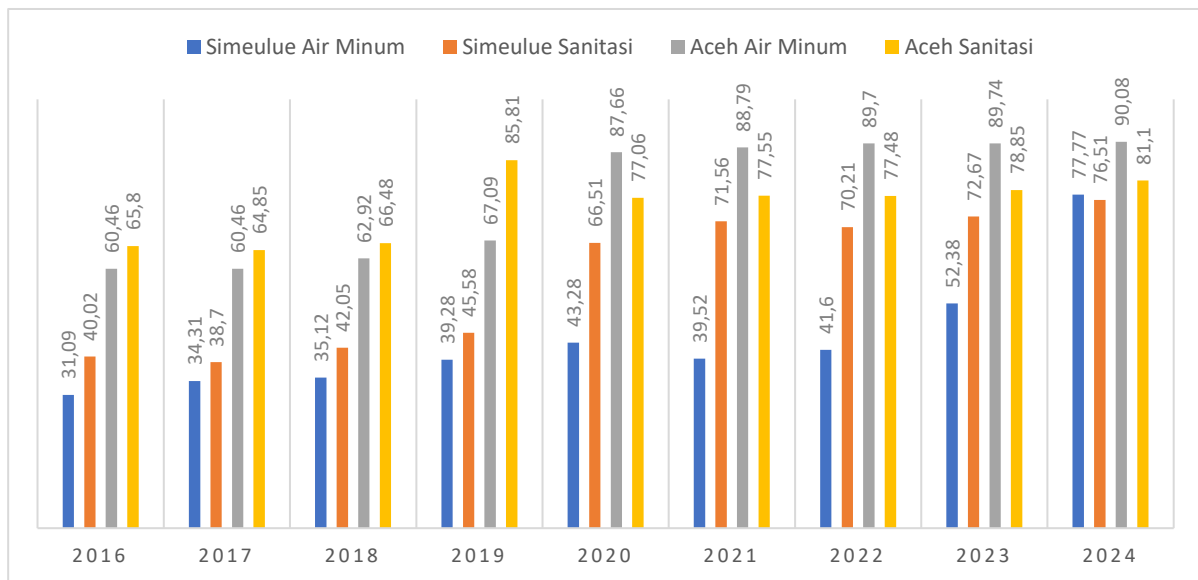
Keolahragaan	Tahun										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Losmen/Wisma /Resort	n.a	n.a	24	25	37	37	38	43	43	43	45

Sumber: Disparbud kab. Simeulue, 2023

2.3.3.6. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak

Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi di Kabupaten Simeulue sejak tahun 2016 hingga 2024 menunjukkan tren yang bervariasi. Akses rumah tangga terhadap air minum layak berada pada kisaran 31,09 persen pada tahun 2016 hingga 52,38 persen pada tahun 2023, lalu meningkat signifikan menjadi 76,17 persen pada tahun 2024. Meski demikian, capaian ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh yang pada 2024 telah mencapai 90,08 persen.

Sementara itu, akses sanitasi layak di Kabupaten Simeulue menunjukkan peningkatan yang lebih konsisten dan signifikan. Pada tahun 2016 persentasenya sebesar 40,02 persen, dan terus naik hingga mencapai 78,85 persen pada 2023, kemudian meningkat lagi menjadi 76,17 persen pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan layanan infrastruktur, kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang semakin baik.. Data selengkapnya sebagaimana tersaji pada Gambar berikut.



Gambar 2.35 Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum an Sanitasi Layak Kabupaten Simeulue Tahun 2016-20224

2.3.3.7. Persentase Rumah Tangga dengan Menggunakan Telepon

Hingga tahun 2022 persentase desa terakses jaringan HP Kabupaten Simeulue telah mencapai 98,00 persen. Artinya Kabupaten Simeulue terkait dengan akses jaringan HP hanya tinggal beberapa Desa yang belum terakses.

Tabel 2.40 Perkembangan BTS Terbangun, Desa Terakses jaringan HP dan Jumlah Rumah Tangga memiliki HP di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022

No	Uraian	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Gampong terakses jaringan HP	85,03	85,15	85,50	85,50	89,00	95,00	98,00
2	Persentase Rumah Tangga memiliki HP	85,03	85,50	87,02	n.a	n.a	90,00	94,20

Sumber: Diskominsa Kabupaten Simeulue, 2023

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Aspek daya saing iklim investasi daerah Kabupaten Simeuule dapat digambarkan dari perkembangan indikator-indikator antara lain: Indeks Demokrasi, Indeks Rasa Aman, Indeks Ketentraman dan Ketertiban, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Daya Saing Daerah serta indikator lainnya.

2.3.4.1. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI merupakan pengukuran yang dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia dengan empat prinsip dasar penyusunan IDI sebagai berikut:

1. IDI hanya mengukur perkembangan demokrasi politik di provinsi
2. IDI hanya mengindikasikan potret demokrasi di provinsi bukan studi etnografs yang detail yang ditujukan guna memberikan gambaran utuh dan lengkap mengenai demokrasi provinsi
3. IDI mengukur demokrasi dua sisi, yaitu sisi negara (pemerintah) dan masyarakat.
4. IDI bukan merupakan tujuan akhir tetapi merupakan tujuan antara untuk merealisasikan kehidupan masyarakat yang bebas, aman, adil dan sejahtera.

Pengukuran IDI yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik baru pada level daerah provinsi sedangkan IDI untuk daerah Kabupaten khususnya Kabupaten Simeulue belum pernah dilakukan pengukuran. Oleh karena itu angka Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021 untuk Wilayah Kabupaten Simeulue mengacu angka Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh yaitu sebesar 80,92 (kategori tinggi). Capaian IDI ini mengikat jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang berada diangka 72,29 (kategori sedang).

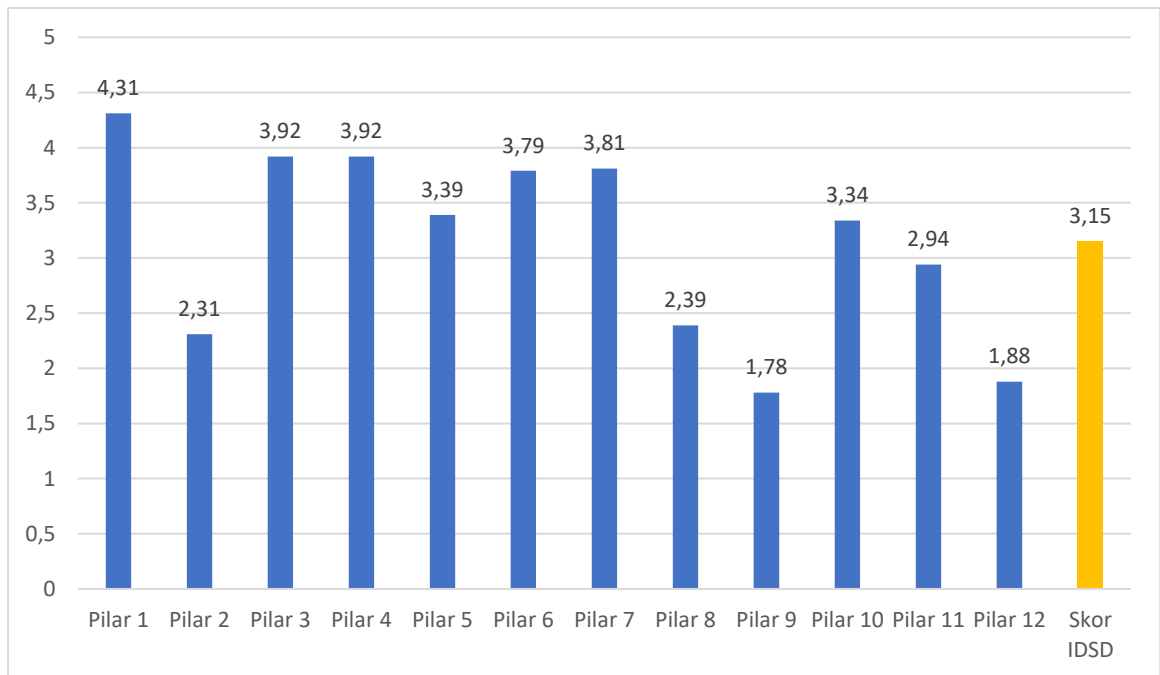
2.3.4.2. Indeks Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, provinsi, nasional, atau internasional.

Dalam mengukur Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) terdapat 12 pilar yang merupakan faktor penentu produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah. Kedua belas pilar ini digunakan untuk membangun dan meningkatkan daya saing suatu daerah agar dapat bersaing dengan daerah lainnya. Lebih jauh, sebuah daerah dapat dibandingkan dalam hal tingkat daya saingnya dengan daerah lainnya berdasarkan 12 pilar yang ada. Keseluruhan pilar tersebut adalah institusi (1), infrastruktur (2), adopsi TIK (3), stabilitas ekonomi makro (4), Kesehatan (5), keterampilan (6), pasar produk (7), pasar tenaga kerja (8), sistem keuangan (9), ukuran pasar (10), dinamisme bisnis (11), dan kapabilitas inovasi (12).

Berdasarkan hasil perhitungan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2024. Angka IDSD Kabupaten Simeulue berada diangka 3,15 poin, dimana pilar 1 yang paling

tinggi di skor 4,31 poin dan paling rendah di pilar 9 dengan skor 1,78 poin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.36 Skor Pilar dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Simeulue Tahun 2024

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Tata kelola pemerintahan Kabupaten Simeulue dalam penyelenggaraan pelayanan umum terus diarahkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta perbaikan sistem birokrasi agar lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun terdapat berbagai keterbatasan, seperti kondisi geografis kepulauan yang memengaruhi akses pelayanan, pemerintah tetap berkomitmen menghadirkan layanan yang merata, terutama di bidang administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar. Upaya reformasi birokrasi juga dilakukan secara bertahap melalui penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dan inovasi pelayanan publik berbasis digital untuk mendukung efisiensi serta memperluas jangkauan layanan.

Secara umum, tata kelola pemerintahan Kabupaten Simeulue menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih dihadapkan pada tantangan peningkatan kapasitas aparatur, pemerataan kualitas layanan antar wilayah, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan publik semakin mudah diakses, transparan, dan berkualitas. Di buktikan dengan Nilai Indeks Implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Simeulue Tahun

2023 sebesar 39,65% (C/ Kurang) mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 59,35% (CC/ Cukup (Memadai)).

2.4.1. Fokus Layanan urusan Keistimewaan Aceh

2.4.1.1. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

A. Syariat Islam

Syari'ah Islam merupakan rangkaian dari tiga pilar yaitu syari'ah, aqidah dan akhlak. Definisi Syari'ah adalah sistem norma ilahiah Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Aqidah adalah iman (keyakinan) yang ditautkan dengan Rukun Iman yang merupakan asas seluruh ajaran Islam. Sedangkan kaidah yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah. Selanjutnya akhlak adalah sikap yang menimbulkan perilaku baik dan buruknya manusia. Akhlak berasal dari kata khuluk yang berarti perangai, sikap, perilaku, watak, budi pekerti. Jumlah pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.41 Jumlah pelanggaran Syariat Islam Tahun 2016- 2024

No	Jenis Kasus	Tahun								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Qanun 11 Tahun 2002 Tentang Akidah, ibadah dan syiar Islam	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	5	1	2	2	8	14	11	22	15
	- Khamar	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Khalwat (Mesum)	0	0	2	2	4	0	2	7	0
	- Ikhtilath (bercumbu)	1	0	0	0	1	3	1	0	0
	- Zina	0	0	0	0	0	0	3	0	6
	- Pelecehan seksual	0	0	0	0	0	0	0	3	1
	- Pemerkosaan	0	0	0	0	0	1	3	2	4
	- Qadzaf (menuduh orang berzina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Liwat (Suka sejenis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Musahaqa (Lesbi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Maisir (Judi)	3	1	0	0	3	10	2	6	4

Sumber: Dinas Syariat Islam kab. Simeulue, 2025

Tahun 2016 – 2021, kondisi pelanggaran seperti khumar tahun 2020 sebanyak 1 kasus, maisir 3 kasus, khalwat meningkat dari 2 kasus menjadi 4 kasus pada tahun 2020, sedangkan jenis kasus lainnya tidak ada kasus. Pada tahun 2021 tidak ada pelanggaran Syariat Islam.

Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan shalat fardhu berjamaah di Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42 Jumlah Rumah Ibadah di Kabupaten Simeulue berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2024

No	Kecamatan	Tahun															
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Mesjid	Meunasah	Mesjid	Meunasah	Mesjid	Meunasah	Mesjid	Meunasah	Mesjid	Meunasah	Mesjid	Meunasah	Mesjid	Meunasah	Mesjid	Meunasah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Simeulue Timur	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	23	37	23	37	22	32
2	Simeulue Tengah	13	19	13	21	13	21	13	21	13	21	30	29	30	29	36	35
3	Simeulue Barat	20	48	20	48	20	48	22	46	22	46	18	22	18	22	18	22
4	Teupah Selatan	22	33	22	33	22	33	22	33	22	33	14	13	14	13	3	0
5	Teupah Barat	18	22	18	22	18	22	18	22	18	22	13	20	13	20	18	25
6	Salang	19	23	19	23	19	23	20	22	20	22	11	18	11	18	14	18
7	Teluk Dalam	11	19	11	19	11	19	11	19	11	19	8	5	8	5	1	0
8	Alafan	11	14	11	21	11	21	11	21	11	21	21	20	21	20	20	22
9	Teupah Tengah	14	12	14	13	14	13	14	13	14	13	21	47	21	47	21	48
10	Simeulue Cut	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5	11	21	11	21	11	17
Total		165	224	165	235	165	235	168	232	168	232	170	232	170	232	164	219

Sumber: Dinas Syariat Islam kab. Simeulue, 2025

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah mesjid di Kabupaten Simeulue selama 5 tahun terakhir bertambah dari tahun 2017 sebanyak 165 unit menjadi 168 unit pada tahun 2021

B. Baitul Mall

Pengelolaan Harta Agama menjadi elemen penting dalam penerapan nilai Syariat Islam dalam masyarakat. Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menegaskan komitmen pemerintahan Aceh dan Kabupaten Simeulue dalam merealisasikan syariat Islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan umat. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf, perwalian (ZISWAF dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Instrument harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan umat.

Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Baitul Mal terus meningkatkan upaya penerimaan zakat dari masyarakat. Sejak tahun 2018 penerimaan zakat dari tahun ke tahun

mengalami peningkatan yang signifikan, seiring dengan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat di lembaga amil zakat pemerintah yaitu Baitul Mal Kabupaten Simeulue. Selain zakat penghasilan, zakat perniagaan, infaq dan sadaqah. Baitul Mal juga melaksanakan pemotongan zakat pada setiap SP2D belanja daerah. Untuk mengetahui secara rinci tentang penerimaan zakat, infaq, dan sadaqah pada Baitul Mal di Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada tabel 2.43.

Tabel 2.43 Jumlah Pendapatan dan Penyaluran Zakat dan Infaq Tahun 2018 – 2024

Zakat dan Infaq		
Tahun	Pendapatan (Rp)	Penyaluran (Rp)
2018	5,626,902,073.94	3,363,604,666.00
2019	6,579,324,426.74	4,178,740,000.00
2020	6,336,542,956.92	3,416,105,000.00
2021	6,669,627,647.08	4,220,000,000.00
2022	6,786,584,740.09	7,407,679,590.00
2023	6,937,461,353.00	8,710,847,058.00
2024	8,609,758,134.00	11,735,325,855.00

Sumber : Baitul Mal Kab. Simeulue, 2025

C. Penyelenggaraan Kehidupan Adat (MAA)

Nilai-nilai adat dan adat istiadat dalam pengembangannya secara umum diarahkan pada dua bidang, yaitu penguatan hukum adat dan adat istiadat. Keberadaan Peradilan Adat memberikan kontribusi signifikan dalam rangka mengurangi bertumpuknya perkara di peradilan umum. Keberadaan Peradilan Adat saat ini diakui oleh negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang Undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Pasal 98 Undang Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, dan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh. Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/667/2011, 1054/MAA/XII/2011, dan B/121/1/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan/Mukim atau Nama Lain di Aceh, dan Peraturan Gubernur Aceh No.60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat. Penguatan pelaksanaan adat istiadat Aceh yang indikatornya diukur melalui Rasio Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat.

D. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah

Urusan penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Kabupaten Simeulue dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah. Perkembangan pembangunan dayah di Kabupaten Simeulue umumnya diinisiasi oleh masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan. Sebagai bentuk upaya pemerintah Daerah dalam mendukung Pendidikan dayah di Kabupaten Simeulue, Pemerintah Kabupaten Simeulue mengalokasikan anggaran pada setiap Tahun APBD yang diuraikan kedalam berbagai bentuk kegiatan.

Pemerintah Aceh turut mendukung upaya pemerintah Kabupaten Simeulue dalam membangun dan mengembangkan pendidikan Dayah melalui peningkatan sarana dan prasarana dayah yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan di dayah. Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah yang diberikan oleh Pemerintah Aceh dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.44 Jumlah Dayah Yang Mendapatkan Bantuan Sarana dan Prasaranan Fungsional Dari Provinsi Aceh Tahun 2013 – 2022

Uraian	Tahun									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jlh. Pagu Bantuan (Rp.Juta)	180	400	230	0	0	0	800	580	750	300
Jlh. Dayah	3	3	2	0	0	0	4	4	2	2

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah Aceh

Tabel 2.45 Perkembangan Dayah Dalam Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 – 2022

Uraian	Tahun									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Dayah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	13	13	13	13	13
Jumlah Tenaga Pendidik										

Sumber : DSIPD Kab. Simeulue, 2023

2.4.2. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.4.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

A. Pendidikan

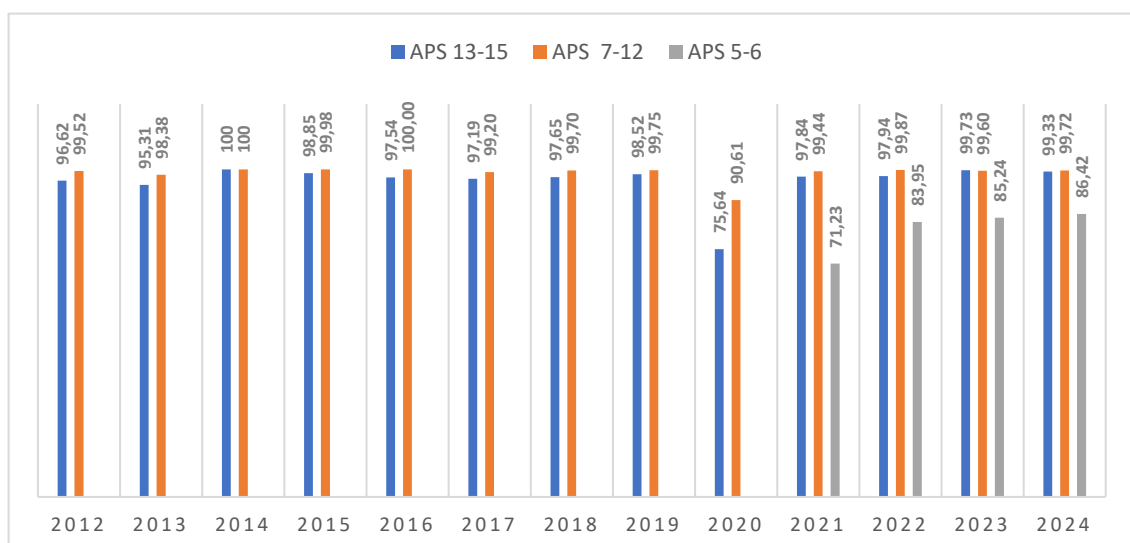
Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga dengan adanya pendidikan diharapkan kualitas sumber daya

manusia semakin meningkat. Fungsi dari pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap orang. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 31, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Simeulue berupaya meningkatkan kualitas SDM guna mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan akses pendidikan yang merata di setiap kecamatan.

1. Angka Partisipasi Sekolah

Kondisi Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun atau setingkat SD Tahun 2023 berada diangka 99,60 % sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berada diangka 99,87 %. Sedangkan untuk APS usia 13-15 tahun atau setingkat SMP tahun 2023 sebesar 99,73 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun 2022 yang berada diangka 97,94. Selanjutnya untuk APS usia setingkat 5-6 tahun atau setingkat PAUD pada tahun 2023 mencapai sebesar 85,24 %, meningkat dari capaian tahun 2022 yang berada diangka 83,95 % (Gambar 2.12).



Gambar 2.37 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2024

2. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah pada tingkat dan jenjang tertentu dengan jumlah siswa pada tingkat dan jenjang yang sesuai pada tahun ajaran sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase. Angka putus sekolah Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2020 ditampilkan pada gambar berikut ini.



Gambar 2.38 Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2020

3. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus pada jenjang tertentu dengan jumlah peserta ujian pada jenjang pendidikan tertentu yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi nilainya berarti makin baik idealnya angka kelulusan adalah sama dengan 100 persen, yang berarti semua siswa peserta ujian lulus seluruhnya. Angka kelulusan digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus, dari jenjang pendidikan tertentu. Angka kelulusan jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Simeulue pada tahun 2016-2020 pada gambar berikut.

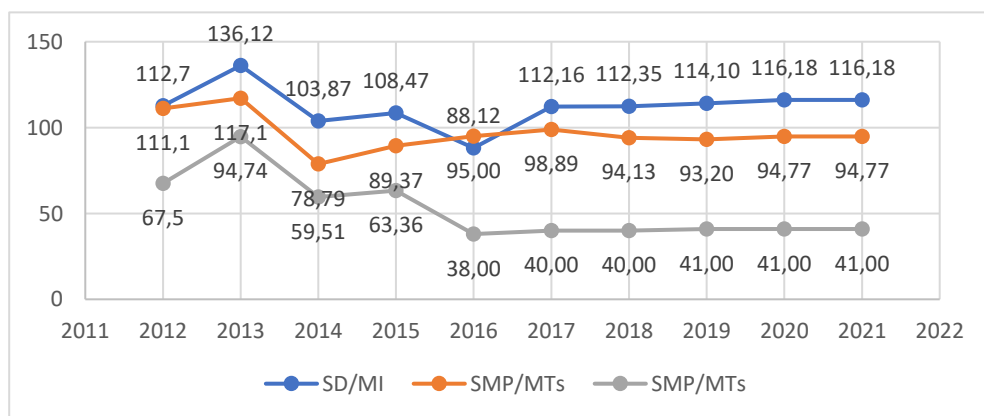


Gambar 2.39 Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2020

Berdasarkan Gambar di atas terlihat bahwa angka kelulusan SD/MI, angka kelulusan SMP/MTs selama 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Bahkan pada tahun 2018 angka kelulusan SD/MI maupun angka kelulusan SMP/MTs telah mencapai angka ideal yaitu 100 persen. Hal ini angka kelulusan SD/MI maupun SMP/MTs sangat baik.

4. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

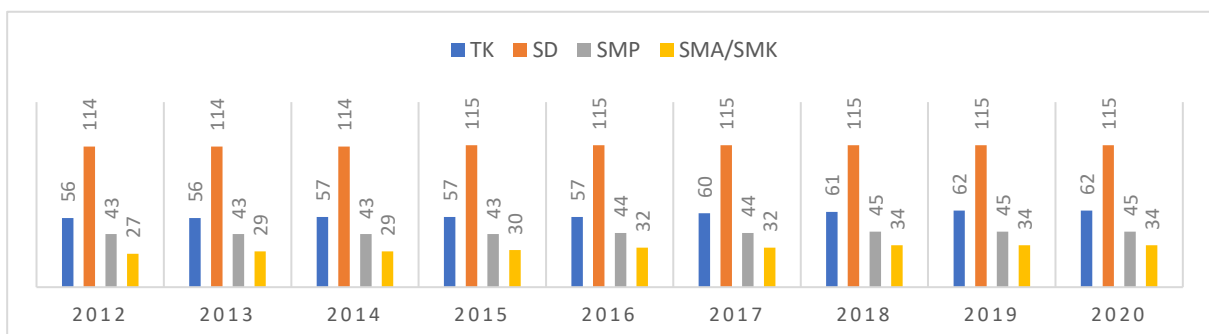
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah pada tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah pada semua jenjang pendidikan selama lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Kurun waktu 2012-2022, rasio tertinggi pada semua jenjang pendidikan dicapai pada tahun 2013, seperti terlihat pada gambar 2.43.



Gambar 2.40 Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022

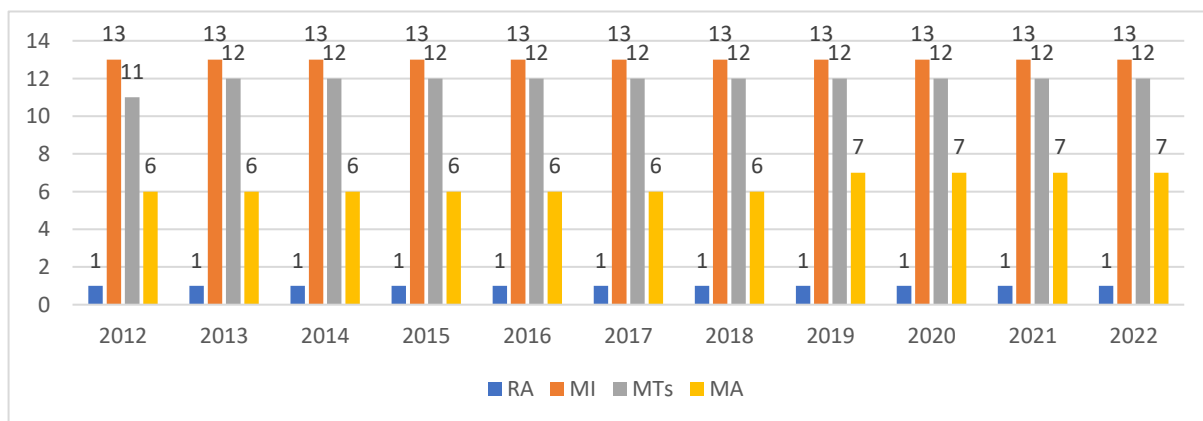
5. Sarana dan Prasarana Sekolah

Pemerintah Kabupaten Simeulue telah membangun prasarana pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Perkembangan prasarana pendidikan selama lima tahun terakhir terus meningkat. Sampai tahun 2020, tercatat prasarana pendidikan SD sebanyak 115 unit. Prasarana SMP berjumlah 46 unit, SMA/SMK sebanyak 34 unit. (Gambar 2.21).



Gambar 2.41 Perkembangan Prasarana Pendidikan Umum Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2020

Disamping pendidikan umum, Pemerintah Kabupaten Simeulue juga membangun prasarana pendidikan agama. Tahun 2022, prasarana pendidikan MI berjumlah 13 unit, MTs sebanyak 12 unit, dan MA sebanyak 7 unit. Untuk lebih jelas gambaran perkembangan prasarana pendidikan agama menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2.25 berikut.



Gambar 2.42 Perkembangan Prasarana Pendidikan Agama Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022

Tabel 2.46 Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik di Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kondisi SD dan SMP	34,55	16,75	n.a	60,00	55,27	69,28

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, 2022

Berdasarkan Tabel di atas, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir ruang kelas kondisi baik SD dan SMP di Kabupaten Simeulue pada tahun 2019 mencapai 60 persen, artinya 40 persen pada katagori rusak sedang. Sedangkan pada tahun 2020 kondisi ruang kelas baik menurun yaitu sebesar 55,27 persen dan pada tahun 2021 kondisi ruang kelas mencapai 69,28 persen.

6. Rasio Guru-Murid

Perkembangan peserta didik/murid pada semua jenjang pendidikan menunjukkan fluktuatif selama enam tahun terakhir (periode 2016-2021). Selama periode tersebut, pertumbuhan rata-rata murid di sekolah pendidikan umum menunjukkan penurunan, kecuali SMK. Sampai tahun 2021, peserta didik mengecap pendidikan SD berjumlah 9.630 orang. Adapun tahun 2016, peserta didik SD mencapai 10.504 orang.

Untuk tingkat SMP, peserta didik menempuh pendidikan tersebut berjumlah 4.473 orang tahun 2016. Jumlah peserta didik tersebut menurun menjadi 4.362 orang tahun 2020. Pada tingkat SMA, jumlah peserta didik mencapai 3.563 orang tahun 2020. Sementara peserta didik yang menempuh pendidikan pada SMK berjumlah 1.019 orang tahun 2020. Empat tahun sebelumnya (tahun 2016), peserta didik di SMK paling kurang 1.107 orang.

Peserta didik yang mengecap pendidikan agama juga cenderung berfluktuatif selama periode 2016-2021. Perkembangan peserta didik pada jenjang pendidikan agama tingkat MTs sebanyak 1.100 orang tahun 2016 dan meningkat menjadi 1.300 orang tahun 2021. Untuk tingkat MA, jumlah peserta didik sebanyak 311 orang tahun 2016 dan terus mengalami peningkatan jumlah peserta didik hingga tahun 2021 sebanyak 339 Orang. Gambaran lebih lanjut, perkembangan peserta didik menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Simeulue periode 2016-2021 dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.47 Perkembangan Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2021

Jenjan Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Pendidikan Umum						
TK/PAUD	1.812	3.485	3.500	3.538	2.167	2.167
SD	10.504	10.165	9.826	9.700	9.630	9.630
SMP	4.473	4.533	4.549	4.593	4.362	4.362
SMA	3.542	3.941	3.419	3.406	3.563	3.563
SMK	1.107	1.049	1.040	968	1.019	1.019
Pendidikan Agama						
RA	26	28	30	25	30	30
MI	1.350	1.151	1.418	1.405	1.371	1.371
MTs	1.100	1.107	1.178	1.143	1.300	1.300
MA	311	300	310	326	339	339

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, 2021

Guru berperan penting dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan peserta didik. Pemerintah Kabupaten Simeulue masih dihadapkan permasalahan dan tantangan dalam penyediaan guru berkualitas yang sesuai dengan kompetensi dan jenjang pendidikan tinggi. Selama lima tahun terakhir (2017-2021), perkembangan jumlah guru yang mengabdikan di Kabupaten Simeulue berfluktuasi. Pada tingkat pendidikan SD, guru yang mengabdikan mengalami penurunan rata-rata 0,72 persen setiap tahunnya. Tahun 2017, jumlah guru SD sebanyak 1.218 orang yang tersebar relatif merata di semua kecamatan. Jumlah guru tersebut bertambah menjadi 1.394 orang pada tahun 2021.

Sementara itu, pada tingkat pendidikan SMP, terjadi penurunan jumlah guru pada tahun 2021 yaitu sebanyak 51 orang. Demikian juga guru yang mengabdikan di SMA, terus mengalami penurunan jumlah guru hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 445 orang. Adapun jumlah guru yang mengabdikan di MI, MTs dan MA mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2021 sebanyak 186 orang (MI), 192 orang (MTs) dan 92 orang (MA). Gambaran lebih lanjut perkembangan Guru menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48 Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2021

Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Pendidikan Umum					
TK/PAUD	649	724	558	393	360
SD	1.218	1.392	1.364	1.598	1.394
SMP	501	533	532	652	601
SMA	478	482	480	486	445
SMK	181	172	153	167	152
Pendidikan Agama					
RA	5	6	7	23	4
MI	179	177	170	167	186
MTs	180	176	142	142	192
MA	74	71	58	69	92

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, 2021

Tabel 2.49 Perkembangan Angka Melanjutkan Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2019

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	2018	2019
1	2	3	4	5
Pendidikan				
1	Dari SD ke SMP	Persen	72,33	84,04
2	Dari SMP ke	Persen	1.524	1.520
Pendidikan				
1	Dari MI ke MTs	Persen	67	30
2	Dari MTs ke MA	Persen	63	40

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, 2020

7. Kemampuan Literasi

Kemampuan Literasi merupakan sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Capaian Skor Kemampuan Literasi Jenjang SD pada tahun 2022 sebesar 49,74 sedangkan tahun 2023 mencapai skor 53,13 dengan Perubahan Skor

dari tahun lalu naik 3,39. Capaian Skor Kemampuan Literasi Jenjang SMP pada tahun 2022 sebesar 54,00 sedangkan tahun 2023 mencapai skor 58,79 dengan Perubahan Skor dari tahun lalu naik 4,73. Hal ini dengan didefinisi capaian 40%-70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Capaian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.50 Capaian Angka Kemampuan Literasi Tahun 2019-2023

Kelompok Indikator Prioritas	Indikator	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kemampuan Literasi	Skor Kemampuan Literasi Jenjang SD	n.a	n.a	42,57	49,74	53,13
	Skor Kemampuan Literasi Jenjang SMP	n.a	n.a	53,51	54,00	58,79

Sumber : Rapor Pendidikan Kabupaten Simeulue 2024 (Laporan diperbarui 28 Mar 2024).

8. Kemampuan Numerasi

Kemampuan Numerasi adalah kemampuan memahami dan menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dan lain sebagainya) untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SD untuk tahun 2022 sebesar 40,00 sedangkan tahun 2023 sebesar 44,11 dengan Perubahan Skor dari Tahun Lalu Naik 4,11. Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SMP untuk tahun 2022 sebesar 50,86 sedangkan tahun 2023 sebesar 56,60 dengan Perubahan Skor dari Tahun Lalu Naik 5,74. Hal ini dengan didefinisikan capaian 40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Capaian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.51 Capaian Angka Kemampuan Numerasi Tahun 2019-2023

Kelompok Indikator Prioritas	Indikator	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kemampuan Numerasi	Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SD	n.a	n.a	31,03	40,00	44,11
	Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	n.a	n.a	51,37	50,86	56,60

Sumber : Rapor Pendidikan Kabupaten Simeulue 2024 (Laporan diperbarui 28 Mar 2024)

9. Indeks Iklim Keamanan

Rapor Pendidikan mengartikan iklim keamanan sekolah sebagai kondisi lingkungan sekolah harus memberikan rasa aman secara fisik maupun psikologis. Seperti tidak adanya perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, narkoba, merokok, dan minuman keras di lingkungan sekolah. Indeks Iklim Keamanan Jenjang SD pada tahun 2022 mencapai 73,85 dan tahun 2023 mencapai 76,50 hal ini mendapat dengan capaian Baik, dengan perubahan skor dari tahun lalu naik 2,65. Sedangkan Indeks Iklim Keamanan Jenjang SMP pada tahun 2022 mencapai 68,14 dan tahun 2023 mencapai 72,17 hal ini mendapat dengan capaian Baik, dengan perubahan skor dari tahun lalu naik 4,03. Sehingga dari kedua indeks iklim keamanan jenjang SD dan SMP dapat dikategorikan dengan definisi capaian satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan. Capaian dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.52 Capaian Indeks Iklim Keamanan Tahun 2019-2023

Kelompok Indikator Prioritas	Indikator	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Iklim Keamanan	Indeks Iklim Keamanan Jenjang SD	n.a	n.a	69,26	73,85	76,50
	Indeks Iklim Keamanan Jenjang SMP	n.a	n.a	70,32	68,14	72,17

Sumber : Rapor Pendidikan Kabupaten Simeulue 2024 (Laporan diperbarui 28 Mar 2024).

10. Indeks Iklim Kebinekaan

Iklim kebinekaan merupakan suatu bentuk layanan pendidikan yang mengenalkan berbagai macam perbedaan dan menjadikan perbedaan tersebut sebagai modal dan potensi untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangan, sehingga tercipta suasana hidup yang lebih indah, lebih lengkap, hidup rukun, toleran, dan harmoni. Indeks Iklim Kebinekaan Jenjang SD pada tahun 2022 mencapai 65,93 dan tahun 2023 mencapai 71,14 yang dapat dikategorikan dengan capaian Baik, dengan perubahan skor dari tahun lalu naik 5,21. Sedangkan Indeks Iklim Kebinekaan SMP pada tahun 2022 mencapai 63,71 dan tahun 2023 mencapai 73,09 dengan kategori capaian Baik, dapat perubahan skor dari tahun lalu naik 9,38, sehingga kedua jenjang

Indek Iklim Kebinekaan ini dalam Rapor Pendidikan dapat didefinisikan capaiannya satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme. Capaian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.53 Capaian Indeks Iklim Kebinekaan Tahun 2019-2023

Kelompok Indikator Prioritas	Indikator	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Iklim Kebinekaan	Indeks Iklim Kebinekaan Jenjang SD	n.a	n.a	64,07	65,93	71,14
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	n.a	n.a	57,85	63,71	73,09

Sumber : Rapor Pendidikan Kabupaten Simeulue 2024 (Laporan diperbarui 28 Mar 2024).

11. Indeks Iklim Inklusivitas

Iklim kelas inklusif mengacu pada lingkungan di mana semua siswa merasa didukung secara intelektual dan akademis, dan diperluas rasa memiliki di kelas tanpa memandang identitas, preferensi belajar, atau pendidikan. Indeks Inklusivitas Jenjang SD pada tahun 2022 mencapai 57,57 dan tahun 2023 mencapai 56,75 yang dapat di katagorikan dengan capaian Baik, meskipun perubahan skor dari tahun lalu Turun 0,82. Sedangkan Indeks Inklusivitas Jenjang SMP pada tahun 2022 mencapai 56,70 dan tahun 2023 mencapai 60,29 dengan katagori capaian Baik, dapat perubahan skor dari tahun lalu naik Naik 3,59, namun dalam Rapor Pendidikan Kabupaten Simeulue tahun 2024 dari kedua jenjang Indek Iklim Inklusivitas ini dapat didevinisikan capaiannya bahwa satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa. Capaian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.54 Capaian Indeks Iklim Inklusivitas Tahun 2019-2023

Kelompok Indikator Prioritas	Indikator	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Iklim Inklusivitas	Indeks Inklusivitas Jenjang SD	n.a	n.a	67,14	57,57	56,75
	Indeks Inklusivitas Jenjang SMP	n.a	n.a	69,55	56,70	60,29

Sumber : Rapor Pendidikan Kabupaten Simeulue 2024 (Laporan diperbarui 28 Mar 2024).

B. Kesehatan

1. Rumah Tangga Berakses Jamban Sehat

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (jamban sehat) adalah rumah tangga yang dapat mengakses fasilitas sanitasi yaitu jamban sehat dimana jamban yang digunakan memenuhi syarat kesehatan, antara lain dilengkapi dengan jenis kloset leher angsa atau plengsengan dengan tutup dan memiliki tempat pembuangan akhir tinja tangki (*septic tank*) atau Sistem pengolahan Air limbah (SPAL), dan merupakan fasilitas buang air besar yang digunakan sendiri atau bersama. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap jamban sehat dihitung dari perbandingan jumlah penduduk dengan akses terhadap jamban sehat dibagi jumlah penduduk di wilayah dan pada periode yang sama dikali 100 persen

Tabel 2.55 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses terhadap Jamban Sehat di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2021

No	Uraian	Tahun									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Jumlah RT yang memiliki akses terhadap jamban	11.022	11.222	11.622	12.372	8.968	9.093	10.078	1.217	18.696	18.667
2.	Jumlah Rumah Tangga	21.834	20.145	23.201	22.840	22.409	23.494	23.966	24.608	24.608	24.608
3.	Persentase	50,48	55,71	50,09	54,17	40,02	38,7	42,05	45,58	80,26	75,86

Sumber: Dinas PUPR Kab. Simeulue, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap jamban sehat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian Kabupaten Simeulue tahun 2021 sebesar 75,86 persen.

2. Persentase Rumah Tangga Prilaku Hidup Bersih dan Sehat

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. PHBS dapat dilakukan di berbagai

tatanan masyarakat, seperti tatanan rumah tangga, sekolah, tempat kerja dan tempat umum. PHBS di rumah tangga merupakan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau dan mampu melakukan PHBS dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah resiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Indikator PHBS di rumah tangga yang digunakan Kabupaten Simeulue ada 16 indikator, dengan 4 variabel yaitu ; (1) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Gizi ada 5 indikator, (2) Kesehatan Lingkungan ada 4 indikator, (3) Gaya Hidup ada 5 indikator, dan (4) Upaya Kesehatan Masyarakat ada 2 indikator. Strata PHBS di Rumah Tangga dapat ditentukan dengan penilaian sebagai berikut.

- Sehat Pratama, apabila rumah tangga memenuhi 1-5 indikator
- Strata Madya, apabila rumah tangga memenuhi 6-10 indikator
- Strata Utama, apabila rumah tangga memenuhi 11-15 indikator
- Sehat Paripurna, apabila rumah tangga memenuhi 16 indikator

Rumus untuk menghitung persentase PHBS rumah tangga sehat adalah jumlah rumah tangga ber PHBS strata utama dan paripurna dibagi jumlah rumah tangga yang dipantau dikali 100 persen. Berdasarkan indikator PHBS di atas, Strata PHBS di Rumah Tangga di Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.56 Persentase Rumah Tangga PHBS Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase RT berperilaku bersih dan sehat	62,28	n.a	n.a	n.a	22,50	75,00

Sumber: Dinkes Kab. Simeulue, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tahun 2016 berdasarkan rumah tangga yang disurvei/dipantau rumah tangga di Kabupaten Simeulue persentase RT berperilaku bersih dan sehat sebesar 62,28 persen. Tahun 2020 persentase RT berperilaku bersih dan sehat menurun drastis dari tahun 2016 yaitu sebesar 22,50 persen. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 75,00 persen. Dengan demikian rumah tangga di kabupaten Simeulue semakin sadar terhadap pentingnya hidup sehat dan bersih didukung dengan upaya program Pemerintah Daerah terkait dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

3. Fasilitas Kesehatan

Penyedia fasilitas layanan kesehatan meliputi pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Layanan ini menjadi sangat vital karena menyangkut kehidupan orang banyak. Fasilitas kesehatan juga merupakan komponen penting dalam melakukan peningkatan pelayanan kesehatan baik dari ketersediaan fasilitasnya maupun ketersediaan tenaga kesehatan. Kondisi fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Simeulue masih perlu ditingkatkan. Berikut data perkembangan penyelenggaraan kesehatan di kabupaten Simeulue tahun 2018-2022.

Tabel 2.57 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Rumah sakit	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah Puskesmas	Unit	11	14	14	15	15
Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	38	38	38	38	38
Jumlah Klinik Kesehatan	Unit	0	1	2	3	3
Jumlah Posyandu	Unit	150	164	168	167	168

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, 2023

Dari data diatas, sampai dengan tahun 2022 terdapat 1 Rumah Sakit di Kabupaten Simeulue dan 15 Puskesmas yang terdapat di setiap kecamatan dalam Kabupaten Simeulue. Sedangkan ketersediaan puskesmas pembantu (pustu) dari 138 desa yang ada di kabupaten Simeulue hanya tersedia 38 unit pustu. Sedangkan klinik kesehatan hanya tersedia sebanyak 3 unit klinik kesehatan serta terdapat pula 168 unit posyandu aktif di seluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten Simeulue. Untuk Data UPTD Puskesmas beserta tingkat akreditasinya disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.58 Data Puskesmas Berdasarkan Tingkat Terakreditasi di Kabupaten Simeulue Tahun 2022

No	Puskesmas	Tingkat Akreditasi
1	UPTD PKM Simeulue Timur	Madya
2	UPTD PKM Teupah Barat	Madya
3	UPTD PKM Teupah Tengah	Dasar
4	UPTD PKM Simeulue Barat	Madya
5	UPTD PKM Sanggiran	Madya
6	UPTD PKM Kuala Makmur	Dasar
7	UPTD PKM Teluk Dalam	Dasar
8	UPTD PKM Luan Balu	Belum Akreditasi
9	UPTD PKM Salang	Dasar
10	UPTD PKM Simeulue Tengah	Madya
11	UPTD PKM Teupah Selatan	Dasar
12	UPTD PKM Simeulue Cut	Madya
13	UPTD PKM Alafan	Madya
14	UPTD PKM Lamerem	Belum Terakreditasi

No	Puskesmas	Tingkat Akreditasi
15	UPTD PKM Alus-Alus	Belum Terakreditasi

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, 2023

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan akreditasi menjadi salah satu bagian terpenting dari upaya yang harus dilaksanakan. Berdasarkan data diatas terdapat 3 UPTD Puskesmas yang belum terakreditasi (UPTD PKM Luan balu, UPTD PKM Lamerem dan UPTD PKM Alus-alus) sedangkan puskesmas yang harus ditingkatkan akreditasinya sebanyak 5 UPTD Puskesmas UPTD PKM Teupah Tengah, UPTD PKM Kuala Makmur, UPTD Puskesmas Teluk Dalam, UPTD PKM Salang dan UPTD PKM Teupah Selatan). Sedangkan untuk data sumber daya manusia kesehatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.59 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tenaga Medis					
Jumlah Dokter Spesialis	14	26	32	34	36
Jumlah Dokter Umum	13	24	33	50	45
Jumlah Dokter Gigi	5	3	8	10	6
Tenaga Kebidanan/Keperawatan/Apoteker/Kefarmasian					
Jumlah Bidan	169	296	408	448	493
Jumlah Perawat	62	233	302	547	486
Jumlah Apoteker	1	6	9	15	9
Jumlah Tenaga Kefarmasian	5	35	48	56	18
Tenaga Prikologi Klinis					
Jumlah Prikologi Klinis	0	0	0	0	0
Tenaga Kesehatan Masyarakat					
Jumlah Epidemiolog Kesehatan	0	0	0	0	0
Jumlah Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Prilaku	30	96	74	74	n.a
Jumlah Pembimbing Kesehatan Kerja	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Jumlah Tenaga Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Jumlah Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Tenaga Kesehatan Lingkungan					
Jumlah Tenaga Sanitasi Lingkungan	2	7	9	22	30
Jumlah Entomolog Kesehatan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Jumlah Mikrobiolog Kesehatan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Tenaga Gizi					
Jumlah Nutrisionis	2	20	25	27	31
Jumlah Dietisien	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Tenaga Kesehatan Tradisional					
Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, 2023

Berdasarkan data diatas, jumlah sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Simeulue masih sangat terbatas atau belum tercukupi sesuai dengan yang dibutuhkan. Distribusi tenaga medis dan bidan terkonsentrasi di fasilitas kesehatan di pusat ibu kota kabupaten yaitu di Kota Sinabang.

4. Rasio Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Aksesibilitas pelayanan kesehatan pada suatu wilayah dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor ketersediaan dan faktor penghalang. Faktor ketersediaan berkaitan dengan ketersediaan pelayanan kesehatan. Aspek yang mempengaruhi ketersediaan meliputi fasilitas layanan kesehatan dan tenaga kesehatan. Sedangkan faktor penghalang merupakan faktor yang dapat menghalangi proses pelayanan kesehatan. Faktor ini meliputi permasalahan geografi seperti luasnya wilayah pelayanan, persebaran dan kepadatan penduduk serta ketersediaan alat transportasi. Faktor penghalang juga meliputi ketersediaan pembiayaan kesehatan dan kepemilikan asuransi oleh masyarakat. Kondisi geografis Kabupaten Simeulue mengharuskan ketersediaan fasilitas kesehatan di setiap lokasi yang harus dipenuhi, mulai dari klinik kecil hingga rumah sakit yang besar dengan fasilitas yang lengkap. Berikut rasio ketersediaan fasilitas kesehatan dalam wilayah Kabupaten Simeulue.

Tabel 2.60 Rasio Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Rumah sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Rasio Puskesmas dan pusku per satuan penduduk	1,57	1,48	1,47	1,49	1,49
Rasio posyandu per satuan balita	13,06	15,60	22,10	22,15	21,97
Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk	0,16	0,16	0,15	0,17	0,20
Rasio Dokter Umum per satuan penduduk	0,03	0,07	0,02	0,36	0,34
Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,04	0,14
Rasio Bidan per satuan penduduk	1,70	2,00	0,31	3,79	5,23

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, 2023

5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dapat disajikan capaian kinerja menggunakan indikator SPM Bidang Kesehatan sebagai berikut.

Tabel 2.61 Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Indikator	Uraian	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	615	456	74

No	Indikator	Uraian	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	587	337	57
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	559	334	60
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	1562	711	46
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	1137	1132	99,9
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	526	526	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	4750	n.a	n.a
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	2044	545	27
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	351	192	55
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Orang	377	205	54
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	369	133	36
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	616	274	44

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas, bahwa capaian kinerja berdasarkan indikator SPM bidang kesehatan pada tahun 2022 yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 74 persen, pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 57 persen, pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 60 persen, pelayanan kesehatan balita sebesar 46 persen, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tercapai 99,9 persen, pelayanan kesehatan pada usia produktif tercapai 100 persen, pelayanan kesehatan pada usia lanjut tidak diperoleh data jumlah warga yang mendapatkan pelayanan, pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sebesar 27 persen, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus sebesar 55 persen, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 54 persen, pelayanan kesehatan orang dengan TB sebesar 36 persen dan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sebesar 44 persen.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Jalan & Jembatan

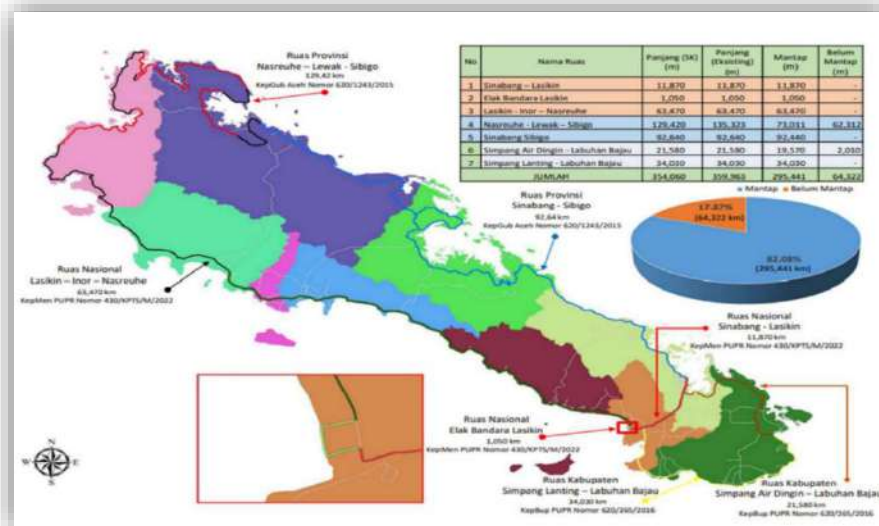
Berdasarkan kewenangan penanganan ruas jalan dalam wilayah Kabupaten Simeulue dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: Jalan Strategis Nasional, Jalan Provinsi dan jalan Kabupaten. Kondisi jalan yang mantap memberikan kemudahan mobilitas perdagangan barang, mbilitas penumpang dan mobilitas sosial. Kondisi jalan provinsi kondisi mantap sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 72,08 persen atau sepanjang 160,05 km dari total panjang jalan provinsi 226,06 km. Sedangkan untuk kondisi mantap jalan nasional sudah mencapai 100 persen atau sepanjang 76,39 km.

Kondisi mantap jalan Kabupaten hingga tahun 2022 baru mencapai 52,04 persen atau sepanjang 250 km dari total panjang jalan kabupaten 480,03 km. Perkembangan kondisi jalan provinsi dan strategis nasional dalam kondisi mantap dapat terlihat pada table berikut.

Tabel 2.62 Persentase Panjang Jalan Nasioanl, Provinsi dan Kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2012-2022

Tahun	Kondisi Jalan Kabupaten				Jalan Provinsi				Jalan Nasional			
	Panjang Jalan (KM)	Baik (Km)	Sedang (Km)	(%) mantap	Panjang Jalan (KM)	Baik (Km)	Sedang (Km)	(%) mantap	Panjang Jalan (KM)	Baik (Km)	Sedang (Km)	(%) mantap
2012	480,43											
2013	480,43											
2014	480,43											
2015	480,43											
2016	480,43	136,10		28,32								
2017	480,43	136,10		28,32								
2018	480,43	144,10		30,00								
2019	480,43	300,70		62,59								

Tahun	Kondisi Jalan Kabupaten				Jalan Provinsi				Jalan Nasional			
	Panjang Jalan (KM)	Baik (Km)	Sedang (Km)	(%) mantap	Panjang Jalan (KM)	Baik (Km)	Sedang (Km)	(%) mantap	Panjang Jalan (KM)	Baik (Km)	Sedang (Km)	(%) mantap
2020	480,43	357,10		74,33								
2021	480,43	403,70		84,00								
2022	480,43	189,86	60,18	52,04	222,06	160,05	0	72,08	76,39	76,39	0	100,00
2023	480,43	189,51	49,34	49,72	222,06	160,05	0	72,08	76,39	76,39	0	100,00
2024	480,43	200,72	27,85	47,58	222,06	160,05	0	72,08	76,39	76,39	0	100,00



Gambar 2.43 Kondisi Jalan Lingkaran Kabupaten Simeulue.

Kabupaten Simeulue yang merupakan daerah kepulauan memiliki jaringan jalan utama berupa jalan lingkaran yang menghubungkan antar kecamatan dan menjadi tulang punggung aksesibilitas perekonomian daerah. Ruas jalan ini terdiri dari tiga kewenangan, yaitu jalan nasional sepanjang 76,39 km dengan kondisi mantap 100%, jalan provinsi sepanjang 222,06 km dengan kondisi mantap 72,08%, serta jalan kabupaten sepanjang 480,43 km dengan kondisi mantap 47,58%. Meskipun jalan nasional dan sebagian besar jalan provinsi sudah dalam kondisi baik, kualitas jalan kabupaten masih memerlukan perhatian lebih agar seluruh jaringan jalan lingkaran dapat optimal mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di Simeulue.

Jembatan kabupaten ber kondisi baik dari Tahun 2016 sampai 2018 cenderung meningkat. Kondisi jembatan pada Tahun 2018, dari total unit jembatan yang ada terdapat

347 unit jembatan ber kondisi baik atau setara dengan 96,25 persen. Untuk tahun 2021 capaian pembangunan jembatan meningkat sebesar 97,50 persen atau jembatan dalam kondisi baik sebanyak 352 unit.

Tabel 2.63 Jembatan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2016-2024

Tahun	Jembatan Kabupaten		
	Jumlah Jembatan	Kondisi Baik (Unit)	Persentase
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2016	361	206	57,00
2017	361	347	96,25
2018	361	347	96,25
2019	361	n.a	n.a
2020	361	n.a	n.a
2021	361	352	97,50
2022	361	352	97,50
2023	361	352	97,50
2024	361	352	97,50

Sumber: Dinas PUPR Kab. Simeulue, 2024

2. Penataan Ruang

Lahirnya Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034, mengamanatkan agar pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan pola ruang dan struktur ruang yang telah direncanakan. Ketaatan terhadap tata ruang dievaluasi berdasarkan sejauh mana pelaksanaan penataan ruang dilaksanakan di Kabupaten Simeulue yang diukur dengan membandingkan antara tahap kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang sudah dilakukan dengan penyelesaian kegiatan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Simeulue yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang sesuai struktur dan pola ruang.

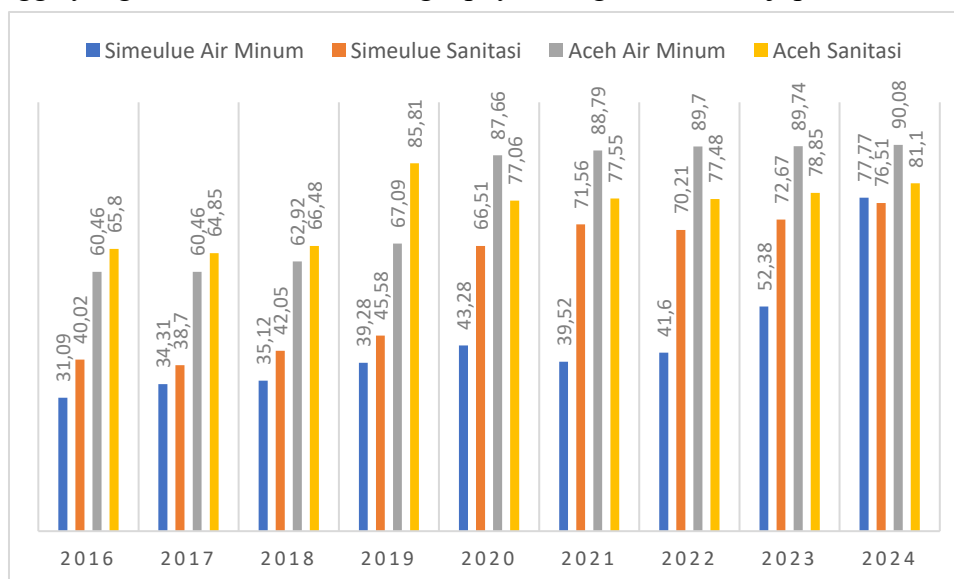
Namun demikian dengan perkembangan kebutuhan ruang yang semakin meningkat sementara kondisi ruang yang ada tidak bertambah, maka muncul potensi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai atau pelanggaran tata ruang sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya tingkat kesesuaian pelaksanaan struktur dan pola ruang terhadap RTRW. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Simeulue telah melakukan evaluasi RTRWK Simeulue pada tahun 2019 kemudian dilanjutkan dengan peninjauan kembali pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 dilakukan revisi dengan kondisi terakhir sampai dengan tahun 2022 Revisi Rencana RTRWK Simeulue belum selesai. Oleh karenanya penyelesaian revisi RTRWK Simeulue merupakan target mendesak yang harus diselesaikan pada tahun 2023 ini.

Tabel 2.64 Persentase Kesesuaian pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRWK Simeulue Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRWK Simeulue Tahun 2024-2034	50	60	70	n.a	70	

3. Air Minum dan Sanitasi

Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi di Kabupaten Simeulue sejak tahun 2016 sampai dengan 2021 menunjukkan angka yang beragam. Rumah tangga berakses air minum layak berada pada angka 31,09 persen sampai 39,52 persen pada rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Kondisi ini masih sangat jauh di bawah capaian Provinsi Aceh yang telah mencapai 77,06 persen. Disisi lain, kondisi pelayanan akses sanitasi layak menunjukkan peningkatan persentase yang signifikan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 35,84 persen. Dari angka 40,02 menjadi 75,86 persen. Kondisi ini terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik. Data selengkapnya sebagaimana tersaji pada Gambar 2.47.



Gambar 2.44 Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2021

4. Jaringan Irigasi

Pemerintah kabupaten mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa Kabupaten Simeulue memiliki 52 unit Daerah Irigasi dengan total luasan 5.343 Ha. Pembangunan di sector irigasi tergolong masih relative rendah, terlihat dari perkembangan rasio jaringan irigasi yang berada diangka 0,013 pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan pembiayaan di sector irigasi melalui dana DAK sejak tahun 2020 sudah tiak tersedia, sedangkan kebijakan pembiayaan dari anggaran APBK tidak tersedia. Perkembangan rasio jaringan irigasi dan irigasi dalam kondisi baik dapat terlihat pad table 2.52.

Tabel 2.65 Panjang Saluran Irigasi, Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik

No	Uraian	Sat.	Tahun										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Saluran Irigasi	Km	35,73	39,16	40,48	57,07	57,99	60,98	63,43	68,00	68,00	68,00	68,00
2	Luas DI	Ha	5.343	5.343	5.343	5.343	5.343	5.343	5.343	5.343	5.343	5.343	5.343
3	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio indeks	0,007	0,007	0,008	0,011	0,011	0,011	0,012	0,013	0,013	0,013	0,013
4	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen					42,31	46,15	45,61	57,59	68,42	80,7	

5. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rumah layak huni adalah bagian lain atau kebalikan dari RTLH. Sehingga angka Rumah layak huni didapat dari Jumlah rumah dikurangi RTLH.. Perkembangan persentase rumah layak huni cenderung mengalami peningkatan. Faktor pendorong adalah banyaknya bantuan pemerintah daerah dalam rangka penanganan RTLH salah satunya adalah program penanganan perumahan untuk fakir dan miskin (Duafa). Pada tahun 2018-2022 dari total jumlah rumah pada tahun 2020 sebanyak 17.196, jumlah rumah layak huni sebanyak 6.680 Unit yang telah dibangun oleh pemerintah daerah atau 38,85 persen dari total jumlah rumah Adapun perkembangan jumlah rumah tidak layak huni dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.66 Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah	17.196	17.196	17.196	17.196	17.196	17.196	24.750
Jumlah Rumah Layak Huni	5.911	5.977	6.680	6.680	6.680	6.680	11.522
Persentase	34,37	34,76	38,85	38,85	38,85	38,85	46,55

Sumber : Dinas PUPR Kab. Simeulue, 2024

Selanjutnya luasan permukiman di kawasan perkotaan Kabupaten Simeulue sebesar 97, 92 Ha, dan kawasan kumuh perkotaan seluas 16 Ha. hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 660/327/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh di Kabupaten Simeulue.

Tabel 2.67 Persentase Luasan Permukiman Perkotaan Kabupaten Simeulue

No	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas Permukiman Kumuh dan di Kawasan perkotaan	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
2.	Luasan Permukiman Perkotaan	97,92	97,92	97,92	97,92	97,92	97,92	97,92
3.	Persentase	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33

Sumber : Dinas PUPR Kab. Simeulue, 2024

D. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Ketenteraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melaksanakan kehidupan dengan tenang dan damai, serta merupakan jaminan bagi

terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Upaya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dilakukan dengan meningkatkan keamanan, kenyamanan lingkungan, dan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

Capaian SPM bidang ketertiban dan ketenteraman umum dan otonomi daerah tahun 2023 adalah sebesar 94,33 persen. Salah satu faktor pendukungnya yaitu Penegakan Qanun dan Perbup yang dilaksanakan untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar akan hukum yang berlaku dimasyarakat. Adapun Persentase Penegakkan dan penindakan Pelanggaran Qanun daerah terkait Ketertiban Umum, Ketenteraman dan perlindungan masyarakat kurun waktu Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat di bawah ini

Tabel 2.68 Penegakkan dan Penindakan Pelanggaran Qanun Daerah terkait Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Simeulue Tahun 2018–2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pelanggaran	12	14	13	45	103
2	Jumlah Pelanggaran Yang Ditegakan	9	13	10	4	95
3	Persentase Penegakan Yang Ditegakan	75,00	92,86	76,92	100	97,03

Sumber : Satuan PolPP dan WH Kabupaten Simeulue 2023

Selanjutnya capaian tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum dan Pilkada Tahun 2021/7 belum optimal yaitu sebesar 85,20 persen, dimana dari total jumlah pemilih sebanyak 56.858 orang yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 48,462 pemilih, yang terdiri dari pemilih laki-laki 83,00 persen dan perempuan 86,20 persen. Kecamatan yang memiliki angka partisipasi pemilih tertinggi berturut-turut adalah Kecamatan Alafan (78,10%), Simeulue Barat (72,80%), dan Simeulue Timur sebesar 48,70 persen.

E. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial dan program perlindungan dan jaminan sosial. Program pemberdayaan sosial dilaksanakan melalui pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk modal usaha dan atau alat kerja dan pengembangan potensi sumber daya manusia bagi warga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Program perlindungan sosial dilaksanakan melalui penyediaan permakanan, sandang serta alat bantu. Sedangkan program perlindungan dan jaminan sosial dilaksanakan melalui Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Simeulue sampai saat ini belum dilakukan secara optimal, yang disebabkan oleh kapasitas kelembagaan sosial yang

belum memadai, SDM yang belum memadai, minimnya sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya optimalnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial.

Penerima bantuan sosial diberikan pada masyarakat dan kelompok masyarakat yang rentan sosial. jumlah penerima bantuan sosial dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69 Data Penerima Bantuan Sosial Tahun 2018-2022

Uraianp	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penerima Bantuan Sosial (Orang)	1.691	1.713	2.726	1.321	1.003
Jumlah Penerima Bantuan Sosial (Kelompok)	n.a	n.a	n.a	124	65

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, 2023

2.4.2.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Ketenagakerjaan

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK memberikan gambaran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa.

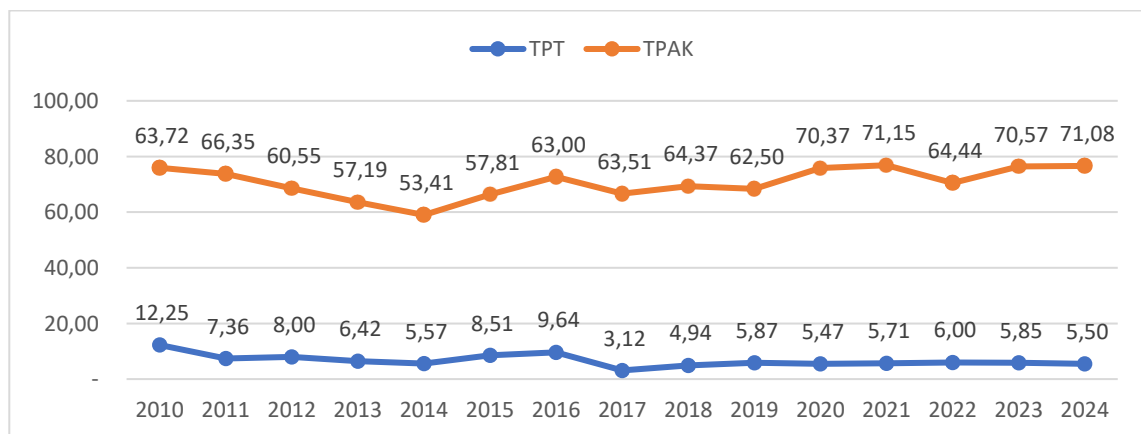
Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penganggur. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. TPAK yang tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha. Rumus TPAK adalah jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100 persen.

Tenaga kerja merupakan faktor terpenting dalam suatu proses produksi. Tenaga kerja yang kreatif dan inovatif akan mampu mengaktualisasikan potensi yang dimiliki, adaptif teknologi baru, dan memanfaatkan peluang sumber daya ekonomi lokal secara optimal. Untuk itu, kualitas tenaga kerja harus ditingkatkan. Melalui implementasi pembangunan secara berkesinambungan akan terciptanya tenaga kerja berdaya saing tinggi dan mampu merespon perubahan, baik saat ini maupun di masa mendatang. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Simeulue dalam periode 2010–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada 2010, TPAK berada di angka 63,72 persen, kemudian sempat menurun hingga

titik terendah 53,41 persen pada 2014. Setelah itu, TPAK berangsur meningkat, mencapai puncaknya pada 2021 sebesar 71,15 persen, sebelum sedikit menurun menjadi 71,08 persen pada 2024. Tren ini mengindikasikan adanya peningkatan keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja, baik melalui kegiatan bekerja maupun mencari pekerjaan.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami perubahan cukup dinamis. Pada 2010, TPT berada di level 12,25 persen, lalu menurun secara bertahap hingga mencapai titik terendah 3,12 persen pada 2017. Setelah itu, angkanya berfluktuasi ringan, dan pada 2024 tercatat sebesar 5,50 persen. Penurunan TPT dalam jangka panjang menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja, meskipun fluktuasi di beberapa tahun mengindikasikan adanya pengaruh faktor eksternal, seperti dinamika ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja.

Secara keseluruhan, peningkatan TPAK yang dibarengi dengan tren penurunan TPT menggambarkan arah positif pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Simeulue. Namun, agar keberhasilan ini berkelanjutan, dibutuhkan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan, dan adaptasi teknologi untuk menghadapi tantangan pasar kerja di masa depan.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.45 Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2021

Kendala yang masih ada dalam hal ketenagakerjaan di Kabupaten Simeulue adalah belum tersedianya secara maksimal Data Base pencari kerja. Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada juga belum berfungsi secara optimal disebabkan kurangnya tenaga instruktur dan pelatih serta kurang sarana dan prasarana pendukung pada BLK tersebut.

B. Pangan

Kondisi ketahanan pangan sangatlah dipengaruhi oleh ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Berbagai permasalahan dan isu pangan yang dihadapi diantaranya:

Pertama, dalam aspek ketersediaan pangan, dimana peningkatan produksi sebagian komoditas pangan, khususnya beras, belum bisa mengimbangi kenaikan konsumsi dan kebutuhan akan komoditas ini, sehingga ketergantungan terhadap impor beras dapat mempengaruhi ketahanan pangan. Kedua, dalam aspek keterjangkauan pangan, faktor kemiskinan dan relatif tingginya harga pangan terhadap pendapatan masih menjadi tantangan utama dalam upaya meningkatkan akses pangan. Kondisi pasokan pangan Simeulue saat ini masih sangat tergantung pada daerah lain terutama dari Aceh & Sumatera Utara. Ketiga, dalam aspek pemanfaatan, dimana pola konsumsi sebagian besar masyarakat Simeulue masih kurang ideal. Karbohidrat masih mendominasi asupan kalori, sedangkan konsumsi protein hewani, buah-buahan, dan sayuran masih belum mencukupi; serta peningkatan konsumsi makanan olahan dan siap saji di perkotaan maupun perdesaan.

Secara umum kondisi ketahanan pangan dapat dilihat melalui pencapaian pola pangan harapan (PPH) ketersediaan dan konsumsi pangan. Capaian PPH ketersediaan dan konsumsi pangan Simeulue selama sepuluh tahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada gambar..

Kabupaten Simeulue terus berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat secara berkelanjutan. Tahun 2012, paling kurang 2 desa tergolong sebagai desa rawan pangan. Namun, tahun 2014 desa rawan pangan berjumlah 6 desa, berkurang dari 9 desa rawan pangan tahun 2013. Namun pada tahun 2015, Kabupaten Simeulue sudah bebas dari desa rawan pangan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Simeulue akan tetap memajukan sektor pangan sehingga mencapai kemandirian pangan.

Tabel 2.70 Perkembangan Desa Rawa Pangan Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022

Kecamatan	Tahun										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Simeulue Timur	0	1	0	0							
Simeulue Tengah	0	2	0	0							
Simeulue Barat	0	1	1	0							
Teupah Selatan	0	0	1	0							
Teupah Barat	0	2	0	0							
Salang	0	0	1	0							
Teluk Dalam	0	0	1	0							
Alafan	0	0	1	0							

Kecamatan	Tahun										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Teupah Tengah	0	1	0	0							
Simeulue Cut	2	2	1	0							
Jumlah	2	9	6	0							

C. Pertanahan

Salah satu indikator yang menjadi target urusan pertanahan adalah peningkatan luas tanah bersertipikat. Jumlah lahan bersertipikat adalah jumlah lahan yang sudah bersertipikat (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Milik, dan Hak Pakai). Jumlah bidang lahan bersertipikat dapat dilihat pada tabel berikut.

Di Kabupaten Simeulue yang menjadi konsentrasi pelaksanaan urusan pertanahan adalah penatagunaan tanah dan penyelesaian lahan yang belum bersertipikat khususnya pada aset pemerintah daerah. Data kondisi kinerja penyelenggaraan bidang urusan pertanahan pada Dinas Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71 Perkembangan Bidang dan Luas Tanah Aset Pemda Bersertipikat Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2023 (bidang)

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Bidang Tanah Bersertipikat	n.a	n.a	n.a	n.a	207	207
2	Jumlah Bidang tanah yang seharusnya bersertipikat	n.a	n.a	n.a	n.a	565	565

Sumber : Dinas Pertanahan, 2024

D. Lingkungan Hidup

1. Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup – IKLH digunakan untuk mengidentifikasi kualitas lingkungan suatu kawasan dan membandingkan kawasan-kawasan dengan tingkat kualitas lingkungan yang berbeda. perhitungan semua komponen IKLH, yakni nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) berdasarkan PerMen LHK RI No. 27 Tahun 2021. Untuk tingkat kabupaten/ kota, nilai IKLH dihitung berdasarkan jumlah dari nilai IKA (37,6%), IKU (40,5%), dan IKL (21,9) tanpa kontribusi IKAL.

Tabel 2.72 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2023

No	Indeks	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	IKA	n.a	n.a	n.a	n.a	60,83	
2	IKU	n.a	98,44	87,00	88,63	91,48	
3	IKTL	69,13	70,06	71,71	81,51	81,51	
5	IKLH	n.a	57,56	51,38	n.a	77,77	78,82

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, 2023

2. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

Peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Mengingat permasalahan lingkungan hidup merupakan persoalan yang kolektif maka tidak cukup hanya peran masyarakat saja namun diperlukan partisipasi semua komponen seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kelompok yang peduli terhadap lingkungan dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya dan meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Simeulue. Ini dimaksudkan agar terjadinya harmonisasi dalam pelaksanaan di lapangan sehingga tujuan kelestarian lingkungan hidup tercapai. Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.73 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase ketelibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup						

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, 2022

3. Persentase Pengelolaan Kawasan Tahura

Taman Hutan Raya (Tahura) adalah sebuah kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk tempat mengoleksi tumbuhan atau satwa, baik jenis yang asli Indonesia ataupun bukan asli Indonesia. Adapun pemanfaatannya bagi kepentingan umum seperti penelitian, ilmu pengetahuan, serta sebagai fasilitas yang menunjang budidaya, budaya rekreasi, dan pariwisata.

Taman Hutan Raya (Tahura) dikelola oleh pemerintah yaitu dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Dilihat dari status hukumnya, Tahura merupakan kawasan lindung yang dikategorikan sebagai hutan konservasi bersama-sama dengan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru. Persentase pengelolaan kawasan Tahura Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.74 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase pengelolaan Kawasan Tahura	25,00	25,00	26,00	28,00	28,00	28,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, 2023

4. Persampahan

Salah satu tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Simeulue adalah pengelolaan persampahan, luasan wilayah dan volume sampah yang belum sebanding dengan ketersediaan sumber daya sarana dan prasarana untuk penampungan/mobilisasi sampah masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki peran dalam penanganan persampahan sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, salah satunya pengelolaan atas kawasan TPA di desa Suak Buluh. Keterbatasan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi jumlah volume sampah yang ditangani. Kondisi sarana angkutan sampah dan perkembangan penanganan persampahan digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.75 Perkembangan Armada dan Kapasitas Angkut Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue Tahun 2023

No	Jenis Armada	Kapasitas	Jumlah Berdasarkan Kondisi (Unit)		Jumlah Ritasen (kali/Hari)	Jumlah Sampah yang Diangkut (Ton/Hari)
			Baik	Rusak		
1	Dum Truck	6	5	4	1	1,98
2	Amroll Truk	6	2	1	2	3,96
3	L-300 Pick Up	0	0	0	0	0
4	Becak	1,5	7	222	2	0,99
5	Kontainer	6	15	5	1	1,98

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, 2023

Tabel 2.76 Perkembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2022

No	Uraan	Satuan	Tahun										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Volume sampah ditangani	m3/hari	44	57	69	75	74		135,68	144,69	241,2	44	69
2	Jumlah Produksi Sampah	m3/hari	237	241	245	251	249		310,68	319,69	179,35	133,56	135,17
3	Persentase Penangan Sampah	persen	19	24	28	30	29,72		25,34	30,78	33,34	32,94	51,05
4	Jumlah TPS	unit	589	1178	1573	1335	1304		1226	1203	1140	1168	1174
5	Volume Daya tampung TPS	m3	94	94	188	253	248		551,7	541,35	149,8	154,72	178,96
6	Jumlah Penduduk	jiwa	84.722	83.173	87.598	89.117	89.059	90.825	92.977	93.724	94.146	94.368	95.047
7	TPS Persatuan Penduduk	persen	0,11	0,23	0,29	0,28	0,55		0,59	0,58	0,63	0,16	0,19

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, 2023

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa perkembangan volume penangan sampah mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2022 baru mencapai angka 51,05 persen mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang berada diangka 32,94 persen. Hal ini menjadi perhatian dalam pembangunan kedepan khususnya di sektor penangan persampahan.

E. Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penataan administrasi kependudukan menjadi program prioritas daerah dalam rangka menerapkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang juga merupakan program prioritas Nasional. Sampai dengan tahun 2022, jumlah penduduk yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah mencapai 93,30 persen dari total penduduk wajib KTP. Capaian angka tersebut mengalami kenaikan yang realtif besar dari tahun 2022 sebesar 53,10 persen. Sedangkan untuk persentase penerbitan akta kelahiran, masih tergolong rendah. Sampai dengan tahun 2021 baru mencapai 55,00 persen.

Penataan administrasi kependudukan dilakukan dalam suatu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selama ini sistem tersebut hanya online dari kecamatan langsung ke Pusat dan dari Kabupaten ke Pusat, sedangkan dari kecamatan ke kabupaten belum online. Karena itu, tenaga terlatih yang mampu mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sangat diperlukan. Dengan demikian diharapkan tersusunnya database

kependudukan yang baik dan akurat sesuai ketentuan. Selain itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan, terutama yang terkait dengan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN). Pemerintah Kabupaten Simeulue berupaya mengoptimalkan penyelenggaraan PATEN di setiap kecamatan.

Tabel 2.77 Perkembangan Penerbitan e-KTP dan Akta Kelahiran Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022

No	Uraan	Tahun										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Penduduk ber -eKTP	53,1	54,87	58,92	52,95	51,27	54,38	90,38	95,32	98,42		93,30
2	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	30,39	n.a	33,66	21,66	38,69	39,73	45,25	46,39	49,66	55,00	57,26

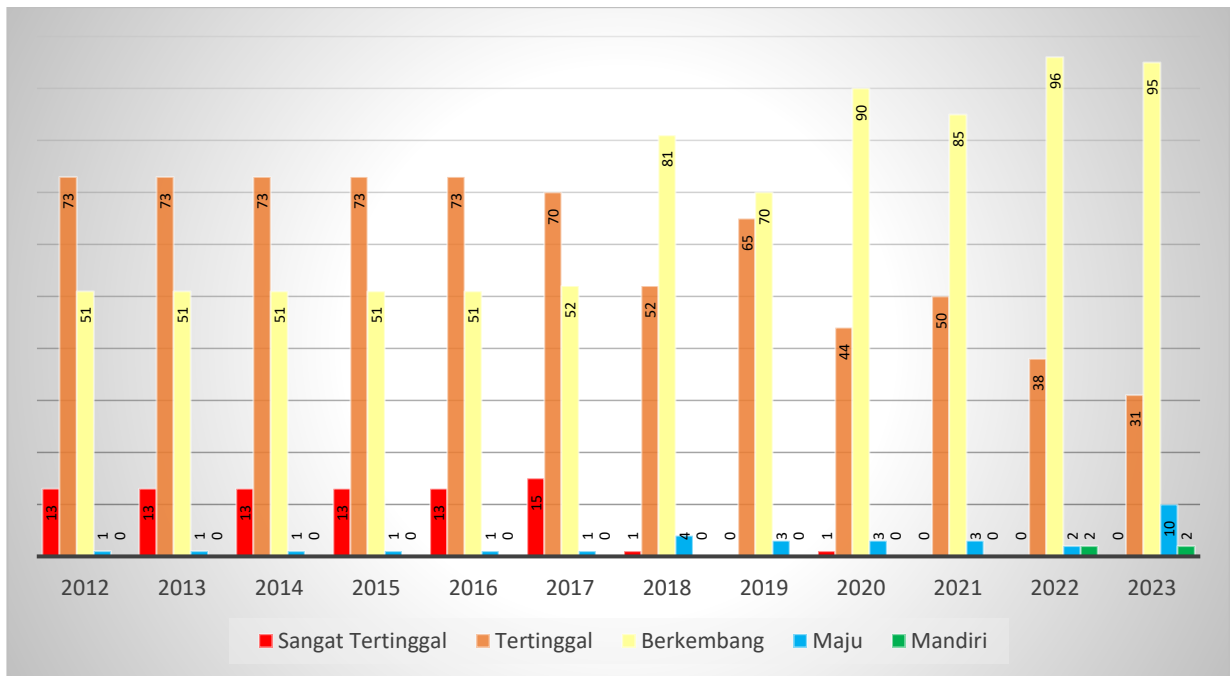
Sumber : Disdukcapil Kab. Simeulue, 2023

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Status Desa

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (sebagai dampak) melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam rangka mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri, Kementerian Desa PDTT meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) status atau perkembangan desa ada 5 Klasifikasi Status Desa yaitu: Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Des Tertinggal, Desa Sangat Tertinggal.

Secara administratif, jumlah desa di Kabupaten Simeulue sebanyak 138 desa. Selama 10 tahun terakhir, tidak ada penambahan (pemekaran) desa di Kabupaten Simeulue. Sampai dengan tahun 2021 dari 138 desa, 85 desa (61,69 persen) tergolong sebagai desa berkembang, 50 Desa (36,23 persen) desa tertinggal, dan 3 desa (2,17 persen) tergolong desa maju. Belum ada satu desa di Kabupaten Simeulue dengan status desa mandiri namun demikian status desa sangat tertinggal sudah menunjukkan angka 0. Perkembangan Status Desa di Kabupaten Simeulue, Tahun 2012-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Gambar 2.46 Perkembangan Status Desa di Kabupaten Simeulue Tahun 2012 – 2023

2. Pembinaan PKK.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan, dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Di Kabupaten Simeulue, tercatat PKK aktif pada tahun 2016 sebanyak 149 unit. Periode 2012-2016, perkembangan PKK aktif cenderung stabil

Upaya pembinaan PKK masih relatif terbatas serta diupayakan di masa mendatang untuk ditingkatkan secara bertahap. Sampai tahun 2016, kecuali Kecamatan Simeulue yang mendapatkan 2 PKK yang dibina, kecamatan lainnya, seperti Teupah Barat, Teluk Dalam, dan Simeulue Cut masing-masing hanya mendapatkan 1 PKK yang dibina. Secara keseluruhan, jumlah PKK yang di bina cenderung berkurang, dari 11 PKK tahun 2012 berkurang menjadi 5 PKK tahun 2016. Keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK terus didorong dan diharapkan berimplikasi positif terhadap kemajuan pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK.

Tabel 2.78 Perkembangan Jumlah PKK Aktif dan Pembinaan PKK di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022

Uraian	Tahun										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PKK Aktif	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
Jumlah PKK yang dibina	11	12	13	13	5	5	10	21	21	21	21

3. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Jumlah BUMDes yang aktif di Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.79 Perkembangan Jumlah BUMDes yang Aktif di Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah BUMDes	138	138	138	138	138	54	54
Jumlah BUM Desa Aktif	138	138	138	138	138	5	5
Persentase BUM Desa Aktif	100	100	100	100	100	9,25	9,25

Tabel diatas menunjukkan bahwa persentase BUMDes yang aktif pada tahun 2016 sampai 2021 cenderung meningkat, karena adanya tindak lanjut dukungan kegiatan mulai dari penyusunan perbub tentang pembentukan BUMDes, pedoman pengelolaan BUMDes sampai dengan dilakukan Bimtek dan pelatihan bagi pengurus BUMDes, dengan harapan bahwa kedepan BUMDes benar-benar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

H. Perhubungan

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah perdesaan maupun daerah yang lainnya. Kondisi

geografis Kabupaten Simeulue mengharuskan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan baik pelabuhan, bandara dan terminal menjadi faktor penting membangun perekonomian di Kabupaten Simeulue

Dalam konteks ekonomi, kedudukan wilayah Kabupaten Simeulue dalam peta Provinsi Aceh juga memiliki arti penting dan strategis utamanya terhadap akses transportasi/perhubungan bagi beberapa kabupaten lainnya di Pesisir BaratSelatan Aceh untuk menuju pusat pasar utama Pulau Sumatera, yaitu Medan. Dengan kedudukannya ini memudahkan bagi Kabupaten Simeulue untuk melakukan transaksi ekonomi dengan wilayah sekitarnya, seperti Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil. Kondisi tersebut di atas tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana transportasi laut dan udara yang sudah ada, walaupun belum cukup memadai. Jumlah ketersediaan pelabuhan, bandara dan terminal di Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80 Jumlah Pelabuhan/bandara/Terminal di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022

No	Infrastruktur Perhubungan	Tahun										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pelabuhan laut	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Jumlah Bandar Udara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Jumlah Terminal Tipe C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Halte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan data diatas, sejak tahun 2012-2022 tidak terjadi penambahan jumlah dari pelabuhan, bandara dan terminal. Jumlah pelabuhan sebanyak 3 pelabuhan, bandara sebanyak 1 bandara dan terminal merupakan terminal tipe C sebanyak 1 terminal. Pelabuhan yang terdapat di Kabupaten Simeulue merupakan pelabuhan penyebrangan antar Kab/Kota sebanyak 1 pelabuhan yang kewenangan pengelolaannya berada pada pemerintah provinsi, dan 2 pelabuhan lainnya merupakan pelabuhan penyebrangan antar pulau kecil yang ada di Kabupaten Simeulue yang merupakan kewenangan kabupaten. Jumlah dan frekuensi Trayek penyebrangan pelabuhan Sinabang yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.81 Rute dan Frekwensi Penyeberangan Kapal pada Pelabuhan Kolok Sinabang Tahun 2022

No	Kapal	Rute	Frekwensi
1	Aceh Hebat 1	Simeulue-Aceh Jaya (Calang)	2 kali seminggu
2	KMP Teluk Sinabang	Simeulue - Aceh Barat (Bubon)	2 kali seminggu
3	KMP Teluk Sinabang	Simeulue - Aceh Selatan (L. Haji)	2 kali seminggu
4	KMP Singgkil	Simeulue - Aceh Singkil (Singkil)	1 kali 1 minggu
5	KMP Aceh Hebat 3	Simeulue - Aceh Singkil (Singkil)	1 kali 1 minggu

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Simeulue, 2023

Berdasarkan data tersebut, terdapat 4 jalur penyebrangan dari dan ke Kabupaten Simeulue, yaitu dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Singkil dengan masing-masing frekwensi sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Pelayanan penyebrangan tersebut menggunakan kapal Aceh Hebat 1 dan Aceh Hebat 3 yang merupakan milik Pemerintah Aceh, KMP Teluk Sinabang dan KMP Teluk Singkil yang seluruh operasional pengelolaan penyebrangannya dilaksanakan oleh ASDP. Namun kondisi rute dan frekuensi tersebut dapat berubah jika kondisi cuaca di perairan barat selatan aceh menunjukkan kondisi yang tidak baik.

Pengelolaan bandara yang ada di Kabupaten Simeulue, merupakan kewenangan pemerintah Pusat dibawah kementerian perhubungan. Bandara tersebut terletak di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue. Saat ini tercatat terdapat 2 maskapai penerbangan yang membantu kelancaran transportasi di bandara tersebut yaitu maskapai Wings Air dan Maskapai Susi Air. Rute dan frekuensi penerbangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.82 Rute dan Frekwensi Penerbangan pada Bandara Lasikin Tahun 2022

No	Maskapay	Rute	Frekwensi
1	Susi Air	Simeulue - Sultan Iskandar Muda (Banda Aceh)	2 kali 1 minggu
2	Wings Air dan Susi Air	Simeulue - Kuala Namu (Medan)	2 kali 1 minggu

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Simeulue, 2023

Berdasarkan data diatas, terdapat 2 rute dari dan ke Kabupaten Simeulue, yaitu dari Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar dengan jumlah frekuensi 2 kali 1 minggu dan dari bandara Kuala Namu Deli Serdang dengan frekuensi 5 kali 1 minggu. Mengenai kondisi Terminal Tipe C di Kabupaten Simeulue berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang yaitu fasilitas utama dan penunjang, prosentase jumlah fasilitas yang ada masih jauh dibawah jumlah fasilitas yang ideal dimana

semua Terminal Tipe C memerlukan rehabilitasi sarana dan prasarana ruang tunggu. Untuk terminal Tipe C Sinabang sangat dibutuhkan rehabilitasi secara menyeluruh

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan semakin menurun pada periode tahun 2014-2017. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas di jalan, namun total panjang jalan yang cenderung tetap. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Simeulue tahun 2012-2022 di sajikan pada Tabel 2.66.

Tabel 2.83 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022

No	Indikator	Tahun										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Total Panjang Jalan (km)	687,8	687,8	687,8	687,8	767,6	767,6	767,6	767,6	767,6	767,6	767,6
2	Total Jumlah Kendaraan (unit)	n.a	2286	3962	5318	5116	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3	Rasio Jumlah Kendaraan perpanjang Jalan	n.a	3,32	5,76	7,73	6,66	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
4	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	n.a	0,30	0,17	0,12	0,15	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

I. Komunikasi dan Informatika

Dukungan infrastruktur teknologi informasi dari Pemerintah Kabupaten dan berkembangnya investasi dunia usaha/swasta di sektor tersebut merupakan penyebab akses informasi dan layanan internet semakin berkembang. Layanan komunikasi berupa telepon seluler/hand phone sudah menjangkau ke wilayah gampong. Bahkan, para pelaku usaha yang menjual aksesoris-aksesoris handphone dan layanan pulsa sangat mudah ditemui di pusat kota dan pusat kecamatan.

1. Perkembangan Akses Jaringan HP & Internet

Hingga tahun 2022 persentase desa terakses jaringan HP Kabupaten Simeulue telah mencapai 89,00 persen. Artinya Kabupaten Simeulue terkait dengan akses jaringan HP hanya tinggal beberapa Desa yang belum terakses.

Tabel 2.84 Perkembangan BTS Terbangun, Desa Terakses jaringan HP dan Jumlah Rumah Tangga memiliki HP di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022

No	Indikator	Tahun										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah BTS Terbangun	29	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	46	59	66
2	Persentase Gampong terakses jaringan HP	n.a	83,26	86,10	85,03	85,03	85,15	85,50	85,50	89,00	95,00	98,00
3	Persentase Rumah Tangga memiliki HP	n.a	83,26	86,10	85,03	85,03	85,50	87,02	n.a	n.a	90,00	94,20

Sumber: Diskominsa Kabupaten Simeulue, 2023

2. Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meliputi tiga domain yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE. Indek SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 2.85 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	n.a	n.a	n.a	1,16	n.a	1.86

Sumber: Diskominsa Kabupaten Simeulue, 2023

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2020 Indeks SPBE belum dapat dinilai atau data kosong, sedangkan tahun 2021 memperoleh indeks 1,16 dan pada tahun

2022 kembali tidak memperoleh nilai. Sedangkan Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (maturity level) untuk menilai domain kebijakan Internal SPBE, domain tata kelola SPBE dan domain layanan SPBE. Dan Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel berikut.

Tabel 2.86 Kriteria Predikat SPBE

Nilai Indeks	Predikat
4.2 – 5.0	Memuaskan
3.5 – < 4.2	Sangat Baik
2.6 – < 3.5	Baik
1.8 - < 2.6	Cukup
< 1.8	Kurang

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dalam era globalisasi saat ini berperan penting dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat, akurat dan mudah dijangkau. Tuntutan tersebut terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik serta tersalurnya aspirasi masyarakat. Selain berupaya untuk memenuhi target kinerja SPBE, Dinas Komunikasi dan Persandian Kabupaten Simeulue memiliki peran melaksanakan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi dalam menyelenggarakan urusan komunikasi dan Informatika.

J. Statistik

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para stakeholders, dunia usaha, akademisi, para pengamat serta masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan

fungsiya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral. Hal tersebut menjadikan terlambatnya penyajian data untuk pembangunan. Data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan adalah data sampai dengan $n+2$, sedangkan data yang tersedia adalah $n-1$. Hal ini kemudian diantisipasi dengan memproyeksikan suatu data hingga diperoleh proyeksi data untuk acuan perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan urusan statistik dilaksanakan dengan pengelolaan Portal Satu Data Kabupaten Simeulue serta berkoordinasi kebutuhan data dengan BPS. Untuk mencapai data tersebut, pemerintah daerah telah melakukan Kerjasama (MoU dan MoA dengan BPS untuk mencapai Satu Data Indonesia (SDI).

1. Satu Data Terpadu

Keberadaan website milik pemerintah Aceh diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Website dapat menjadi sumber informasi dan data satu pintu, sehingga semua data dapat diintegrasikan dalam satu sistem. Pemerintah Aceh sudah memiliki Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data. SIAT dimaksudkan untuk mewujudkan sistem informasi terpadu yang terdiri dari Integrasi Sistem Informasi, pengelolaan Satu Data, layanan keterbukaan Informasi Publik, dan Aceh Cerdas, untuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, selain data-data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) diperlukan juga data-data dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang mengurus statistik sektoral. Banyak sekali data-data sektoral bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang bisa dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Data tersebut diharapkan dapat diintegrasikan dan dapat diakses melalui satu pintu

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, maka untuk mendapatkan pengambilan keputusan yang berkualitas, diperlukan data dan informasi geospasial yang berkualitas. Penerapan prinsip Satu Data Indonesia perlu dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi geospasial yang berkualitas. Ciri-ciri data dan informasi geospasial yang berkualitas diantaranya harus memenuhi Standar Data, Metadata, Interoperabilitas, Kode Referensi dan Data Induk serta disimpan, diamankan, dan disebarluaskan serta dapat dibagi-pakai sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Adapun data

dan informasi Geospasial yang selama ini tersedia dan di produksi oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

K. Persandian

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Sektor persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait keamanan informasi sektor pemerintah. Permasalahan terkait persandian dan keamanan informasi adalah: 1) Perlu adanya peningkatan sistem keamanan informasi dalam rangka ketersediaan, autentikasi dan kerahasiaan informasi, baik informasi berklasifikasi maupun non klasifikasi , serta 2) Terbatasnya sumber daya di bidang persandian dan keamanan informasi, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya perangkat/peralatan persandian dan keamanan informasi. Sejalan dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maka semakin meningkat pula tindakan illegal/kejahatan yang akan terjadi pada sistim infrastruktur TIK, yaitu berupa serangan siber baik berbentuk runsomeware, Sql Injection, DDos, Phising maupun social engineering. Hal ini perlu perhatian yang mendalam dikarenakan perkembangan disektor TIK semakin pesat, terlebih pemanfaatan teknologi AI (artificial intelligence) dan IoT (Internet of things) yang dapat disalahgunakan dalam berselancar di dunia siber.

Saat ini penyelenggaraan persandian adalah untuk keamanan informasi dengan didukung sumber daya manusia (SDM) yang telah dilatih. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan risiko keamanan informasi adalah persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian risiko dibagi jumlah sistem elektronik yang ada dikali seratus persen. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan ayanan keamanan informasi bagi perangkat daerah sehingga dapat terwujud layanan keamanan informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi kepada pengguna.

Tabel 2.87 Perkembangan Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi persandian	Orang	n.a	n.a	1	n.a	n.a
2	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi	Perangkat daerah	6	6	6	6	6
3	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi	%	n.a	n.a	13,95	13,95	13,95

Sumber : Diskominsa Kab. Simeulue, 2023

L. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUKM) di Kabupaten Simeulue memegang peranan yang sangat penting dan menjadi basis ekonomi kerakyatan. Kecuali jumlah KUKM yang banyak, KUKM di Kabupaten Simeulue juga menyerap tenaga kerja lokal, menggunakan sumberdaya bahan baku lokal, serta mendorong perekonomian wilayah. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk terus memberdayakan dan mengembangkan KUKM sebagai basis ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.

Secara kuantitas, jumlah koperasi berfluktuatif selama dua belas tahun terakhir. Tahun 2012, jumlah koperasi sebanyak 139 unit. Angka tersebut meningkat menjadi 141 unit tahun 2013. Akhir tahun 2016, tercatat koperasi di Kabupaten Simeulue berkurang menjadi 78 unit, jauh lebih rendah dari tahun 2012. Implikasinya, anggota yang terserap dalam koperasi serta omset koperasi juga berfluktuatif selama periode 2012-2016.

Tabel 2.88 Perkembangan Koperasi di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022

UMKM	TAHUN										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Koperasi (unit)	139	141	141	106	78	78	84	86	90	90	96
Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	21	20	23	29	30	31	26	26	34	34	22

UMKM	TAHUN										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Koperasi Aktif (unit)	15,11	14,18	16,31	27,36	38,46	39,74	30,95	30,23	37,78	37,79	22,91
Jumlah Koperasi yang Dibina (unit)	21	20	23	24	20	15	n.a	3	10	10	7
Jumlah Anggota Koperasi (orang)	2705	3117	2731	2804	2736	2828	3128	3211	3408	3408	3602
Jumlah Omzet (Rp. Milyar)	22,63	22,63	9,70	8,23	21,32	21,34	22,43	22,43	20,66	20,66	20,63

Potensi UMKM di Kabupaten Simeulue berpeluang untuk berkembang terus. Hal ini disebabkan oleh Disperindagkop melaksanakan pembinaan dan mengikutsertakan UMKM pada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik Disperindagkop UKM maupun Dinas Koperasi UKM Provinsi Aceh serta adanya bantuan usaha Covid-19 untuk para pelaku UMKM. Akhir tahun 2021, jumlah UMKM mencapai 2518 unit, meningkat sebanyak 917 unit dari tahun 2012 yang berkisar 1.601 unit. Namun demikian, tenaga kerja yang terserap di sektor UMKM memperlihatkan penurunan, dari 3.742 orang tahun 2012 menjadi 3751 orang tahun 2021. Disisi lain omzet UMKM juga setiap tahunnya, dari Rp.50,58 miliar tahun 2012 menjadi Rp. 246,98 miliar tahun 2021.

Tabel 2.89 Perkembangan Jumlah UMKM Aktif di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022

UMKM	TAHUN										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah UMKM (Unit)	1601	1645	1686	1826	1826	429	1480	1480	2518	2599	2599
Jumlah Tenaga Kerja (orang)	3742	3981	4115	4230	2700	4266	3895	3558	3751	3461	3461
Jumlah Omzet UMKM (Rp.Milyar)	50,58	54,63	66,10	116,97	36,29	123,88	199,37	246,98	246,98	742,86	742,86

Sumber: Disperindagkop Kab. Simeulue, 2022

Berdasarkan tabel di atas terdapat 30 UMKM unggulan di Kabupaten Simeulue yang tersebar di sebagian Kecamatan Simeulue Timur dan ada juga di Kecamatan Teupah Selatan, Teupah Barat dan Teupah Tengah yang bergerak di usaha kuliner dan kerajinan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas UMKM khususnya yang terkait dengan Digitalisasi pemasaran produk UMKM dimana pada akhir Tahun 2024 telah melakukan Pelatihan Pemasaran Online kepada 23 UMKM di Kabupaten Simeulue yang bergerak di bidang usaha Kuliner dan Cafe atau Restoran.

M. Penanaman Modal

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal sering disebut sebagai investasi di sebuah daerah atau wilayah tertentu. Investasi Daerah adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun asing di suatu wilayah daerah spesifik. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan Kedua investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA).

Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsi pun bertambah dan bertambah pula effective demand. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut induced investment. Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri.

Penanaman modal atau investasi berperan sangat penting dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Keterbatasan anggaran pembangunan, mengharuskan pemerintah menggali potensi pendanaan atau penanaman modal dari dunia usaha/swasta di dalam negeri dan asing (PMDN dan PMA) Berbagai potensi dan unggulan investasi daerah ditawarkan dengan memperhatikan prospek dan jenis aktivitas ekonominya yang bermanfaat signifikan bagi daerah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berimplikasi secara berkelanjutan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan memberikan pendapatan yang berkesinambungan (income generating) yang lebih baik bagi masyarakat. Perkembangan nilai investasi di Kabupaten Simeulue tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90 Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Investasi PMA/PMD N (Rp)	3.541.197.600	7.976.625.368	9.976.625.368	59.749.946.009	181.289.223.765

Sumber : DPMPTSP Kab. Simeulue, 2023

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa nilai investasi dari tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2018 nilai investasi sebesar Rp. 3.541.197.600,- sedangkan tahun 2019 meningkat menjadi Rp. ,976.625.368,- dan tahun 2020 sebesar 9.976.625.368,-. Pada tahun 2021, nilai investasi di Kabupaten Simeulue meningkat tajam menjadi Rp. 59.749.946.000,- dan pada tahun 2022 peningkatan yang sangat signifikan kembali terjadi yaitu sebesar Rp. 181.289.223.765.

Peningkatan nilai investasi juga dipengaruhi oleh kemudahan dalam pelayanan perizinan, sehingga investor tidak enggan dalam berinvestasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan investasi dan meningkatkan pelayanan perizinan saat ini masih terus berupaya untuk mengoptimalkan layanan perizinan. Perkembangan pelayanan perizinan di kabupaten Simeulue Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91 Perkembangan Pelayanan Perizinan diKabupaten Simeulue Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Izin yang diterbitkan	Izin	1581	28	29	451	849
2	Jumlah pengajuan Izin	Izin	1581	28	29	451	849
3	Jumlah aduan yang terselesaikan	Aduan	5	10	3	9	6
4	Jumlah aduan yang masuk	Aduan	10	15	11	9	7

Sumber : DPMPTSP Kab. Simeulue, 2023

N. Kepemudaan

Indeks pembangunan pemuda adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Ini merupakan salah satu indikator atau barometer pembangunan kepemudaan. Indeks Pembangunan Kepemudaan diukur melalui 5 dimensi yaitu 1) Pendidikan, 2) Kesehatan dan Kesejahteraan, 3) Lapangan dan Kesempatan Kerja, 4) Partisipasi dan Kepemimpinan, serta 5) Gender dan Diskriminasi. Secara umum pencapaian IPP Simeulue .Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Simeulue dalam 6 (enam) Tahun terakhir 2017-2022 belum tersedia data terkait hal tersebut.

Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. Menghadapi kompleksnya permasalahan bangsa menghadapi era revolusi industri 4.0, peranan pemuda Indonesia Simeulue khususnya terlihat nyata melalui berbagai usaha-usaha kreatif yang dilakukan dalam menggerakkan dan meningkatkan ekonomi bangsa melalui bisnis-bisnis startup, serta prestasi-prestasi yang dicapai.

Tabel 2.92 Perkembangan Jumlah Pemuda, Oraganisasi Pemuda, Kegiatan Kepemudaan dan Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022

Organisasi Kepemudaan	Satuan	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pemuda	orang	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Jumlah Pemuda berpresasi	orang	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Organisasi Kepemudaan	Satuan	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif	unit	n.a	n.a	17	17	17	17	17
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	keg.	4	4	2	4	4	3	5
Indeks Pembangunan Pemuda	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kub. Simeulue, 2023

O. Keolahragaan

Keberadaan organisasi pemuda dan olahraga tentu tidak dapat dilihat secara mandiri saja, melainkan harus ada peran dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan peran pemuda. Sampai dengan tahun 2022, berbagai kegiatan dalam hal pembinaan terus dilaksanakan oleh pemerintah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Simeulue yang memiliki peran dalam pengembangan organisasi pemuda dan organisasi olahraga terus melakukan upaya – upaya dalam meningkatkan kapasitas pemuda tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah cabang olahraga yang dibina yang mampu menorehkan prestasi. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.93 Jumlah Cabang Olah Raga Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2022

Keolahragaan	Satuan	Tahun										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cabang Olahraga Binaan	cabor	16	18	20	21	21	27	28	28	28	28	28
Cabang Olahraga Berprestasi	cabor	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	27	18	18	18	18	18
Atlit Olahraga Binaan	orang	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Atlit Berprestasi	orang											
Pelatih Berprestasi	orang	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Pelatih Olahraga Binaan	orang	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Keolahragaan	Satuan	Tahun										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gedung Pemuda	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Lapangan Olahraga	unit	348	248	348	353	276	n.a	278	276	276	276	276

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kub. Simeulue, 2023

Berdasarkan data diatas, sampai dengan tahun 2022, jumlah cabang olahraga yang dibina sebanyak 28 cabor, dan yang berprestasi sebanyak 18 cabor. Dari jumlah cabor yang dibina, jumlah cabor yang mewakili kabupaten sebanyak 22 cabor. Sedangkan data perolehan medali dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94 Perolehan Mendali Dalam Pekan Olahraga Tingkat Provinsi Tahun 2022

No	Kejuaraan Tingkat Provinsi	Perolehan Mendali		
		Emas	Perak	Perunggu
1	PORDA 2022	1	0	2
2	PORA 2022	5	2	16
3	Kejurwil Piala PANGDAM	5	4	1

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kub. Simeulue, 2023

P. Perpustakaan

Untuk meningkatkan budaya literasi harus didukung oleh lingkungan termasuk dukungan pemerintah dengan menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang baik, seperti; ketersediaan perpustakaan yang nyaman dan dapat digunakan untuk semua kalangan masyarakat, ketersediaan koleksi buku dan sumber bacaan yang up to date, ruang baca pada fasilitas publik, dan sosialisasi atau dukungan terhadap budaya literasi.

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (reading habit society) menuju masyarakat belajar () yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah

Pengunjung perpustakaan adalah masyarakat yang datang/berkunjung ke perpustakaan. Rumus persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan yaitu jumlah pengunjung dikurangi jumlah pengunjung tahun sebelumnya dibagi jumlah pengunjung tahun sebelumnya dikali 100 persen. Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Simeulue dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.95 Perkembangan Layanan Perpustakaan Kabupaten Simeulue

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pustaka Daerah	n.a	1	1	1	1
2	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	n.a	167	226	800	5965
3	Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung (%)	n.a	n.a	35,3	253,9	645,6
4	Jumlah Buku Perpustakaan yang Tersedia	n.a	367	367	560	560
5	Jumlah tenaga perpustakaan sesuai standar	0	0	0	0	2

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kub. Simeulue, 2023

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa budaya literasi masyarakat terus mengalami perkembangan yang positif yang mana ini memperlihatkan kegemaran membaca masyarakat Simeulue yang terus meningkat.

Q. Kearsipan

Indeks Manajemen Kearsipan adalah nilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue. Dasar penilaian Indeks Manajemen Kearsipan adalah Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor: 38 tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan. Untuk mengukur capaian indeks manajemen kearsipan digunakan sarana berupa audit kearsipan, dengan nilai atas hasil audit kearsipan yang terdiri dari:

- Nilai 91 s.d 100 dengan kategori “sangat baik”
- Nilai 76 s.d 90 dengan kategori “baik”
- Nilai 61 s.d 75 dengan kategori “cukup”
- Nilai 51 s.d 60 dengan kategori “kurang”
- Nilai dibawah atau sama dengan 50 dengan kategori “buruk”

Persentase pengelolaan arsip secara baku Persentase arsip Vital Konvensional yang dialih meddiakan untuk memperoleh nilai audit kearsipan dapat digunakan rumus akumulasi dari hasil audit internal dan audit eksternal dibagi dua. Tahapan pelaksanaan audit kearsipan terdiri dari pengisian formulir, verifikasi dan wawancara. Audit kearsipan internal dilakukan oleh

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Simeulue selaku Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Simeulue kepada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Simeulue, sedangkan Audit kearsipan eksternal dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Aceh kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Simeulue.

Pengelolaan kearsipan daerah mencakup kegiatan pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip pada organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Simeulue. Untuk dapat menerapkan pengelolaan arsip yang handal dan sesuai dengan kaidah kearsipan perlu diadakan kegiatan pembinaan kearsipan dan penyelamatan serta pelestarian dokumen/arsip. Pencapaian kegiatan pembinaan kearsipan pada organisasi perangkat daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keberhasilan pengelolaan arsip daerah tidak terlepas dari kesadaran masing-masing unit kerja tentang pentingnya arsip. Pencapaian kegiatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan semakin bertambahnya Khasanah arsip yang tersimpan di lembaga kearsipan daerah. Capaian Pengelolaan Kearsipan dapat dilihat dari peningkatan unit kerja yang sudah menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan.

Tabel 2.96 Perkembangan Layanan Perpustakaan Kabupaten Simeulue

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan	18	18	18	23	29
2	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan	45	45	45	45	45
3	Persentase perangkat daerah yang menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan	40,00	40,00	40,00	51,11	64,4
4	Jumlah tenaga arsiparis	n.a	n.a	n.a	n.a	2
5	Jumlah tenaga teknis pengelola kearsipan	n.a	n.a	n.a	n.a	29

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kub. Simeulue, 2023

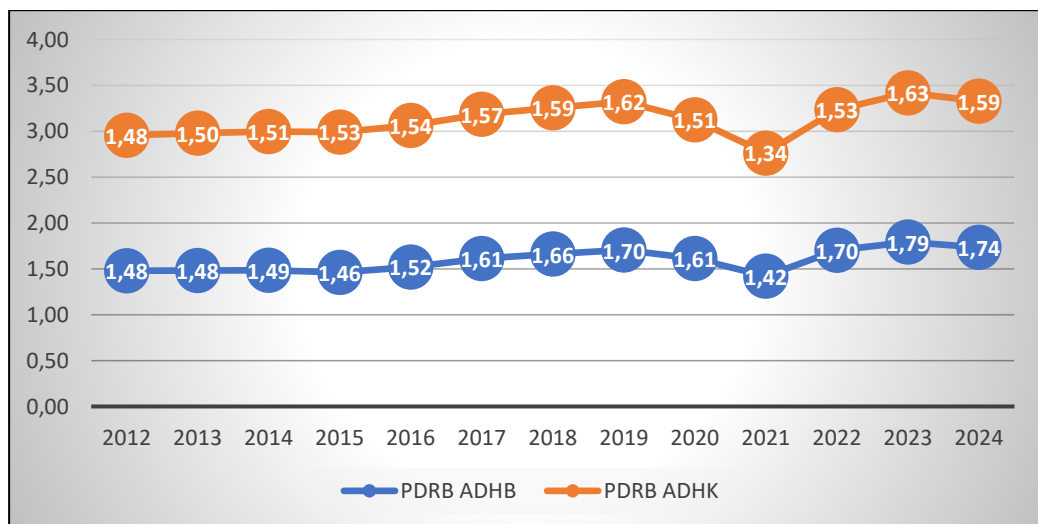
Data diatas menunjukkan sejak tahun 2018-2022 jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip sesuai dengan kaidah kearsipan terus mengalami peningkatan, dari 45 organisasi perangkat daerah, sebanyak 29 organisasi perangkat daerah yang telah menerapkan arsip sesuai dengan kaidah kearsipan atau sekitar 64,4 persen. hal tersebut tidak terlepas dari ketersediaan tenaga arsiparis dan tenaga teknis pengelola kearsipan yang ada di masing-masing perangkat daerah.

2.4.2.3. Fokus Layanan Umum Urusan Pilihan

A. Pariwisata

Pariwisata Simeulue merupakan salah satu sektor unggulan yang selalu memberikan kontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi Simeulue. Mengutip data yang dirilis BPS Kabupaten Simeulue, dalam kurun waktu 2012-2022, kontribusi sektor pariwisata Simeulue terhadap PDRB Kabupaten Simeulue mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,61 persen hingga samapi tahun 2021 angka ini terus mengalami penurunan hingga mencapai 1,43 persen. Namun pada tahun 2022 kontribusi sector pariwisata Kembali meningkat diangka 1,73 persen.

Disisi lain pertumbuhan sektor ini secara umum mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2013 pertumbuhan mencapai 6,07 persen mengalami kenaikan pada tahun 2017 diangka 6,41 persen. Namun diakibatkan oleh pandemi covid-19, pertumbuhan sector ini mengalami perlambatan hingga -8,30 persen pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022 kembali naik hingga mencapai angka pertumbuhan sebesar 18,99 persen.



Gambar 2.47 Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2012-2024

Pertumbuhan jumlah wisatawan merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kepariwisataan daerah. melalui kepariwisataan yang terkelola dengan baik memiliki kontribusi besar sebagai penyelamatan perekonomian daerah terutama masyarakat di sekitar destinasi wisata. Jumlah wisatawan di Kabupaten Simeulue selama lima tahun terakhir mengalami penurunan drastis, hal ini karena adanya pandemi Covid-19 sehingga Wisatawan Nusantara dan Mancanegara tidak bisa berkunjung ke Kabupaten Simeulue. Akibatnya menurunnya ekonomi dan pendapatan asli daerah Kabupaten Simeulue

Length of Stay (Lama Tinggal Wisatawan) adalah rata-rata lamanya tamu menginap di wisma/losmen dan Resort atau perbandingan antara banyaknya malam tamu dibagi malam tempat tidur dengan banyaknya malam kamar dihuni. Untuk memperoleh angka lama tinggal wisatawan dapat digunakan rumus Jumlah lama menginap tamu di wisma/losmen dan Resort yang ada dibagi jumlah wisma/losmen dan Resort yang ada di Kabupaten Simeulue. Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Simeulue tahun 2012 s.d. 2022 dapat dilihat dari rata-rata lama tinggal wisatawan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.97 Kontribusi Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB ADHB, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penginapan dan Rata-rata Lama Waktu Menginap di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2024

Tahun	Kontribusi Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB ADHB	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Losmen/Wisma /Resort	Rumah Makan/ Kafe	Rata-rata lama menginap
2012	18.069,70	n.a	n.a	n.a	n.a
2013	19.831,70	n.a	n.a	n.a	n.a
2014	21.651,50	n.a	24	n.a	n.a
2015	23.995,90	n.a	25	n.a	n.a
2016	26.940,80	28.032	37	n.a	3
2017	30.618,20	48.791	37	n.a	3
2018	33.933,80	54.589	38	n.a	3
2019	37.702,30	49.346	43	n.a	3
2020	36.672,00	33.702	43	72	3
2021	34.971,20	25.000	43	72	3
2022	45.768,50	n.a	45	76	3
2023	52.597,80	n.a	42	84	5
2024	54.688,70	n.a	42	84	5

Sumber: Disparbud kab. Simeulue, 2023

Wilayah kepulauan Simeulue memiliki potensi pariwisata yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Jumlah obyek wisata di Kabupaten Simeulue terutama terletak pada keindahan alamnya yang masih sangat alami. Dari 39 lokasi obyek wisata di kabupaten ini, 24 diantaranya adalah obyek wisata pantai. Kecamatan Teupah Barat memiliki lokasi obyek wisata terbanyak di kabupaten ini mencapai 7 buah, yaitu Pantai Lantik, Pantai Salur, Pulau Teupah, Pulau Mincau, Pulau Sevelak, Pantai Maudil dan Pantai Nancala 7. Kecamatan Simeulue Barat terdapat 5 obyek wisata yaitu Pantai Sigulai, Pantai Layabaung, Mata Ifaung, Pulau Tinggi dan Danau Lauo Laut tawar. Sementara di Teluk Dalam hanya terdapat Danau Laut Tawar Mutiara. Lokasi dan nama obyek wisata yang berkembang tahun 2016-2020 sebagaimana tersebut pada tabel berikut.

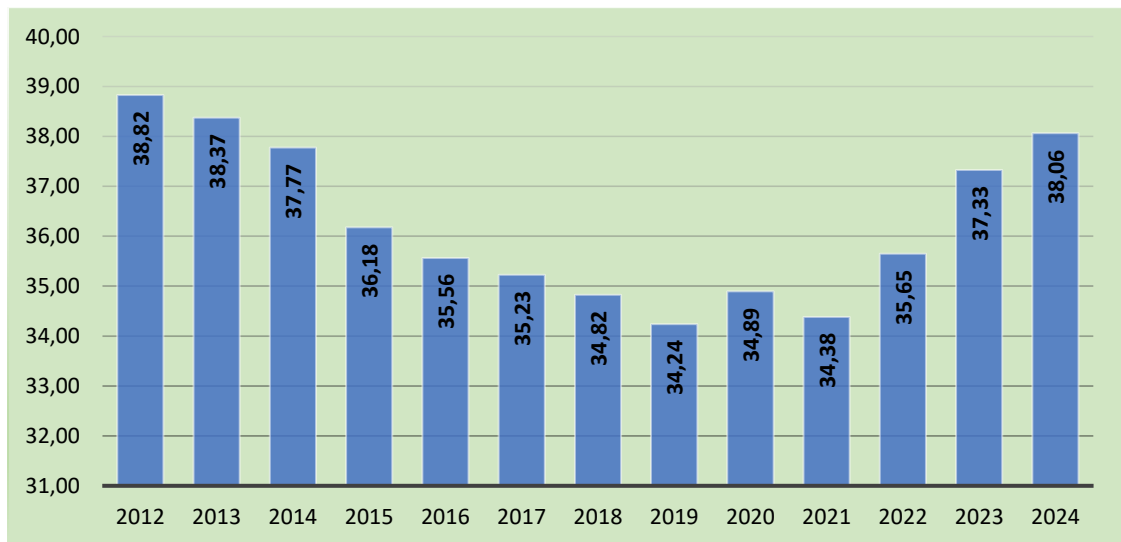
Tabel 2.98 Objek Wisata Kabupaten Simeulue Tahun 2021

Kecamatan	Objek Wisata
Simeulue Timur	Pantai Ganting, Pulau Simanaha, Pulau Siumat dan Pantai Ujung Babang, Pulau Panjang
Simeulue Tengah	Air Terjun Putra Jaya, Suak Baru, Pantai Araban
Simeulue Barat	Pantai sigulai, Pantai Layabaung, Mata Ifalung, Pulau Tinggi dan Danau Lauo Laut Tawar, Pantai Batu Ragi, Pantai Teluk Sembilan
Teupah Selatan	Pantai Alus-Alus, Pantai Badegong, Pantai Pasir Tinggi, Pantai Bebi dan Pantai Thailand, Pulau Batu Belayar, Pulau Lasia, Pulau Babi, Pantai Ujung Balla Pulau Bangkalak
Teupah Barat	Pantai Alaek Sektare, Pantai Salur, Pulau Teupah, Pulau Mincau, Pulau Sevelak, Pantai Maudil dan Pantai Nancala, Pantai Naibos
Salang	Pantai Nasreuheu, Pantai Bidadari, Pantai Iseng dan Pantai Along
Teluk Dalam	Danau Laut Tawar Mutiara, Pulau Pinang, Pantai Sambay, Air Terjun Bulu Hadek
Alafan	Pulau Selaut Besar, Pulau Selaut Kecil dan Puklau Lekon, Pantai Batu Alafan, Pantai Lafakha
Teupah Tengah	Pantai Busung, Pantai Lasikin, Taman Jaro Rayo dan Matanurung
Simeulue Cut	Pulau Simeulue Cut, Pantai Sianduk, dan Pantai Tale-Tale

Sumber: Disparbud kab. Simeulue, 2022

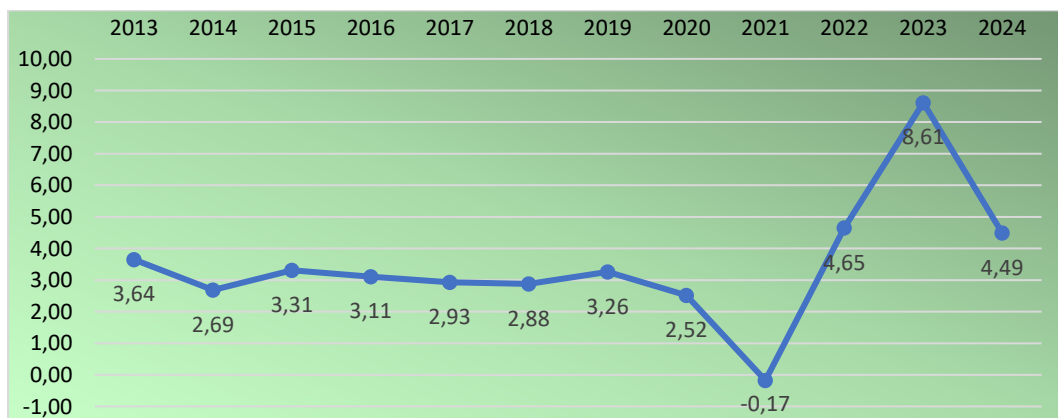
B. Pertanian

Pertanian masih menjadi penopang perekonomian di Kabupaten Simeulue dengan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Simeulue. Tahun 2022 berdasarkan laporan PDRB BPS bahwa sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 35,78 persen. Kondisi ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 dimana kontribusi di sector ini sebesar 38,82 persen.



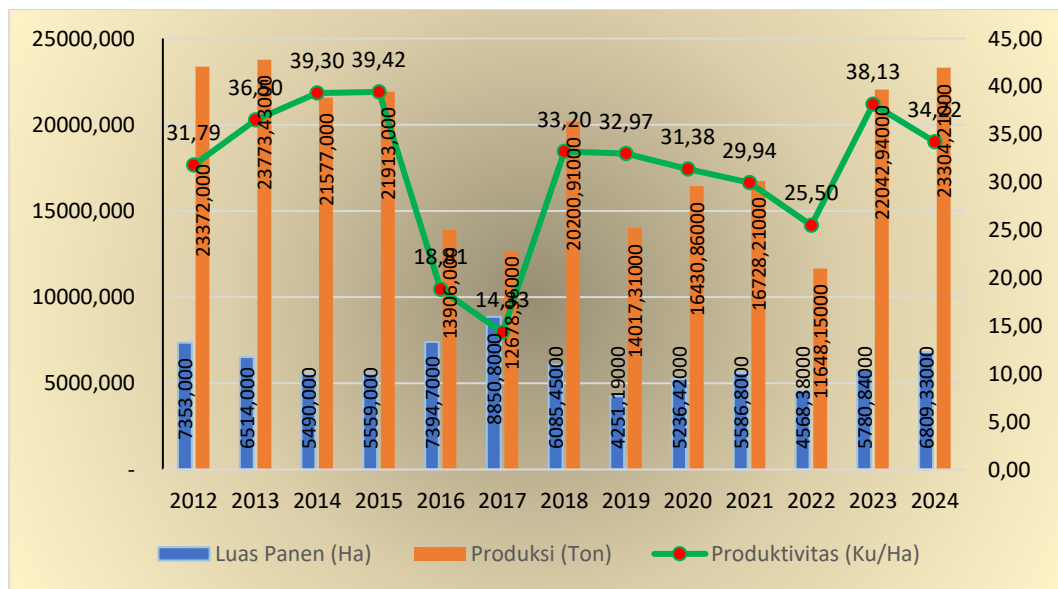
Gambar 2.48 Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2023 (PDRB ADHB)

Laju Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Simeulue menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan pada tahun 2021 sempat mengalami kontraksi atau mengalami pertumbuhan sebesar -0,17 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya efek Pandemi Covid 19 Namun pada taun 2022 sektor ini mulai mengalami peningkatan kembali dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,20 persen.



Gambar 2.49 Perkembangan Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Tahun 2013-2023 (PDRB ADHK)

Komoditas tanaman pangan di Kabupaten Simeulue, umumnya adalah padi, ubi kayu, dan ubi jalar. Di wilayah barat-selatan Aceh, Kabupaten Simeulue termasuk penghasil padi yang masih rendah. Tahun 2021, produksi padi di Kabupaten Simeulue berkisar 31.504 ton, mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama 9 tahun sebesar 8.132 ton dari tahun 2012 yang berada di angka 23.372 ton. Namun demikian produktivitas sedikit menurun dari 3,24 ton/ha di tahun 2012 menjadi sebesar 3,15 ton/ha pada tahun 2021.



Gambar 2.50 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2023

Komoditas tanaman pangan lainya selain padi adalah jagung, ubi kayu, dan ubi jalar, namun dengan luas tanaman yang masih terbatas. Pada tahun 2012 luas lahan tanam ubi kayu sebanyak 8 ha dan produksi sebanyak 85,50 ton. Luas tanam ubi kayu meningkat menjadi 47 ha di tahun 2021 dengan jumlah produksi 181 ton/tahun. Tanaman ubi jalar juga meningkat baik dari luas tanam maupun dari jumlah produksi. Pada tahun 2021 angka produksi mencapai 36 ton dengan luas tanam 8 ha.

Tabel 2.99 Luas Tanam dan Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan Selain Padi di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2021

Komoditas	Tahun											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Tanam (ha)												
Jagung	1	0	8	0	118,40	238,00	504,00	188,00	2,00	2,00	4	8,4
Ubi Kayu	8	12	17	3	13,00	41,00	31,00	15,00	47,0	79,0	63,0	63,0
Ubi Jalar	3	6	14	5	7,00	27,00	6,00	6,00	8,00	5,00	4,20	1,7
Produksi (ton)												
Jagung	8,75	0	28	0	62	190,4	751	152,8	736	1.800	4,6	4,37
Ubi Kayu	85,5	110	170	30	31,9	128	132	85	181	280	221	74,8
Ubi Jalar	3	22,8	56	2,5	28	88	46,5	27	36	36	29	5,2

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, 2024

Komoditas tanaman pertanian lainya selain tanaman pangan yang ada di Kabupaten Simeulue adalah tanaman hortikultura antara lain: cabai merah, cabai rawit, kacang Panjang,

ketimun dan terung. Perkembangan luas panen, jumlah produksi dapat terlihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.100 Luas Panen dan Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2021

Komoditas	Tahun										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Luas Panen (ha)											
Cabai Merah	3,00	4,00	14,00	22,00	36,00	75,00	66,00	67,00	32,00	32,00	
Cabai Rawit	1,00	3,00	11,00	17,00	21,00	26,00	26,00	26,00	15,00	15,00	
Kacang Panjang	6,00	7,00	14,00	18,00	17,00	14,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Ketimun	7,00	9,00	20,00	24,00	21,00	4,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Terung	2,00	3,00	9,00	11,00	19,00	14,00	1,00	0,00	3,00	3,00	
Produkti (ton)											
Cabai Merah	19,5	26	91	14,8	10,80	29,30	14,90	14,80	10,30	10,30	
Cabai Rawit	6,1	18,3	67,1	11,6	7,50	5,30	5,80	7,00	4,80	4,80	
Kacang Panjang	12	15,4	30,8	12,5	5,40	3,70	0,30	0,00	0,00	0,00	
Ketimun	12,6	16,2	37,5	14,1	2,90	0,40	0,00	0,00	0,10	0,10	
Terung	10	15	48,6	4,6	5,10	2,50	0,10	0,00	0,30	0,30	

Permasalahan substansial dalam pengembangan komoditi pangan dan hortikultura adalah ketersediaan bibit/benih unggul dan pemasaran. Penggunaan varietas unggul sering menjadi kendala dimana petani masih sangat tergantung dari bantuan pemerintah akibat belum tersedianya unit produksi bibit/benih unggul yang representatif dan mudah diakses oleh masyarakat. Selama ini sebagian besar kebutuhan bibit/benih unggul masih didatangkan dari luar daerah dengan harga yang mahal sehingga penggunaan bibit/benih unggul oleh petani masih sangat minim dan cenderung bergantung dari bantuan pemerintah

Kabupaten Simeulue juga memiliki komoditas buah buahan dengan jenis buah yang beragam terlihat pada table berikut.

Tabel 2.101 Produksi Komoditas Buah-Buahan di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2021 (ton)

Komoditas	Tahun										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pisang	20,4	21,2	29,5	27,1	12,3	14,6	18,2	19,5	28,2	28,2	
Nenas	1,3	1,4	3,8	4,9	1,5	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	
Belimbing	3,2	1,2	8,4	3,5	3,2	1,7	3,5	2,6	4,1	4,1	
Kedondong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Durian	61,0	9,6	95,9	11,3	14,5	30,7	15,1	10,9	14,4	14,4	
Jambu Biji	3,7	1,2	2,8	0,2	0,1	7,2	1,4	11,7	4,6	4,6	
Sawo	1,5	0,9	3,1	1,1	0,9	4,4	2,8	2,8	6,6	6,6	
Peapaya	8,6	7,4	10,0	19,0	14,1	18,1	12,7	13,9	11,7	11,7	
Sirsak	-	0,1	1,0	2,0	0,6	1,3	1,3	1,5	2,1	2,1	
Semangka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nangka	5,7	4,1	11,5	35,1	14,8	22,1	15,9	15,5	16,6	16,6	
Manggis	7,3	1,3	3,7	-	1,3	0,8	14,0	4,9	1,6	1,6	
Alpukat	-	-	-	-	1,9	2,7	4,7	2,5	3,3	3,3	
Mangga	1,0	-	-	0,6	0,6	2,5	2,5	4,9	7,3	7,3	
Rambutan	2,5	0,6	-	3,0	4,5	9,0	8,3	1,9	1,9	1,9	
Duku	-	-	-	-	1,1	-	0,2	0,1	0,7	0,7	

Pembangunan jalan usaha tani telah dilakukan di setiap kecamatan dalam upaya meningkatkan aksesibilitas produksi dan pemasaran dari kawasan sentra produksi. Sampai tahun 2020, jalan usaha tani yang dibangun sepanjang 14.904 meter. Panjang jalan usaha tani Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2022.

Tabel 2.102 Panjang Jalan Usaha Tani Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022 (dalam meter)

Kecamatan	Tahun										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Simeulue Timur	260	512	102	150	1.326	1.326	1.326	1.326	500		
Teupah Selatan	100	1.705	552	0	2.357	2.357	2.357	2.357	-		
Teupah Tengah	0	277	105	0	382	382	382	382	-		
Teupah Barat	250	871	1.657	0	6.861	6.861	7.911	7.911	-		
Teluk Dalam	400	625	0	0	2.551	2.551	2.551	2.551	1.163		

Kecamatan	Tahun										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Simeulue Tengah	800	1701	0	0	5.118	5.118	5.118	5.118	1.297		
Simeulue Cut	125	478	465	350	1.068	1.068	1.068	1.068	1.318		
Salang	266	1.208	825	0	2.299	2.299	3.098	3.098	-		
Simeulue Barat	1.160	1.200	801	800	3.161	3.161	3.161	3.161	7.244		
Alafan	500	387	916	0	1.803	1.803	1.803	1.803	3.382		
Jumlah	3.861	8.964	5.423	1.300	26.926	26.926	28.775	28.775	14.904		

Sumber: Dinas Pertanian Holtikultura dan Tanaman Pangan Kab. Simeulue,, 2021

Dalam upaya meningkatkan produksi padi dan mendorong pembangunan pertanian di Kabupaten Simeulue, juga telah mambangun infrastruktur pertanian lainnya, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103 Perkembangan Infrasturktur Pertanian Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2020

No	Infrastruktur Pertanian Terbangun	Kecamatan	Satuan	Tahun
1	2	3	4	5
1	Pembangunan Embung Desa Lubuk Baik	Alafan	1 Unit	2016
2	Pembangunan Embung Desa Angkeo	Teupah Barat	1 Unit	2016
3	Pembangunan Embung Desa Layabaung	Simeulue Barat	1 Unit	2016
4	Pembangunan Embung Desa Serafon	Alafan	1 Unit	2016
5	Pembangunan Embung Desa Labuhan	Teupah Selatan	1 Unit	2017
6	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	Simeulue Barat	632	2017
7	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	Simeulue Barat	1.038	2017
8	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	Simeulue Barat	422	2017
9	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	Alafan	828	2017
10	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	Teluk Dalam	500	2017
11	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	Teluk Dalam	342	2017
12	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	Teluk Dalam	250	2017
13	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	Teupah Barat	1.100	2017
14	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	Simeulue Cut	1.510	2017
15	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	Simeulue Tengah	400	2017
16	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	Teupah Selatan	250	2017
17	Pembangunan Kantor BBU	Simeulue Tengah	1 Unit	2017
18	Pembangunan Gudang Padi		1 Unit	2017
19	Pembangunan Embung Desa Kuala Bakti	Teluk Dalam	1 Unit	2018
20	Pembangunan Embung Desa Latak Ayah	Simeulue Cut	1 Unit	2018
21	Pembangunan Embung Desa Borengan	Simeulue Cut	1 Unit	2018

No	Infrastruktur Pertanian Terbangun	Kecamatan	Satuan	Tahun
1	2	3	4	5
22	Pembangunan Embung Desa Amabaan	Simeulue Barat	1 Unit	2019
23	Pembangunan Embung Desa Ujung	Simeulue Cut	1 Unit	2019
24	Pembangunan Embung Desa Lewak	Alafan	1 Unit	2019
25	Pembangunan Embung Desa Situfa Jaya	Simeulue Tengah	1 Unit	2019
26	Pembangunan Embung Desa Lambaya	Simeulue Tengah	1 Unit	2019
27	Pembangunan Embung Desa Luan Sorip	Simeulue Tengah	1 Unit	2019
28	Pembangunan Embung Desa Nasreuhe	Salang	1 Unit	2019
29	Pembangunan Dam Parit Desa Langi	Alafan	1 Unit	2019
30	Pembangunan Dam Parit Desa Sebbe	Simeulue Tengah	1 Unit	2019
31	Pembangunan Dam Parit Desa Suak	Simeulue Timur	1 Unit	2019
32	Pembangunan Long Storage Desa	Teupah Selatan	1 Unit	2019
33	Pembangunan Long Storage Desa Sigulai	Simeulue Barat	1 Unit	2019
34	Pembangunan Long Storage Desa Angkeo	Teupah Barat	1 Unit	2019
35	Pembangunan Mes Dinas		1 Unit	2019
36	Pembangunan Gudang Alsintan	Simeulue Timur	1 Unit	2019
37	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa	Simeulue Tengah	1 Unit	2020
38	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa	Simeulue Barat	1 Unit	2020
39	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa	Alafan	1 Unit	2020
40	Peningkatan Jalan Usah Tani Desa Sinar	Simeulue	1 Unit	2020
41	Pembangunan Jalan Produks Pertanian	Alafan	1 Unit	2020
42	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa	Teluk	1 Unit	2020
43	Pembanguan Linning Desa Lataling	Teupah	1 Unit	2020
44	Pembangunan Dam Parit Desa Mutiara	Salang	1 Unit	2020
45	Pembangunan Dam Parit Desa Seuneubuk	Teupah	1 Unit	2020
46	Pembangunan Jalan Usaha Tani Lala	Simeulue	1 Unit	2020
	Layabaung	Barat		
47	Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun	Simeulue	1 Unit	2020
48	Pembangunan Jalan Usaha Tani Blang	Simeulue	1 Unit	2020
49	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa	Simeulue	1 Unit	2020
50	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa	Simeulue	1 Unit	2020
51	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa	Simeulue Barat	1 Unit	2020
52	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa	Simeulue Barat	1 Unit	2020
53	Pembangunan Embung Desa Leubang	Teupah Barat	1 Unit	2020
54	Pembangunan Embung Desa Laayon	Teupah Barat	1 Unit	2020
55	Pembangunan Dam Parit Desa Lanting	Simeulue Tengah	1 Unit	2020
56	Pembangunan Dam Parit Desa Lamayang	Simeulue Tengah	1 Unit	2020
57	Pembangunan Long Storage Desa Sebbe	Simeulue Tengah	1 Unit	2020
58	Pembangunan Long Storage Desa Kuta	Simeulue Tengah	1 Unit	2020
59	Pembangunan Long Storage Desa Kuala	Teluk Dalam	1 Unit	2020
60	Pengadaan Power Tresher		5 paket	2020
61	Pembangunan Drainase BBU Sebbe	Simeulue Tengah	1 Pkt	2020

C. Perkebunan

Kabupaten Simeulue memiliki potensi perkebunan yang dapat dikelola secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut belum terkelola secara optimal akibat terbatasnya investasi dunia usaha/swasta yang bergerak di sektor perkebunan. Secara statistik, peran sektor perkebunan masih relatif stabil dalam mendorong kinerja ekonomi daerah Kabupaten Simeulue. Sektor ini termasuk dalam lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian memberikan kontribusi nilai tambah 18,09 persen dari keseluruhan PDRB ADHK Kabupaten Simeulue tahun 2019. Untuk total nilai tambah PDRB ADHB, kontribusi lapangan usaha ini mencapai 18,06 persen tahun 2019.

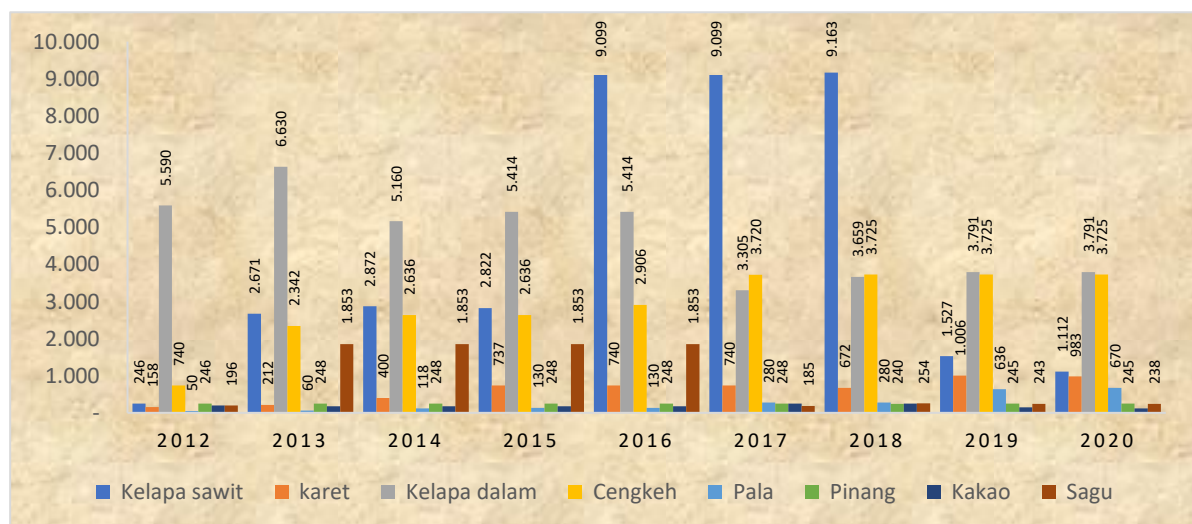
Berbagai komoditas unggulan perkebunan dibudidayakan petani, meliputi cengkeh, kelapa sawit, karet, kelapa dalam, pala, pinang, kakao, dan sagu. Luas tanam komoditas tersebut ada yang terus meningkat signifikan dan ada juga berfluktuatif selama lima tahun terakhir. Kondisi tersebut juga berdampak pada jumlah produksi komoditas. Komoditas cengkeh merupakan yang paling luas areal budidayanya, disamping juga komoditas kelapa dalam dibandingkan dengan komoditas lainnya. Perkembangan luas tanam dan produksi komoditas perkebunan di Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2020 seperti yang terdapat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.104 Luas Tanam Komoditas Perkebunan Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2020 (Ton)

Komoditas Perkebunan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kelapa Sawit	3.202	3.858	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813	3.719	3.719
Karet	2.066	2.332	2.786	3.459	6.255	3.827	3.827	3.807	3.807
Kelapa Dalam	7.472	7.476	7.503	7.703	5.086	7.903	7.803	8.107	8.107
Cengkeh	14.238	14.851	15.141	15.141	15.941	15.951	15.956	15.956	15.956
Pala	1.556	1.670	2.133	2.568	9.799	2.568	2.568	2.514	2.515
Pinang	1.942	1.951	1.951	1.951	1.871	1.951	1.951	2.063	2.063
Kakao	1.806	1.924	1.924	1.924	3.163	1.924	1.924	1.884	1.884
Sagu	1.999	2.351	2.356	2.356	2.356	2.356	2.356	1.940	1.941



Gambar 2.51 Grafik Luas Tanam Komuditas Perkebunan Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2020



Gambar 2.52 Grafik Jumlah Produksi Komuditas Perkebunan Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2020 (dalam Ton)

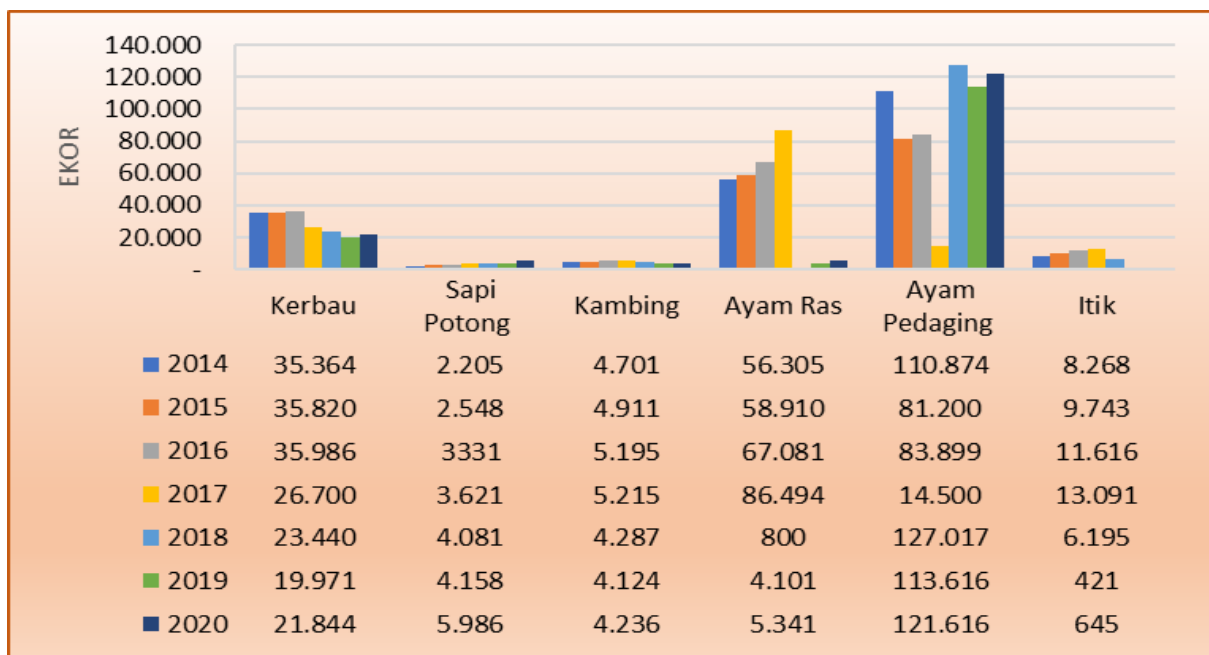
D. Peternakan

Perkembangan populasi ternak besar, kecil dan unggas selama enam tahun terakhir di Kabupaten Simeulue cenderung menurun. Dari semua jenis ternak, hanya jenis sapi potong yang memperlihatkan angka kenaikan populasi ternak, dari 2.205 ekor di tahun 2014 meningkat menjadi 5.989 ekor Tahun 2020. Ayam ras dan itik menurun drastis, masing-masing menurunt menjadi 5.341 ekor dan 645 ekor pada tahun 2020. Sementara pada tahun 2014, ayam ras berjumlah 56.305 ekor dan itik berjumlah 8.268 ekor. Adapun ternak kambing tercatat 4.701 ekor tahun 2014 sedikit meningkat menjadi 4.236 ekor tahun 2020.

Perkembangan populasi ternak besar juga cenderung menurun selama enam tahun terakhir. Akhir tahun 2020, populasi kerbau mencapai 21.844 ekor, dari sebelumnya 35.364 ekor di tahun 2014. Perkembangan populasi ternak selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah.

Tabel 2.105 Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2020 (Ekor)

Hewan Ternak	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kerbau	35364	35820	35986	26700	23440	19971	21844
Sapi Potong	2205	2548	3331	3621	4081	4158	5986
Kambing	4701	4911	5195	5215	4287	4124	4236
Ayam Ras	56305	58910	67081	86494	800	4101	5341
Ayam Pedaging	110874	81200	83899	14500	127017	113616	121616
Itik	8268	9743	11616	13091	6195	421	645



Gambar 2.53 Grafik Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2020

E. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Simeulue termasuk salah satu wilayah di barat selatan Aceh yang langsung berbatasan dengan laut. Kabupaten ini diapit dan dikelilingi Samudera Hindia. Dengan posisi tersebut, Kabupaten Simeulue memiliki potensi kekayaan laut cukup besar yang dapat didayagunakan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan tabel dibawah menunjukkan bahwa Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Simeulue semakin meningkat secara signifikan selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2012 produksi perikanan tangkap sebesar 8.561 Ton. Hingga akhir tahun 2022 tercatat sebesar 21.511 Ton. Peningkatan hasil produksi ini disebabkan oleh adanya program pemerintah

dan swasta terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap setiap tahunnya disediakan oleh pemerintah daerah untuk para nelayan.

Tabel 2.104 Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kabupaten Simeulue Tahun 2012 – 2022

Uraian	Tahun										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Perikanan laut/Tangkap (Ton)	8.561	12.538	13.965	12.696	14.653	14.130	16.430	17.173	19.210	21.113	21.511
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	n,a	n,a	n,a	n,a	23,73	31,21	24,66	9,58	n.a	62,46	54,30
Total Produksi	n,a	n,a	n,a	n,a	14.677	14.161	16.455	17.183	19.210	21.175	21.565

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Simeulue, 2023

Ketersediaan armada perikanan yang layak sangat mempengaruhi dalam proses penangkapan ikan di laut. Armada perikanan yang digunakan nelayan sangat bervariasi dan jumlahnya sebanyak 3492 unit tahun 2021. Armada perikanan tersebut naik dibanding tahun 2016 yang sebanyak 3314 unit. Pada tahun 2021, lebih dari 77,15 persen atau sebanyak 2694 unit armada merupakan perahu motor. Selebihnya perahu tanpa motor ukuran kecil sebanyak 798 unit tahun 2021. Sementara tahun 2016, tercatat perahu tanpa motor sebanyak 1062 unit. Jangkauan jenis sarana perahu tanpa motor ini dalam menangkap ikan masih terbatas. Adapun kapal motor 10-30 GT sampai dengan tahun 2021 berjumlah sebanyak 16 unit.

Tabel 2.105 Perkembangan Jumlah Armada Penangkapan Ikan Kabupaten Simeulue Tahun 2012–2022

Uraian	Tahun										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perahu Tanpa Motor					1.062	1.301	963	963	873	798	
Perahu Motor 20-30 GT					2	-	-	-	-	-	

Uraian	Tahun										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perahu Motor 10-20 GT					20	13	14	14	15	16	
Perahu Motor 1-10 GT					105	78	444	444	544	679	
Perahu Motor <1 GT					2.125	2.003	1.868	1.868	1.900	1.999	

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Simeulue, 2023

Jenis alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan didominasi pancing. Jumlah pancing tangan yang digunakan nelayan mencapai 24.792 unit tahun 2021. Dibandingkan tahun 2016 yang sebanyak 19,87 unit, rata-rata setiap tahunnya pancing bertambah hamper 6,70 persen/tahun. Sebagian nelayan juga menggunakan pancing rawai yang sebanyak 650 unit tahun 2021, naik drastis rata-rata 15,32 persen/tahun dari tahun 2016 yang sebanyak 331 unit.

Tabel 2.106 Perkembangan Jumlah Alat Tangkap Ikan Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022

Uraian	Tahun										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Purseine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jaring	596	596	596	916	3	647	587	-	784	791	
Jaring	-	-	150	916	3	65	126	-	500	591	
Pancing	3.365	4.011	17.484	18.263	-	-	-	-	-	-	
Serok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bubu	-	-	-	-	-	108	134	-	-	-	
Pancing	4.015	4.011	17.484	19.568	20	23.752	22.795	23.890	24.190	24.792	
Pancing	583	583	272	281	331	408	475	550	600	650	

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Simeulue, 2023

Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan, Pemerintah Kabupaten Simeulue berupaya menyediakan fasilitas pendukung perikanan yang diharapkan dapat berimplikasi positif terhadap kesejahteraan petani ikan. Upaya arah tersebut ditempuh melalui penyediaan berbagai fasilitas perikanan yang dibangun, seperti TPI dan pasar ikan. Tahun 2021, tercatat TPI sebanyak 14 unit, PPI 1 unit, pasar ikan sebanyak 12 unit, pabrik es 5 unit, tempat penyimpanan ikan 2 unit, Cool Box 389 unit, dan fasilitas lainnya.

**Tabel 2.107 Perkembangan Ketersediaan Fasilitas Pendukung Perikanan Kabupaten
Simeulue Tahun 2012 - 2021**

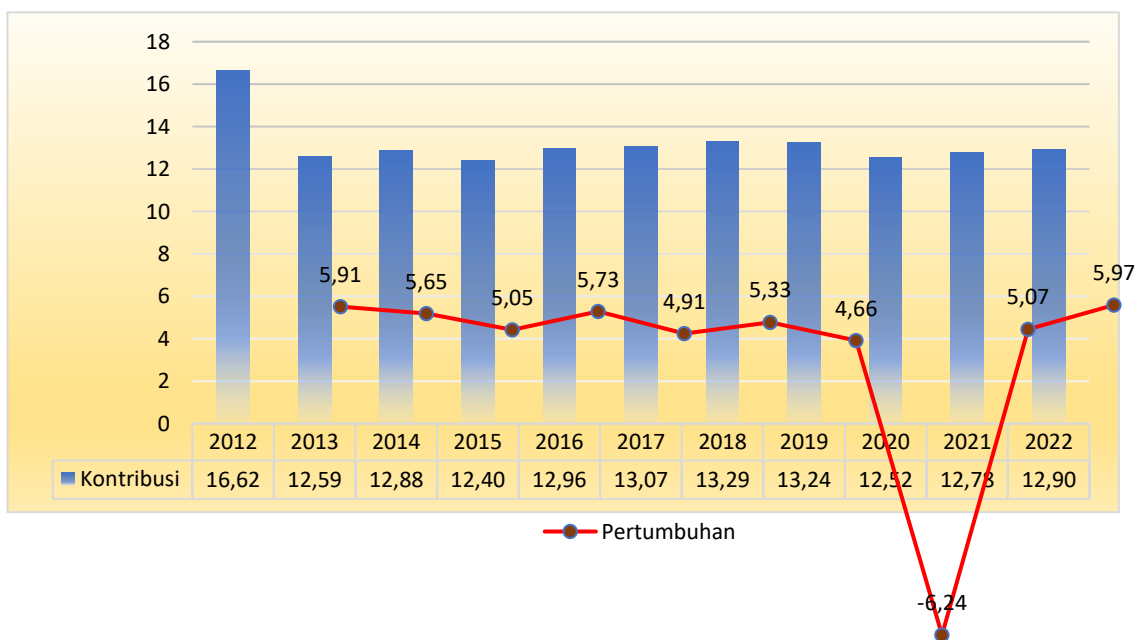
Jenis Fasilitas	Tahun										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PPI (unit)	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TPI (unit)	13	15	14	14	14	18	14	14	14	14	14
Jumlah Pasar ikan (Unit)	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah Keramba Tancap (unit)	106	106	126	136	-	29	7	0	0	0	0
Jumlah Keramba Apung (unit)	24	27	29	39	-	30	21	10	10	10	10
Pabrik Es	-	-	2	3	3	5	5	5	5	5	5
Tempat Penyimpanan Ikan (Cold Storage)	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Koperasi Perikanan	-	-	1	3	10	16	17	0	0	0	0
Ice Flake	-	-	0	0	2	3	3	3	3	3	3
Tambatan Perahu	-	-	22	32	32	42	49	49	49	49	49
Kolam Pelabuhan Perikanan	-	-	10	10	25	49	55	55	55	55	55
Cool Box	-	-	820	910	1,25	561	642	389	389	389	389
Mobil Pembeku	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Simeulue, 2023

E. Perdagangan

Kontribusi Sektor Perdagangan adalah kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Realisasi kontribusi sektor perdagangan tahun 2016 s.d. 2020 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.30. Kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Perdagangan memberikan kontribusi di perekonomian Simeulue sebesar 12,52 %. Jika dilihat selama lima tahun terakhir tahun 2020 kontribusi dari kategori ini mengalami penurunan.

Pada Laju pertumbuhan kategori ini tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar -6,24 %. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap melambatnya laju pertumbuhan pada kategori ini. Salah satu hal yang terjadi selama pandemi tersebut pemerintah melakukan pembatasan skala besar di seluruh daerah di Indonesia sehingga perdagangan antar daerah yang mulai terbatas. Barang - barang di Kabupaten Simeulue banyak yang berasal dari luar Simeulue sehingga dengan adanya kebijakan tersebut produksi barang perdagangan menurun. Selain itu, permintaan atas barang juga menurun selama pandemi Covid- 19 dan menyebabkan harga barang naik. Meskipun tahun 2020 mengalami perlambatan, kategori ini tetap merupakan penyumbang pertumbuhan ketiga.

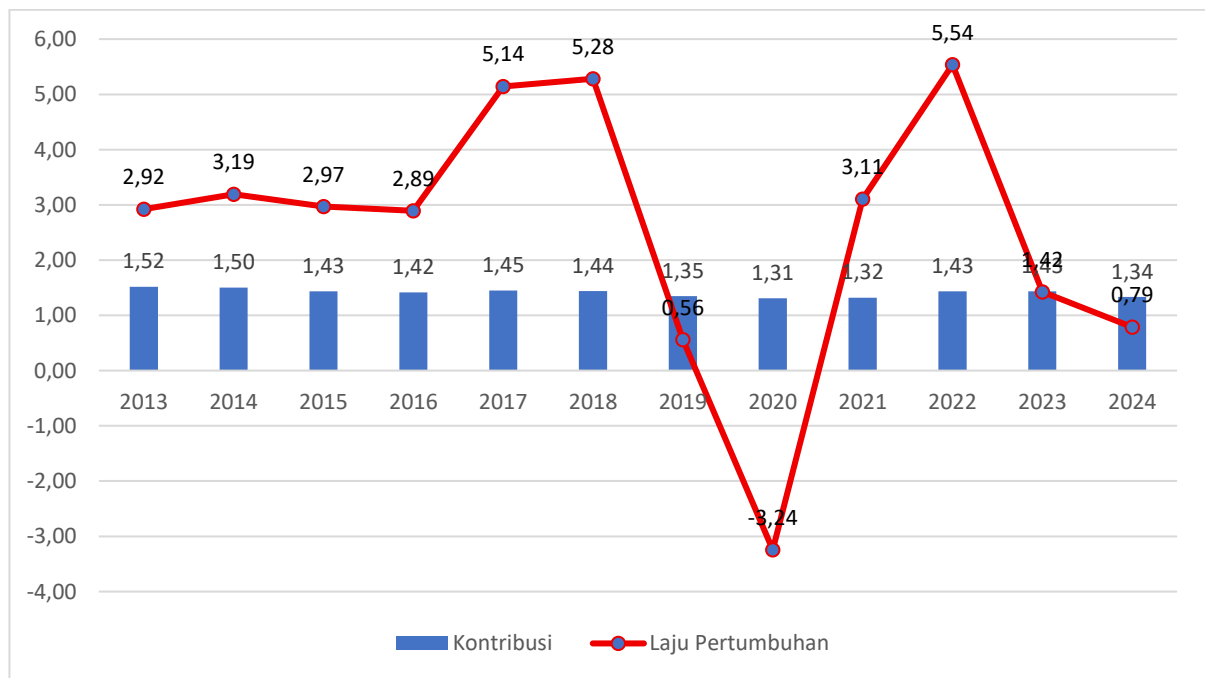


Gambar 2.54 Kontribusidan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2022

F. Perindustrian

Industri pengolahan di Simeulue didominasi oleh industri menengah kecil (UMK) seperti makanan minuman (kue-kue, roti, air minum isi ulang) furnitur, industri pakaian dan

lain-lain. Untuk industri menengah besar pengolahan hasil pertanian masih belum tersedia seperti industri pengolahan padi (RMU), industri pengolahan hasil perikanan, industri pengolahan garam, industri pengolahan minyak kelapa (VCO) dan lain-lainnya..



Gambar 2.55 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Simeulue Tahun 2013-2024

Berdasarkan Gambar diatas, pada tahun 2022 kategori industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 1,45 %. Persentase ini meningkat dari tahun sebelumnya. Selama tahun 2019 hingga tahun 2020 laju pertumbuhan kategori industri pengolahan mengalami penurunan menjadi sebesar -3,24 % Hal ini terjadi karena kategori ini banyak menerima dampak dari pandemi Covid-19 selama tahun 2020 dimana penurunan permintaan pada banyak industri.

F. Transmigrasi

Di Kabupaten Simeulue memiliki tiga kawasan transmigrasi yaitu, kawasan transmigrasi Latiung, kawasan transmigrasi Silaut, dan Kawasan Transmigrasi Salang. Untuk transmigrasi yang berada di Kecamatan Teupah Selatan dan sebagian Kecamatan Teupah Tengah sudah mendapatkan legalisasi melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui SK Kemendes Nomor 118 Tahun 2017. Di Kecamatan Teupah Selatan terdapat 2 (dua) satuan permukiman transmigrasi yaitu satuan permukiman UPT Latiung yang telah berkembang menjadi 3 (tiga) desa yaitu Desa Trans Maranti, Desa Trans Jernge dan Desa Trans Baru dan satuan permukiman UPT Lataling yang tahapan pembangunannya telah dimulai dari tahun 2019 . Kawasan transmigrasi lainnya adalah kawasan transmigrasi Selaut yg berada di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Salang, Kecamatan

sebanyak 3.593 orang. Dari 3.257 orang PNS, diantaranya 52,52 persen adalah laki-laki dan selebihnya 47,41 persen perempuan pada Tahun 2020. Komposisi tersebut sudah mengalami perubahan jika dibandingkan dari tahun 2015. Tahun 2015, PNS laki-laki sebanyak 55,47 persen dan PNS perempuan berkisar 44,53 persen. Perkembangan PNS menurut jenis kelamin Kabupaten Simeulue sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini

Tabel 2.108 Perkembangan PNS Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Simeulue Tahun 2015-2020 (orang)

No	Jenis Kelamin	Tah						Pert. Rata-Rata
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Laki-Laki	1.993	1.994	1.712	1.681	1.722	1.713	-1,52
2.	Perempuan	1.600	1.575	1.518	1.445	1.533	1.544	0,64
Jumlah		3.593	3.593	3.230	3.126	3.255	3.257	-,057

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Simeulue, 2021

Dari 3.593 orang PNS tahun 2015, sebanyak 40,33 persen berpendidikan sarjana S1, S1/S2 sebanyak 1,17 persen, dan diploma sebanyak 28,72 persen. Selanjutnya tahun 2020 telah mengalami perubahan signifikan yang didominasi PNS tamatan sarjana S1 sebanyak 48,97 persen, PNS tamatan sarjana S1/S2 sebanyak 3,50 persen, sedangkan PNS tamatan diploma tidak lebih dari 22,54 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Simeulue terus berupaya mewujudkan SDM aparatur yang berkualitas melalui perbaikan tingkat pendidikan PNS ke jenjang pendidikan tinggi. Ke depan, PNS yang berpendidikan tamatan pendidikan SMA harus menjadi prioritas untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Sampai tahun 2020, paling kurang 23,89 persen PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue berpendidikan SMA.

Tabel 2.109 Perkembangan PNS Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Simeulue Tahun 2015-2020 (orang)

No	Tingkat Pendidikan	Tahun						Pert. Rata-Rata
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SD	15	13	8	4	5	4	9,63
2.	SMP	54	57	29	19	21	25	22,88
3.	SMA	1.001	1.013	919	820	792	778	4,33
4.	DI/DII/DIII	1.032	813	863	770	596	734	10,16
5.	S1	1.449	1.583	1.334	1.450	1.565	1.595	6,42
6.	S2/S3	42	58	94	101	113	121	7,15
Jumlah		3.593	3.569	3.214	3.018	3.224	3.257	

Dari sisi golongan, sebanyak 60,39 persen PNS Pemerintah Kabupaten Simeulue bergolongan III pada tahun 2020. PNS bergolongan II juga cukup dominan yang berkisar 24,90 persen. Adapun PNS bergolongan IV tidak lebih dari 13,94 persen, disamping juga PNS golongan I yang sebanyak 0,77 persen. Komposisi PNS tersebut menggambarkan bahwa masih terbatasnya sumber daya aparatur yang profesional dalam melakukan pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sumber daya aparatur di jajaran Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak sebanding dengan kebutuhan perangkat daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 2.110 Perkembangan PNS Menurut Golongan Kabupaten Simeulue Tahun 2015 – 2020 (orang)

No	Golongan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	I	58	60	45	39	27	25
2.	II	1.182	1.142	823	781	799	811
3.	III	1.866	1.892	1.903	1.865	1.952	1.967
4.	IV	487	475	443	440	446	454
Jumlah		3.593	3.569	3.214	3.125	3.224	3.257

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Simeulue, 2021

Belum tersedianya gedung Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Simeulue yang representatif, termasuk gedung untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, mess peserta diklat, serta ruang makan dan mushalla, merupakan permasalahan yang dapat menghambat kinerja pembinaan SDM aparatur. Oleh karena itu, pembangunan gedung Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Simeulue patut diprioritaskan. Dengan demikian, diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mempermudah pelaksanaan diklat, baik diklat pra jabatan, diklat kepemimpinan, dan diklat teknis lainnya.

B. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan berperan strategis sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Sesuai tupoksi, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Simeulue. Kinerja pembangunan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah tercermin dari beberapa indikator, meliputi ketersediaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Disamping itu, tersedianya juga dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Berikut gambaran indikator kinerja perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Simeulue sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.111 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan

No	Indikator	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Penjabaran Program RPJM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kab. Simeulue, 2023

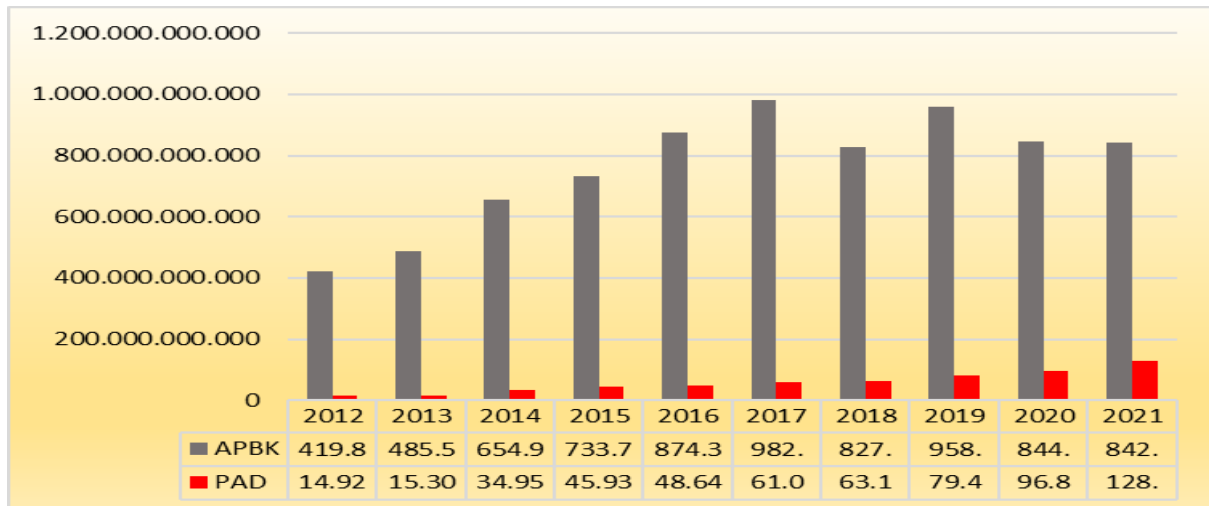
C. Keuangan

Pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Simeulue telah memperlihatkan kemajuan serta diharapkan dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini tergambar dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat yang berhasil diraih ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk terus membenahi serta meningkatkan pengelolalan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue tahun 2020 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini dari BPK merupakan yang ke enam kali diperoleh Pemerintah Kabupaten Simeulue, secara berturut turut. Predikat WTP dari BPK RI sejak dari 2016-2020.

1. Perkembangan Pendapatan Asli Kabupaten Simeulue

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. PAD bertujuan untuk meberikan kontribusi kepada daerah dalam menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Persentase

Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.57 Grafik Perbandingan antara PAD dengan Pendapatan Daerah

Tabel 2.112 Presentase Pendapatan 2012-2022

Uraian	Tahun										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase PAD terhadap PA	3,56	3,15	5,34	6,26	5,56	6,22	7,63	8,29	11,47	15,21	

Sumber: BPKD Kab. Simeulue, 2023

D. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Sejalan dengan perubahan OPD di Kabupaten Simeulue, peran fungsi litbang semakin ditingkatkan, meskipun diakui belum berbentuk badan tersendiri yang terpisah dari BAPPEDA. Hal ini juga tidak terlepas dari keterbatasan sumber penerimaan daerah. Ke depan, diharapkan peran Litbang semakin strategis dalam mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Selain itu, Litbang juga diharapkan lebih berperan dalam menghasilkan berbagai rekomendasi dan alternatif kebijakan dalam mengatasi berbagai masalah di bidang ekonomi, sosial, dan budaya

Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi

Daerah (SIDa) yang di ukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Tabel 2.113 Indeks Inovasi Daerah Tahun 2018-2024

Uraian	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	0,00	0,00	2,33	13,29	0,4	36,58	38,81

Sumber: Bappeda Kab. Simeulue, 2025

1. Sistem Inovasi Daerah

Sistem Inovasi Daerah merupakan suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar stakeholders pembangunan daerah. Sistem Inovasi Daerah juga dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, yang dimaksud inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapaun tujuan dari Inovasi Daerah tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan bentuk inovasi daerah menurut Peraturan Pemerintah dimaksud yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berikut inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Simeulue dalam hal tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

a. E- SIMPATIGU

e-Simpatigu adalah sebuah aplikasi yg dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka pengelolaan guru. Simpatigu adalah Sistem Pendataan, Pemerataan dan Distribusi Guru TK, SD dan SMP di Kabupaten Simeulue sesuai dgn kewenangan. Kegiatan distribusi guru ini telah dikuatkan dalam Perbup no 10 tahun 2023 tentang Pedoman Penataan dan Pemerataan Guru. E- SIMPATIGU membantu untuk menghitung data kebutuhan guru sesuai anjab dan analisa beban kerja yg diatur secara

otomatis jumlah jam minimal dan maksimal sesuai beban dalam kurikulum. Selain itu data sebaran guru antar sekolah yg akurat sesuai kualifikasi pendidikan serta sertifikasi guru. Data data ini dapat digunakan sebagai informasi oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kegiatan proses rekrutmen, penempatan serta distribusi guru secara merata

b. AKUN BELAJAR ID

Id belajar adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh kementerian pendidikan riset dan teknologi dalam rangka pengelolaan akses pembelajaran bagi seluruh guru dan siswa di Indonesia , id belajar kepala sekolah selain untuk membuka lapor pendidikan hasil asesmen nasional berbasis komputer (ANBK) dan untuk id dinas pendidikan digunakan untuk mengakses lapor pendidikan hasil asesmen nasional berbasis komputer (ANBK)

c. SiPATEN

SiPATEN (Sistim Pelayanan Terpadu Online) merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah pengurusan Rekomendasi Perizinan dibidang Kesehatan sesuai dengan Permenkes 14 tahun 2021 (Papperless Report) Alur Kegiatan : Upload Berkas, Verifikasi, Cetak Rekomendasi. Saat ini pengembangan dalam tahapan penandatanganan digital yang prosesnya hanya menunggu notifikasi dari kominfo. SiPATEN telah dilaksanakan sejak Agustus 2022 dengan adanya SPATEN ini dapat memudahkan petugas kesehatan dan pelaku usaha dibidang kesehatan dalam pembuatan rekomendasi perizinan dibidang Kesehatan tanpa menggunakan harus datang ke unit layanan perizinan melainkan cukup dengandaftar dan upload kelengkapan berkas melalui SiPATEN.

d. E-SALUR

e-Salur adalah sebuah Aplikasi Arsip Digital yang dibangun oleh Kecamatan Teupah Barat dalam rangka pengelolaan Arsip Sekretariat Kecamatan Teupah Barat dalam bentuk digital. e-Salur dibuat untuk Proses terjadinya konversi arsip dari lembaran kertas atau fisik menjadi data elektronik, menyederhanakan system kerja, memudahkan akses data, mengurangi tempat penyimpanan sekaligus dapat mengurangi biaya, waktu serta memberikan rasa aman atas setiap jenis arsip yang ada, akuntable, efektif dan efisien.

e. E-DISTOP

E-Distop (Elektronik Data Persediaan dan Stok Opname) RSUD Kab. Simeulue adalah aplikasi berbasis web untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan data Persediaan dan Stok Opname pada RSUD Kab. Simeulue secara elektronik. Aplikasi ini memungkinkan penggunaannya dapat lebih efisien dalam menata dan mencatat pelaporan data persediaan, karena aplikasi e-Distop memiliki sistem Auto Report sehingga dapat membuat laporan secara otomatis. Selain Auto Report aplikasi ini juga mempunyai fitur Realtime Notification & Messaging yang mana memungkinkan pengguna mendapatkan notifikasi dan pesan secara langsung (Realtime). Selain itu aplikasi ini juga dapat dijalankan secara multiplatform karena memiliki fitur Responsive (Mobile Friendly), yaitu dapat di akses di perangkat apapun baik itu PC, Laptop dan Mac bahkan perangkat Smartphone seperti Android, Iphone, dll selama terhubung dengan internet dan memiliki browser

2. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

a. SIM-BG

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung serta mendorong kemudahan perizinan berusaha, telah diundangkan Permen PUPR No. 19 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan IMB dan SLF melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). SIMBG diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan bangunan gedung di wilayahnya baik dalam proses penyelenggaraan IMB dan SLF sehingga lebih tertib dan transparan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan bangunan gedung yang telah ditetapkan. Dengan adanya SIMBG diharapkan proses penyelenggaraan bangunan gedung juga menjadi lebih efektif dan koordinasi antar perangkat daerah terkait menjadi lebih jelas. Semoga Buku Panduan Aplikasi SIMBG ini bermanfaat bagi kita semua.

b. Sicantik Cloud

SiCANTIK merupakan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). Aplikasi ini digunakan untuk perijinan berusaha

maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

1. Inovasi Daerah Lainnya

a. MA'ANDUNG

Ma'Andong merupakan singkatan dari Malimo Anak Sikandong. Secara etimologi, kata Ma'Andong diadopsi dari bahasa kearifan lokal simeulue yang memiliki arti yaitu mengasuh anak kandung yang dimanjakan. Dan secara filososi, Ma Andong ini memiliki makna bahwa setiap anak merupakan anak manja dan sangat disayang, dengan anggapan tersebut, pengasuh akan memberikan semua yang terbaik untuk si anak. Dalam konteks penyelenggaraan praktek baik, Ma'Andong merupakan kegiatan percepatan penurunan stunting melalui penguatan kualitas pengasuhan anak dengan tujuan peningkatan pengetahuan pola pengasuhan ditingkat rumah tangga. Adapun sasaran kegiatan Ma Andong adalah : Wanita Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Ibu dengan Balita, Suami, dan Pengasuh. Kegiatan yang dilaksanakan dalam mengimplementasikan Ma'Andong adalah:

- a. Peningkatan Pengetahuan Pengasuhan Anak;
- b. Pembinaan Keluarga Balita dan Anak;
- c. Peningkatan Layanan Pengasuhan;
- d. Peningkatan Pengetahuan Kader Kesehatan Gizi;
- e. Penyediaan Peralatan dan Bahan Pendukung; dan
- f. Penyuluhan Anak.

Dasar hukum pelaksanaan Ma Andong terdiri dari 2 (dua) yaitu pertama pelaksanaan ditingkat kabupaten yaitu Peraturan Bupati Simeulue Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Simeulue dan yang kedua pelaksanaan ditingkat desa yaitu Peraturan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Simeulue. Dalam praktek pelaksanaan kegiatan baik oleh OPD terkait dan Pemerintah Desa, kegiatan Ma Andong ini terbukti efektif meningkatkan pengetahuan pola pengasuhan ditingkat rumah tangga.

b. MANINTING

Maninting merupakan singkatan dari Makanan Anti Stunting. Secara etimologi, kata Maninting di adopsi dari bahasa kearifan lokal simeulue yang memiliki arti yaitu

melompat - lompat kegirangan karena mendapatkan sesuatu yang berharga. Sedangkan dari sisi filosofi, bermakna bahwa seorang anak bahagia dan melompat kegirangan karena mendapat makanan enak dan sehat. Dalam konteks penyelenggaraan praktek baik, Maninting merupakan kegiatan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui kegiatan pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil, bayi, dan balita. Adapun makanan bergizi sebagaimana dimaksud adalah Menu 4 Bintang dengan kombinasi pangan lokal dengan menu makanan yang mengandung empat unsur zat gizi seperti: karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sayur-sayuran. Menu makanan yang mengandung zat gizi berupa karbohidrat dapat diperoleh dari beras merah, beras putih, kentang, dan umbi-umbian. Lalu menu makanan yang mengandung zatgizi berupa protein hewani dapat diperoleh dari daging ayam, daging kambing, daging bebek, daging sapi, telur, dan ikan. Sedangkan menu makanan yang mengandung zat gizi berupa protein nabati dapat diperoleh dari tempe, tahu, kacang merah, dan kacang polong. Dan menu makanan yang mengandung zat gizi berupa sayur-sayuraan dapat diperoleh dari labu jepang/ siam, wortel, bayam, dan tomat. Dasar hukum pelaksanaan Maninting yaitu Peraturan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Simeulue. Kegiatan Praktik Baik Maninting ini telah dilaksanakan oleh Puskesmas dan Pemerintah Desa. Dan hasilnya, kegiatan Maninting ini terbukti efektif menurunkan dan mencegah stunting

- HUMASA SEBEL-KHUMAHA HEBA

Humasa Sebel – Khumaha heba merupakan sebuah gerakan mengajak masyarakat untuk turun kesawah secara serentak dan berskala besar. Gerakan ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 yang saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang lalu gerakan ini sangat efektif untuk menjaga ketersediaan pangan diKabupaten Simeulue.

d. KLIK PASIEN

Inovasi ini merupakan Sistem Pendaftaran Secara Online untuk Layanan Berobat Rawat Jalan pada Poliklinik UPTD RSUD SIMEULUE Kondisi sebelumnya saat proses pelayanan pada pendaftaran masih melalui Pendaftaran Manual dimana masyarakat datang lebih awal dan berebutan untuk mendapatkan nomor antrian yang ini berdampak pada tidak optimalnya Pelayanan pendaftaran di RSUD Simeulue. Saat ini inovasi tersebut sudah mampu mengurai antrian pada saat pendaftaran dan tidak perlu lagi datang lebih awal untuk melakukan antrian panjang untuk memperoleh pelayanan. Pada aplikasi tersebut sudah terdapat estimasi waktu pelaksanaan pelayanan terhadap pasien.

Penerapan Inovasi daerah tersebut belum sepenuhnya dijalankan secara berkelanjutan, dikarenakan terbatasnya pendanaan yang tersedia pada APBK ataupun sumber pendanaan lainya.

E. Pengawasan

Pelayanan bidang urusan pengawasan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengawasan internal terhadap kinerja pegawai dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan. Pengawasan memiliki dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari fungsi manajemen maupun dari sisi pencapaian visi dan misi pemerintah. Ia memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan sekaligus menjadi pengawal dalam pelaksanaan program.

Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) MCP merupakan tolak ukur bagi KPK dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk mendorong perbaikan system dan regulasi Pemerintah Daerah serta implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan, disamping itu MCP merupakan salah satu laman yang dapat memberikan informasi capaian kinerja program Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) pada 8 (delapan) area intervensi (perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan /pelayanan terpadu satu pintu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia

Peran pengawasan dalam pembangunan di simeulue sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang ada. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi dan reviu. Realisasi pelaksanaan fungsi pengawasan Tahun 2018 s.d 2022 disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.114 Pemeriksaan, Evaluasi dan Review Tahun 2018-2022

Objek Pemeriksaan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Hasil LHP, LHE, LHR	42	28	7	13	29
Jumlah Temuan	187	174	26	48	115
Jumlah Rekomendasi	249	234	32	52	133

Sumber : Inspektorat Kabupaten Simeulue, 2023

Tabel 2.115 Nilai SPIP untuk Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2022

OPD	Verifikasi Tim			
	Penetapan tujuan	Struktur dan Proses	Pencapaian Tujuan	Nilai SPIP
Inspektorat	42	28	7	13

Sumber : Inspektorat Kabupaten Simeulue, 2023

F. Sekretariat DPRD

Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat - alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue (DPRK); tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD); dan terintegrasi program-program DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRK.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.

Hasil Evaluasi RPJP Kabupaten Simeulue Periode 2007-2027 memberikan informasi pembangunan Kabupaten Simeulue dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2022 telah mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Beberapa aspek pembangunan yang mengalami perubahan positif diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 telah mencapai 67,27 meningkat sebesar 6,67 poin dibandingkan tahun 2010 sebesar 60,6. Faktor pendorong meningkatnya IPM disebabkan oleh semakin membaiknya kinerja bidang kesehatan, pendidikan dan sektor ekonomi Masyarakat. Secara khusus indikator bidang kesehatan yang semakin membaik adalah meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH), bidang pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) serta dimensi standar hidup layak (pengeluaran per kapita per tahun). Selanjutnya.

Angka kemiskinan juga mengalami penurunan, dari angka 32,26 persen di tahun 2007 menjadi 18,37 persen di tahun 2022. Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan, dari angka 8,45 persen di tahun 2007 menurun sebesar 2,45 persen menjadi 6,00 persen pada tahun 2022.

Untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue ditahun 2022 telah mencapai sebesar 3,62 persen, meningkat sebesar 1,76 persen dibandingkan dengan pada tahun 2006 yang baru mencapai 1,86 persen. Namun demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2007 hingga tahun 2019. Dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 4.00 s.d 5.00 persen. Hal ini diakibatkan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2019 & tahun 2020. Dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi jatuh diangka 0,15 persen. Pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan perkembangan yang positif kembali di tahun 2021 di angka 2,85 persen dan pada tahun 2022 diangka 3,62 persen.

Sementara itu, nilai Indeks Gini Kabupaten Simeulue selama kurun waktu 17 tahun berfluktuasi berada pada kisaran 0,1 - 0,3 yang tergolong pada kategori rendah. Dari angka nilai Indeks Gini 0,314 di tahun 2005 menurun diangka 0,279 pada tahun 2022. Namun, Gini Ratio ini bukan menggambarkan kondisi riil distribusi meningkatnya pendapatan masyarakat.

a) Capaian Indikator Makro

Selama hampir dua dekade pembangunan Simeulue terhitung tahun 2007-2022 ada beberapa hal positif yang mengalami kemajuan diantaranya:

1. **Penduduk Miskin Mengalami Penurunan dari 33,39 persen menjadi 18,37 persen.** Angka Kemiskinan Kabupaten Simeulue selama dua dekade mengalami penurunan signifikan dimana pada tahun 2005 angka Kemiskinan sebesar 33,39 persen menjadi 18,37 persen pada tahun 2022 atau turun sebesar -15,02 persen namun masih diatas rata rata aceh yang hanya 14,75 persen
2. **Pendapatan Perkapita Meningkat.** Dimana pada tahun 2006 hanya 3,87 Juta menjadi 27,93 juta pada tahun 2022 atau meningkat enam kali lipat.
3. **Pertumbuhan Ekonomi Meningkat.** Pertumbuhan ekonomi Kabupate Simeulue pada tahun 2006 adalah 1,86 persen dan tahun 2022 tumbuh menjadi 3,62 persen atau tumbuh 1,76 persen. Ekonomi Simeulue anjlok pada tahun 2006 karena Simeulue mengalami gempa dan tsunami.
4. **Tingkat Pengangguran Mengalami Penurunan.** Angka Pengangguran Terbuka tahun 2005 sebesar 8,45 persen, pada tahun 2022 menjadi 6,00 persen atau mengalami penurunan sebesar 2,45 persen di tahun 2022.
5. **Inflasi mengalami penurunan.** Inflasi Simeulue memngacu pada inflasi provinsi aceh mengalami kenaikan dari 1,43 persen pada tahun 2005 menjadi 5,89 persen pada tahun 2022 sehingga capaian tidak tercapai.
6. **Ketimpangan pendapatan berfluktuasi.** Gini Simeulue tahun 2005 sebesar 0,314 namun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 0,279, Ketimpangan kategori rendah.

7. **IPM semakin tumbuh.** Pada tahun 2010 IPM Kabupaten Simeulue sebesar 60,6 dan mengalami peningkatan menjadi 67,27 pada tahun 2022. Namun IPM ini masih dibawah rata rata Aceh sebesar 72,80.
8. **Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tumbuh** pada Tahun 2023 menjadi 9,81 Tahun atau tumbuh sebesar 1,47 Tahun 2012.
9. **Angka UHH semakin membaik.** Pada tahun 2012 angka UHH Simeulue sebesar 64,22 dan pada tahun 2023 menjadi 65,61 namun masih dibawah rata-rata nasional sebesar 73,93
10. **Panjang Jalan dalam Keadaan Mantap semakin meningkat.** Pada tahun 2005 kondisi jalan dalam keadaan mantap adalah sepanjang 153,91 km dari Panjang jalan 382,15 km atau $\pm 40,27$ persen, kondisi ini semakin membaik pada tahun 2020 menjadi sebesar 49,7 persen dari Panjang jalan 778,88 km.
11. **Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum semakin bertambah.** Pada tahun 2005 Rumah tangga berakses air minum layak berada pada angka 9,15 persen . Persentase ini bertambah untuk setiap tahunnya dan hingga pada tahun 2022 masih mencapai angka 41,60 persen.
12. **Pelayanan akses sanitasi layak menunjukkan peningkatan persentase yang signifikan.** Tahun 2012 angka sanitasi layak sebesar 50,48 persen, dan terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya sampai dengan tahun 2021 menjadi sebesar 75,86 persen.
13. **Sektor ketenagalistrikan meningkat.** Pengguna listrik pada Tahun 2007 sebesar 54,93 persen angka sanitasi layak sebesar 50,48 persen, mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 pengguna listrik mencapai 99,46 persen
14. **Akses jaringan telekomunikasi meningkat.** Persentase desa terakses jaringan HP pada tahun 2021 telah mencapai 95,00 persen.
15. **Produksi perikanan tangkap terus meningkat.** Pada tahun 2012 produksi perikanan tangkap sebesar 8.561 ton. Mengalami peningkatan hingga tahun 2021 sebesar 20.000 ton.

b) Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi dalam waktu hampir dua dekade pembangunan Simeulue terhitung tahun 2007-2022 ada beberapa Rekomendasi yang harus di tindak lanjuti;

1. Implementasi Pelaksanaan Syariat Islam, Sosial, Budaya Dan Adat Istiadat Belum Optimal.
 - 1) Pelaksanaan Syariat Islam belum sesuai harapan
 - 2) Belum optimalnya pendapatan dan Pendistribusian Baitul Mal
 - 3) Pelayanan sosial belum menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan
 - 4) Belum optimalnya pelaksanaan pemajuan kebudayaan

2. Sumber Daya Manusia Masih Rendah
 - 1) Tingkat Pendidikan masih belum ideal
 - 2) Mutu guru belum optimal dan merata;
 - 3) Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) masih rendah;
 - 4) Prevalensi stunting masih tinggi
 - 5) Kemandirian dayah secara ekonomi juga masih rendah
3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simeulue Belum Maksimal dan Fluktuatif
 - 1) Laju pertumbuhan ekonomi masih rendah
 - 2) Pendapatan PerKapita masih rendah;
 - 3) Angka kemiskinan masih tinggi;
 - 4) Industri Pengolahan dan pariwisata masih lemah
 - 5) Iklim investasi belum mengembirakan
4. Kualitas Tatakelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah Belum Optimal
 - 1) Pemanfaatan Digitasssl (SPBE) untuk pelayanan publik belum optimal
 - 2) Belum optimalnya pelaksanaan riset dan inovasi untuk kemajuan daerah
 - 3) lemahnya implementasi reformasi birokrasi
5. Masih Tingginya Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah
 - 1) Belum optimalnya sarana transportasi
 - 2) Penanganan perumahan dan permukiman kumuh masih rendah;
 - 3) Infrastruktur dan pelestarian sumber daya air masih belum optimal
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Serta Ketahanan Bencana Masih Rendah
 - 1) Ketahanan daerah terhadap bencana masih rendah;
 - 2) Belum optimalnya pengelolaan Lingkungan hidup
 - 3) Pengelolaan energi dan Sumber Daya Mineral belum optimal

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan

Penduduk dan pembangunan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Penduduk mengacu pada manusia, individu, orang atau sekumpulan orang-orang dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan pembangunan mempunyai arti proses merubah sesuatu menjadi lebih baik atau membuat sesuatu lebih baik, untuk dinikmati dan dimanfaatkan oleh penduduk. Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan penduduk baik secara fisik maupun spiritual. Dalam pembangunan, penduduk menjadi subjek sekaligus objek. Penduduk menjadi subjek karena penduduk menjadi sasaran yang dibangun, yang meliputi peningkatan kemampuan (*empowered*) dan makin

meluasnya berbagai kesempatan (*opportunity*) sehingga penduduk menikmati pembangunan yang telah dilakukan. Sebagai sasaran dan penikmat hasil pembangunan diperlukan jumlah, struktur dan laju pertumbuhan penduduk serta persebarannya untuk mencapai pemerataan dan keadilan

Proyeksi Demografi pada suatu wilayah sangat diperlukan dalam menyusun dokumen jangka panjang daerah. untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya manusia dimasa yang akan datang,

2.6.1.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kurun periode 2025-2045 persentase pertumbuhan penduduk Kabupaten Simeulue diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2025 hingga 2030 sebesar 7,19 persen yang merupakan puncak bonus demografi. Jika dilihat perbandingan pertumbuhan penduduk pada tahun 2030 hingga 2035 sebesar 6,10 persen, tahun 2035 hingga 2040 sebesar 4,97 persen, dan tahun 2040 hingga 2045 sebesar 4,11 persen.

Trend menurun tersebut disebabkan oleh semakin tingginya kesadaran penduduk terhadap pembatasan angka kelahiran dan program perencanaan keluarga. Selain itu, meningkatnya produktivitas kerja golongan usia produktif yaitu pada rentang usia 15 hingga 65 tahun, terutama semakin besarnya peluang perempuan dalam bekerja menyebabkan preferensi untuk memiliki banyak anak semakin menurun.

Jumlah penduduk Kabupaten Simeulue tahun 2045 diperkirakan mencapai 124,461 jiwa dengan peningkatan sebesar 29,47 persen dibandingkan dengan tahun 2040. Komposisi penduduk perempuan berjumlah 61.280 jiwa atau tumbuh 23,95 persen, sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 63.174 jiwa atau naik 26,91 persen. Untuk lebih jelasnya dan bisa kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

Nama	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
			2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Kecamatan	orang	97.118	100.136	107.336	113.884	119.548	124.461
jumlah penduduk kecamatan berjenis kelamin laki-laki	orang	49.780	51.313	54.930	58.153	60.873	63.174
jumlah penduduk kecamatan berjenis kelamin perempuan	orang	47.338	48.823	52.406	55.731	58.675	61.287

Sumber : BPS, 2024

Tabel 2.117 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

Lokasi	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Simeulue Tengah	7.647	7.940	8.451	8.999	9.479	9.903
Salang	9.222	9.515	10.192	10.818	11.360	11.831
Teupah Barat	8.378	8.564	9.259	9.782	10.225	10.599
Simeulue Timur	28.830	29.922	31.866	33.919	35.722	37.312
Teluk Dalam	5.709	5.845	6.310	6.671	6.978	7.239
Simeulue Barat	12.302	12.729	13.596	14.451	15.197	15.849
Teupah Selatan	9.444	9.603	10.437	10.997	11.464	11.852
Alapan	5.154	5.267	5.696	6.017	6.288	6.517
Teupah Tengah	6.895	7.093	7.620	8.076	8.468	8.805
Simeulue Cut	3.537	3.658	3.909	4.154	4.367	4.554
Kab. Simeulue	97.118	100.136	107.336	113.884	119.548	124.461

Sumber : BPS, 2024

Tabel 2.118 Proyeksi Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis kelamin Laki-laki dalam Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

Lokasi	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Simeulue Tengah	3.907	4.059	4.311	4.582	4.815	5.017
Salang	4.711	4.860	5.199	5.506	5.765	5.985
Teupah Barat	4.306	4.398	4.751	5.007	5.218	5.391
Simeulue Timur	14.771	15.303	16.299	17.300	18.155	18.888
Teluk Dalam	2.943	3.006	3.248	3.422	3.566	3.683
Simeulue Barat	6.406	6.656	7.068	7.513	7.896	8.228
Teupah Selatan	4.792	4.873	5.288	5.560	5.780	5.958
Alapan	2.670	2.734	2.947	3.109	3.243	3.354
Teupah Tengah	3.472	3.559	3.831	4.045	4.223	4.370
Simeulue Cut	1.802	1.865	1.988	2.109	2.212	2.300
Kab. Simeulue	49.780	51.313	54.930	58.153	60.873	63.174

Sumber : BPS, 2024

Tabel 2.119 Proyeksi Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis kelamin Perempuan dalam Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

Lokasi	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Simeulue Tengah	3.740	3.881	4.140	4.417	4.664	4.886
Salang	4.511	4.655	4.993	5.312	5.595	5.846
Teupah Barat	4.072	4.166	4.508	4.775	5.007	5.208
Simeulue Timur	14.059	14.619	15.567	16.619	17.567	18.424
Teluk Dalam	2.766	2.839	3.062	3.249	3.412	3.556
Simeulue Barat	5.896	6.073	6.528	6.938	7.301	7.621
Teupah Selatan	4.652	4.730	5.149	5.437	5.684	5.894
Alapan	2.484	2.533	2.749	2.908	3.045	3.163

Lokasi	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Teupah Tengah	3.423	3.534	3.789	4.031	4.245	4.435
Simeulue Cut	1.735	1.793	1.921	2.045	2.155	2.254
Kab. Simeulue	47.338	48.823	52.406	55.731	58.675	61.287

Sumber : BPS, 2024

2.6.1.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Komposisi penduduk berdasarkan umur diperkirakan akan mengalami pergeseran dari tahun ke tahun. Pada penduduk dengan kategori tidak produktif, jumlah penduduk usia 0-14 tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia tersebut mencapai 26,41 persen. Jumlah ini terus mengalami penurunan ditahun 2030 diangka 26,41 persen. Pada tahun 2035 komposisi penduduk usia 0-14 kembali naik hingga mencapai angka 26,26 persen. Namun pada tahun 2045 kembali meurun hingga diangka 23,08 persen.

Tabel 2.120 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
			2025	2030	2035	2040	2045
jumlah penduduk kabupaten kelompok umur 0-4	orang	9.160	10.112	10.090	9.894	9.565	9.420
jumlah penduduk kabupaten kelompok umur 5-9	orang	8.300	8.093	10.042	10.034	9.839	9.512
jumlah penduduk kabupaten kelompok umur 10-14	orang	8.373	8.239	8.049	9.983	9.981	9.790
jumlah penduduk kabupaten kelompok umur 15-19	orang	9.164	8.704	8.208	8.021	9.946	9.948
jumlah penduduk kabupaten kelompok umur 20-24	orang	9.393	9.612	8.671	8.178	7.997	9.915
jumlah penduduk kabupaten kelompok umur 25-29	orang	8.259	8.678	9.640	8.696	8.205	8.026
jumlah penduduk kabupaten kelompok umur 30-34	orang	7.528	7.761	8.682	9.646	8.699	8.209
jumlah penduduk kabupaten kelompok umur 35-39	orang	7.245	7.278	7.675	8.592	9.546	8.605
jumlah penduduk kabupaten kelompok umur 40-44	orang	6.940	7.069	7.151	7.556	8.461	9.403
jumlah penduduk kabupaten kelompok umur 45-49	orang	5.955	6.391	6.917	7.007	7.409	8.305
jumlah penduduk kabupaten kelompok umur 50-54	orang	4.805	5.110	6.233	6.750	6.848	7.244
jumlah penduduk kabupaten kelompok umur 55-59	orang	4.044	4.291	4.921	6.014	6.530	6.633

Kelompok Umur	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
			2025	2030	2035	2040	2045
jumlah penduduk kabupaten kelompok umur 60-64	orang	3.144	3.410	4.025	4.633	5.677	6.177
jumlah penduduk kabupaten kelompok umur 65-69	orang	2.181	2.443	3.057	3.638	4.203	5.172
jumlah penduduk kabupaten kelompok umur 70-74	orang	1.358	1.521	2.054	2.589	3.109	3.612
jumlah penduduk kabupaten kelompok umur >75	orang	1.269	1.424	1.921	2.653	3.533	4.490

Sumber : BPS, 2024

Berbeda dengan usia tidak produktif lainnya yaitu usia 65+ atau disebut penduduk lansia. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan menyebabkan Usia Harapan Hidup (UHH) semakin baik. Pada tahun 2025 penduduk berusia 65+ diperkirakan hanya sebesar 4.39 persen. Persentase ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun puncaknya pada tahun 2045, dimana penduduk berusia 65+ meningkat signifikan dengan proporsi mencapai 10,67 persen.

Jumlah penduduk usia produktif yaitu antara 15-64 tahun memiliki proporsi yang dominan dalam struktur penduduk Kabupaten Simeulue. Kurun periode 2020-2030 persentase penduduk usia produktif terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2025 komposisi penduduk usia 15-64 sebesar 68,39 persen dan pada tahun 2045 menurun diangka 66,26 persen.

2.6.1.3. Kepadatan Penduduk

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk mempunyai peran penting untuk meningkatkan kualitas penduduk. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dalam rangka tercapainya penduduk tumbuh seimbang harus ditingkatkan sebagai langkah penting dalam rangka pembangunan kependudukan terutama meningkatkan kualitas penduduk dan melakukan pengarahan penduduk. Pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk harus didorong melalui pemberdayaan dan pembangunan keluarga sebagai unit terkecil sasaran pembangunan daerah.

Jika dilihat dari persentase pertumbuhan penduduk yang memiliki trend penurunan dari tahun ke tahun (Tabel. 3.1), diperkirakan dalam 20 tahun ke depan pemerintah dapat mencapai pertumbuhan penduduk pada tingkat yang ideal. Saat ini permasalahan kepadatan penduduk berfokus pada persebaran penduduk yang tidak merata terutama pada wilayah kota dan perdesaan. Kepadatan penduduk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Selain itu terdapat perbedaan luas wilayah antar daerah kecamatan dengan beberapa wilayah kawasan hutan lindung, yang menyebabkan persebaran penduduk tidak merata. Berdasarkan analisis peta rancana tata ruang wilayah Kabupaten Simeulue, didapat bahwa luas wilayah Kabupaten Simeulue di luar kawasan hutan adalah 100.588,72 ha (54,91 %) dari luas total wilayah Simeulue. Jika proyeksi jumlah penduduk tahun 2045 sebesar 124.460 jiwa,

maka didapat rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Simeulue pada tahun 2045 adalah sebesar 124 jiwa/km².

2.6.1.4. Penduduk Usia Produktif

Penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun tercatat memiliki proporsi yang dominan dalam struktur penduduk Simeulue. Komposisi penduduk usia produktif mencapai 68,39 persen pada tahun 2025 dan 68,21 persen pada tahun 2030. Bonus demografi terjadi ketika penduduk usia produktif, yaitu 15-64 tahun mendominasi total keseluruhan penduduk, atau dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Pada kondisi ini angka ketergantungan penduduk diperkirakan akan menurun, disebabkan proporsi jumlah usia tidak produktif yang lebih rendah. Bonus demografi dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi jika SDM dipersiapkan dengan baik dan terencana. Kebijakan yang pro terhadap pembangunan SDM akan sangat bermanfaat bagi pemanfaatan bonus demografi ke depan. Sebaliknya, tanpa persiapan yang matang, bonus demografi dapat menjadi permasalahan bagi pembangunan.

2.6.1.5. Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan Simeulue pada tahun 2020 adalah sebesar 46,22 persen dan diproyeksikan pada tahun 2045 menjadi 50,93 persen. Berdasarkan kelompok usianya, pada tahun 2020, penduduk di Simeulue didominasi oleh penduduk usia produktif (15–64 tahun), yakni sebesar 68,39 persen, sementara sisanya adalah penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk 65 tahun ke atas (Tabel 3). Rasio ketergantungan Simeulue pada tahun 2020 adalah sebesar 46,22 persen. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 46 orang penduduk usia non produktif (penduduk usia 0-14 tahun, dan penduduk usia 65 tahun ke atas). Rasio ketergantungan penting untuk diketahui karena rasio ketergantungan yang tinggi menunjukkan tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia non produktif.

Tabel 2.121 Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

PARAMETER	TAHUN					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Angka Ketergantungan (%)	46.22	46.60	48.82	51.66	50.72	50.93

Sumber : Data diolah, 2024

Semakin rendah rasio ketergantungan maka akan semakin baik atau semakin kecil beban yang ditanggung penduduk usia produktif. Pada tahun 2025-2030, rasio ketergantungan penduduk mengalami penurunan dikarenakan jumlah usia produktif lebih besar dibandingkan jumlah usia tidak produktif. Seiring menurunnya bonus demografi, rasio ketergantungan kembali meningkat. Diperkirakan pada tahun 2045, rasio ketergantungan penduduk meningkat cukup tinggi yaitu menjadi 50,93 persen. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya angka usia harapan hidup penduduk usia 65+ yang meningkat proporsinya menjadi 10,67 persen dari total penduduk. Total penduduk usia 0-14 tahun

juga masih cukup tinggi yaitu pada kisaran 23,08 persen. Meningkatnya angka penduduk usia tidak produktif menyebabkan beban penduduk usia produktif meningkat.

2.6.1.6. Penduduk dengan Disabilitas

Data akurat tentang Penyandang Disabilitas digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas dan juga untuk membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan data DRKA bahwa angka Disabilitas Simeulue pada tahun 2023 adalah sebanyak 497 jiwa dengan rincian terlihat pada tabel 3.4.

Tabel 2.122 Angka Penduduk Disabilitas di Kabupaten Simeulue Tahun 2023

Wilayah Kabupaten	Disabilitas Fisik	Disabilitas Netra Buta	Disabilitas Rungu Wicara	Disabilitas Mental Jiwa	Disabilitas Fisik dan Mental	Disabilitas Lainnya
1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten Simeulue	148	70	96	118	16	49

Sumber : Data diolah, 2024

2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik untuk menunjang kehidupan sosial masyarakat serta meningkatkan kepuasan masyarakat disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah ditetapkan. Selain itu pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik diupayakan merata dan proporsional sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk di setiap wilayah yang harus dilayani.

Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan public di Kabupaten Simeulue tentunya akan terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang diproyeksikan akan berjumlah 124.450 jiwa pada tahun 2045. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain meliputi kebutuhan rumah/tempat tinggal, air bersih, energi/Listrik, tempat pengolahan persampahan, sarana Kesehatan serta sarana Pendidikan,

2.6.2.1. Proyeksi Kebutuhan Perumahan

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka Kawasan permukiman juga bertambah termasuk juga kebutuhan akan rumah layak huni. Jumlah rumah di Kabupaten Simeulue pada tahun 2023 berjumlah 23.279 unit. Pada tahun 2045 kebutuhan rumah diproyeksikan akan bertambah sebanyak 7.450 unit menjadi 30.729 unit.

Tabel 2.123 Jumlah Kebutuhan Tempat Tinggal Di Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue (Unit)

Lokasi	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Simeulue Tengah	1.915	1.964	2.092	2.228	2.373	2.528
Salang	1.988	2.039	2.172	2.313	2.464	2.624
Teupah Barat	2.033	2.085	2.221	2.365	2.519	2.684
Simeulue Timur	7.154	7.337	7.815	8.324	8.866	9.443
Teluk Dalam	1.297	1.330	1.417	1.509	1.607	1.712
Simeulue Barat	2.781	2.852	3.038	3.236	3.446	3.671
Teupah Selatan	2.606	2.673	2.847	3.032	3.230	3.440
Alapan	931	955	1.017	1.083	1.154	1.229
Teupah Tengah	1.721	1.765	1.880	2.002	2.133	2.272
Simeulue Cut	853	875	932	992	1.057	1.126
Kab. Simeulue	23.279	23.875	25.431	27.084	28.849	30.729

Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue Tahun 2024 (olah)

Tabel 2.124 Jumlah Tempat Tinggal Yang Terpenuhi Dari Jumlah Kebutuhan Per Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue (Unit)

Lokasi	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Simeulue Tengah	1.915	1.954	2.054	2.174	2.301	2.435
Salang	1.988	2.029	2.132	2.257	2.389	2.528
Teupah Barat	2.033	2.075	2.180	2.307	2.442	2.585
Simeulue Timur	7.154	7.300	7.672	8.120	8.595	9.097
Teluk Dalam	1.297	1.323	1.391	1.472	1.558	1.649
Simeulue Barat	2.781	2.838	2.982	3.157	3.341	3.536
Teupah Selatan	2.606	2.660	2.795	2.958	3.131	3.314
Alapan	931	950	998	1.057	1.119	1.184
Teupah Tengah	1.721	1.756	1.846	1.953	2.068	2.189
Simeulue Cut	853	871	915	968	1.025	1.085
Kab. Simeulue	23.279	23.756	24.964	26.423	27.967	29.601

Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue Tahun 2024 (olah)

2.6.2.2. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih.

Pertambahan jumlah penduduk menuntut pemenuhan kebutuhan akan air minum yang semakin bertambah pula. Jumlah kebutuhan air minum di Kabupaten Simeulue tahun 2023 sebanyak 46,48 L/dt, diproyeksikan akan meningkat sebanyak 297,09 L/dt pada tahun 2045 menjadi 343,57 L/dt.

Tabel 2.125 Proyeksi Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (L/dt)

No	Nama	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	jumlah air minum yang terpenuhi dari jumlah kebutuhan per kecamatan	46,48	21,46	105,67	183,35	272,82	343,57
2	jumlah kebutuhan air minum di kecamatan	46,48	64,03	163,59	228,84	292,52	343,57

Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue Tahun 2024 (olah)

Tabel 2.126 Jumlah Air Minum Yang Terpenuhi Dari Jumlah Kebutuhan Per Kecamatan (L/dt)

Lokasi	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Simeulue Tengah	2,82	0,76	5,15	12,60	19,73	26,49
Salang	0,00	0,92	6,36	15,83	25,21	34,41
Teupah Barat	5,58	1,87	8,08	13,67	21,32	28,50
Simeulue Timur	30,24	14,53	50,51	70,32	95,48	105,02
Teluk Dalam	3,91	1,28	5,59	9,56	15,07	20,36
Simeulue Barat	0,00	0,30	8,22	19,98	31,09	41,48
Teupah Selatan	1,11	0,23	9,15	15,53	24,31	32,61
Alapan	0,00	0,80	3,45	8,39	13,08	17,47
Teupah Tengah	2,82	0,69	6,77	11,61	18,34	24,85
Simeulue Cut	0,00	0,09	2,39	5,87	9,20	12,38
Kab. Simeulue	46,48	21,46	105,67	183,35	272,82	343,57

Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue Tahun 2024 (olah)

Tabel 2.127 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Simeulue (L/dt)

Lokasi	Kondisi Tahun 2023	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Simeulue Tengah	2,82	3,79	10,30	16,80	21,92	26,49
Salang	0,00	4,60	12,72	21,10	28,01	34,41
Teupah Barat	5,58	6,22	13,47	18,23	23,69	28,50
Simeulue Timur	30,24	32,29	63,14	78,13	95,48	105,02
Teluk Dalam	3,91	4,25	9,31	12,74	16,74	20,36
Simeulue Barat	0,00	3,04	16,43	26,64	34,54	41,48
Teupah Selatan	1,11	2,34	15,25	20,71	27,01	32,61
Alapan	0,00	3,19	6,90	11,19	14,53	17,47
Teupah Tengah	2,82	3,43	11,29	15,48	20,38	24,85
Simeulue Cut	0,00	0,88	4,78	7,82	10,22	12,38
Kab. Simeulue	46,48	64,03	163,59	228,84	292,52	343,57

Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue Tahun 2024 (olah)

Tabel 2.128 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Simeulue (SR)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Jumlan Penduduk	97.118	100.136	107.336	113.884	119.548	124.461
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (SR)	32.010	33.377	35.780	37.960	39.847	41.483

Sumber : Data diolah, 2024

2.6.2.3. Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik.

Rata-rata jumlah KWh yang terjual per pelanggan di wilayah Kabupaten Simeulue sebesar 122 kWh. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan masyarakat akan Listrik semakin bertambah pula. Proyeksi kebutuhan Listrik pada tahun 2045 adalah sebesar 3.913 GWh bertambah sebesar 893,58 dari tahun 2023 yang berjumlah 3.019,5.

Tabel 2.129 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik (GWh)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7
Jumlan Penduduk	97.118	100.136	107.336	113.884	119.548	124.461
Jumlah Rumah	24.750	25.806	27.665	29.350	29.885	32.074
Proyeksi Kebutuhan Listrik	3.019,50	3.148,38	3.375,09	3.580,73	3.645,97	3.913,08

Sumber : Data diolah, 2024

2.6.2.4. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Jika dilihat dari data data nasional bahwa jumlah produksi sampah perorang perhari adalah sebesar 0,68 kg, Oleh karenanya jumlah prodeuksi sampah pada tahun 2045 diproyeksikan sebesar 84,63 ton/hari. Sampai dengan tahun 2023 di Kabupaten Simeulue terdapat fasilitas pemrosesan akhir sampah seluas 1 sel (0,5 ha) dengan ketersediaan lahan seluas 6 Ha. Oleh karena itu pada tahun 2045 di targetkan luas sel terbangun untuk tempat pemrosesan akhir sampah seluas 5 Ha untuk lebih lengkanya dapat di lihat tabel 2.130.

Tabel 2.130 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/hari)	65,30	68,09	72,99	77,44	81,29	84,63
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) (Ha)	0,5	1	2	3	4	5
jumlah TPA (unit)	1	1	1	0	0	0
jumlah TPS3R (unit)	3	3	5	10	20	27
jumlah TPST (unit)	0	0	0	1	2	3
produksi sampah (ton)	16.476,29	17.989,43	19.095,02	20.268,55	21.514,20	22.836,41

Sumber : Data diolah, 2024

2.6.2.5. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Pertambahan jumlah penduduk juga menuntut pemenuhan kebutuhan akan sarana kesehatan semakin bertambah pula. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Simeulue terdiri dari Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas pembantu serta failitas kesehatan lainnya. Pada tahun 2045 kebutuham fasilitas kesehatan diproyeksikan sebanyak 3 unit Rumah Sakit, 20 unit Puskesmas, 140 unit Puskesmas Pembantu serta 20 unit fasilitas lainnya.

Tabel 2.131 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan (unit)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Penduduk (jiwa)	97.118	100.136	107.336	113.884	119.548	124.461
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit
Puskesmas	15 Unit	15 Unit	16 Unit	18 Unit	20 Unit	20 Unit
Puskesmas Pembantu	124 Unit	124 Unit	127 Unit	130 Unit	135 Unit	140 Unit
Fasilitas lainnya	4 Unit	4 Unit	7 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit

Sumber : Data diolah, 2024

2.6.2.6. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Pertambahan jumlah penduduk juga menuntut pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana pendidikan semakin bertambah pula, baik itu berupa TK, SD maupun SMP. Kebutuhan Fasilitas Pendidikan berupa sekolah TK diproyeksikan berjumlah 119 unit, bertambah sebanyak 31 unit di tahun 2045 dari jumlah sebanyak 88 unit pada tahun 2023. Kebutuhan akan SD juga diproyeksikan berjumlah 145 unit, bertambah sebanyak 17 unit dari 2023 sebanyak 128 unit. Sedangkan kebutuhan sarana sekolah setingkat SMP diproyeksikan akan bertambah sebanyak 16 unit pada tahun 2045.

Tabel 2.132 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan (unit)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Penduduk	97.118	100.136	107.336	113.884	119.548	124.461
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
TK	88	89	99	109	114	119
SD/MI	128	129	132	135	140	145
SMP/MTs	59	60	63	67	71	75
SMA/MA/SMK	37					

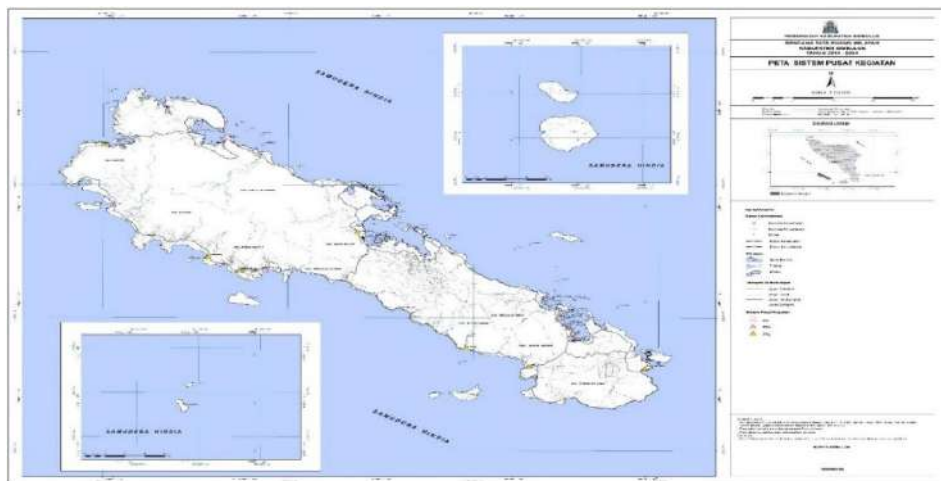
Sumber : Data diolah, 2024

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1. Pusat – Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Simeulue

Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034 dijelaskan bahwa terdapat pusat kegiatan yang terdiri dari: Pusat Kegiatan Lokal (PKL); Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Simeulue yaitu:

1. PKL yaitu Kota Sinabang di Simeulue Timur;
2. PPK terdiri atas:
 - a. PPK Kampung Aie di Simeulue Tengah; dan
 - b. PPK Sibigo di Simeulue Barat.
3. PPL terdiri atas:
 - a. PPL Nasreuheu di Kecamatan Salang;
 - b. PPL Selare'e di Teluk Dalam;
 - c. PPL Labuhan Bajau di Kecamatan Teupah Selatan;
 - d. PPL Salur di Kecamatan Teupah Barat;
 - e. PPL Langi di Kecamatan Alafan;
 - f. PPL Lasikin di Kecamatan Teupah Tengah; dan
 - g. PPL Kuta Padang di Kecamatan Simeulue Cut.
 - h. PPL Kuala Bakti di Kecamatan Teluk Dalam



Gambar 2.58 Peta Sitem Pusat Kegiatan Kabupaten Simeulue

Adapun fungsi dari setiap pusat-pusat kegiatan yang dikembangkan, disesuaikan dengan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Simeulue diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan PKL sebagai pusat pengembangan perikanan dilakukan di PKL Sinabang;
- 2) Mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian, dilakukan di PPK Kampung Aie, PPK Sibigo, PPL Nasreuhe, PPL Lasikin dan PPL Langi.
- 3) Mengembangkan PKL, PPK, dan PPL sebagai pusat pengembangan pariwisata dilakukan di PKL Sinabang, PPK Kampung Aie, PPK Sibigo, PPL Nasreuheu, PPL Kuala Bakti, PPL Labuhan Bajau, PPL Salur, PPL Langi, PPL Lasikin, dan PPL Kuta Padang;

- 4) Mengembangkan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan, dilakukan di PPL Nasreuhe, PPL Kuala Bakti dan PPL Labuhan Bajau; dan
- 5) Mengembangkan PPL sebagai Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dilakukan di PPL Kuala Bakti dan PPL Labuan Bajau.

2.7.2. Prioritas Pemanfaatan Ruang

2.7.2.1. Dasar Penyusunan Arah Pemanfaatan Ruang

Arah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun). Prioritas pemanfaatan ruang dikembangkan berdasarkan pertimbangan upaya untuk mengantisipasi kebutuhan dan dinamika pengembangan ruang kota. Untuk mewujudkan struktur dan pola ruang kabupaten, maka prioritas pemanfaatan ruang di Kabupaten Simeulue secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Upaya untuk mengantisipasi dan mitigasi dari ancaman bencana, seperti bencana tsunami, longsor dan banjir diprioritaskan pada pembentukan struktur ruang pada ruang di kawasan yang tidak atau minim resiko bencana. Kegiatan ini seharusnya diantisipasi dengan memberikan ketegasan bagi masyarakat untuk setiap kegiatan pembangunan memperhatikan kondisi alam dan memberikan pemahaman terhadap kemungkinan bencana yang kemungkinan terjadi.
- b. Upaya memenuhi kebutuhan dan dinamika pengembangan ruang permukiman dan kota pada beberapa bagian kabupaten ini mengalami perkembangan pembangunan yang cepat. Perlu mendorong terwujudnya rencana pola ruang wilayah pada kawasan tersebut, serta perwujudan komponen komponen pembentuk struktur ruang yang dapat memacu pertumbuhan kawasan.
- c. Upaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan perkotaan yang sudah tertata dan kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pelestarian cagar budaya khususnya pada kawasan perumahan. Prioritas ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan.
- d. Upaya konservasi dan penyelamatan kawasan kepulauan.
- e. Penyelamatan hutan dan pengembalian hutan perlu segera dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat lokal.

Kearifan lokal yang ada perlu diberi kesempatan dan kepercayaan untuk menghentikan perusakan hutan dan pemusnahan satwa di kawasan ini. Pemanfaatan ruang pada masing-masing kawasan yang diprioritaskan di Kabupaten Simeulue dilakukan dengan:

- a. Pembangunan baru, yaitu pengembangan kawasan pada ruang kota yang masih kosong dan atau belum terbangun. Pola ini diterapkan pada ruang-ruang yang rusak akibat bencana alam dan ruang-ruang yang akan dikembangkan sebagai kawasan perkotaan baru.
- b. Pemeliharaan lingkungan, yaitu mempertahankan kualitas lingkungan yang sudah baik agar tidak mengalami penurunan kualitas. Pola ini diterapkan pada kawasan perumahan yang sudah tertata, kawasan perdagangan dan jasa komersial serta kawasan perkantoran yang sudah terencana dan tidak terjadi kecenderungan perubahan fungsi maupun intensitasnya.
- c. Perbaikan lingkungan, yaitu memperbaiki struktur lingkungan yang sudah ada, dan dimungkinkan melakukan pembongkaran terbatas guna penyempurnaan pola fisik prasarana yang sudah ada. Pola ini diterapkan pada kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat meningkatnya aktivitas.

Berdasarkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung ruang serta tuntutan dinamika perkembangan kota, maka pengembangan ruang di Kabupaten Simeulue dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Ruang yang dibatasi perkembangannya, meliputi ruang yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana, ruang dengan daya dukung lingkungan rendah, serta ruang yang dijaga kelestariannya dalam upaya upaya untuk tetap menjaga keseimbangan ekologi. Pada kawasan ini prioritas pemanfaatan ruang di arahkan pada upaya mitigasi bencana dengan membatasi perkembangan pola ruang yang tidak sesuai serta mewujudkan struktur ruang yang dapat mereduksi ancaman bencana alam.
- b. Ruang yang dikendalikan perkembangannya, adalah ruang kota yang sudah berkembang dan terencana. Pada kawasan yang di-kendalikan pengembangannya, prioritas pemanfaatan ruang diarahkan pada upaya untuk menjaga lingkungan yang sudah stabil (tidak mengalami perubahan baik intensitas maupun fungsinya) khususnya pada kawasan perumahan dan kawasan perkantoran.
- c. Ruang yang didorong perkembangannya, adalah ruang kabupaten yang masih belum terbangun dan didorong pengembangan dalam rangka memenuhi kebutuhan dinamika perkembangan pembangunan. Prioritas pemanfaatan ruang diarahkan pada pengembangan jaringan jalan baru sebagai pembentuk struktur ruang utama dan pengembangan pola ruang sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Berkaitan dengan penetapan kawasan strategis di dalam RTRW Kabupaten Simeulue yang merupakan kawasan yang diprioritaskan penataan ruangnya karena pertimbangan pertumbuhan ekonomi, maka dalam pemanfaatan ruang menetapkan bahwa kawasan-kawasan strategis tersebut menjadi prioritas untuk dikembangkan pada lima tahun pertama, sehingga diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan Kabupaten.

2.7.2.2. Perwujudan Rencana Struktur Ruang

- a. Perwujudan Rencana Sistem Pusat-Pusat Pelayanan Dari hirarki dan fungsi utama kawasan dapat diturunkan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana utama yang seharusnya dibangun dalam kerangka mewujudkan rencana struktur ruang yang telah dirumuskan.
- b. Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
 1. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Transportasi
 - 1) Rencana sistem jaringan prasarana transportasi darat

Untuk melayani pergerakan barang dan orang secara efektif dan efisien diperlukan pembangunan, peningkatan dan perbaikan jalan yang menghubungkan antar pusat permukiman, peningkatan dan cakupan pelayanan kendaraan angkutan penumpang dan barang serta pembangunan dan peningkatan terminal penumpang. Adapun program utama yang diperlukan untuk mewujudkan sistem jaringan prasarana angkutan darat adalah:

- (1) Peningkatan jalan;
 - (2) Pemeliharaan jalan kabupaten yang menghubungkan antara PKL, PPK, dan PPL;
 - (3) Optimalisasi terminal terpadu
 - (4) Pembangunan sub terminal
 - (5) Pembangunan halte
 - (6) Pembangunan/optimalisasi unit pengujian kendaraan bermotor
 - (7) Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, trayek angkutan perkotaan, angkutan perdesaan, angkutan barang.
- 2) Rencana sistem jaringan prasarana transportasi udara Keberadaan bandar udara diharapkan dapat membantu pengembangan transportasi menjadi lebih baik.

Bandar udara ini diperuntukkan untuk penerbangan perintis yang dapat menghubungkan Kabupaten ini dengan kabupaten/kota lain di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Arahkan pemanfaatan ruang untuk transportasi udara:

- (1) Peningkatan pembangunan sarana prasarana kawasan bandara Lasikin, dan
 - (2) Penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
- 3) Rencana sistem jaringan prasarana laut

Keberadaan pelabuhan di Kabupaten ini sebagai sarana transportasi utama dengan Pulau Sumatera telah membantu transportasi massal, bahan pangan, hasil alam, perkebunan dan industri dari atau ke kabupaten ini. Keberadaan Pelabuhan juga diharapkan akan melahirkan jenis investasi baru di daerah ini. Arah pemanfaatan ruang untuk transportasi laut adalah sebagai berikut:

- (1) Pembangunan/peningkatan Pelabuhan dan sarana prasarananya, dan
 - (2) Penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Pelabuhan
2. Sistem jaringan prasarana energi
- Program pembangunan yang perlu dilakukan adalah:
- (1) Perluasan layanan listrik sampai tingkat desa, terutama pada desa yang berada pada kawasan terpencil;
 - (2) Pengembangan potensi sumber pembangkit listrik tenaga air, arus laut, panas bumi dan surya;
 - (3) Pemeliharaan pada sumber pembangkit listrik yang sudah ada.
- Program pembangunan prasarana energi adalah:
- (1) Pembangunan prasarana energi terbarukan di berbagai kecamatan yang mempunyai potensi;
 - (2) Perbaikan prasarana energi terbarukan yang telah ada;
 - (3) Pembangunan jaringan energi dari pusat penghasil energi ke konsumen.
3. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi
- Program pengembangan prasarana telekomunikasi adalah:
- (1) Pengembangan cakupan pelayanan telekomunikasi;
 - (2) Penataan dan efisiensi penempatan BTS;
 - (3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasional kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk.
4. Sistem jaringan sumber daya air
- Program pengelolaan dan pengembangan jaringan sumberdaya air adalah:
- (1) Pengelolaan dan pengembangan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten
 - (2) Pengelolaan dan pengembangan sumberdaya air berbasis wilayah sungai,
 - (3) Pengelolaan dan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih;
 - (4) Pengelolaan dan pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
 - (5) Pengelolaan dan pengembangan sistem pengendali banjir.
5. Sistem jaringan prasarana permukiman
- Program pembangunan prasarana permukiman adalah:

- (1) Pembangunan perumahan perkotaan di kota;
- (2) Perbaikan perumahan tidak/semi permanen di seluruh pusat pelayanan kawasan/lingkungan;
- (3) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
- (4) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan drainase;
- (5) Pembangunan jalan lokal/lingkungan dari PPK/PPL ke desa-desa berkembang.

2.7.2.3. Perwujudan Rencana Pola Ruang

a. Perwujudan Kawasan Lindung

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pola ruang kawasan lindung ini adalah:

1. Menetapkan batas (pengukuran tata batas) dari kawasan lindung;
2. Sosialisasi batas resmi (hasil pengukuran dan penetapan tata batas) dari kawasan-kawasan lindung tersebut;
3. Merumuskan peraturan tentang pemberian izin, arahan insentif dan disinsentif, serta sanksi-sanksi terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian kawasan lindung sebagaimana disampaikan pada poin 1);
4. Menyiapkan mekanisme pemantauan, pengaduan dan advokasi pelaksanaan peraturan tentang batas-batas kawasan lindung;
5. Pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada di dalam kawasan lindung;
6. Pengembalian fungsi kawasan hutan yang mengalami kerusakan;
7. Pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan lindung, agar tidak mengganggu fungsi lindung.

Sedangkan dalam upaya pemulihan fungsi kawasan lindung, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Identifikasi kawasan dan tingkat kerusakan (sangat kritis dan berdampak penting);
2. Prioritasi penanganan kawasan yang rusak sesuai tingkat kerusakan dan dampaknya;
3. Penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk rehabilitasi kawasan yang rusak;
4. Pengembangan program perhutanan sosial dan atau sejenisnya khususnya pada Kawasan hutan lindung dan hutan produksi;
5. Pengadaan bibit dan penanaman pada kawasan prioritas;
6. Pemantauan dan evaluasi.

b. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung

Rencana pengelolaan kawasan lindung yang pada dasarnya adalah memulihkan fungsinya seperti sediakala, maka program yang direncanakan untuk pemulihan tersebut, adalah:

1. Meningkatkan dan mengembangkan cakupan kawasan program perhutanan sosial pada kawasan hutan lindung yang sudah rusak/alih fungsi non hutan;
2. Melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah dan masyarakat setempat;
3. Langkah-langkah pengelolaan hutan lindung yang akan dilaksanakan adalah:
 - (1) Penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada kawasan HL untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya;
 - (2) Penegakan hukum bagi kegiatan illegal logging dengan penanganan (represif, persuasif, dan preventif) secara berkelanjutan;
 - (3) Kegiatan Rehabilitasi, Redeliniasi kawasan hutan;

Perhutanan sosial dilakukan pada hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat (meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/benefit kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat), tanpa mengganggu fungsi pokoknya (meningkatkan fungsi hutan dan fungsi kawasan, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi kawasan hutan).

c. Perwujudan Kawasan Sempadan Sungai

Perlindungan terhadap kawasan sempadan sungai dimaksud untuk menjaga kelestarian sumber daya air pada kawasan sekitar aliran sungai. Program yang diperlukan dalam perlindungan kawasan sempadan sungai yaitu dengan cara:

1. Penetapan batasan yang tegas untuk kawasan sempadan sungai;
2. Penanaman vegetasi pada kawasan sempadan sungai;
3. Peningkatan kerjasama dan peran masyarakat dalam pemanfaatan kawasan sempadan sungai.
4. Pencegahan kegiatan budidaya disepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya.
5. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai, terutama bagi kegiatan yang berpotensi merusak/merubah ekosistem sungai.
6. Pengamanan dan pemeliharaan sungai dengan menetapkan garis sempadan sepanjang aliran sungai, penanaman vegetasi, dan konstruksi khusus.

d. Perwujudan Kawasan Sempadan Pantai

Perlindungan terhadap kawasan sempadan sungai dimaksud untuk menjaga untuk melindungi dan menjaga:

1. Kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam;
3. Alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan
4. Alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

Penghitungan batas sempadan pantai harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait.

e. Kawasan Rawan Bencana Alam

1. Gempa Bumi dan Tsunami

Program utama mitigasi yang perlu diambil dalam menghadapi gempa adalah:

- (1) Pemasangan alarm dan komunikasi tanda bahaya (alarm warning systems) di seluruh setiap wilayah padat penduduk di seluruh wilayah kecamatan;
- (2) Penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- (3) Standarisasi kualitas bangunan tahan gempa bumi, terutama bangunan/obyek vital dan perumahan penduduk di seluruh wilayah Kabupaten;
- (4) Sosialisasi tanggap darurat dan mekanisme evakuasi korban bencana di seluruh wilayah Kabupaten;
- (5) Penguatan kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana;
- (6) Pembangunan dan penguatan sistem komunikasi ke daerah-daerah terpencil;
- (7) Penguatan akses informasi dan komunikasi ke dan dari instansi-instansi yang menangani bencana;
- (8) Penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana.

Secara teknis mitigasi gempa bumi dan tsunami dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

- (1) Menghindar (avoidance), yaitu dengan cara tidak membangun dan menempatkan bangunan di tempat-tempat yang berpotensi terkena bencana;
- (2) Penetapan persyaratan keselamatan struktur bangunan (provision for safety instructures), struktur bangunan harus dirancang dengan memperhitungkan

keselamatan jiwa manusia, yaitu dengan bangunan yang tahan gempa bumi (2sloop);

- (3) Pembatasan penggunaan lahan dan penempatan jumlah jiwa (limitation of landuseand occupancy), Jenis peruntukan lahan, seperti lahan pertanian atau lahan pemukiman dapat dilakukan dengan cara membuat peraturan peraturan yang berkaitan dengan potensi bencana yang mungkin timbul. Penempatan jumlah jiwa per hektar dapat disesuaikan untuk mengurangi tingkat bencana.

2. Bencana Longsor

Program utama yang perlu dilakukan untuk mitigasi rawan bencana longsor adalah:

- (1) Penguatan lereng di kawasan rawan longsor;
- (2) Rehabilitasi dan reboisasi daerah-daerah penyangga dan resapan air;
- (3) Pengendalian penebangan dan pemanfaatan lahan di daerah penyangga dan resapan air;
- (4) Pembangunan saluran drainase di tempat yang rawan bencana tanah longsor;
- (5) Pengendalian penambangan pada daerah-daerah penyangga dan resapan air;
- (6) Pengendalian pemukiman di daerah penyangga, resapan air dan daerah rawan longsor;
- (7) Inventarisasi dan pengawasan ketat daerah-daerah rawan longsor;
- (8) Pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor di setiap wilayah kecamatan;
- (9) Penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana tanah longsor;
- (10) Peraturan daerah yang mengatur sanksi hukum bagi pelanggaran tata ruang di daerah rawan longsor;
- (11) Penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah.

3. Bencana Banjir

Pada kawasan dengan genangan yang cukup lama perlu ditetapkan sebagai kawasan lindung (inclave). Karena bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang dapat diduga maka rekayasa teknik pengendalian kerusakan air dapat dilakukan disamping dibangunnya sistem peringatan dini. Namun untuk mencegah banjir limpasan karena deforestasi tentu hanya dapat dilakukan dengan rehabilitasi kawasan hulu. Program utama yang perlu dilakukan adalah:

- (1) Delineasi kawasan banjir eksisting dan potensi meluasnya kawasan rawan banjir;

- (2) Identifikasi faktor penyebab bahaya banjir, seperti kerusakan kawasan tangkapan air pada hulu sungai, kerusakan DAS, cekungan dan faktor-faktor lainnya;
- (3) Penyusunan program mitigasi bencana banjir, baik mitigasi struktural maupun non struktural;
- (4) Pelaksanaan program mitigasi yang telah dirumuskan seperti :
 - Rehabilitasi dan reboisasi kawasan hulu dan DAS,
 - Pembangunan waduk pengendali daya rusak air (banjir),
 - Sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak (potensial terdampak),
 - Menetapkan sebagian dari kawasan banjir sebagai kawasan lindung karena merupakan bagian dari eksostim rawa/tanah basah (wet land).

f. Rencana Perwujudan Kawasan Budidaya

1. Kawasan Hutan Produksi

Hutan Tanam Rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan, kelompok atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan yang meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan semata-mata dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa dan belum dibebani izin/hak. Pengelola hutan desa adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk desa dan secara fungsional berada dalam organisasi desa serta bertanggung jawab kepada kepala desa. Lokasi dan luas hutan desa ditentukan oleh instansi berwenang. Hutan desa dapat berada dalam hutan lindung dan hutan produksi dengan ketentuan bahwa untuk hutan lindung tidak diperkenankan memanfaatkan hasil hutan kayu. Pemanfaatan lain adalah hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan pemungutan hutan bukan kayu.

Kedua program di atas terlihat jelas sangat berpihak kepada masyarakat, baik masyarakat yang berada di sekitar hutan ataupun yang berada dalam hutan. Program ini akan membawa kemanfaatan yang bermakna bagi pemulihan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kendatipun demikian proses penetapan lokasi, pola pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dari hutan tanaman rakyat dan hutan desa seyogyanya diselenggarakan dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk pengelolaan HPT ini adalah sebagai berikut:

- (1) Fasilitasi kelompok dalam izin pengelolaan HTR/HD;
- (2) Pemasangan batas luar kawasan dan blok pemanfaatan dan blok perlindungan;
- (3) Pembangunan infrastruktur pendukung untuk pemanfaatan sumber daya air (pertanian, mikrohydro, kebutuhan air bersih);
- (4) Pembangunan fasilitas wisata alam;
- (5) Fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan.

g. Rencana Perwujudan Kawasan Pertanian

1. Kawasan tanaman pangan (sawah)

Program yang dikembangkan untuk pertanian lahan basah atau padi sawah beririgasi adalah:

- (1) Peningkatan layanan irigasi pertanian;
- (2) Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian;
- (3) Peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan;
- (4) Pengembangan varietas padi organik bersertifikat;
- (5) Pemberian insentif pertanian (keringanan pajak/retribusi dan subsidi);
- (6) Penguatan kelembagaan petani dan pemodal.

2. Pertanian Lahan Kering (Hortikultura)

Untuk mewujudkan rencana pola ruang pertanian lahan kering dan hortikultura diperlukan program seperti berikut :

- (1) Penetapan kawasan sentra pertanian lahan kering;
- (2) Pemilihan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan;
- (3) Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan;
- (4) Pembangunan prasarana dan sarana produksi;
- (5) Penguatan kelembagaan petani dan permodalan.

3. Rencana Perwujudan Kawasan Perkebunan

Program untuk pengembangan ketiga jenis komoditas perkebunan campuran ini adalah:

- (1) Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial;
- (2) Peningkatan produktivitas komoditi dengan intensifikasi lahan;
- (3) Pembangunan infrastruktur pada kawasan pengembangan.

h. Rencana Perwujudan Kawasan Peternakan

Program yang dikembangkan untuk kawasan peternakan adalah:

1. Pengembangan sentra peternakan ternak besar, yaitu sapi, domba, kambing dan kerbau. Sebagai sentra peternakan ternak besar perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi, pembesaran, penggemukan, pemanfaatan daging (RPH) dan pengolahan daging dan susu;
 2. Pengembangan sentra peternakan unggas. Diusulkannya pusat sentra peternakan unggas ini karena populasi unggas terdapat di seluruh kecamatan dengan jumlah yang relatif berimbang antara kawasan;
 3. Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pada kawasan sentra peternakan;
 4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak;
 5. Pengembangan pakan ternak lokal yang mengandalkan bahan baku lokal.
- i. Rencana Perwujudan Kawasan Perikanan
- Program yang dikembangkan untuk kawasan perikanan ini meliputi:
1. Pembinaan dan penyuluhan untuk pengembangan perikanan;
 2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada wilayah pengembangan perikanan;
 3. Penguatan kelembagaan pengelola perikanan dan pemodalan.
- j. Rencana Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi
- Program yang dikembangkan untuk kawasan pertambangan ini meliputi:
1. Inventarisasi sumberdaya mineral yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi;
 2. Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian;
 3. Menetapkan satuan Wilayah Pertambangan (WP);
- k. Rencana Perwujudan Kawasan Pariwisata
- Program yang dikembangkan untuk kawasan pariwisata adalah:
1. Pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu. Arahkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
 - (1) Inventarisasi sumberdaya alam yang berpotensi sebagai objek wisata.
 - (2) Membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah.
 - (3) Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan.
 2. Arahkan pemanfaatan untuk kawasan pariwisata adalah:
 - (1) Penataan di dalam kawasan wisata alam dan budaya terutama dalam kaitannya dengan perletakan bangunan atau infrastruktur pendukung kawasan, sehingga dapat terjaga fungsi konsevasinya;

- (2) Menata dan mengendalikan kawasan atau kegiatan budidaya lain yang terletak di sekitarnya, agar dapat dijaga saling pengaruh yang tidak merugikan kedua pihak (industri besar dan kegiatan sekitarnya);
- (3) Penguatan strategi pemasaran dukungan promosi yang gencar agar dapat dijaga saling pengaruh dan berlanjut dengan objek wisata lainnya;
- (4) Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan arus kedatangan wisatawan baik domestik maupun mancanegara;
- (5) Peningkatan kemampuan pengelolaan objek-objek wisata baik dikalangan aparat daerah maupun masyarakat sehingga dapat dikelola dengan maksimal.

1. Recana Perwujudan Kawasan Permukiman

3. Permukiman Perkotaan

Pembangunan kawasan permukiman perlu didekati dengan mitigasi bencana. Prinsip dasar yang dalam pembangunan permukiman adalah:

- (1) Konstruksi bangunan harus tahan bencana.
- (2) Tidak dibangun di kawasan rawan bencana
- (3) Bangunan penyelamat (escape building) sebagai rumah perlindungan bersama bila terjadi bencana alam. Pada saat normal (tidak terjadi bencana) bangunan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bangunan sosial. Bangunan ini tentunya harus tahan gempa dan berada pada kawasan yang aman dan mudah dijangkau.
- (4) Permukiman seyogyanya harus didukung dengan infrastruktur dasar, seperti sistem transportasi, air bersih, listrik, telekomunikasi yang memadai, sanitasi lingkungan dan adanya pengelolaan sampah yang baik serta dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, kesehatan dan perdagangan.

Pembangunan permukiman dikembangkan dengan komposisi 1:3:6, artinya bila dibangun sebuah rumah mewah harus sebanding dengan pembangunan 3 rumah sedang dan 6 rumah sederhana. Komposisi tersebut sekaligus menggambarkan pemetakan kelompok tingkatan kepadatan rumah, yaitu kepadatan tinggi, sedang dan rendah.

Program pembangunan permukiman perkotaan adalah sebagai berikut:

- (1) Pemetakan zona permukiman eksisiting dan kawasan siap bangun dengan memperhatikan :
 - Daya tampung kota, terkait dengan kawasan yang relatif aman dari nancaman bencana alam;
 - Rencana pengembangan fasilitas utama kota;
 - Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.

- (2) Identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas dan utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan dimasa depan, seperti:
 - Jalan lingkungan;
 - Sistem jaringan prasarana air minum;
 - Sistem jaringan prasarana listrik;
 - Sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - Sistem pengelolaan sampah (gerobak, TPS dan TPA);
 - Sistem drainase dan pengelolaan limbah.
- (3) Identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan rawan
- (4) bencana alam dan merekomendasikan mitigasinya/relokasi;
- (5) Identifikasi seluruh bangunan yang berada pada kawasan aman bencana

2.7.3. Indikasi Program/Proyek Strategis yang dapat Mempengaruhi Perkebangan Daerah Simeulue berdasarkan RTRWK Simeulue

1. Pengembangan fasilitas pelayanan skala kabupaten
2. Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Nasional pada Kabupaten Simeulue
 - Ruas jalan Sinabang - Sibigo sepanjang 93,37 km
 - Ruas jalan Sinabang - Lasikin sepanjang 11,20 km
 - Ruas jalan Lasikin - Nasreuhe 64,13 km
 - Ruas jalan Nasreuhe - Lewak - Sibigo 131,67 km
 - Ruas jalan Simpang Laning – Labuhan Bajau sepanjang 32.08 km
3. Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan jalan Provinsi pada Kabupaten Simeulue
 - Ruas jalan Lauke - BuluHadek sepanjang 9,8 km
 - Ruas jalan Kuala Makmur - Salur Latun sepanjang 19.46 km
 - Ruas jalan Sigulai – Nasreuheu.
4. Optimalisasi Pelabuhan Penyeberangan Sinabang di Kecamatan Simeulue Timur dan Pelabuhan Sibigo di Kecamatan Simeulue Barat sebagai Pelabuhan Pengumpan.
5. Pengembangan pelabuhan laut Sinabang di Kecamatan Simeulue Timur
6. Pengembangan bandara udara Lasikin.
7. Peningkatan saran dan prasarana pelabuhan perikanan
8. Pengembangan kawasan pertambangan
9. Pengembangan energi listrik
 - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dengan kapasitas 8 MW di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah;

- Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan kapasitas 2x7 MW di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur
10. Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi Sigulai
 11. Pengembangan kawasan transmigrasi di kecamatan Teupah Selatan, Simeulue Barat, Simeulue Tengah, Teluk Dalam, Salang dan Alafan.
 12. Pengembangan, peningkatan prasarana dan sarana pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional perbatasan negara pulau kecil terluar.
 - Pulau Simeulue Cut, kecamatan Simeulue Cut.
 - Pulau Silaut Besar, Kecamatan Alafan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Kabupaten Simeulue dihadapkan berbagai persoalan kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah angka kemiskinan yang masih tinggi mencapai 17,69 persen pada desember tahun 2024 dimana masih lebih tinggi dari Provinsi Aceh 14,23 persen dan Nasional 8,57 persen tahun 2024. Angka pengangguran di Kabupaten Simeulue pada tahun 2024 sebesar 5,50 persen dimana masih lebih tinggi dibandingkan Angka pengangguran Nasional 4,90 persen pada tahun 2024. masih tingginya pengangguran disebabkan oleh banyaknya kehilangan pekerjaan akibat lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja di kabupaten Simeulue. Disisi lain pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue berada di angka 4,43 persen pada tahun 2024. Kondisi ini masih dibawah rata-rata Aceh sebesar 4,66 persen dan Nasional sebesar 5,02 persen pada tahun 2024.

Kabupaten Simeulue memiliki potensi sumber daya alam yang sangat memadai (Kelautan dan perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, pariwisata dan potensi migas) namun saat ini belum dikelola secara maksimal, masih bersifat sektoral, dan tidak berkesinambungan. Jika dilihat dari kontribusi PDRB tahun 2024 memperlihatkan adanya kontribusi sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

3.1.1. Sumber Daya Manusia masih rendah

Sumber daya manusia di Kabupaten Simeulue masih menjadi tantangan utama dalam mendorong pembangunan daerah. Kualitas pendidikan yang belum merata, keterbatasan fasilitas pembelajaran, serta rendahnya keterampilan tenaga kerja menyebabkan daya saing masyarakat masih lemah. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas kerja dan terbatasnya kesempatan untuk mengakses lapangan pekerjaan yang lebih beragam, terutama di sektor formal.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga terlihat dari rendahnya jumlah tenaga terampil dan profesional di berbagai bidang strategis, sehingga banyak program pembangunan belum berjalan optimal. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pelatihan vokasi dan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Akibatnya, ketergantungan pada sektor primer masih tinggi, sementara potensi ekonomi daerah di sektor lain belum mampu dikembangkan secara maksimal.

Permasalahan Sumber daya Manusia di kabupaten Simeulue dapat di uraikan secara rinci sebagai berikut.

a. Pendidikan

- Angka IPM Kabupaten Simeulue dari tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 sebesar 66,03, tahun 2021 sebesar 66,41, tahun 2022 sebesar 67,27, pada tahun 2023 sebesar 68,06 dan pada tahun 2024 sebesar 70,95. Namun demikian, pencapaian ini masih lebih rendah dari angka IPM Provinsi Aceh yaitu sebesar 75,36 tahun 2024 dan angka IPM Nasional yaitu sebesar 75,00 tahun 2024.
- Masih Rendahnya angka Rata-Rata Lama Sekolah. Pada tahun 2024 tercatat sebesar 9,89 Tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Simeulue rata-rata tamatan SMP.
- Masih terdapat sebagian kecil anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan. Dengan Capaian APS usia 7–12 tahun mencapai 99,72% dan APS usia 13–15 tahun sebesar 99,33% pada tahun 2024.
- Lemahnya Capaian Literasi SD sebesar 53,13% dan SMP 58,79% Pada Tahun 2024. disebabkan kemampuan memahami dan mengolah informasi, yang berpotensi menghambat prestasi belajar di jenjang selanjutnya.
- Rendahnya capaian Numerasi SD hanya 44,11% dan SMP 56,60% tahun 2024 disebabkan oleh lemahnya pemahaman konsep dasar matematika, kurangnya metode pembelajaran yang menarik, serta minimnya media pembelajaran kontekstual.
- Belum optimalnya Indeks iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan dan Inklusivitas.

b. Kesehatan

- Rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat Kabupaten Simeulue tahun 2024 sebesar 65,61 tahun masih dibawah rata-rata Aceh sebesar 70,34 pada tahun 2024 dan Nasional 74,2 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh perilaku gaya hidup (life style).
- Masih terjadinya kasus kematian ibu melahirkan. Pada tahun 2024 kasus kematian ibu melahirkan mencapai 4 kasus. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran dan pemahaman terhadap kesehatan Ibu Hamil pada masa kehamilan dan pada beberapa kasus terdapat keterlambatan medis dalam penanganan persalinan.

- Masih adanya Angka Kematian Bayi Kabupaten Simeulue tahun 2024 sebanyak 19/1000 kelahiran hidup ;
- Masih Tingginya angka Prevalensi Stunting. Pada tahun 2024 tercatat sebesar 25,5% dari nasional yaitu 19,8%. Hal ini disebabkan oleh banyaknya keluarga 1000 HPK yang belum memahami pola pengasuhan yang baik, rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap, belum melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta faktor ekonomi keluarga.
- Rendahnya desa ODF (Open Defecation Free). Dari 138 Desa baru 49 desa (35,5%) yang ODF sedangkan 89 desa (64,5%) masih melakukan buang air besar sembarangan.
- Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas sesuai standar (RSUD dan Puskesmas).
- Belum optimalnya pelayanan kesehatan di 15 Puskesmas. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya fasilitas kesehatan yang representatif
- Belum optimalnya pelayanan kesehatan di Pustu/ Poskesdes. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya fasilitas kesehatan yang representatif dan 50% sarana Pustu/ Poskesdes tidak layak.
- Jarak tempuh pelayanan kesehatan rujukan untuk wilayah Simeulue Barat, Teluk Dalam, Alafan, Simeulue Tengah, Simeulue Cut dan Salang membutuhkan waktu 180-250 menit. Hal ini belum tersedianya RSUD Pratama sebagai tempat rujukan terdekat.
- Belum optimalnya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Simeulue. Hal ini disebabkan oleh RSUD Kabupaten Simeulue masih Tipe C, sehingga terbatasnya jenis pelayanan kesehatan yang dapat dilayani.
- Rendahnya Persentase Rumah Tangga Prilaku Hidup Bersih dan Sehat. Pada tahun 2024 tercatat sebesar 25%. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya dan bagaimana penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

c. Sosial

- Belum maksimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya yang terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. Pada tahun 2024 hanya 5.228 (80,4%) dari total 6.503 PMKS yang mendapat

penangan. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan program penanganan PMKS oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.

- Belum optimalnya peran Sumber Daya Kesejahteraan Sosial dalam menjalankan fungsi yaitu mencegah terjadinya masalah sosial, memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengoordinasian terhadap LKS yang menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- Belum optimalnya program pengembangan dan pemberdayaan sosial khususnya dalam rangka peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga.
- Belum optimalnya program jaminan dan perlindungan sosial khususnya dalam Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, pengelolaan data fakir miskin.
- Belum program dan perlindungan sosial khususnya dalam pemeliharaan anak-anak terlantar dan pengelolaan data fakir miskin.
- Belum optimalnya penanganan dan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial. Hal ini disebabkan oleh kurang memadai sarana dan prasarana penanganan korban bencana seperti mobil rescue dan mobil dapur umum yang tidak berfungsi/ rusak berat, tidak adanya armada mobilisasi bantuan logistik ke lokasi bencana, kurang memadainya tenda pengungsi dan bufferstock (makanan dan sandang) dan tidak adanya pelayanan dukungan psikososial.
- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. Hal ini disebabkan oleh minimnya jumlah kampung siaga bencana dan belum optimalnya kapasitas Taruna Siaga Bencana.

d. Kepemudaan dan Olahraga

- Belum terpenuhinya persentase organisasi pemuda yang aktif. Pada tahun 2024 hanya 68% yang aktif dari 25 organisasi kepemudaan. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya pemberdayaan organisasi pemuda.
- Minimnya pertumbuhan pemuda yang berwirausaha. Pada tahun 2023 tercatat hanya 30 orang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya program pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.
- Kurangnya prestasi olahraga. Pada event olahraga POPDA, PORA, dan Kejurwil Piala PANGDAM pada tahun 2024 jumlah raihan medali yaitu emas 11 medali, perak 6 medali, dan perunggu 19 medali. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya

pembinaan cabang olahraga, pembinaan atlet, dan kurangnya pelatih yang bersertifikat. Selain itu sarana dan prasarana olah raga belum memadai

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simeulue masih Rendah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue pada tahun 2024 sebesar 4,43 persen masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh sebesar 4,66 persen dan Nasional sebesar 5,02 persen pada tahun 2024. nilai lapangan usah pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi dominan dibandingkan dengan nilai tambah lapangan usaha lainnya dengan kontribusi sebesar Rp 1.199.261,10 atau 38,06 persen dari total PDRB Kabupaten Simeulue.

Angka kemiskinan Kabupaten Simeulue 17,69 persen pada desember 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan Aceh sebesar 14,23 persen dan Nasional sebesar 8,57 persen pada tahun 2024, dan pendapatan Perkapita baru mencapai Rp 31,94 juta pada tahun 2024 masih lebih rendah dari Provinsi Aceh Rp. 43,78 juta dan Nasional Rp. 78,60 juta pada tahun 2024.

Ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih ada dimana ditunjukkan pada gini rasio 2024 sebesar 0,259 hal ini menunjukan bahwa pemerataan pendapatan Kabupaten Simeulue masih rendah, yang berkolasi terhadap tingginya angka kemiskinan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Simeulue masih tinggi. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Simeulue tahun 2024 sebesar 5,50 persen masih lebih tinggi dari Nasional 4,90 persen pada tahun 2024.

Permasalahan Ekonomi di kabupaten Simeulue dapat di uraikan secara rinci sebagai berikut.

a. Pangan

- Masih rendahnya kemandirian ketahanan pangan Kabupaten Simeulue dan masih tingginya terhadap pangan dari daerah lain;
- Tingginya jumlah Desa Rawan Pangan. Pada tahun 2024 desa rawan pangan tercatat sebanyak 31 desa.
- Belum optimalnya produktivitas komoditas pangan seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek.
- Rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya Nilai Tukar

Petani Aceh dengan nasional pada tahun 2022 yaitu masing-masing 107,45 dan 109,00 dan belum berjalannya industri pengolahan untuk hasil pertanian.

- Rendahnya kemandirian ketahanan pangan Kabupaten Simeulue dan masih tingginya pasokan terhadap pangan dari daerah lain.
- Masih rendah Pangan Lestari dalam Peningkatan Kemandirian Pangan

b. Pertanian

- Angka produktifitas rata-rata padi simeulue masih rendah 4,33 ton/ha;
- Lahan pertanian yang terbatas, terutama karena kondisi geografisnya sebagai pulau kecil. Lahan yang ada sering kali tidak cukup luas untuk mendukung pertanian skala besar, dan alih fungsi lahan untuk pemukiman atau kegiatan lain juga menjadi masalah;
- Infrastruktur pendukung pertanian seperti irigasi, jalan tani, dan fasilitas pascapanen masih terbatas. Ini menghambat petani dalam mengelola lahan dan mendistribusikan hasil panen ke pasar, serta meningkatkan biaya produksi;
- Ketergantungan pada Pertanian Tradisional dimana banyak petani masih menggunakan metode pertanian tradisional dengan teknologi yang minim. Hal ini membatasi produktivitas dan membuat pertanian rentan terhadap perubahan iklim dan serangan hama;
- Akses Terbatas ke Pupuk dan Benih Berkualitas dimana Petani sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk dan benih berkualitas tinggi. Keterbatasan ini mempengaruhi hasil panen dan kualitas produk pertanian yang dihasilkan, serta menyebabkan ketergantungan pada bahan impor yang harganya tidak stabil;
- Masalah Pemasaran dan Distribusi yang sering kali menghadapi tantangan dalam menjual hasil panen mereka, terutama karena akses pasar yang terbatas. Kurangnya fasilitas penyimpanan dan distribusi menyebabkan hasil pertanian cepat rusak atau tidak mendapatkan harga yang layak di pasar;
- Keterbatasan dalam pendampingan teknis dan penyuluhan pertanian membuat petani kurang terinformasi tentang teknik budidaya yang lebih modern dan efisien. Ini juga menghambat adopsi inovasi teknologi pertanian
- Pendapatan petani cenderung rendah karena produktivitas yang terbatas dan harga jual hasil pertanian yang tidak stabil. Ini berdampak pada kesejahteraan mereka dan membuat pertanian kurang menarik bagi generasi muda;

- Masih rendahnya Diversifikasi Tanaman dimana sebagian besar petani hanya menanam beberapa jenis tanaman tertentu, seperti padi, kelapa, dan cengkeh. Kurangnya diversifikasi ini membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga dan risiko gagal panen;
- Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Kurang Berkelanjutan dimana Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan, dapat merusak tanah dan mengurangi produktivitas jangka panjang. Pengelolaan lahan dan sumber daya yang lebih berkelanjutan diperlukan untuk menjaga kelestarian pertanian di Simeulue;
- Minimnya lembaga keuangan mikro dan makro dalam menunjang akses permodalan petani.

c. Perkebunan

- Masih Rendahnya produksi perkebunan;
- Belum optimalnya pengembangan potensi daerah dari sektor perkebunan seperti halnya cengkeh, sawit, kelapa, dan rotan
- Masih Rendahnya produksi/produktivitas komoditas perkebunan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti hama penyakit tanaman, usia produktif dan jenis bibit yang kurang berkualitas dan bersertifikasi;
- Belum Optimalnya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perkebunan dan juga masih minimnya pemeliharaan prasarana perkebunan dimana pada tahun 2023 yaitu sebesar 60% dari target 100%;
- Masih rendahnya cakupan bina kelompok tani dimana pada tahun 2023 yaitu sebesar 23% dari target sebesar 25%;
- Petani/pekebun masih menggunakan teknik pertanian tradisional dengan peralatan yang sederhana. Kurangnya akses terhadap teknologi modern, seperti mesin pengolah hasil perkebunan, serta sarana produksi seperti pupuk dan pestisida, membatasi produktivitas;
- Belum optimalnya penanganan Pasca Panen pada komoditas perkebunan yang menyebabkan produksi/produktivitas menurun;
- Masalah kepemilikan lahan dan alih fungsi lahan perkebunan menjadi lahan non-produktif dapat mengancam keberlanjutan perkebunan. Pengelolaan lahan yang kurang optimal juga sering menjadi kendala dalam meningkatkan produksi.

- Masih mengandalkan komoditas tertentu, seperti kelapa, pinang, dan cengkeh. Ketergantungan ini membuat sektor perkebunan rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global, yang dapat berdampak langsung pada pendapatan petani;
- Minimnya akses pasar sebagai daerah kepulauan menghadapi tantangan dalam mengakses pasar yang lebih luas. Hasil perkebunan sering kali dijual di pasar lokal dengan harga yang tidak kompetitif, mengurangi potensi keuntungan bagi petani.
- Keterbatasan pendampingan dan penyuluhan dari pemerintah atau pihak terkait menyebabkan petani kurang terinformasi tentang teknik bercocok tanam yang lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini juga mempengaruhi adopsi teknologi baru di sektor perkebunan.
- Lemahnya implementasi regulasi terhadap sektor perkebunan, misalnya dalam hal perlindungan terhadap produk lokal atau insentif bagi pekebun kecil.
- Minimnya lembaga keuangan mikro dan makro dalam menunjang akses permodalan petani pekebun.

d. Kelautan dan Perikanan

- Belum optimalnya produksi perikanan tangkap. Pada tahun 2024 tercatat sebesar 22.898 Ton atau 30,77 % dari total potensi perikanan laut sebesar 74.500 Ton pertahun. Hal ini disebabkan oleh kurangnya armada dan sarana prasarana/ fasilitas pendukung perikanan tangkap yang representatif.
- Masih adanya kasus ilegal fishing di wilayah perairan laut Kabupaten Simeulue, hal ini disebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan.
- Rendahnya produksi perikanan budidaya. Pada tahun 2024 produksi perikanan budidaya tercatat sebesar 92,73 Ton. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya dalam mengembangkan usaha perikanan budidaya, dan akses pasar hasil perikanan budidaya.
- Minimnya IKM yang bergerak dibidang pengolahan hasil perikanan/ hal ini disebabkan oleh terbatasnya kapasitas pasar dalam menyerap produk hasil olahan perikanan
- Rendahnya upaya konservasi terhadap ekosistem laut.
- Belum optimalnya pengembangan kapasitas kelembagaan nelayan dalam peningkatan kesejahteraan nelayan.
- Minimnya lembaga keuangan mikro dan makro dalam menunjang akses permodalan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

- Belum adanya asuransi untuk menjamin kontinuitas usaha nelayan

e. Peternakan

- Masih tingginya penyakit ternak;
- Belum optimalnya pengembangan potensi daerah dari sektor peternakan seperti halnya kerbau asli Simeulue
- Masih tingginya tingkat kematian ternak yang disebabkan oleh serangan wabah penyakit, kurangnya obat-obatan, rendahnya manajemen kesehatan ternak dan pelayanan kesehatan/perkembangan ternak yang belum optimal;
- Penggunaan teknologi modern dan praktik manajemen yang efisien masih rendah di kalangan peternak kecil. Banyak yang masih menggunakan metode tradisional yang kurang produktif;
- Masih kurangnya lahan pengembalaan ternak dan lahan hijauan pakan ternak (HPT) yang berkualitas dan terjangkau;
- Belum adanya Pengolahan Limbah Ternak, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan masyarakat setempat;
- Masih banyaknya wilayah yang mengalami keterbatasan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan akses ke pasar. Hal ini menyulitkan distribusi produk peternakan dan menaikkan biaya operasional.
- Lemahnya implementasi regulasi terhadap sektor peternakan dan dukungan sektor peternakan juga belum optimal, misalnya dalam hal perlindungan terhadap produk lokal atau insentif bagi peternak kecil.
- Belum adanya Dokumen Rencana Induk Peternakan;
- Masih rendahnya produksi peternakan yaitu pada tahun 2024 sebesar 312.090 ton nilai ini jauh dari target yaitu sebesar 429.166 ton. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti pengelolaan pasca panen yang belum optimal, sistem pemasaran hasil peternakan yang belum optimal, penambahan bobot ternak yang belum optimal dan juga eksploitasi ternak yang masih tinggi.
- Minimnya lembaga keuangan mikro dan makro dalam menunjang akses permodalan peternak.

f. Ketenagakerjaan

- Tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan data BPS Kabupaten Simeulue, pada tahun 2024 TPT tercatat sebesar 5,85% atau 2.414 orang

dengan angkatan kerja 43.900. Hal ini disebabkan kurangnya penciptaan lapangan kerja.

- Minimnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan, kualifikasi, dan kompetensi yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya lembaga pelatihan kerja serta minimnya program-program pelatihan tenaga kerja.

g. Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah

- Rendahnya jumlah Koperasi Aktif. Pada tahun 2023 tercatat 23 Koperasi Aktif dari total jumlah 97 koperasi yang terdaftar.
- Rendahnya pertumbuhan UMKM. Pada tahun 2020 tercatat 2518 dan tahun 2024 tercatat 2599
- Belum maksimalnya dukungan regulasi terhadap koperasi untuk menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis, adaptif, dan akomodatif bagi kepentingan anggota dan masyarakat
- Rencahnya peran koperasi dalam membangun ekonomi kerakyatan masyarakat.

h. Penanaman Modal

- Rendahnya laju/ nilai investasi daerah. Pada tahun 2024 nilai investasi tercatat senilai Rp. 152.968.828.559. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal seperti kurangnya program pendukung yang memotivasi investor masuk ke Kabupaten Simeulue seperti hal nya pemberian stimulus bagi investor, kemudahan berinvestasi, jaminan keamanan, penyediaan sumber daya pendukung investasi seperti kapasitas listrik, jaringan internet, air bersih, terbatasnya kuantitas komoditas ataupun bahan baku produksi, transportasi, dan juga posisi geografis Kabupaten Simeulue. Selain itu kurangnya promosi juga menjadi penyebab rendahnya laju/ nilai investasi daerah.

i. Perindustrian

- Masih rendahnya kontribusi perindustrian terhadap pertumbuhan ekonomi;
- Belum adanya agro industri skala menengah dan besar untuk peningkatan nilai tambah produk pertanian;
- Masih rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah;
- Belum Optimalnya Sarana dan prasarana kawasan Industri;
- Masih rendahnya pembinaan IKM terhadap 825 IKM yang aktif 395 IKM;
- Masih rendahnya SDM serta belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung IKM dan Manajemen Pemasaran, Dimana sampai dengan 2022 belum pernah dilakukan Pengembangan SDM;

- Belum Optimalnya Pengembangan IKM dimana pada tahun 2022 belum memiliki Rencana induk Pengembangan;
- Ketergantungan bahan baku lokal dari luar dan ketidakstabilan harga bahan baku lokal.

j. Perdagangan

- Rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi;
- Sebagai daerah kepulauan, akses pasar menjadi terbatas. Pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menjual produk mereka ke luar daerah, dan pasar lokal yang kecil membuat skala ekonomi sulit dicapai.
- Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang terkait perlindungan konsumen.
- Keterbatasan sumber daya manusia/ pedagang dalam mengakses pasar dan masih rendahnya kemampuan manajemen usaha.
- Rendahnya penetrasi teknologi informasi, termasuk akses internet yang terbatas, menghambat pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam perdagangan digital atau e-commerce, yang bisa menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan akses pasar fisik.
- Ketergantungan pangan dari luar masih tergolong tinggi sebagian besar kebutuhan pangannya masih dipenuhi dari luar, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan dari luar daerah. Ketergantungan ini juga membuat keseimbangan perdagangan menjadi kurang sehat.
- Akses dan Infrastruktur masih terbatas dimana Keterbatasan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan transportasi menjadi kendala utama dalam memperlancar distribusi barang. Hal ini menyebabkan biaya logistik yang tinggi, sehingga harga barang cenderung lebih mahal dibandingkan dengan daerah lain.
- Belum optimalnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan pasar Kontribusi Sektor Perdagangan
- Belum optimalnya promosi/ kerjasama perdagangan antar daerah

k. Transmigrasi

- Minimnya fasilitas yang mendukung kehidupan dan aktivitas penduduk transmigrasi, seperti infrastruktur transportasi, air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya.

- Masih adanya permasalahan lahan kawasan transmigrasi dengan masyarakat setempat.
- Masih adanya potensi konflik antara transmigran dengan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh perbedaan budaya dan berbagai hal lainnya.
- Belum tersedianya sarana dan prasarana produksi, pengolahan, pemasaran dan fasilitas pendukung pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi.

l. Energi dan Sumber Daya Mineral

- Masih adanya rumah tangga yang belum mendapatkan distribusi aliran listrik. Pada tahun 2023 tercatat 1600 unit rumah belum memiliki KWH listrik dari 22.554 rumah.
- Belum adanya pengelolaan energi terbarukan seperti hal nya biogas.

m. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Persentase desa berstatus desa maju masih sangat rendah (2,17 persen).
- Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Simeulue pada tahun 2024 masih kategori Berkembang dengan score 0,6695. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya desa yang berstatus Tertinggal dan Berkembang dengan jumlah masing-masing yaitu 26 Desa Tertinggal dan 90 Desa Berkembang.
- Rendahnya jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif. Pada tahun 2024 jumlah BUMDes yang aktif tercatat hanya 6 dari 71 BUMDes. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kapasitas desa dalam pengelolaan BUMDes.
- Belum optimalnya kapasitas Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini ditandai dengan perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pelaporan dana desa tidak tepat waktu, adanya konflik antara Kepala Desa dan BPD, banyaknya kasus-kasus pengelolaan dana desa yang diakibatkan oleh kesalahan dalam pengadministrasian dana desa, dan berbagai hal lainnya.
- Belum optimalnya penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), dan Lembaga Adat Desa.

3.1.3. Daya Saing Daerah

Permasalahan aspek daya saing dapat dilihat melalui unsur kemampuan ekonomi daerah, fasilitas infrastruktur, dan sumber daya manusia. Permasalahan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Simeulue masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja pembangunan. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi membuat konektivitas wilayah kurang optimal dan menurunkan daya tarik investasi. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal pendidikan, keterampilan, dan penguasaan teknologi, masih relatif rendah sehingga produktivitas ekonomi belum mampu bersaing dengan daerah lain. Permasalahan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya efektif serta rendahnya inovasi daerah juga menjadi faktor yang melemahkan daya saing. Selain itu, pemanfaatan potensi unggulan daerah seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata belum maksimal akibat kurangnya promosi, dukungan industri hilir, serta sinergi lintas sektor. Kondisi ini menyebabkan Indeks Daya Saing Simeulue masih tertinggal dibandingkan kabupaten lain di sekitar Kabupaten Simeulue dapat dilihat dari skor nilai Indeks Daya Saing Daerah tahun 2024 dimana nilai Kabupaten Simeulue 3,15 poin lebih rendah di bandingkan Aceh singkil 3,25 poin, Aceh Jaya 3,27 poin, Aceh Barat 3,30 poin, dan Aceh Selatan 3,33 poin.

2. Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita masih rendah sebesar Rp 762.085. rata-rata pengeluaran terhadap makanan Rp 442.322 lebih besar dibandingkan bukan makanan sebesar Rp 319.763.

3. Fasilitas Infrastruktur

Persentase rumah tangga yang terakses air bersih baru mencapai 48,00 persen sedangkan Aceh telah mencapai 77,55 persen

4. Sumber Daya Manusia

Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Simeulue sebesar 67,27 masih di bawah rata-rata aceh sebesar 72,80 dan nasional sebesar 72,91.

5. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Simeulue berada diwilayah barat samudra hindia Indonesia merupakan wilayah kepulauan dan berada pada kawasan pertbatasan negara pulau-pulau kecil terluar. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Simeulue memiliki posisi yang tidak strategis dalam perdagangan nasional, regional, maupun internasional.

6. Demografi

Masyarakat Kabupaten Simeulue memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi maka kondisi ini menyebabkan pendapatan penduduk produktif terserap untuk memenuhi kebutuhan pokok. Selain dari pada itu jumlah penduduk Simeulue yang kecil dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 1.40 persen menjadikan Simeulue kekurangan SDM untuk mengolah sumberdaya alam yang ada.

7. Pariwisata

Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Simeulue masih relatif rendah karena sektor pariwisata yang berpotensi besar belum memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas yang sulit, kualitas sumber daya manusia pariwisata yang rendah, serta minimnya promosi membuat jumlah kunjungan wisatawan masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada lambatnya perputaran ekonomi lokal, sehingga peluang peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha akomodasi, kuliner, transportasi, maupun industri kreatif belum tergarap secara optimal. Hal ini dapat dilihat dimana kontribusi akomodasi dan makan minum terhadap PDRB ADHB Kabupaten Simeulue 54,69 miliar rupiah masih lebih rendah dari pada Kota Sabang 73,52 miliar rupiah. Dengan demikian permasalahan mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Potensi Pariwisata yang Belum Tergarap Optimal
- Keterbatasan Infrastruktur Pendukung
- Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata
- Keterbatasan Promosi dan Branding Daerah
- Isu Keberlanjutan Lingkungan
- Sinergi Kebijakan dan Kelembagaan
- Masih rendahnya daya saing pariwisata
 - (1) Belum optimalnya Pengembangan Sumber Daya pariwisata;
 - (2) Belum optimalnya infrastruktur pariwisata;
 - (3) Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;
 - (4) Belum optimalnya pemanfaatan Aset daerah dalam Kontribusi Terhadap Kepariwisata;
 - (5) Belum Efektifnya Promosi dan Pemasaran;
 - (6) Belum optimalnya Diversifikasi produk pariwisata;
 - (7) Kurangnya Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata;
 - (8) Rendahnya kualifikasi dan keterampilan sumber daya manusia di sektor pariwisata;

- (9) Kurangnya Penyediaan Layanan Teknologi;
- (10) Rendahnya Inovasi Produk dan Pengalaman;
- (11) Masih kurangnya Akses Pasar dan Teknologi terhadap Para Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif.

3.1.4. Masih belum optimalnya Transformasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Simeulue

Transformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Simeulue masih belum optimal, terlihat dari rendahnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi digital dalam birokrasi masih terbatas, sehingga proses administrasi cenderung lambat dan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah masih perlu diperkuat untuk mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih sinkron. Kapasitas aparatur dalam mengelola kebijakan serta mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik juga masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini menyebabkan pelayanan umum belum maksimal dan kualitas tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya mendukung tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan

Permasalahan Transformasi tata kelola di kabupaten Simeulue dapat di uraikan secara rinci sebagai berikut.

a. Sekretariat Daerah

- Rendahnya nilai LPPD dan SPM Kesehatan. Pada tahun 2024 nilai LPPD tercatat 2,4 sedangkan SPM Kesehatan 87,83%. Hal ini oleh kurangnya pemahaman terhadap definisi operasional indikator kinerja terkait yang dengan LPPD dan SPM dan pelaksanaan kerja sama untuk perencanaan pembangunan daerah dalam pelaporan maupun pelaksanaannya dan belum adanya peraturan daerah tentang urusan pemerintahan daerah.
- Rendahnya Nilai SAKIP. Pada tahun 2024 tercatat sebesar 50,03 dengan kategori C. Hal ini disebabkan oleh rendahnya capaian Kinerja Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Utama.
- Belum tersedianya data rupa bumi wilayah Kabupaten Simeulue.
- Rendahnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada tahun 2024 capaian IRB tercatat 59,35 dengan kategori C. Hal ini disebabkan oleh belum terakomodirnya beberapa kegiatan utama Reformasi Birokrasi, rendahnya capaian Kinerja Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Utama, dan belum

optimalnya penyediaan data rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik SPBE.

b. Sekretariat DPRK

- Belum optimalnya pelayanan Sekretariat Dewan dalam membantu pencapaian kinerja dan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue yang meliputi : tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan; tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Qanun, dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJMD maupun RKPD; dan terintegrasi program-program DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRK

c. Komunikasi, informatika dan Persandian

- Indkes Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih rendah baru mencapai angka 1,86 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan permasalahan antara lain:
- Belum optimalnya pelaksanaan E-Government. Hal ini ditandai oleh masih rendahnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Simeulue. Pada tahun 2024 tercatat Indeks SPBE sebesar 1,86. Hal ini disebabkan dari berbagai aspek penilaian yang masih rendah yaitu : Kebijakan internal tata kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Penerapan manajemen SPBE dan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Layanan Publik Berbasis Elektronik.
- Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan kelembagaan informasi dan komunikasi publik. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya rumusan kebijakan tentang tata kelola TIK, Persandian dan statistik serta belum memadainya sarana pendukung pelayanan informasi, E-Government dan pengamanan jaringan..
- Desa yang terakses jaringan telekomunikasi belum maksimal, hal ini ditandai dengan capaian Persentase Gampong terakses jaringan HP 88,40 % atau 122 Desa pada tahun 2024.
- Tingkat penilaian kesiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi masih rendah. Hal ini disebabkan berbagai hal dalam penilaian belum dapat diselenggarakan oleh dinas terkait. Penilaian ini masih dilakukan secara mandiri oleh OPD tingkat kabupaten dan belum dinilai oleh OPD tingkat provinsi.

- Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah 50%, karena masih ada perangkat daerah yang belum memiliki akun komunikasi sandi OPD.
 - Belum tersedianya SDM yang berkompeten dibidang persandian.
 - Sarana dan prasarana bidang persandian belum memadai, hal ini disebabkan oleh Perangkat Teknologi keamanan informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS)/Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD) Optimal, serta Perangkat Perlindungan informasi melalui pengamanan signal dan kegiatan kontra pengindraan belum ada.
- d. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
- Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN. Hal ini disebabkan oleh belum adanya Gedung Pendidikan dan Pelatihan ASN sehingga mengakibatkan terbatasnya ASN yang mendapat peningkatan kapasitas dan kompetensi.
 - Belum memadainya sarana prasarana pengadaan ASN. Hal ini disebabkan kurangnya komputer dan lemahnya jaringan internet.
 - Masih tingginya kasus pelanggaran disiplin ASN.
 - Belum optimalnya implementasi sistem merit dalam pola pengembangan karir dan kompetensi ASN
- e. Perencanaan
- Rendahnya kualitas dokumen perencanaan. Hal ini ditandai dengan banyaknya koreksi atas hasil evaluasi Bappeda Provinsi terhadap dokumen perencanaan dan belum pernah meraih 3 (tiga) besar penghargaan Abdullah Madjid Ibrahim Award.
 - Belum sinkronnya perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan SKPK khusus nya pada tujuan, sasaran, dan indikator kinerja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya bimtek perencana
 - Rendahnya cakupan program kegiatan usulan masyarakat yang terkamodir dalam dokumen perencanaan daerah.
 - Belum terkoordinasinya perencanaan pembangunan Kabupaten Simeulue dengan perencanaan pembangunan Desa.
 - Minimnya program kegiatan tematik terakomdir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan

stunting, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Anggaran Responsif Gender (ARG) dan lain-lain.

f. Keuangan

- Belum optimalnya pencapaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Pada tahun 2024 tercatat sebesar 65,07.
- Rendahnya proporsi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Murni terhadap APBK Simeulue. Tahun 2024 kontribusinya hanya sebesar 9,7 persen;
- Pendapatan asli daerah yang belum optimal untuk menunjang kemandirian fiskal daerah, disebabkan oleh: kurang akuratnya data objek pajak, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan obyek pajaknya, dan penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang belum optimal
- Rendahnya kapasitas fiskal daerah.
- Belum optimalnya akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan.
- Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah, terlihat dari persentase aset daerah yang ter-registrasi

g. Penelitian dan Pengembangan

- Belum optimalnya pelaksanaan riset serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung perencanaan pembangunan Kabupaten Simeulue. Hal ini dikarenakan penelitian dan pengembangan tidak fokus pada pelayanan Pemerintah Daerah.
- Masih minimnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pengembangan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy) dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran.
- Belum optimalnya penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang diukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.
- Masih rendahnya persentase kebijakan inovasi yang diterapkan

h. Pengawasan

- Belum optimalnya pelaksanaan riset serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung perencanaan pembangunan Kabupaten Simeulue. Hal ini dikarenakan penelitian dan pengembangan tidak fokus pada pelayanan Pemerintah Daerah.
- Kurang memadainya SDM Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

- Maturitas SPIP Masih pada level 3. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya SDM pada SKPK yang kurang penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran khususnya pada sinkronisasi tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.
 - Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK, Inspektorat Aceh, dan Inspektorat Kabupaten. Pada tahun 2024 hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti tercatat sebesar 66,14%.
 - Masih banyaknya SKPK yang belum menerapkan tata kelola keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan oleh Inspektorat Kabupaten
- i. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Belum optimalnya kondisi ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat islam. Hal ini ditandai dengan masih adanya pelanggaran Qanun tentang ketertiban umum dan Qanun Syariat Islam yaitu 15 Kasus pada tahun 2024.
 - Belum optimalnya penegakan qanun/peraturan terhadap kasus pelanggaran yang terjadi, yaitu diangka 97,03%
 - Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum dan Pilkada Tahun 2017 yaitu sebesar 85,20 persen.
 - Belum optimal pembinaan terhadap Parpol, Ormas, LSM dan OKP dalam rangka meningkatkan peran sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
- j. Pertanahan
- Pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Simeulue belum tuntas.
 - Belum semua bidang tanah pemerintah Kabupaten Simeulue bersertipikat.
 - Pengawasan terhadap pemanfaatan tanah pemerintah belum optimal
 - Perlindungan terhadap tanah pemerintah/negara yang belum optimal
 - Belum adanya regulasi daerah terkait prosen perizinan terhadap kegiatan pembukaan dan pemanfaatan tanah negara.
 - Belum adanya pengaturan pengelolaan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - Belum tersedianya aplikasi dan perangkat dan SDM pengelola sistem informasi pertanahan untuk kemudahan akses data.

k. Perpustakaan

- Rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan. Pada tahun 2024 jumlah pengunjung perpustakaan tercatat hanya 670 kunjungan.
- Belum Terakreditasinya Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Simeulue. Hal ini disebabkan oleh kurang memadainya koleksi buku dan koleksi judul, kurangnya SDM pustakawan/ tenaga teknis/ dan penilai yang memiliki sertifikat, dan belum memadainya fasilitas perpustakaan.

l. Kearsipan

- Belum optimalnya manajemen kearsipan. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya perangkat daerah yang menerapkan pola arsip pengelolaan arsip dinamis dan statis sesuai kaidah kearsipan.
- Belum terpenuhinya SDM pengelola kearsipan yang kompeten.

3.1.5. Lingkungan Sosial Masyarakat

Faktor Penilai Kemajuan Pembangunan Syariat Islam di Kabupaten Simeulue dapat digambarkan beberapa Aspek Regulasi dan Kelembagaan, Aspek Pendidikan dan Pemahaman Keagamaan, Aspek Sosial dan Budaya, Aspek Ekonomi dan Keuangan Syariah, Aspek Hukum dan Penegakan Syariat, Aspek Infrastruktur dan Fasilitas Keagamaan, dan Aspek Indikator Kuantitatif dan Kualitatif.

Dari sisi regulasi pemerintah Kabupaten Simeulue belum memiliki Qanun atau Peraturan Bupati yang terkait implementasi syariat Islam. Selain itu perkembangan pendidikan berbasis syariat Islam belum mengalami peningkatan yang berarti dengan pencapaian dimana Persentase dayah yang mandiri belum ada yang mencapai mandiri. Sedangkan dari segi infrastruktur dan fasilitas keagamaan juga masih ada yang belum representatif dengan capaian 78%.

Permasalahan Lingkungan Sosial Masyarakat di kabupaten Simeulue dapat di uraikan secara rinci sebagai berikut.

a. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Simeulue belum tuntas.
- Belum optimalnya Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pada tahun 2024 tercatat sebesar 79,78. Hal ini mengindikasikan masih adanya ketimpangan pembangunan SDM antara perempuan dan laki-laki.
- Belum optimalnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Pada tahun 2024 tercatat sebesar 0.433. Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya proporsi perempuan

di sektor-sektor pembangunan. Seperti lembaga politik, pada tahun 2024 perempuan yang berperan duduk di DPRK Simeulue hanya 20%, lalu TPAK perempuan, partisipasi perempuan pada organisasi, partai politik, dan lembaga lainnya. Hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman perempuan terhadap politik, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan dalam bepolitik dan dunia kerja

- Belum adanya kebijakan daerah yang responsif terhadap gender. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya Pengarus Utamaan Gender (PUG), dan belum optimalnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
- Kurangnya eksistensi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pembinaan dan pemberdayaan terhadap lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
- Tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2024 kasus kekerasan anak tercatat sebanyak 16 kasus. Sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan 1 kasus.
- Kurangnya sarana prasarana, peralatan, perlengkapan, SDM, serta dukungan operasional Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- Masih adanya perempuan dan anak korban kekerasan tidak mau melaporkan kasusnya ke pihak berwenang atau P2TP2A.
- Belum optimalnya partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan (PAPP). Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitasi kegiatan lembaga pemberdayaan anak seperti Forum Anak.
- Masih adanya kasus pernikahan usia dini. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 21 kasus. Jumlah kasus paling tinggi terdapat di Kecamatan Salang yaitu 6 kasus. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap risiko menikah usia dini, dan peraturan perundangan-undangan tentang pernikahan.

b. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Tingginya disparitas sebaran dan kepadatan penduduk antar kecamatan. Kecamatan Simeulue Timur dengan sebaran penduduk tertinggi yaitu 29,88% dari jumlah penduduk 96.031 jiwa. Untuk kepadatan penduduk rata-rata 52 jiwa per KM setiap kecamatan.
- Rendahnya PUS yang menjadi akseptor KB. Pada tahun 2023 jumlah PUS yang menjadi akseptor KB yaitu 10.546 dari 14.346 PUS. Hal ini disebabkan oleh masih

adanya petugas KB (PKB, PLKB, dan Kader IMP) kurang kompeten dalam menjelaskan pentingnya KB, masih adanya PUS yang belum memahami pentingnya KB, belum optimalnya Kelompok Kegiatan KB berupa UPPKS, BKB, BKR, BKL, PIK KRR, dan belum memadainya sarana prasarana, peralatan, perlengkapan balai penyuluh KB dan fasilitas kesehatan lainnya.

- Belum maksimalnya penyelenggaraan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya desa belum mendapat pembinaan Program Kampung KB.
- Tingginya jumlah keluarga beresiko stunting. Pada tahun 2024 Persentase Balita Stunting adalah 25,5% dari Persentase Balita Stunting nasional 19,8%. Hal ini disebabkan banyaknya keluarga 1000 HPK belum memahami pengasuhan yang baik dan melaksanakan perilaku hidup bersih sehat, faktor ekonomi keluarga.
- Tingginya jumlah Keluarga Pra Sejahtera. Pada tahun 2024 Proporsi Keluarga Pra Sejahtera terhadap Keluarga Sejahtera I, II, III, dan Keluarga Sejahtera Plus yaitu 21,97%. Hal ini disebabkan oleh masih banyak nya keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

c. Kebudayaan dan Adat

- Belum optimalnya upaya pelestarian budaya. Hal ini ditandai dengan belum adanya pembinaan komunitas budaya, minimnya dokumentasi budaya, dan kurangnya pengelolaan/ pemeliharaan cagar budaya.
- Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kebudayaan simeulue. hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan sumber literasi kebudayaan, dan belum adanya sarana prasarana budaya seperti museum budaya.
- Kurangnya animo masyarakat untuk mempelajari/ melestarikan budaya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya event-event budaya daerah dan atraksi budaya dalam acara-acara resmi Pemerintah Kabupaten Simeulue.

3.1.6. Masih Rendahnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar Di Kabupaten Simeulue

Ketersediaan infrastruktur dasar di Kabupaten Simeulue masih tergolong rendah dan menjadi salah satu hambatan utama dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akses jalan antar kecamatan dan desa belum sepenuhnya memadai, sehingga menghambat mobilitas barang, jasa, dan aktivitas ekonomi. Kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan infrastruktur energi, air bersih, serta jaringan telekomunikasi yang belum menjangkau secara merata seluruh wilayah.

Keterbatasan infrastruktur dasar tersebut berdampak pada lambatnya pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Masyarakat masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh pelayanan dasar yang layak, seperti pendidikan, kesehatan, maupun akses pasar. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan pembangunan infrastruktur dasar sangat penting dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkecil kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Simeulue.

Permasalahan Ketersediaan Infrastruktur Dasar di Kabupaten Simeulue dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut.

a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Rendahnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap, pada tahun 2024 jalan dengan kondisi mantap tercatat hanya 228,50 KM dari total panjang jalan 480,430 KM;
- Masih adanya infrastruktur yang belum tuntas seperti halnya jalan lingkar simeulue. Pada tahun 2024 tercatat masih ada sekitar 62,62 KM yang belum terbangun dari total panjang 354,06 KM;
- Kurang memadainya infrastuktur drainase dan jaringan yang kurang kompatibel dalam menampung debit air. Hal ini ditandai dengan masih adanya kejadian banjir disetiap curah hujan tinggi khususnya di Desa Latitik, Desa Abail, Desa Suka Karya, Desa Sigulai, dan Desa Leubang Hulu.;
- Rendahnya persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik. Pada tahun 2024 tercatat 45%. dari total 57 Daerah Irigasi kewenangan kabupaten hanya 26 dalam kondisis baik. Hal ini disebabkan oleh minim operasional dan pemeliharaaa;
- Masih adanya pemanfaatan ruang yang masih belum sesuai dengan RTRW. Hal ini disebabkan oleh Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota dan Turunanya (RTRW, RDTR, RTBL) Belum Operasional sebagai dasar perizinan pemanfaatan ruang (IPR).

b. Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman

- Tingginya persentase Rumah Tidak Layak Huni dimana pada tahun 2024 tercatat sebesar 56,55% atau 11.522 unit dari 24.750 unit.
- Capaian rumah tangga dengan akses air minum layak Simeulue tahun 2022 sebesar 41,6% masih dibawah capaian Aceh sebesar 90,08% dan nasional sebesar 92,64%.
- Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak Simeulue adalah 78,3% di tahun 2022 sedangkan Aceh sebesar 77,48% pada tahun 2022 dan nasional sebesar 80,29 %.

- Sistem drainase di kawasan perkotaan dan perdesaan belum optimal hal ini disebabkan oleh belum direviunya masterplan drainase kawasan perkotaan dan belum adanya masterplan drainase kawasan perdesaan serta minimnya pemeliharaan.

c. Perhubungan

- Rendahnya pelayanan transportasi publik seperti halnya pengelolaan terminal tipe C Kabupaten Simeulue, cakupan layanan umum transportasi publik antar kecamatan.
- Masih adanya kendaraan umum yang beroperasi namun belum memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya sarana uji kelayakan kendaraan umum.
- Belum memadainya fasilitas/ sarana keselamatan dan ketertiban transportasi. Hal ini disebabkan oleh belum tersedia halte tempat pemberhentian orang dan barang, belum memadainya sarana dan prasarana keselamatan jalan, belum optimalnya pengelolaan dan penataan perparkiran, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaati aturan berlalu lintas, dan masih adanya ternak (Kerbau, Sapi dan Kambing) masyarakat yang berkeliaran di jalanan protokol.
- Konektivitas antar pulau dalam Kabupaten Simeulue masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurang memadainya fasilitas pelabuhan/ dermaga penghubung serta alat transportasi yang digunakan untuk penyeberangan antar pulau-pulau kecil.
- Belum optimalnya tata kelola lalu lintas dan angkutan jalan, hal ini disebabkan oleh belum adanya Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3.1.7. Kualitas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Simeulue

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Simeulue masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Sebagai daerah kepulauan, Simeulue memiliki kekayaan alam berupa hutan, laut, dan pesisir yang menjadi sumber utama kehidupan masyarakat. Namun, tekanan terhadap lingkungan cukup tinggi akibat aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keberlanjutan. Masalah seperti degradasi hutan, pencemaran lingkungan, serta pengelolaan sampah yang belum optimal menjadi isu yang perlu segera ditangani.

Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada kualitas lingkungan hidup, seperti meningkatnya risiko abrasi pantai, banjir, dan kerusakan ekosistem pesisir. Keterbatasan infrastruktur pengelolaan lingkungan serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam turut memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, upaya

penguatan tata kelola lingkungan, peningkatan edukasi masyarakat, dan penerapan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan menjadi kunci dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Simeulue agar tetap lestari dan berkelanjutan.

Permasalahan Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Simeulue dapat di uraikan secara rinci sebagai berikut.

a. Lingkungan Hidup

- Belum optimalnya tata kelola lingkungan hidup. Dapat dilihat dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH). Pada tahun 2024 IKLH Kabupaten Simeulue sebesar 78,82 persen. Meliputi indikator komponen lingkungan (Indeks Kualitas Udara, Indikator Kualitas Lahan, Indikator Kualitas Air). Serta cakupan layanan persampahan masih rendah yaitu 30% pada tahun 2024.
- Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pengelolaan persampahan. Hal ini ditandai oleh masih ada masyarakat dan pelaku usaha buang sampah sembarangan, belum melakukan pemilahan sampah (organik dan anorganik) ditingkat rumah tangga dan pelaku usaha, dan kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menyediakan tempat sampah sendiri.
- Persentase pengelolaan persampahan masih rendah serta cakupan pelayanan persampahan sebesar 40 persen;
- Rendahnya ketaatan pelaku usaha dalam melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Tahura Simeulue yang belum terkelola;
- Belum maksimal nya pengelolaan kawasan Tahura Kabupaten Simeulue. Tahun 2023 pengelolaan Tahura Kabupaten Simeulue masih dalam proses penyusunan legalisasi kelembagaan seperti hal nya penyusunan regulasi kawasan Tahura dari total 919,05 Ha.
- Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. Hal ini dapat dilihat dari luasan RTH publik yang dikelola belum mencapai 30% dari luasan kawasan perkotaan serta SDM pengelolaan RTH. Tahun 2024 luasan yang terealisasi 12,27 Ha.
- Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pengelolaan persampahan. Hal ini ditandai oleh masih ada masyarakat dan pelaku usaha buang sampah sembarangan, belum melakukan pemilahan sampah (organik dan anorganik) ditingkat rumah tangga dan pelaku usaha, dan kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menyediakan tempat sampah sendiri.

b. Wilayah Rawan Bencana

- Kabupaten Simeulue merupakan wilayah rawan dengan indeks Resiko Tinggi. Adapun potensi bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Simeulue antara lain gempa bumi, tsunami, abrasi, wabah penyakit, cuaca ekstrim, kekeringan dan banjir

3.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Simeulue mengacu kepada isu strategis nasional, aceh dan kondisi Kabupaten Simeulue yang memerlukan penanganan. Isu strategis merupakan perbedaan antara kondisi saat ini dengan harapan yang tergambar tujuan pembangunan dalam masa 20 (dua puluh) tahun.

3.2.1. Isu strategis nasional

Isu dan tantangan pembangunan Nasional yang termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, meliputi:

3.2.1.1 Produktivitas rendah

Produktivitas pekerja Indonesia masih berada di bawah rata-rata ASEAN, yaitu US\$ 23,89 ribu per pekerja, sedangkan rata-rata ASEAN adalah US\$ 24,27 ribu per pekerja dimana produktivitas yang rendah dapat berdampak pada penurunan PDB per kapita, investasi yang tidak optimal serta juga akan menghambat pengembangan inovasi. Upaya-upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja akan ditempuh melalui peningkatan lapangan usaha melalui peningkatan investasi, peningkatan skala usaha petani dan nelayan, serta pemerataan akses dan kesempatan kerja, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0 pada tujuh subsektor prioritas, penerapan standardisasi, dan industri hijau.

Pelaksanaan Kebijakan fiskal juga akan diarahkan dengan prinsip konsolidatif, namun tetap fleksibel untuk memberi ruang yang memadai bagi pelaksanaan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi. Upaya peningkatan lapangan kerja yang berkualitas juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Peningkatan produktivitas utamanya difokuskan pada penciptaan ekosistem usaha yang dapat mendorong usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk tumbuh dan berkembang

3.2.1.2 IPTEKIN dan Riset Lemah

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) telah menjadi salah satu faktor utama bagi negara-negara maju dalam mempercepat program pembangunan nasional di berbagai sektor, terlebih pada sektor pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Namun,

kebijakan iptekin di negara-negara berkembang seperti Indonesia justru masih belum menjadi diskursus publik utama baik di kalangan pembuat kebijakan di level pusat dan daerah, industri, akademisi, maupun di tengah masyarakat. Untuk itu, intervensi pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Indonesia supaya akselerasi pembangunan dapat terjalin secara optimal. Iptekin telah terbukti dapat berkontribusi besar terhadap pembangunan dan berpeluang menjadikan Indonesia sebagai negara maju, sehingga diperlukan adanya upaya peningkatan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam proses produksi dan diversifikasi produk industri dimana riset dan inovasi diupayakan dengan diversifikasi produk, serta penyiapan infrastruktur pendukung guna menjaga kualitas bahan baku, termasuk infrastruktur konektivitas sebagai penghubung daerah produsen hulu.

Iptekin dan riset menjadi salah satu elemen kunci dalam mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) pada banyak negara maju. Pada masa sekarang banyak negara berkembang telah berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan ekonominya melalui pendekatan Iptekin. Beberapa dari mereka kemudian berhasil melepas status negara berkembang menjadi negara maju yang disebut sebagai negara industri baru, sehingga, dengan cara meniru, mereplikasi, mengadaptasi, mengabsorpsi kebijakan Iptekin dan pengembangan riset ini akan menjadi salah satu bentuk *best practices* yang dilakukan oleh negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Namun demikian, seringkali implementasi kebijakan tersebut berjalan tidak sesuai dengan rencana atau tidak mencapai tujuan. Untuk itu, kebijakan iptekin di Indonesia perlu mendapat perhatian lebih dari berbagai kalangan yang antara lain akademisi, pemerintah, industri, maupun masyarakat.

3.2.1.3 Deindustrial Dini

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengandalkan sektor industri sebagai penopang perekonomian. Namun, dalam satu dekade terakhir kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) menunjukkan tren penurunan. Hal itu mengindikasikan adanya gejala deindustrialisasi dini, yaitu penurunan peran sektor industri dalam perekonomian nasional. Indonesia mengalami deindustrialisasi dini, yang ditandai dengan terus menyusutnya sektor industri hingga produktivitas yang makin menurun. Kontribusi sektor manufaktur Indonesia hanya menyentuh angka 18,3 persen, dari yang sebelumnya pernah mencapai 32 persen, menunjukkan Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi dini. Sementara itu, sektor jasa yang tak menghasilkan barang serta industri dengan produktivitas rendah terus mendominasi kegiatan perekonomian.

Walaupun Indonesia telah keluar dari status negara berpenghasilan rendah menjadi negara dengan pendapatan menengah ke atas, namun daya saing manufaktur terus mengalami penurunan. Deindustrialisasi ini disebabkan beberapa faktor, antara lain rendahnya investasi di sektor manufaktur, lemahnya daya saing produk lokal, dan tingginya biaya produksi. Selain itu, pandemi covid-19 berdampak negatif terhadap kinerja sektor industri. Deindustrialisasi ini dapat berpengaruh buruk terhadap perekonomian Indonesia. Sektor industri memiliki multiplier effect yang tinggi, yaitu mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Industrialisasi menjadi strategi utama bagi banyak negara di dunia untuk membangun ekonominya. Berawal dari Revolusi Industri di Inggris, kemudian melebar ke Eropa dan AS, pascaPerang Dunia II industrialisasi juga dijalankan banyak negara berkembang untuk mengatasi ketertinggalan. Sebagian negara berhasil, seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong. Namun, banyak juga yang lambat kemajuannya, bahkan gagal, dan kembali ke struktur ekonomi sebelumnya, tanpa peningkatan ekonomi yang berarti. Industrialisasi merupakan bagian penting dari transformasi ekonomi dengan menjadikan sektor manufaktur sebagai penggerak utama ekonomi. Dengan demikian, intensitas modal, produktivitas, dan teknologi yang lebih tinggi, keterkaitan yang kuat dengan sektor primer dan jasa serta sifatnya yang tradable (dapat diperdagangkan ke luar negeri), sektor industri akan tumbuh tinggi dengan menarik sektor primer (pertanian dan pertambangan) serta membangun sektor jasa yang lebih produktif. Dinamika ini juga diikuti dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor primer ke manufaktur secara bertahap. Deindustrialisasi ini dapat berpengaruh buruk terhadap perekonomian Indonesia, dimana sektor industri memiliki multiplier effect yang tinggi, yaitu mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.2.1.4 Pariwisata dibawah Potensi

Pariwisata Indonesia memang memiliki potensi besar, namun masih belum optimal. Sektor pariwisata di Indonesia saat ini diandalkan sebagai sektor alternatif untuk mendorong perekonomian Indonesia karena dua sektor yang selama ini diandalkan yaitu sektor industri dan sektor pertanian cenderung mengalami stagnasi. Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia menghadapi berbagai masalah, walaupun secara jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia sangat besar dalam bentuk sumbangannya terhadap PDB, penerimaan devisa, dan penyerapan tenaga kerja. Potensi yang besar dari sektor pariwisata di Indonesia harus dikembangkan dan ditingkatkan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pariwisata juga merupakan sebuah industri yang kompleks karena melibatkan banyak sekali industri lainnya, seperti industri perhotelan, restoran dan rumah makan,

transportasi darat, laut, dan udara, industri kerajinan, industri jasa seperti biro perjalanan dan pemandu wisata, dan lainnya. Karena melibatkan aneka ragam industri lainnya yang berarti juga melibatkan banyak orang dari berbagai profesi, pariwisata disebut memberikan multiplier effects atau efek ganda kepada banyak orang. Hal ini, berarti bahwa industri pariwisata memberikan kontribusi ekonomi kepada banyak pihak, baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pariwisata. Tetapi dengan potensi yang besar di sektor pariwisata Indonesia, banyak sekali kendala untuk memajukan sektor ini. Kendala yang sering ditemui adalah infrastruktur baik perjalanan darat, laut maupun udara, sumber daya manusia, teknologi, pengembangan industri yang berdaya saing, pembiayaan, perluasan pasar, serta penciptaan iklim usaha. Semuanya itu, tidak dapat dibenahi dengan waktu satu atau dua tahun. Tetapi membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk dapat bersaing dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

3.2.1.5 Ekonomi Laut Belum Optimal

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Dengan luas wilayah laut yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, sektor kelautan menjadi sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi besar untuk dikembangkan. Namun, peran sektor kelautan dalam perekonomian nasional masih belum optimal. Sektor kelautan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Dengan luas wilayah laut yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, sektor ini menjadi sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi besar untuk dikembangkan. Sektor kelautan berkontribusi langsung terhadap PDB melalui sektor perikanan dan kelautan, pariwisata bahari, dan transportasi laut. Selain itu, sektor ini juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sektor kelautan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui beberapa cara. Pertama, melalui eksploitasi sumber daya alam laut seperti perikanan, minyak dan gas, serta mineral laut. Kedua, melalui pengembangan industri berbasis kelautan seperti perikanan, akuakultur, dan pariwisata bahari. Ketiga, melalui peningkatan konektivitas dan transportasi laut yang dapat mendukung perdagangan dan distribusi barang. Keempat, melalui peningkatan investasi di sektor kelautan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tantangan yang dihadapi oleh sektor kelautan dalam berkontribusi terhadap perekonomian nasional cukup beragam. Di antaranya adalah masalah pengelolaan sumber daya alam laut yang belum optimal, tingginya tingkat pencemaran laut, perubahan iklim yang berdampak pada keseimbangan ekosistem laut, serta masalah illegal fishing yang

merugikan perekonomian nasional. Selain itu, kurangnya infrastruktur dan investasi di sektor kelautan juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Strategi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan peran sektor kelautan dalam perekonomian nasional antara lain adalah dengan melakukan pengelolaan sumber daya alam laut secara berkelanjutan, meningkatkan investasi dan infrastruktur di sektor kelautan, mengembangkan industri berbasis kelautan, serta melakukan penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan kerjasama dengan negara-negara lain dalam pengelolaan sumber daya laut dan penanggulangan masalah lingkungan laut. Sektor kelautan penting untuk masa depan perekonomian nasional karena memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Dengan pengelolaan yang baik, sektor ini dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, sektor kelautan juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.

Sektor kelautan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Dengan pengelolaan yang baik dan strategi yang tepat, sektor ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja yang banyak. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak ringan, mulai dari masalah pengelolaan sumber daya alam, perubahan iklim, hingga illegal fishing. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak untuk memaksimalkan peran sektor kelautan dalam perekonomian nasional.

3.2.1.6 Kontribusi Koperasi dan UMKM rendah

Kontribusi koperasi dan UMKM di Indonesia masih dianggap rendah dibandingkan dengan potensinya. Koperasi merupakan pilar ekonomi kerakyatan menjadi salah satu prasyarat bagi terwujudnya kemandirian dan kedaulatan bangsa. Koperasi dengan filosofi kegotongroyongannya mampu mengungkit dan mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya. Sehingga jumlah dan kontribusi yang diberikan koperasi perlu terus didorong dengan mengoptimalkan lebih jauh lagi agar mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sebagai upaya untuk mengembangkan koperasi, pemerintah terus mendorong terwujudnya konglomerasi ekonomi Indonesia melalui koperasi. Koperasi juga didorong memiliki peningkatan jumlah anggota yang signifikan dan mengalami peningkatan aset serta mampu berpartisipasi aktif selama pandemi. Selain itu pemerintah juga telah memberikan insentif kepada koperasi dengan program penyaluran dana bergulir Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik

Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Namun, UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan kemampuan manajerial yang masih minim. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai program, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan insentif khusus bagi UMKM. Langkah ini bertujuan untuk tidak hanya mendukung keberlangsungan usaha kecil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

UMKM merupakan sektor yang mendominasi struktur ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha. Usaha-usaha ini tersebar di berbagai sektor, seperti perdagangan, manufaktur, pertanian, dan jasa dan juga termasuk kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga teknologi digital. Keberadaan UMKM sangat penting, terutama di daerah-daerah terpencil, karena mampu menciptakan lapangan kerja, mendistribusikan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun demikian, kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional masih ditemukan kendala pada modal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Banyak UMKM yang tidak dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan, kurangnya kelengkapan administrasi, atau minimnya informasi tentang layanan keuangan. Oleh karena itu, program seperti KUR dan berbagai insentif lainnya dirancang untuk menjembatani kesenjangan ini.

3.2.1.7 Infrastruktur dan literasi rendah

Salah satu strategi pemerataan pembangunan adalah menjamin ketersediaan infrastruktur sesuai kebutuhan wilayah. Pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah menunjukkan kinerja yang baik, seperti pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, dan jaringan kereta api. Penyediaan akses dasar masyarakat terhadap air minum, sanitasi layak, dan listrik juga menunjukkan peningkatan, tetapi perlu terus didorong agar mampu menjangkau seluruh penduduk dan wilayah. Pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, serta pengembangan kawasan strategis telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mendorong berkembangnya kegiatan sosial ekonomi di desa. Pengentasan daerah tertinggal berhasil cukup signifikan dari 199 kabupaten Tahun 2005 menjadi 62 kabupaten Tahun 2019.

Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Indonesia saat ini belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam mempercepat pemanfaatannya secara optimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi penawaran, tantangan pembangunan digital yang masih harus dihadapi adalah kesiapan infrastruktur TIK meliputi kapabilitas dan kapasitas infrastruktur TIK berupa penetrasi jaringan, keterbatasan manajemen spektrum, keterbatasan kapasitas data center, dan rendahnya penerapan kebijakan TIK. Pembangunan infrastruktur TIK juga mengalami hambatan sulitnya kondisi geografi di beberapa daerah. Dari sisi permintaan, masih dihadapi tantangan seperti rendahnya adopsi teknologi, penerapan teknologi untuk hal yang tidak produktif, konten lokal yang belum memadai, serta daya beli yang rendah terhadap perangkat telekomunikasi maupun internet.

Budaya literasi, kreativitas, dan inovasi belum optimal untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, ditandai dengan disparitas kemampuan literasi antarwilayah, serta akses penduduk terhadap TIK yang selalu meningkat dari tahun ke tahun tetapi tidak diikuti dengan kemampuan dalam memilah informasi.

3.2.1.8 Pembangunan belum berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, dimana disebabkan beberapa hal antara lain kerusakan lingkungan berupa masih tingginya deforestasi hutan yang menyebabkan perubahan iklim, serta bencana alam seperti kekeringan, banjir, dan longsor tanah yang dimana penyebabnya adalah penggundulan hutan secara besar-besaran dengan tujuan untuk pemusnahan lahan hutan untuk kepentingan tambang maupun pertanian. Oleh karena itu, peninjauan terkait kebijakan atau pengaturan hukum yang berlaku untuk mencegah dan mengatur mengenai kegiatan penebangan hutan berskala besar di Indonesia. Serta menunjukkan tantangan yang harus dihadapi dalam pengaplikasian hukum dan kebijakan tersebut baik dalam bidang implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

3.2.1.9 Integrasi domestik terbatas

Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga menyebabkan keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan antara lain karena pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa, yang berkontribusi sebesar 57,8 persen terhadap PDB (2022), infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa. pemberdayaan ekonomi meliputi pelaksanaan bantuan sosial dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Hal ini antara lain disebabkan penggunaan data

masih terfragmentasi, belum terintegrasi antar sektor, program, daerah, serta belum termutakhirkan secara sistematis sehingga kesalahan sasaran masih cukup tinggi dan menurunkan efektivitas dari alokasi perlindungan sosial pemerintah. Selanjutnya, pelaksanaan bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non alam, serta perubahan iklim

3.2.1.10 Kualitas SDM masih rendah

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Pada era pasar bebas Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi persaingan. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat akan dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) menjadi 0,73 pada Tahun 2045 yang dihadapkan dengan tantangan peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia yang ditandai tingginya kesenjangan IPM antarprovinsi dan antar kabupaten/kota.

3.2.1.11 Tata kelola pemerintahan belum optimal

Tata kelola pemerintahan di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan publik. Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas akan semakin efektif dengan pembinaan dan pengawasan yang kuat serta penerapan kode etik penyelenggara negara. Permasalahan terkait ketimpangan kuantitas dan kualitas aparatur daerah, regulasi yang tumpang tindih, serta kurang kondusifnya sistem politik daerah yang cenderung menguatkan kelompok kepentingan politik tertentu di daerah merupakan beberapa hal yang menjadi penyebab belum optimalnya tata kelola pemerintah yang akan segera diatasi.

3.2.1.12 Kepastian dan penegakan hukum masih lemah

Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu, pemulihan aset tindak pidana yang belum optimal, potensi pelanggaran HAM masih tinggi, dan pengawasan institusi penegak hukum baik

internal maupun eksternal masih lemah, budaya hukum masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah juga merupakan isu di bidang hukum yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, dengan adanya landasan supremasi hukum dan stabilitas nasional Indonesia di kancah internasional penting untuk memastikan keberlangsungan keberhasilan pembangunan. Kebijakan pembangunan dan penataan sistem hukum nasional akan dikembangkan seiring dengan penataan sistem etika jabatan publik dalam rangka pembinaan etika kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dukungan infrastruktur yang efektif untuk peningkatan kualitas demokrasi dan negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Supremasi hukum menjamin akan kepastian hukum dan keadilan. Stabilitas politik menghasilkan pemerintahan efektif dan responsif, keamanan nasional yang tangguh menciptakan lingkungan aman, sedangkan stabilitas ekonomi mendukung kesejahteraan masyarakat.

3.2.1.13 Demokratisasi belum optimal

Proses demokratisasi demokratisasi di Indonesia belum optimal, dimana ini ini disebabkan oleh antara lain adanya kesenjangan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, kemampuan keuangan yang kurang, serta lingkungan yang kurang kondusif bagi masyarakat sipil. Selain itu, prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiadaan mekanisme koreksi antara aktor pemerintah dan masyarakat menyebabkan belum optimalnya partisipasi masyarakat, terutama dalam tahap pelaksanaan.

Tantangan berikutnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Penting untuk mencatat bahwa tantangan-tantangan ini tidak bersifat mutlak dan terus berkembang seiring waktu. Berbagai langkah akan diambil untuk mengatasi kendala-kendala ini. Pertama, pemerintah dapat meningkatkan literasi politik melalui program pendidikan dan informasi yang merata. Kedua, langkah-langkah tegas perlu diambil untuk memberantas korupsi dan memperkuat integritas lembaga-lembaga demokratis. Terakhir, perlu adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui edukasi politik dan fasilitasi dialog antarkelompok masyarakat.

3.2.1.14 Kesenjangan Jawa dan luar Jawa

Pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan, tetapi kesenjangan saat ini masih cukup tinggi utamanya antara Jawa dan luar Wilayah Jawa, serta antara wilayah barat dan timur. Oleh karena itu, pembangunan di luar Wilayah Jawa dengan berfokus pada penciptaan pemerataan ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang mengedepankan prinsip hilirisasi, inklusivitas, dan

keberlanjutan lingkungan dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia. Hal ini memungkinkan pertumbuhan di luar Wilayah Jawa lebih tinggi dibandingkan di Wilayah Jawa.

Dengan tercapainya pertumbuhan yang tinggi serta peningkatan urbanisasi di kota-kota di luar Jawa, dorongan migrasi ke Wilayah Jawa akan berkurang, bahkan bisa sebaliknya, terjadi peningkatan migrasi ke luar Wilayah Jawa. Dengan migrasi alami ini dan transmigrasi (migrasi buatan) yang terus diperkuat, tekanan penduduk di Wilayah Jawa akan berkurang. Untuk menanggulangi kesenjangan tersebut, pada setiap wilayah akan diterapkan tiga transformasi, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang didukung dengan dua landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

3.2.2. Isu Strategis Aceh

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Aceh, serta memperhatikan isu-isu strategis di tingkat nasional maupun internasional, maka disusun isu-isu strategis Aceh yang diharapkan dapat teratasi dalam 20 tahun mendatang (2025 – 2045). Isu strategis adalah hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Aceh karena dampaknya dapat mempengaruhi Aceh secara langsung maupun tidak langsung secara signifikan dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis Aceh diuraikan di bawah ini:

3.2.2.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 1) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, 2) Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan, 3) Promosi Gaya Hidup Sehat, 4) Peningkatan Gizi Masyarakat, 5) Perbaikan Sanitasi dan Akses Air Bersih, 6) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, 7) Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, 8) Peningkatan Kesehatan Mental, 9) Pemberdayaan Komunitas, 10) Kebijakan dan Regulasi yang Inklusif, dan 11) Penyusunan Regulasi Pangan dan Obat yang mengatur produksi, distribusi, dan pemasaran makanan serta obat-obatan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya.

Penanggulangan stunting dapat dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan multisektor, melibatkan berbagai aspek dari kesehatan hingga pendidikan dan sanitasi. Beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk menanggulangi stunting yaitu: 1) Intervensi Gizi Spesifik, 2) Intervensi Gizi Sensitif, 3) Penguatan Sistem Kesehatan, 4) Pendekatan Lintas Sektor (pendidikan, pertanian dan kesejahteraan sosial), 5) Edukasi dan Peningkatan Kesadaran, 6) Intervensi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, 7) Penggunaan Data dan Penelitian, dan 8) Pengembangan Kebijakan Evidence Based (Berbasis Bukti).

3.2.2.2 Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat.

Berbagai upaya yang terstruktur dan berkesinambungan penting dilakukan untuk mencapai pemerataan pendidikan, memperkuat pendidikan vokasi dan meningkatkan minat baca masyarakat. Beberapa langkah penting yang dapat diambil yaitu : 1) Pemerataan Pendidikan yang difokuskan antara lain untuk peningkatan akses dan infrastruktur pendidikan, bantuan dan subsidi pendidikan, peningkatan kualitas guru, pemanfaatan teknologi dan pendidikan jarak jauh; 2) Perkuatan Pendidikan Vokasi dilakukan antara lain dengan cara pengembangan kurikulum vokasi, pemagangan, kerjasama dengan dunia usaha, penyediaan fasilitas dan infrastruktur, sertifikasi dan akreditasi, kampanye literasi, penyediaan infrastruktur literasi.

3.2.2.3 Penanggulangan Kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup berbagai ektor dan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan: 1) pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, 2) peningkatan kualitas, mutu dan akses pendidikan, 3) peningkatan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan, 4) bantuan sosial, 5) pemenuhan kebutuhan perumahan dan pelestarian lingkungan hidup, 6) penguatan tata kelola dan kebijakan yang mendukung pengurangan kemiskinan dan mendukung kesejahteraan masyarakat miskin.

3.2.2.4 Peningkatan Pendapatan Perkapita dengan Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan memaksimalkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi di Aceh, perlu dilakukan dengan berbagai langkah strategis yang terintegrasi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu: 1) diversifikasi ekonomi, 2) peningkatan investasi, 3) peningkatan kualitas sumber daya manusia, 4) peningkatan kewirausahaan, 5) pengembangan infrastruktur, 6) penguatan tata kelola dan kebijakan ekonomi, dan 7) peningkatan produktivitas dan inovasi, 8) pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, 9) pengembangan sektor jasa, industri dan pariwisata, 10) pengembangan sektor pertanian dan perikanan berbasis teknologi.

3.2.2.5 Optimalisasi Riset dan Inovasi serta Teknologi Digital

Optimalisasi riset dan inovasi serta teknologi digital merupakan kunci untuk memajukan ekonomi, meningkatkan daya saing global, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Upayaupaya yang dapat dilakukan untuk mencapai optimalisasi ini yaitu : 1) meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan (R&D), 2) penguatan ekosistem inovasi, 3) pengembangan kapasitas dan sumber daya manusia, 4) optimalisasi teknologi

digital, 5) penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan riset, inovasi dan teknologi digital, 6) kolaborasi internasional, dan 7) pemanfaatan data dan AI (Artificial Intelligence).

3.2.2.6 Membuka Lapangan Kerja dan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat.

Untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu: 1) mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, 2) meningkatkan keterampilan dan pendidikan, 3) meningkatkan akses dan inklusivitas, 4) mendorong kewirausahaan, 5) digitalisasi dan teknologi, 6.) kebijakan dan regulasi yang mendukung (berupa insentif pajak, regulasi yang ramah usaha, dan kebijakan tenaga kerja), 7) penguatan sektor umkm, dan 8) peningkatan produktivitas melalui inovasi

3.2.2.7 Memperkuat Industri Pengolahan dan Eksport

Memperkuat industri pengolahan dan ekspor adalah strategi kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini yaitu: 1) meningkatkan kualitas dan standar produk, 2) pengembangan teknologi dan inovasi, 3) peningkatan infrastruktur dan logistik, 4) kebijakan dan regulasi yang mendukung, 5) pengembangan sumber daya manusia, 6) peningkatan akses pasar, 7) dukungan keuangan dan investasi, 8) pemberdayaan umkm, dan 9) keberlanjutan dan ramah lingkungan.

3.2.2.8 Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau.

Mengembangkan produktivitas pangan dan ekonomi hijau adalah dua tujuan yang saling mendukung untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kedua sektor tersebut yaitu : 1) peningkatan produktivitas pangan melalui: a) penggunaan teknologi modern, b) pertanian presisi, c) penggunaan varietas tanaman unggul, d) sistem irigasi cerdas, e) praktik pertanian berkelanjutan, dan 2). pengembangan ekonomi hijau dengan cara: a) pemanfaatan energi baru terbarukan, b) pembangunan infrastruktur energi hijau, c) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, d) konservasi hutan, e) pengelolaan air, f) pengembangan industri hijau, g) penggunaan teknologi ramah lingkungan, h) kebijakan dan regulasi yang mendukung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya praktek ramah lingkungan, dan i) pendidikan lingkungan.

3.2.2.9 Memperkuat Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Memperkuat perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi memerlukan strategi yang holistik dan terintegrasi untuk mengatasi tantangan spesifik dan

memaksimalkan potensi masing-masing. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yaitu: pengembangan infrastruktur, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi kreatif dan digital, dan kebijakan perkotaan yang berkelanjutan. Untuk memperkuat pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yaitu: pengembangan infrastruktur dasar, pengembangan pertanian dan agroindustri, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM, pariwisata berbasis desa, akses keuangan dan pembiayaan. Selanjutnya, upaya untuk mensinergikan perkotaan dan pedesaan dapat dilakukan dengan cara: (1) meningkatkan konektivitas dan kolaborasi, dan (2) pengembangan kluster ekonomi.

3.2.2.10 Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Berkesinambungan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berkesinambungan memerlukan berbagai upaya yang melibatkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan reformasi birokrasi. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: 1) peningkatan transparansi, 2) peningkatan akuntabilitas, 3) partisipasi publik, 4) reformasi birokrasi, 5) pengembangan kebijakan yang berkelanjutan, dan 6) pendidikan dan kesadaran anti-korupsi, 7) memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan penataan peraturan perundangan/ deregulasi kebijakan dan manajemen SDM, 8) membangun budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik, transparansi, dan penegakan hukum, 9) mengembangkan kerjasama dengan lembaga antikorupsi, organisasi internasional, dan donor internasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

3.2.2.11 Memperkuat Otonomi Khusus

Memperkuat Otonomi Khusus Aceh memerlukan berbagai langkah yang terfokus pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta penegakan hak-hak khusus yang telah diberikan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat otonomi khusus di Aceh: 1) Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah, 2) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, 3) Pengembangan Ekonomi Lokal, 4) Penguatan Identitas dan Budaya Lokal, 5) Peningkatan Kesejahteraan Sosial, 6) Penegakan Hukum dan Keamanan, 7) memperkuat implementasi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi khusus Aceh dan menjaga konsistensi dengan hukum nasional, 8) Memperkuat peran lembaga adat dan agama dalam pengelolaan urusan keagamaan, adat istiadat dan kebudayaan di Aceh sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh otonomi khusus serta memastikan bahwa implementasi otonomi khusus Aceh memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh tanpa membedakan suku, agama, atau kelompok tertentu.

3.2.2.12 Kemandirian Ruang Fiskal

Mewujudkan kemandirian ruang fiskal di Aceh memerlukan pendekatan yang terfokus dan spesifik, mengingat karakteristik dan kebutuhan unik Aceh. Beberapa langkah spesifik yang dapat dilakukan yaitu: 1) optimalisasi penerimaan daerah, 2) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Aceh secara optimal dan berkelanjutan, 3) diversifikasi ekonomi, 4) peningkatan efisiensi pengeluaran pemerintah, 5. pengelolaan utang daerah, 6) penguatan kapasitas administrasi fiskal, 7. pemberdayaan ekonomi lokal, dan 8) penguatan kebijakan dan regulasi. 8) diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar transfer dari pemerintah pusat. 9) Peningkatan investasi, kewirausahaan, dan daya saing sektor-sektor ekonomi lokal, 10) Membangun kerjasama dan sinergi antara kabupaten/kota di Aceh, 11) Promosi investasi dan pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan insentif bagi investor, 12) mendorong kemitraan publik-swasta, serta mendukung pengembangan UMKM dan industri kreatif.

3.2.2.13 Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh

Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh merupakan bagian penting dari upaya menjaga identitas dan karakteristik unik Aceh. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini yaitu : 1) Penguatan Pendidikan dan Sosialisasi Syariat Islam, 2) Penegakan Hukum Syariat Islam, 3) Pelestarian dan Pengembangan Budaya Aceh, 4) Penguatan Kelembagaan Adat, 5) Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariat dan Budaya, 6) Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Pengembangan Budaya, 7) peningkatan kapasitas lembaga-lembaga kekhususan Aceh yang bertanggung jawab atas implementasi syariat Islam di Aceh, 8) peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai syariat Islam dan budaya Aceh.

3.2.2.14 Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan disabilitas, serta memperkuat gender dan keluarga, memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini yaitu : 1) mendorong pemberdayaan ekonomi bagi PMKS, penyandang disabilitas, dan perempuan dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, dan dukungan untuk memulai usaha mikro, 2) penanganan disabilitas, 3) memperkuat gender, 4) memperkuat keluarga (pendidikan, kesehatan, gizi dan

ekonomi), 5) memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

3.2.2.15 Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Batu bara serta Migas yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan

Pemanfaatan sumber daya cadangan mineral dan batubara serta migas, diperoleh secara maksimal haruslah dilaksanakan dengan mengedepankan tata kelola pertambangan yang profesional, menerapkan kaidah pertambangan yang baik yang berwawasan lingkungan serta berdampak positif bagi masyarakat Aceh. Beberapa Upaya spesifik yang dapat dilakukan selain mendukung kebijakan nasional diantaranya: 1) Pemetaan potensi Cadangan Minerba serta Migas Aceh yang terintegrasi, 2) Pengawasan dan pembinaan terhadap IUP agar berstatus clear and clean, 3) Peningkatan industri hulu berbasis Minerba dan Migas yang prospektif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, 4) Hilirisasi industri minerba, minyak dan gas di wilayah Aceh.

Mewujudkan pembangunan berorientasi lingkungan dan energi baru terbarukan adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Beberapa upaya spesifik yang dapat dilakukan antara lain: 1) pengembangan kebijakan dan regulasi, 2) mendorong investasi pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan, 3) peningkatan efisiensi energi, 4) konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan hidup, 5) edukasi dan kesadaran publik, 6) penelitian dan inovasi, dan 7) pengembangan ekonomi hijau.

3.2.2.16 Pengurangan Risiko Bencana

Pengurangan risiko bencana merupakan langkah penting untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman alam dan antropogenik. Berikut adalah Langkah spesifik yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana antara lain: 1) penguatan sistem peringatan dini, 2) penguatan infrastruktur dan tata ruang, 3) pengembangan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat, 4. pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, 5) penguatan koordinasi dan kolaborasi, dan 6) pemanfaatan teknologi dan inovasi, 6) meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana, termasuk penyusunan kebijakan, perencanaan, dan implementasi program-program pengurangan risiko bencana, 7) Membangun kerjasama dan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengurangi risiko bencana.

3.2.2.17 Memperkuat Pembangunan Kewilayahan

Memperkuat pembangunan kewilayahan adalah kunci untuk memastikan pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Berikut adalah

beberapa upaya spesifik yang dapat dilakukan untuk memperkuat pembangunan kewilayahan anatara lain: 1) pengembangan infrastruktur, 2) pemberdayaan ekonomi lokal, 3) peningkatan kualitas hidup, 4) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, 5) pemberdayaan sosial dan kelembagaan, 6) pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan 7) meningkatkan kolaborasi dan kemitraan, 8) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di daerah terpencil, terjauh dan pinggiran melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. 8) mendorong adopsi inovasi dan teknologi di wilayah yang membutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi lokal.

3.2.2.18 Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas

Memperkuat sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas merupakan langkah penting dalam mendukung penguatan infrastruktur daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini antara lain: 1) investasi infrastruktur strategis, 2) peningkatan pengawasan dan kualitas konstruksi, 3) peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, 4) peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, 5) peningkatan akses layanan dasar, dan 6). pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam berkelanjutan (konservasi lingkungan, pengelolaan air dan tanah, dan pengendalian pencemaran), 7) meningkatkan akses dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi yang modern.

3.2.3. Isu Strategis Berdasarkan KLHS RPJPD Simeulue

Berdasarkan Isu Strategis Dokumen KLHS RPJPD Simeulue Tahun 2025-2045, yaitu:

1. Pelayanan Dasar
2. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana
3. Pengembangan infrastruktur daerah berkelanjutan dan tahan bencana
4. Optimalisasi Nilai Tambah Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (blue economy) melalui Peningkatan Kapasitas SDM, Subsidi, dan Investasi
5. Tata Kelola dan Kepastian Hukum
6. Peningkatan dan pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal (pembangunan sarana/prasarana dan pengelolaannya)
7. Peningkatan pasrtisipatif lembaga adat

3.2.4. Isu Strategis Kabupaten Simeulue

Berdasarkan pada isu-isu strategis tingkat Nasional maupun Aceh maka disusun isu- isu strategis Kabupaten Simeulue diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang

dihadapi dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang (2025-2045). Isu-isu strategis tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Penguatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
2. Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;
3. Peningkatan Daya Saing Daerah;
4. Penguatan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Sehat dan Budaya Masyarakat Maju;
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).
6. Penguatan Infrastruktur secara menyeluruh dan Berkelanjutan;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

1. Penguatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Upaya untuk meningkatkan produktivitas SDM dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas mutu dan akses pendidikan, pelatihan keterampilan dan keahlian tenaga kerja, peningkatan kualitas dan akses kesehatan, perbaikan kondisi kerja serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong inovasi yang efektif dan produktif, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, inovasi, daya saing, dan kualitas hidup masyarakat dalam merespon berbagai tantangan dimasa depan.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan hal wajib dan sangat prioritas untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas harus terus ditingkatkan. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata di setiap wilayah seyogyanya harus terpenuhi dengan baik, termasuk distribusi tenaga pendidik, tenaga medis dan pelayanan yang berkualitas harus terus ditingkatkan melalui inovasi yang efektif.

Pembangunan dibidang pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karen pendidikan merupakan upaya yang mempercepat pengembangan potensi manusia agar mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya. Pembangunan pendidikan diselenggarakan secara integral oleh institusi pendidikan, pengguna, dan pemerintah daerah untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, berahlak mulia, berkepribadian nasional, cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, unggul dalam persaingan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan pasar

Pembangunan kesehatan merupakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertujuan untuk mewujudkan derajat keehatan masyarakat yang setinggi tingginya sebagai investasi bagi pembangunan

sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Titik berat pembangunan kesehatan dilakukan antara lain pada kesehatan ibu dan anak, sanitasi, peningkatan kualitas gizi masyarakat, penurunan stunting, peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, perluasan jaminan kesehatan masyarakat, pengembangan peran instalasi kesehatan masyarakat sebagai pusat pemberdayaan untuk membentuk lingkungan dan perilaku sehat serta peningkatan peran dan fungsi kaum perempuan sebagai penggerak pembangunan di seluruh tingkat dan lapisan masyarakat.

Pembangunan sosial juga merupakan hal harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia. Pembangunan sosial adalah suatu konsep pembangunan yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial dimana setiap individu memiliki akses yang adil terhadap berbagai kebutuhan dasar. Salah satu permasalahan sosial yang harus diselesaikan adalah terkait dengan kemiskinan ekstrim. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dapat dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: penurunan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Intervensi pengentasan kemiskinan mencakup berbagai bidang, baik secara langsung untuk mendukung pengentasan kemiskinan maupun secara tidak langsung melalui kolaborasi dalam integrasi dan penganggaran pelaksanaan program di tingkat pemerintah pusat, kabupaten/kota dan swasta.

2. Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;

Dampak pandemi covid-19 melanda Kabupaten Simeulue, kondisi sosial ekonomi masyarakat banyak yang terdampak dan mengakibatkan perekonomian daerah menurun secara signifikan yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan daerah. Namun kondisi saat ini perekonomian daerah mulai membaik secara perlahan dan angka kemiskinan mulai terjadi penurunan khususnya di dua tahun terakhir, dimana angka kemiskinan Simeulue tahun 2023 adalah sebesar 17,92 persen sedikit menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang berada diangka 18,37 persen.

Pekembangan perekonomian Kabupaten Simeulue sebagian besar didukung oleh sektor pertanian (pertanian, perkebunan, perikanan) dimana pada tahun 2023 kontribusinya berada diangka 37,33 persen sedikit naik dari tahun 2022 yaitu diangka 35,78 persen. Masalah rendahnya produktivitas disektor pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi fokus dalam pencapaian peningkatan perekonomian daerah. Oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan produktivitas dan daya saing di sektor tersebut yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity, salah satunya dengan pengembangan kawasan strategis pertanian, pertanian dan perikanan.

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat perlu dilakukan pengembangan strategi dan terobosan inovasi baik inovasi yang berbasis teknologi maupun inovasi dari sisi regulasi, sehingga pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah dapat bersaing dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia, baik dari sektor Koperasi dan UMKM, Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan, Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat yang dinamikanya terus berkembang. Salah satu contohnya adalah peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) dapat dikembangkan untuk masa yang akan datang.

3. Peningkatan Daya Saing Daerah

Peningkatan daya saing daerah merupakan hal yang penting dalam pembangunan ekonomi lokasi. Daya saing daerah berkelanjutan menjadi kunci untuk memulihkan perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang variatif dan adaptif terhadap karakter daerah dan tipologi daya saing yang dimiliki. Peningkatan daya saing daerah dipengaruhi oleh empat komponen yaitu lingkungan pendukung, sumberdaya manusia, pasar dan ekosistem inovasi yang dijabarkan kedalam dua belas pilar yaitu. Institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dimensi bisnis dan kapabilitas inovasi.

Kondisi indeks daya saing daerah Kabupaten Simeulue pada tahun 2024 berada diangka 3,15 poin, masih berada dibawah Aceh Singkil yang berada diangka 3,25 poin. Oleh karena itu Peningkatan pembangunan di dua belas pilar tersebut sangat perlu ditingkatkan agar kemampuan daya saing Daerah Kabupaten Simeulue dapat meningkat.

Kabupaten Simeulue memiliki keunggulan potensi wisata bahari, seperti pantai, ombak untuk selancar kelas dunia, keindahan bawah laut, serta panorama alam dan budaya lokal yang khas. Namun, potensi tersebut belum tergarap secara maksimal karena keterbatasan promosi, minimnya paket wisata terintegrasi, serta rendahnya investasi sektor pariwisata.

Aksesibilitas menuju Simeulue masih menjadi tantangan utama, baik dari sisi transportasi laut maupun udara. Selain itu, infrastruktur dasar seperti jalan menuju objek wisata, ketersediaan listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, hingga akomodasi yang representatif masih terbatas. Kondisi ini berpengaruh terhadap minat wisatawan untuk datang dan berkunjung lebih lama.

Selain dari pada itu, sebagian besar pelaku usaha pariwisata di Simeulue belum memiliki keterampilan yang memadai dalam hal pelayanan, manajemen destinasi, maupun

pengelolaan homestay dan usaha kuliner. Kurangnya tenaga kerja terlatih di bidang hospitality serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pariwisata ramah lingkungan juga menjadi hambatan peningkatan daya saing.

Promosi pariwisata Simeulue masih bersifat sporadis dan belum konsisten dalam membangun citra (branding) sebagai destinasi unggulan. Pemanfaatan media digital dan jaringan pariwisata global juga masih terbatas, sehingga keunikan Simeulue yang sudah dikenal oleh surfer mancanegara belum mampu menarik wisatawan secara masif.

Potensi wisata bahari sangat bergantung pada kualitas lingkungan, khususnya laut dan pesisir. Aktivitas yang tidak ramah lingkungan seperti penangkapan ikan dengan cara merusak, penumpukan sampah, dan degradasi ekosistem pesisir dapat menurunkan daya tarik wisata. Isu keberlanjutan lingkungan perlu mendapat perhatian agar pengembangan pariwisata tidak merusak ekosistem

Keterpaduan kebijakan lintas sektor dan kelembagaan dalam pengembangan pariwisata masih lemah. Koordinasi antara pemerintah daerah, swasta, masyarakat, dan komunitas pariwisata belum optimal, sehingga banyak potensi yang tidak termanfaatkan secara maksimal.

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).

Dalam melaksanakan reformasi birokrasi di daerah, tata kelola dan penyelenggaraan pelayanan publik harus ditingkatkan untuk memastikan pelayanan dan kepercayaan masyarakat berjalan efektif, efisien, mudah diakses, transparan dan akuntabel. Tentu saja kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Simeulue dinilai dalam kategori “baik”, namun efektivitas pelaksanaannya sangat penting agar pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat tetap optimal

Dari aspek akuntabilitas dan maturitas pelaksanaan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan juga masih perlu terus ditingkatkan terutama dari aspek tata kelola pemerintahan (good governance), tata kelola keuangan, pengelolaan manajemen SDM, dll. termasuk peningkatan dan pemanfaatan inovasi daerah baik secara teknologi informasi maupun regulasi, sehingga dapat menyikapi setiap perubahan dinamika dan regulasi yang terus berkembang setiap waktu.

Dari segi akuntabilitas, penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu lebih ditingkatkan terutama dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini juga mencakup peningkatan dan pemanfaatan inovasi regional baik di bidang teknologi informasi maupun teknologi. Regulasi yang harus kita hadapi perlu kita perkuat agar kita bisa mengikuti segala dinamika dan regulasi yang terus berkembang.

5. Penguatan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Sehat dan Budaya Masyarakat Maju

Pembangunan lingkungan sosial masyarakat dan pembangunan kebudayaan juga menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabuapten Simeulue. Upaya pembangunan lingkungan sosial dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal perlu dilakukan untuk mendukung penguatan lingkungan sosial yang lebih luas.

Keamanan lingkungan menjadi faktor penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Konflik berkepanjangan yang pernah terjadi di Aceh tentunya telah memberikan dampak negatif yang sangat besar dan menjadi pengalaman sehingga hal serupa tidak terjadi kembali dimasa yang akan datang. Peningkatan keamanan dapat diupayakan melalui penguatan penegakan qanun serta pengawasan yang intensif khususnya terhadap keberadaan wisatawan asing yang berkunjung serta pengawasan di wilayah perairan laut terhadap illegal fishing. Penguatan lembaga Satpol PP dan WH serta kerjasama dengan aparat penegak hukum serta masyarakat dapat dilakukan secara sistematis agar keamanan daerah Kabupaten Simeulue dapat terus terjaga.

Upaya pelestarian adat istiadat, pengembangan kebudayaan dan kesenian Simeulue serta pengelolaan cagar budaya juga perlu dilakukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memperkuat peran dan fungsi lembaga adat.

Hal lain yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan daerah adalah terkait dengan Pemberdayaan serta pemenuhan hak perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan, serta penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.

6. Penguatan Infrastruktur secara menyeluruh dan berkelanjutan

Untuk menyeimbangkan pembangunan masing-masing wilayah kecamatan dan mencapai ketersediaan infrastruktur di dalam kabupaten, maka ketersediaan infrastruktur dasar jalan dan jembatan sebagai penghubung wilayah harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Kondisi kemantapan jalan Lingkar Simeulue baru mencapai 83,44% dan Jalan Kabupaten sebesar 52,04.%. Kondisi ini tentunya perlu untuk ditingkatkan agar mendukung peningkatan perekonomian daerah.

Pembangunan infrastruktur wilayah dikembangkan melalui pendekatan pembangunan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk mencapai pembangunan yang

seimbang dan merata antar wilayah serta mendukung tumbuhnya pusat-pusat ekonomi dan permukiman baru.

Selanjutnya infrastruktur lainnya yang perlu dikuatkan dan ditingkatkan pembangunannya adalah antara lain, air minum, sanitasi, persampahan, irigasi, rumah layak huni, transportasi, telekomunikasi serta infrastruktur lainnya yang mendukung peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, dengan menyelaraskan pembangunan daerah dan antar daerah serta daya dukung lingkungan.

Pembangunan infrastruktur daerah juga diupayakan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui investasi swasta, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur daerah.

7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Capaian IKLH Daerah Kabupaten Simeulue sebesar 78,82 persen pada tahun 2023 menunjukan bahwa kualitas lingkungan hidup yang masih cukup baik Namun demikian kondisi ini harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan agar lingkungan hidup dapat menjamin kebutuhan pembangunan berkelanjutan dimasa yang akan datang. Pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan tentunya sedikit banyak akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga diperlukan kebijakan yang mendukung pembangunan lingkungan hidup.

Membangun kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan sangat mendukung tercapainya kualitas lingkungan yang baik. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan awal yang lebih baik, sosialisasi, komunikasi dan informasi tentang lingkungan, dan penyebaran kearifan lokal.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan, menguatkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan, mengoptimalkan penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta menguatkan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola sumber daya air, dan kawasan lindung. Berbagai upaya tersebut perlu didukung oleh sistem penegakan hukum yang baik, dengan ketersediaan perangkat hukum dan perundangan yang memberikan kepastian kewenangan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, berkeadilan, serasi, dan mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomian dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan

daya tampung lingkungan. Tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan dengan menerapkan penataan ruang mandiri.

Kondisi geografis Kabupaten Simeulue berada di wilayah yang rentan terhadap bencana alam dan perubahan iklim, dan memiliki indeks risiko tinggi bencana. Pengurangan resiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim adalah fokus utama upaya penanganan bencana ke depan. Ini berarti pencegahan lebih dini, mitigasi, dan peningkatan kesiapsiagaan untuk mengurangi kerusakan, kerugian ekonomi, dan korban jiwa. Pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian dari setiap fase pembangunan dan pengembangan wilayah. Penataan ruang yang berbasis kebencanaan, sistem informasi tentang kebencanaan dan kerentanan terhadap iklim, sistem peringatan dini, perencanaan penanganan bencana, sosialisasi, dan pelatihan masyarakat untuk meningkatkan kesiapan dan ketahanan menghadapi bencana.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi dan Misi Nasional

Visi, misi dan arah kebijakan daerah harus mengacu pada visi, misi dan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan** dengan sasaran utama;

A. Pendapatan per kapita setara negara maju antara

1. GNI Per kapita (US\$) dari 5.500 menjadi 23.00 – 30.300 US Dollar
2. Kontribusi PDB Maritim (%) dari 7,60 menjadi 15,00
3. Kontribusi PDB Manufaktur (%) dari 20,80 menjadi 28,00

B. Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang

1. Rasio Gini (Indeks) 0,377- 0,382 menjadi 0,290 - 0,320
2. Kontribusi PDRB KTI (%) dari 20,60 (2022) menjadi 28,50

C. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat

1. Global Power Indeks (Peringkat) dari 34 (2023) menjadi 15 besar (2045)

D. Daya saing sumber manusia meningkat

1. Human Capital Index (Indeks) dari 0,54 (2022) menjadi 0,73 (2024)

E. Intensitas emisi gas Rumah kaca (GRK) menurun menuju net zero emission

1. Penurunan Intensitas GRK (%) dari 82,89 (Baseline 2025) menjadi 89,18 (2045)

Nasional telah menetapkan 8 (delapan) misi pembangunan beserta 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan yang dikelompokkan dalam agenda transformasi seperti diuraikan sebagai berikut:

A. Transformasi Indonesia

1. Transformasi Sosial
 - 1) Kesehatan untuk Semua
 - 2) Pendidikan Berkualitas dan merata
 - 3) Perlindungan Sosial yang adaptif
2. Transformasi Ekonomi
 - 4) Iptek, inovasi dan Produktivitas Ekonomi
 - 5) Penerapan Ekonomi Hijau

- 6) Transformasi digital
- 7) Integrasi ekonomi domestik dan global
- 8) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
- 3. Transformasi Tata kelola
 - 9) Regulasi dan tatakelola yang berintegritas dan adaptif

B. Landasan Transformasi

- 4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia
 - 10) Hukum yang berkeadilan, keamanan nasional Tangguh dan demokrasi substantial
 - 11) Stabilitas ekonomi makro
 - 12) Ketangguhan Diplomasi dan pertahanan berdaya gentar dan kawasan
- 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
 - 13) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
 - 14) Keluarga berkualitas, kesadaran gender dan masyarakat inklusi
 - 15) Lingkungan Hidup berkulaitas
 - 16) Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan
 - 17) Resilien terhadap bencana perubahan iklim

C. Kerangka Implementasi Transformasi

- 6. Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan
- 7. Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
- 8. Kestinambungan pembangunan

4.2. Visi dan Misi Provinsi Aceh

4.2.1. Visi Provinsi Aceh

Berdasarkan kondisi Aceh saat ini dan skenario yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh pemerintah Aceh, serta sinkronisasi dengan visi nasional, maka visi pembangunan Aceh Tahun 2025-2045 adalah terwujudnya:

“ACEH ISLAMI, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”

Visi pembangunan Aceh tahun 2025 - 2045 adalah kondisi Aceh dimana keistimewaan semakin kuat (Syariat Islam, Kebudayaan dan Pendidikan), Maju, dan Berkelanjutan sebagaimana tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. **ISLAMI** merupakan suatu kondisi masyarakat Aceh yang secara utuh menjalankan segala aspek kehidupannya berdasarkan nilai-nilai Islam dalam aspek aqidah, akhlak, ibadah, pendidikan Islami, Implementasi nilai Islam, muamalah, keamanan sosial.
2. **MAJU** tercermin dari kondisi masyarakat Aceh sejahtera yang memiliki konektivitas mantap, permukiman dan perumahan layak, tingkat pendapatan setara dengan daerah maju, kemandirian para penyandang disabilitas, harga pokok terjangkau, ekonomi desa dan kota bertumbuh, kemudahan akses pendidikan, kesehatan, modal kerja dan ketrampilan, petani dan nelayan memiliki nilai tambah yang sejahtera, industrialisasi berjalan mantap, ekspor tinggi, angka ketergantungan rendah, semangat wirausaha yang kuat, pekerja memiliki jaminan yang kuat, lapangan kerja terbuka lebar, kesetaraan dalam kesempatan kerja, pemerintah yang regulatif dengan tata kelola berintegritas, adaptif, berotonomi khusus, dengan sumber daya manusia yang inklusif, berkualitas, menguasai Iptek, Inovatif, produktif, dengan kehidupan keluarga setara, beragama bermaslahat, berkebudayaan maju, mampu memanfaatkan transformasi digital dan energi yang dikelola secara maju.
3. **BERKELANJUTAN** adalah kondisi pembangunan Aceh yang dapat menjaga keberlangsungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta memperhatikan keseimbangannya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga terjaminnya modalitas generasi mendatang untuk melanjutkan estafet pembangunan secara sehat, dengan meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana, mengutamakan energi baru terbarukan.

4.2.2. Misi Provinsi Aceh

Adapun pencapaian Visi tersebut maka ditetapkan 8 Misi Pembangunan yaitu:

A. Mewujudkan Transformasi sosial.

Misi ini diwujudkan untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing melalui pendidikan berkualitas, berkarakter dan merata, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta perlindungan sosial yang adaptif. Transformasi sosial juga ditujukan untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

B. Mewujudkan transformasi ekonomi

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, inovatif, produktif, ramah lingkungan dan memanfaatkan digitalisasi untuk mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, serta menjadikan kota dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Misi ini juga diarahkan untuk mendorong pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif, serta pertumbuhan investasi

dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan mengoptimalkan sumber daya alam disektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, minerba, dan migas, serta mengembangkan sektor perdagangan dan investasi.

C. Mewujudkan transformasi tata kelola

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola yang regulatif, berintegritas, adaptif, professional, efektif dan efisien untuk mendukung keberlanjutan pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai islami. Selanjutnya juga untuk mewujudkan percepatan digitalisasi pelayanan publik dan mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien.

D. Mewujudkan perdamaian, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan implementasi Syariat Islam

Misi ini diwujudkan untuk memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, penguatan perdamaian, dan otonomi khusus Aceh serta pemantapan Syariat Islam melalui implementasi nilai-nilai Islami. Selain itu melalui misi ini juga untuk mewujudkan penataan regulasi dan kebijakan terkait dengan keistimewaan Aceh sehingga implementasi Syariat Islam dapat terlaksana dengan baik.

E. Mewujudkan masyarakat Aceh yang berketahanan sosial budaya dan ekologis.

Misi ini diwujudkan dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat melalui pembangunan karakter dan sadar lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Selanjutnya misi ini juga untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, menetapkan arah kebijakan yang komprehensif dalam meningkatkan ketahanan daerah dengan mengimplementasikan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.

F. Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

Misi ini diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, implementasi syariat islam, perkuatan otonomi khusus Aceh, ketahanan sosial budaya dan ekologi, penataan pertanahan dan pengendalian kesesuaian pelaksanaan terhadap struktur ruang dan pola ruang RTRW. Penerjemahan agenda tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing kawasan dan kabupaten/kota untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah yang didukung oleh infrastruktur mantap dan baik sesuai kebutuhan wilayah.

G. Mewujudkan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Misi ini diwujudkan untuk meningkatkan dan memantapkan sarana dan prasarana pembangunan yang berupa penanganan terhadap perumahan dan permukiman kumuh, pelestarian sumber daya air, pengembangan infrastruktur energi yang handal, berkelanjutan, berkualitas dan ramah lingkungan. Hal ini menjadi faktor kunci dan pilar dalam mendukung pengembangan wilayah sebagai pendukung agenda transformasi pembangunan.

H. Mewujudkan kesinambungan pembangunan

Misi ini diwujudkan untuk menjamin kesinambungan pembangunan berdasarkan kaidah pelaksanaan menuju Aceh yang unggul melalui kolaborasi semua pemangku kepentingan pembangunan, disertai manajemen pembangunan berbasis risiko guna menjaga konsistensi dalam satu masa dan antar periode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan penguatan implementasi dan pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.

4.3. Visi Pemerintah Kabupaten Simeulue

Dengan memperhatikan visi misi nasional dan visi misi Pemerintah Aceh, kondisi Kabupaten Simeulue saat ini dan skenario tantangan dimasa 20 tahun yang akan datang, maka Pemerintah Kabupaten Simeulue menetapkan visi pembangunan jangka panjang Tahun 2025-2045, sebagai berikut :

“ SIMEULUE YANG MAJU, ISLAMI DAN BERKELANJUTAN”

Visi pembangunan Aceh tahun 2025 - 2045 adalah kondisi Kabupaten Simeulue Maju baik dari segi sumber daya manusia, ekonomi, Infrastruktur dan Tata Kelola Pemerintahan. Selain itu diharapkan pelaksanaan keistimewaan Aceh semakin kuat, dan diiringi dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selanjutnya penjelasan visi dapat diuraikan sebagai berikut.

1. MAJU

Merupakan Prinsip pembangunan yang berlandaskan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sumber daya manusia yang tangguh serta mendorong inovasi yang berdaya saing pada tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita masyarakat Simeulue dapat terwujud, terciptanya keadilan akan membawa dampak secara langsung bagi tercapainya masyarakat Simeulue yang makmur. Hal ini ditandai dengan basis sektor unggulan yang kuat, berdaya saing, dan nilai tambah tinggi. Hal tersebut didorong dengan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur, dan adopsi teknologi yang mendorong inovasi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga kapasitas tata kelola

pemerintah yang efektif dan berintegritas dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas.

2. ISLAMI

Bermakna bahwa, pada setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Simeulue dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip *good governance* serta dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Syari'at Islam secara Kaffah. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang madani, yaitu masyarakat yang adil, makmur, aman dan damai selaras dengan terciptanya aparatur pemerintahan yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

3. BERKELANJUTAN

Memiliki makna pembangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana, pengelolaan risiko dan adaptasi bencana, pengurangan limbah serta inovasi dan teknologi ramah lingkungan, serta edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan.

4.4. Sasaran Visi

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Simeulue yang Maju, Islami dan Berkelanjutan, sebagaimana yang tertuang dalam Visi RPJPD Simeulue Tahun 2025 – 2045. Ketercapaian visi ini dapat tercermin dari sasaran visi yang akan dicapai di akhir tahun 2045, diantaranya yaitu:

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita;
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan;
3. Syariat Islam;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat;
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*;

Tabel 4.1 Sasaran Visi RPJPD Simeulue Tahun 2025 – 2045

Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Peningkatan Pendapatan per Kapita;	PDRB per kapita (Rp Juta)	32	219,00
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	1.65-1.85	3.65-3.85
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,73-1,75	2,85 - 2,91
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	16,92	6,92
	Rasio gini (Indeks)	0,282	0,179

Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Syariat Islam	Persentase Pusat Dakwah yang Aktif	78,00	100,00
	Persentase dayah yang mandiri	5,88	56,88
Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	67,67	78,71
Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,82	81,1

Sumber : Bappeda, 2024

Tabel 4.2 Penyelarasan Sasaran Visi RPJPN dan RPJPD Tahun 2025 – 2045

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045				RPJPA Tahun 2025-2045				RPJP Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi		Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi		Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi		Baseline 2025	Target 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju				Peningkatan Pendapatan per Kapita				Peningkatan Pendapatan per Kapita			
	a	GNI Per Kapita (US\$)	5.500	23.000 – 30.300	a	PDRB per kapita (Rp Juta)	44.48-44.67	219.54-258.70	a	PDRB per kapita (Rp Juta)	32	219,00
	b	Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15	b	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEI)	55,01	498,83	b	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	1.65-1.85	3.65-3.85
	c	Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28	c	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	5.17-5.19	6.94-7.11	c	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,73-1,75	2,85 - 2,91
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan				Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan				Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan			
	a	Tingkat Kemiskinan (%)	6.0 - 7.0	0.5 - 0.8	a	Tingkat Kemiskinan (%)	10.78-11.28	0.08-0.58	a	Tingkat Kemiskinan (%)	15,32	0,5
	b	Rasio Gini (indeks)	0.379 – 0.382	0.377 – 0.320	b	Rasio gini (Indeks)	0.290-0.293	0.228-0.251	b	Rasio gini (Indeks)	0,282	0,179
	c	Kontribusi PDRB KTI (%)	21.5 (2022)	28,5	c	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,08	1,03				
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat				Syariat Islam				Syariat Islam			
	Global Power Index (peringkat)		34 (2023)	15 besar	a	Indeks Pembangunan Syariat	80,00 - 83,00	90,00 - 95,00	Persentase dayah yang mandiri		5,88	56,88
					b	Persentase dayah yang mandiri	44,00	95				
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat				Daya saing sumber daya manusia meningkat				Daya saing sumber daya manusia meningkat			
	Indeks Modal Manusia		0.54 (2022)	0,73	Indeks Modal Manusia		0,59	0,77	Indeks Pembangunan Manusia		72,1	96,75
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission				Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission				Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission			
	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)		38,6	93,5	Penurunan intensitas emisi GRK (%)		36,08	91,09	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		78,82	81,1
	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)		38,6									

Sumber : Bappeda, 2024

4.5. Misi

Dalam mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2025 – 2045, telah dirumuskan 8 (delapan) misi Pembangunan jangka panjang daerah sebagai penjabaran dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah yang telah ditetapkan.

Adapun Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2025–2045 sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan Transformasi Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Tinggi

Mewujudkan Transformasi sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing tinggi merupakan fondasi utama dalam mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat. Misi ini diwujudkan untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, berdaya saing dan sejahtera melalui Pendidikan yang berkualitas dan merata. Kesehatan untuk semua serta perlindungan sosial yang adaptif khususnya bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dengan fokus pada pendidikan yang merata dan berkualitas, pelatihan keterampilan, akses pelayanan kesehatan yang mudah serta pembangunan karakter yang kuat, dapat menghasilkan individu-individu yang memiliki kecakapan dan moralitas serta jiwa sosial yang tinggi. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia tidak hanya menciptakan tenaga kerja yang produktif dan inovatif, tetapi juga membentuk masyarakat yang bertanggung jawab, berempati, dan berkontribusi positif terhadap kemajuan sosial dan ekonomi..

Misi II : Mewujudkan Transformasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah

Mewujudkan transformasi peningkatan pembangunan ekonomi daerah diupayakan dengan peningkatan produktivitas ekonomi iptek dan inovasi, penerapan ekonomi hijau memanfaatkan digitalisasi, integrasi ekonomi domestic dan global serta menjadikan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, membangun dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi lokal (pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan), promosi investasi, pariwisata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk upaya peningkatan SDM ketenagakerjaan dan pengembangan balai latihan kerja, dapat meningkatkan produktivitas dan daya

saingnya di pasar global. Pentingnya kemitraan antara sektor publik dan swasta juga tidak bisa diabaikan, karena hal ini akan mempercepat inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Misi III : Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Yang Baik

Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik merupakan pondasi penting dalam membangun pelayanan publik masyarakat yang maju dan berkelanjutan. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang regulatif, berintegritas, adaptif efektif dan efisien. Hal ini dapat tercapai dengan cara antara lain adopsi praktik-praktik terbaik dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pelayanan publik,. Selain itu, peningkatan partisipasi publik dan penggunaan teknologi informasi yang canggih dapat mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan dinamis bagi peningkatan tata kelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Misi IV : Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi dan Pembangunan Syariat Islam

Misi ini diwujudkan untuk meningkatkan stabilitas keamanan daerah, pembangunan demokrasi yang mencakup segala hal dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, stabilitas ekonomi serta implementasi Syariat Islam di lingkungan pemerintah dan masyarakat. Stabilitas keamanan diupayakan dengan mengatasi ancaman keamanan melalui langkah pencegahan, penegakan hukum yang tegas, serta pendekatan inklusif. Karena stabilitas ekonomi merupakan aspek penting dalam membangun kesejahteraan daerah. Oleh karena itu, harus ada kerjasama dan soliditas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam memelihara stabilitas keamanan dan ekonomi daerah sehingga penyelenggaraan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.

Misi V : Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi

Misi ini diwujudkan dengan memperkuat ketahanan individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat, meningkatkan kerukunan hidup umat beragama, melestarikan nilai luhur budaya , meningkatkan pemberdayaan dan memenuhi hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia,

membangun karakter yang sadar lingkungan dan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi. Mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam serta melakukan pengelolaan dan melindungi lahan pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan pangan lestari daerah. Dengan membangun komunitas yang inklusif, produktif dan kesetaraan SDM yang saling mendukung, melestarikan warisan budaya dan keberagaman, serta menjaga keseimbangan ekologi dengan alam, menjaga ketahanan energi, air dan kemandirian pangan, kita dapat menciptakan fondasi yang kuat dan berkelanjutan serta merespon tantangan yang akan dihadapi untuk masa depan .

Misi VI : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan

Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diwujudkan untuk menciptakan kesetaraan dan kemakmuran bagi semua lapisan masyarakat. Perwujudan ini diarahkan pada pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, meningkatkan penatagunaan tanah serta pembangunan kawasan perkotaan dan pengembangan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi yang ada di daerah Kabupaten Simeulue. Fokus pada investasi infrastruktur yang merata , akses yang adil terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi dapat diperluas untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Selain itu, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan peluang yang merata bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup di seluruh wilayah. Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap wilayah dapat berkembang secara inklusif, menciptakan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan dan kemajuan yang berkelanjutan.

Misi VII : Mewujudkan Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan

Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan adalah langkah penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap layanan- layanan esensial. Dengan memperkuat infrastruktur

seperti rumah sakit, sekolah, jalan, dan fasilitas publik lainnya, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sanitasi yang berkualitas, dll.. Dengan demikian, peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat.

Misi VIII : Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah

Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah adalah misi yang mendasar dan penting bagi kemajuan jangka panjang suatu daerah. Hal ini melibatkan pengintegrasian keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan dan tindakan pembangunan disertai manajemen pembangunan berbasis risiko guna menjaga konsistensi dalam satu masa dan antar periode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan penguatan implementasi dan pembiayaan pembangunan secara berkesinambungan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti memprioritaskan efisiensi sumber daya, memperhatikan dampak sosial, dan melindungi lingkungan alam, masyarakat dapat menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, pemerataan akses terhadap layanan dasar, dan keseimbangan dengan ekologi.

Tabel 4.3 Penyelarasan Misi RPJPN dan RPJPD Tahun 2025-2045

No	Misi RPJPN 2025 - 2045	Misi RPJPA 2025 - 2045	Misi RPJP Kab. Simeulue 2025 - 20452
1	Transformasi Sosial,	Mewujudkan Transformasi sosial	Mewujudkan Transformasi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
2	Transformasi Ekonomi,	Mewujudkan transformasi ekonomi	Mewujudkan Transformasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah
3	Transformasi Tata Kelola,	Mewujudkan transformasi tata kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola yang baik
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia,	Mewujudkan keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan Implementasi Syariat Islam	Mewujudkan Kemanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi dan Pembangunan Syariat Islam
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan masyarakat Aceh yang berketahanan sosial budaya dan ekologis	Meningkatkan Ketahanan Sosial budaya dan Ekologi

No	Misi RPJPN 2025 - 2045	Misi RPJPA 2025 - 2045	Misi RPJP Kab. Simeulue 2025 - 20452
6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7	Sarana dan prasarana berkualitas dan Ramah Lingkungan,	Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8	Kesinambungan Pembangunan.	Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Pada bab sebelumnya telah dirumuskan visi dan misi pembangunan beserta uraian substansinya. Agar visi dan misi tersebut dalam diimplementasikan dalam kerangka pembangunan 20 tahun, maka perlu diuraikan berbagai arah kebijakan yang lebih teknis atas misi pembangunan. Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan. Namun demikian, urutan kerangka arah kebijakan yang disusun berikut dilandaskan pada kondisi optimis atas kondisi yang mungkin terjadi di masa depan yang terbagi dalam setiap periode 5 tahunan. Dengan demikian, maka tema pembangunan dapat berubah pada setiap periode mengikuti kondisi lingkungan yang relevan dan masih dalam batasan tema pembangunan yang disusun.



Gambar 5.1 Gambaran Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

Arah kebijakan pembangunan selama periode 20 tahun ke depan dibagi ke dalam 4 (empat) tema besar pembangunan meliputi Perkuatan Pondasi Transformasi, Percepatan Transformasi, Peningkatan Daya Saing dan yang terakhir Terwujudnya Kabupaten Simeulue yang Maju.

5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap I (Periode 2025 – 2029)

Tahapan pembangunan pertama merupakan “**Perkuatan Fondasi Transformasi**”. Pada tahap ini diharapkan memiliki dampak yang signifikan pada

Masyarakat Kabupaten Simeulue. Tahap awal ini arah kebijakan pembangunan difokuskan pada kebijakan pembangunan untuk memperkuat fondasi dalam tiga aspek kunci: sosial ekonomi, sumber daya manusia, dan infrastruktur dasar. Semua ini bertujuan agar Kabupaten Simeulue dapat mencapai status yang lebih maju.

Tahun 2025 menandai dimulainya babak baru dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Simeulue. Tahap I Periode Pembangunan 2025-2029, dengan fokus pada **"Perkuatan Fondasi Transformasi"**, baik itu sosil, ekonomi sarta tata kelola pemerintahan menjadi landasan penting untuk mewujudkan visi jangka panjang selama 20 tahun ke depan. Ibarat membangun rumah, tahap ini adalah fondasi yang kokoh, memastikan stabilitas dan ketahanan bagi kemajuan di masa depan.

1. Memperkuat Mewujudkan transformasi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

- a. Penguatan infrastruktur dasar kesehatan, sdm dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh Masyarakat;
- b. Penguatan infrastruktur dasar pendidikan, sdm guru dan tenaga kependidikan serta akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak peserta didik;
- c. Penguatan upaya perlindungan sosial masyarakat yang adaptif dan merata.

2. Mewujudkan Transformasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah.

- a. Penguatan kapasitas ilmu pengetahuan teknologi, inovasi serta produktifitas ekonomi;
- b. Penguatan pondasi dalam upaya penerapan ekonomi hijau;
- c. Pemenuhan akses digital diseluruh wilayah kabupaten;
- d. Peningkatan Integrasi ekonomi domestik dan global;
- e. Pengembangan desa desa dan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang baik

- a. Panataan regulasi dan perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi;
- b. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

4. Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan pembangunan Syariat Islam

- a. Perkuatan Perdamaian, Ketentraman dan Ketertiban yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial;
- b. Penguatan upaya perwujudan stabilitas ekonomi daerah;
- c. Penguatan pondasi pembangunan syariat Islam melalui pembinaan aqidah dan akhlak di kelembagaan formal dan informal.

5. Mewujudkan masyarakat Simeulue yang berketahanan sosial budaya dan ekologis

- a. Penguatan kerukunan beragama dan nilai kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat
- b. Penguatan pembangunan keluarga berkualitas, masyarakat inklusif dan penurunan ketimpangan gender
- c. Penguatan kapaisatas kelembagaan dan instrument kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas
- d. Penguatan instrumen kebijakan dalam mendukung ketahanan energi, air dan kemandirian pangan
- e. Penguatan kapaisatas kelembagaan dan instrument kebijakan pengelolaan kebencanaan dalam mewujudkan pemerintah dan masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim

6. Mewujudkan pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan

- a. Penguatan kelembagaan dan instrumen regulasi daerah yang lengkap dalam pengelolaan penataan ruang
- b. Pembangunan wilayah prioritas pada wilayah dengan potensi ekonomi tinggi atau wilayah terpencil berpenduduk

7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

- a. Penyediaan sarana dan prasarana konektivitas dan aksesibilitas yang merata dari pusat-pusat pelayanan menuju kawasan pengembangan
- b. Penyediaan infrastruktur dasar permukiman yang memadai meliputi rumah layak huni, air minum layak, sanitasi aman dan pengelolaan persampahan
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air yang memadai dan ramah lingkungan
- d. Mendukung ketersediaan sarana dan prasarana energi listrik dan jaringan telekomunikasi yang memadai dan menjangkau ke seluruh desa

8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah

- a. Pembiayaan pembangunan melalui transformasi tata kelola pendapatan daerah, optimalisasi PAD serta pembangunan daerah oleh non pemerintah dengan CSR.

Arah kebijakan pembangunan tersebut kemudian diuraikan kedalam arah kebijakan transformasi daerah sebagai berikut:

- a. Penguatan infrastruktur dasar kesehatan, sdm dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh Masyarakat.**
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar
 2. Promosi Kesehatan melalui perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
 3. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.
 4. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
 5. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
 6. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
- b. Penguatan infrastruktur dasar pendidikan, sdm guru dan tenaga kependidikan serta akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak peserta didik;**
1. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar.
 2. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana.
 3. Peningkatan iklim keamanan, iklim kebinekaan dan iklim inklusivitas di lingkungan sekolah dasar secara merata.
 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
 5. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
 6. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
- c. Penguatan upaya perlindungan sosial masyarakat yang adaptif dan merata.**
1. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan
 2. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas

3. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
 4. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat.
 5. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
- d. **Penguatan kapasitas ilmu pengetahuan teknologi, inovasi serta produktifitas ekonomi;**
1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian
 2. Peningkatan intensitas pelatihan tenaga kerja untuk memiliki kapasitas enterpreneur serta optimalisasi jaminan kesejahteraan tenaga kerja.
 3. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
 4. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
 5. Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
 6. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
 7. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam maupun wisata kultural, secara kolaboratif dan partisipatif.
 8. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.

9. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.
 10. Peningkatan produktivitas BUMD.
- e. **Penguatan pondasi dalam upaya penerapan ekonomi hijau;**
1. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
 2. Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.
 3. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
- f. **Pemenuhan akses digital diseluruh wilayah kabupaten;**
1. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
 2. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.
 3. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
- g. **Peningkatan Integrasi ekonomi domestik dan global;**
1. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang cukup untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (Jalan lingkar Simeulue kewenangan kabupaten , sarana transportasi penyeberanga dan sarana transfortasi darat yang memadai)

- h. Pengembangan desa desa dan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.**
 - 1. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan
 - 2. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
 - 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan
 - 4. Penguatan pengelolaan jalan Kabupaten dan jalan desa
- i. Panataan regulasi dan perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi;**
 - 1. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi
 - 2. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- j. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.**
 - 1. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - 2. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN berbasis merit
 - 3. Penguatan peran pemerintah desa dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
 - 4. Penguatan tapal batas wilayah administrasi kecamatan dan desa
 - 5. Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan
- k. Perkuatan Perdamaian, Ketentraman dan Ketertiban yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial;**
 - 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi
 - 2. Peningkatan peran dan fungsi KIP Simeulue dan Panitia Pengawas Pemilihan Simeulue
 - 3. Perkuatan pemerintahan mukim dan gampong sesuai dengan kewenangan daerah
 - 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran SatpolPP dan WH
- l. Penguatan upaya perwujudan stabilitas ekonomi daerah;**
 - 1. Penguatan pengendalian inflasi daerah.

2. Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
 3. Peningkatan Pajak Daerah
 4. Penguatan peran serta pelaku usaha menyiapkan dana pengembangan masyarakat, paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun yang dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah dan dananya tetap dikelola oleh perusahaan
- m. Penguatan pondasi pembangunan syariat Islam melalui pembinaan aqidah dan akhlak di kelembagaan formal dan informal**
1. Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, serta peningkatan melek Al Quran,
 2. Peningkatan Mutu dan Kemandirian Dayah
 3. Peningkatan Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal
 4. Peningkatan kapasitas Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Dinas Syariat Islam.
- n. Penguatan kerukunan beragama dan nilai kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat**
1. Penguatan kerukunan antar umat beragama, dan golongan
 2. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
 3. Penguatan upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan kebudayaan dan kesenian Simeulue
- o. Penguatan pembangunan keluarga berkualitas, masyarakat inklusif dan penurunan ketimpangan gender**
1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
 2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan

resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.

3. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.
4. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.

p. Penguatan kapaisatas kelembagaan dan instrument kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas

1. Penguatan partisipasi masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan
2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy
3. Implementasi pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
4. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung, hutan konservasi dan ekosistem alami.

q. Penguatan instrumen kebijakan dalam mendukung ketahanan energi, air dan kemandirian pangan

1. Peningkatan sumberdaya energi listrik serta pengembangan energi terbarukan
2. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
3. Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); peningkatan inovasi dan teknologi pertanian; dan pengembangan benih lokal

r. Penguatan kapaisatas kelembagaan dan instrument kebijakan pengelolaan kebencanaan dalam mewujudkan pemerintah dan masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim

1. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
2. Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu

3. Membangun kerjasama dengan pihak eksternal seperti organisasi lingkungan, lembaga riset, dan donor internasional untuk mendukung pembangunan berorientasi lingkungan dan energi terbarukan.
- s. **Penguatan kelembagaan dan instrumen regulasi daerah yang lengkap dalam pengelolaan penataan ruang**
 1. Penguatan kapasitas SDM dan regulasi penataan ruang
 2. Membangun kerjasama penyelenggaraan penataan ruang dengan pemerintahan desa dan masyarakat
 3. Pengendalian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah selaras
 - t. **Pembangunan wilayah prioritas pada wilayah dengan potensi ekonomi tinggi atau wilayah terpencil berpenduduk**
 1. Pembangunan wilayah prioritas pada wilayah dengan potensi ekonomi tinggi atau wilayah terpencil berpenduduk.
 - u. **Penyediaan sarana dan prasarana konektivitas dan aksesibilitas yang merata dari pusat-pusat pelayanan menuju kawasan pengembangan**
 1. Peningkatan kemantapan jalan lingkar Simeulue
 2. Peningkatan kemantapan jalan kabupaten Simeulue
 3. Peningkatan pelayanan angkutan darat dan pelayaaran
 - v. **Penyediaan infrastruktur dasar permukiman yang memadai meliputi rumah layak huni, air minum layak, sanitasi aman dan pengelolaan persampahan**
 1. Pembangunan dan peningkatan sarana utilitas umum kawasan permukiman, khususnya pada kawasan permukiman kumuh perkotaan
 2. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
 3. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
 4. Pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan
 - w. **Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air yang memadai dan ramah lingkungan**
 1. Pengelolaan dan konservasi sumber daya air yang terintegrasi, efisien dan berkelanjutan
 2. Pengeolaan kawasan hutan konservasi (Tahura Simeulue) secara partisipatif dan adaptif
 - x. **Mendukung ketersediaan sarana dan prasarana energi listrik dan jaringan telekomunikasi yang memadai dan menjangkau ke seluruh desa**

1. Dukungan pengembangan energi listrik terbarukan skala mikro khususnya pada wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil berpenduduk
 2. Pemenuhan perangkat pendukung telekomunikasi pada wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil berpenduduk
- z. Pembiayaan pembangunan melalui transformasi tata kelola pendapatan daerah, optimalisasi PAD serta pembangunan daerah oleh non pemerintah dengan CSR.**
1. Pembiayaan pembangunan melalui transformasi tata kelola pendapatan daerah , optimalisasi PAD serta pembangunan daerah oleh non pemerintah dengan CSR.

5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Periode 2030 - 2034

Pada tahap ini, dengan telah terwujudnya fondasi yang kuat, Kabupaten Simeulue bersiap untuk melakukan “**Percepatan Transformasi**”, dengan terus memperkuat fondasi sosial, ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur dasar dengan target pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 4%.

Percepatan transformasi sosial dititikberatkan pada peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan secara merata di seluruh kecamatan serta peningkatan perlindungan sosial. Selanjutnya pada Transformasi ekonomi difokuskan pada optimalisasi sumber pertumbuhan ekonomi baru di beberapa kecamatan serta pengembangan dan hilirisasi komoditas unggul secara berkelanjutan.

Transformasi tata kelola difokuskan pada Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi. Difokuskan pada terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proporsional, dan berkompeten, penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi.

Mewujudkan Kemanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi dan Pembangunan Syariat Islam”, Merupakan sssPeningkatan Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat dalam mendukung stabilitas keamanan, ketertiban, perdamaian dan ekonomi daerah yang didukung dengan peningkatan nilai Syariat Islam.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif; akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi Aceh untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi; penguatan pengawasan dan

penegakan hukum yang konsisten, meningkatnya manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana. Serta pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan memastikan untuk pelayanan dasar dan daya saing daerah.

Pembangunan wilayah difokuskan pada pemerataan dan pengembangan wilayah strategis untuk pertumbuhan ekonomi yang baru dan tata wilayah perkotaan, penguatan fungsi infrastruktur dan membangun konektivitas antar wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah Alafan dan Simeulue Barat dan wilayah transmigrasi di Teupah Selatan dan Simeulue Barat.

Dalam pembiayaan pembangunan terjadi optimalisasi sumber pendanaan pemerintah, terutama dana otonomi khusus dan telah berkembang sumber pendanaan non pemerintah, terutama investasi, CSR dan LSM Funding. Selanjutnya Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2030-2034 sedara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi

- a. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan secara merata, serta kesadaran hidup sehat di masyarakat;
- b. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan secara merata di seluruh kecamatan;
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial bagi masyarakat yang adaptif dan merata.

2. Mewujudkan Transformasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah.

- a. Peningkatan ilmu pengetahuan teknologi, inovasi, produktifitas dan daya saing ekonomi;
- b. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan ekonomi daerah;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi);
- d. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif;
- e. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pedesaan prioritas mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang baik

- a. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi terkait pelayanan public;
 - b. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi.
- 4. Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan pembangunan Syariat Islam**
- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas demokrasi serta ketertiban umum terutama fungsi peran Satpol PP dan WH;
 - b. Penguatan pengendalian inflasi daerah dan peningkatan PAD;
 - c. Peningkatan pembangunan Syariat Islam melalui penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.
- 5. Mewujudkan masyarakat Simeulue yang berketahanan sosial budaya dan ekologis**
- a. Penguatan kerukunan antar umat beragama dan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila;
 - b. Penguatan lingkungan pendukung keluarga agar dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif;
 - c. Penguatan konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas;
 - d. Peningkatan sumberdaya energi listrik serta pengembangan energi terbarukan;
 - e. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya bencana, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
- 6. Mewujudkan pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan**
- a. Peningkatan peran serta pemerintahan desa dan masyarakat dalam pengelolaan penataan ruang
 - b. Penataan kawasan perkotaan serta pengembangan wilayah pedesaan yang memiliki potensi unggulan dan karakteristik yang kuat.
- 7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**
- a. Peningkatan sarana dan prasarana konektivitas antar wilayah yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis tata ruang;
 - b. Peningkatan kualitas infratraktur dasar permukiman;
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air yang memadai dan ramah lingkungan;

- d. Mendukung upaya pengembangan energi listrik terbarukan skala mikro serta pemenuhan perangkat pendukung telekomunikasi pada wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil berpenduduk.

8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah

- a. Optimalisasi sumber pendanaan pemerintah, terutama dana otonomi khusus dan telah berkembangnya sumber pendanaan non pemerintah, terutama investasi, CSR dan LSM Funding.

Arah kebijakan pembangunan tersebut kemudian diuraikan kedalam arah kebijakan transformasi daerah sebagai berikut:

a. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan secara merata, serta kesadaran hidup sehat di masyarakat.

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar
2. Promosi Kesehatan melalui perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
3. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.
4. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
5. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
6. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.

b. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan secara merata di seluruh kecamatan;

1. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar.
2. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana.
3. Peningkatan iklim keamaan, iklim kebinekaan dan iklim inklusivitas di lingkungan sekolah dasar secara merata.
4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
5. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).

c. Peningkatan upaya perlindungan sosial bagi masyarakat yang adaptif dan merata.

1. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan
2. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas
3. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
4. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat.
5. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.

d. Peningkatan ilmu pengetahuan teknologi, inovasi, produktifitas dan daya saing ekonomi;

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian
2. Peningkatan upskilling dan re-skilling tenaga kerja melalui pengembangan Balai Latihan Kerja
3. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
4. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
5. Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
6. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas,

ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif

7. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam maupun wisata kultural, secara kolaboratif dan partisipatif.
 8. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
 9. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.
 10. Peningkatan produktivitas BUMD.
- e. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan ekonomi daerah;**
1. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
 2. Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.
 3. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
- f. Peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi)**
1. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
 2. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.

3. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
- g. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif;**
1. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang cukup untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (Jalan lingkar Simeulue kewenangan kabupaten , sarana transportasi penyeberanga dan sarana transfortasi darat yang memadai)
- h. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pedesaan prioritas mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah**
1. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan
 2. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan
 4. Penguatan pengelolaan jalan Kabupaten dan jalan desa
- i. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi terkait pelayanan public;**
1. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi
 2. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- j. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi.**
1. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 2. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN berbasis merit
 3. Penguatan peran pemerintah desa dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
 4. Penguatan tapal batas wilayah administrasi kecamatan dan desa
 5. Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan
- k. Peningkatan kuantitas dan kualitas demokrasi serta ketertiban umum terutama fungsi peran Satpol PP dan WH;**

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi
2. Peningkatan peran dan fungsi KIP Simeulue dan Panitia Pengawas Pemilihan Simeulue
3. Perkuatan pemerintahan mukim dan gampong sesuai dengan kewenangan daerah
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran SatpolPP dan WH

l. Peningkatan pengendalian inflasi daerah dan peningkatan PAD;

1. Penguatan pengendalian inflasi daerah.
2. Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
3. Peningkatan peran serta pelaku usaha menyiapkan dana pengembangan masyarakat, paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun yang dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah dan dananya tetap dikelola oleh perusahaan

m. Peningkatan pembangunan Syariat Islam melalui penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.

1. Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, serta peningkatan melek Al Quran,
2. Peningkatan Mutu dan Kemandirian Dayah
3. Peningkatan Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal
4. Peningkatan kapasitas Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Dinas Syariat Islam.
5. Penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.

n. Penguatan kerukunan antar umat beragama dan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.

1. Penguatan kerukunan antar umat beragama, dan golongan

2. Memperkuat peran dan fungsi Lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Simeulue di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
3. Penguatan upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan kebudayaan dan kesenian Simeulue

o. Penguatan lingkungan pendukung keluarga agar dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif

1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
3. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.
4. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.

p. Penguatan konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas.

1. Penguatan partisipasi masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan
2. Penguatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut; perizinan budidaya; pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil
3. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy
4. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung, hutan konservasi dan ekosistem alami.
5. Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); peningkatan inovasi dan teknologi pertanian; dan pengembangan benih lokal

q. Peningkatan sumberdaya energi listrik serta pengembangan energi terbarukan

1. Peningkatan sumberdaya energi listrik serta pengembangan energi terbarukan

2. Membangun kerjasama dengan pihak eksternal seperti organisasi lingkungan, lembaga riset, dan donor internasional untuk mendukung pembangunan berorientasi lingkungan dan energi terbarukan.
- r. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya bencana, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi**
1. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
 2. Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu
 3. Membangun kerjasama dengan pihak eksternal seperti organisasi lingkungan, lembaga riset, dan donor internasional untuk mendukung pembangunan berorientasi lingkungan dan energi terbarukan.
- s. Peningkatan peran serta pemerintahan desa dan masyarakat dalam pengelolaan penataan ruang**
1. Peningkatan kapasitas SDM dan regulasi penataan ruang
 2. Peningkatan kerjasama penyelenggaraan penataan ruang dengan pemerintahan desa dan masyarakat
 3. Pengendalian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah selaras
- t. Penataan kawasan perkotaan serta pengembangan wilayah pedesaan yang memiliki potensi unggulan dan karakteristik yang kuat**
1. Pembangunan wilayah prioritas pada wilayah dengan potensi ekonomi tinggi atau wilayah terpencil berpenduduk.
- u. Peningkatan sarana dan prasarana konektivitas antar wilayah yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis tata ruang**
1. Peningkatan kemantapan jalan lingkar Simeulue
 2. Peningkatan kemantapan jalan kabupaten Simeulue
 3. Peningkatan pelayanan angkutan darat dan pelayaaran
- v. Peningkatan kualitas infratraktur dasar permukiman**
1. Peningkatan sarana utilitas umum kawasan permukiman, khususnya pada kawasan permukiman kumuh perkotaan

2. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
 3. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
 4. Pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan
- w. **Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air yang memadai dan ramah lingkungan**
1. Pengelolaan dan konservasi sumber daya air yang terintegrasi, efisien dan berkelanjutan
 2. Pengelolaan kawasan hutan konservasi (Tahura Simeulue) secara partisipatif dan adaptif
- x. **Mendukung upaya pengembangan energi listrik terbarukan skala mikro serta pemenuhan perangkat pendukung telekomunikasi pada wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil berpenduduk**
1. Dukungan pengembangan energi listrik terbarukan skala mikro khususnya pada wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil berpenduduk
 2. Pemenuhan perangkat pendukung telekomunikasi pada wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil berpenduduk
- y. **Optimalisasi sumber pendanaan pemerintah, terutama dana otonomi khusus dan telah berkembangnya sumber pendanaan non pemerintah, terutama investasi, CSR dan LSM Funding.**
1. Pemantapan dan perluasan cakupan sektor pembangunan yang menggunakan sumber dana non pemerintah, terutama investasi, CSR, LSM Funding.

5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Periode 2035 – 2039

Pada tahap III Periode Pembangunan Tahun 2035 – 2039 yaitu “**Peningkatan Daya Saing**”, setelah tahapan Perkuatan Fondasi dan Percepatan Transformasi terwujud, selanjutnya diarahkan pada peningkatan daya saing daerah.

Simeulue, bagaikan mutiara tersembunyi di barat Indonesia, memiliki potensi luar biasa untuk menjadi wilayah yang sejahtera dan maju. Untuk mewujudkannya, diperlukan upaya terarah dan berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing daerah.

Peningkatan daya saing daerah merupakan lokomotif utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial berkelanjutan. Daya saing yang kuat akan menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan fokus yang tepat, strategi yang komprehensif, dan kolaborasi yang kuat, Simeulue dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjadi daerah yang lebih berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

Arah kebijakan pembangunan daerah pada tahap III periode tahun 2035 – 2039 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi

- a. Pengembangan akses dan mutu layanan kesehatan secara merata, serta kesadaran hidup sehat di masyarakat.
- b. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan berbasis digital.
- c. Percepatan upaya perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan

2. Mewujudkan Transformasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah.

- a. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, perikanan, industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
- b. Pengembangan Ekonomi hijau untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing dalam pola pembangunan berkelanjutan Peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi)
- c. Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).
- d. Penerapan teknologi dan kemitraan usaha dalam upaya pengembangan peran UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global
- e. Pengelolaan kawasan perkotaan secara inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan kemandirian desa

3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang baik

- a. Penguatan kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang proporsional, dan berkompeten.
- b. Percepatan digitalisasi layanan publik dan penguatan infrastruktur pemerintahan digital

4. Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan pembangunan Syariat Islam

- a. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum, serta pengawasan khususnya di wilayah perairan laut terhadap illegal fishing.
- b. Peningkatan peran serta pelaku usaha menyiapkan dana pengembangan masyarakat.

- c. Peningkatan pembangunan Syariat Islam melalui optimalisasi peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia yang baik.

5. Mewujudkan masyarakat Simeulue yang berketahanan sosial budaya dan ekologis

- a. Peningkatan peran dan fungsi Lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Simeulue
- b. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan.
- c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan upaya pelestarian lingkungan hidup.
- d. Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut yang ramah lingkungan.
- e. Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu

6. Mewujudkan pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan

- a. Pengembangan kapasitas pemerintahan desa dalam perencanaan dan pengelolaan penataan ruang
- b. Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan yang diprioritaskan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

- a. Pengembangan sarana dan prasarana konektivitas dan aksesibilitas yang terintegrasi dengan infrastruktur lainnya.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana dasar permukiman pada kawasan perkotaan
- c. Pengembangan pengusahaan sumber daya air oleh pemerintah, dan pemerintah desa dan Masyarakat
- d. Peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam penghematan penggunaan energi listrik serta kepedulian masyarakat dalam menjaga infrastruktur ketenagalistrikan yang telah terbangun.

8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah

- a. Peningkatan cakupan sektor pembangunan yang memanfaatkan sumber dana non pemerintah, terutama investasi, CSR, LSM Funding.

Arah kebijakan pembangunan tersebut kemudian diuraikan kedalam arah kebijakan transformasi daerah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pengembangan akses dan mutu layanan kesehatan secara merata, serta kesadaran hidup sehat di masyarakat.

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar
2. Promosi Kesehatan melalui perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. Pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan, terutama sarana rekreasi dan olah raga.
3. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.
4. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
5. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
6. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
7. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan
8. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

**b. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan berbasis digital
Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar.**

1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
3. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana.
4. Peningkatan iklim keamaan, iklim kebinekaan dan iklim inklusivitas di lingkungan sekolah dasar secara merata.
5. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
6. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.

7. Promosi Literasi, peningkatan Akses terhadap Bahan Bacaan, dan Ketersediaan dan Kualitas Buku, Integrasi Literasi dalam Kurikulum Pendidikan serta Pembangunan Keterampilan Literasi Digital,
 8. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.
- c. Percepatan upaya perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan**
1. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan
 2. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
 3. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat.
 4. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
 5. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
 6. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
- d. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, perikanan, industri pariwisata dan ekonomi kreatif:**
1. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
 2. Peningkatan upskilling dan re-skilling tenaga kerja melalui pengembangan Balai Latihan Kerja
 3. Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian
- Penyediaan bibit dan varietas unggul

untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.

4. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
5. Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan
6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang kepariwisataan untuk mendukung Program Sapta Pesona
7. Peningkatan infrastruktur pariwisata dan Pengembangan Destinasi Wisata
8. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
9. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
10. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.
11. Peningkatan produktivitas BUMD.

e. Pengembangan Ekonomi hijau untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing dalam pola pembangunan berkelanjutan.

1. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
2. Peningkatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.
3. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.

f. Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).

1. Peningkatan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis.

2. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
3. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.
4. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
5. Peningkatan kapasitas tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan peluang lapangan kerja digital.

g. Penerapan teknologi dan kemitraan usaha dalam upaya pengembangan peran UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global

1. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang cukup untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (Jalan lingkar Simeulue kewenangan kabupaten , sarana transportasi penyeberanga dan sarana transfortasi darat yang memadai)
2. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.
3. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.

h. Pengelolaan kawasan perkotaan secara inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan kemandirian desa

1. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan

2. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan
 4. Peningkatan pengelolaan jalan Kabupaten dan jalan desa
 5. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
- i. Penguatan kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang proporsional, dan berkompeten;**
1. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
 2. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- j. Percepatan digitalisasi layanan publik dan penguatan infrastruktur pemerintahan digital.**
1. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
 2. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN berbasis merit
 3. Pengembangan karir ASN melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
 4. Peningkatan kepatuhan seluruh pihak, terutama lembaga pemerintah untuk menjalankan amanah dari setiap dokumen perencanaan
- k. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum, serta pengawasan khususnya di wilayah perairan laut terhadap illegal fishing;**
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi
 2. Peningkatan peran dan fungsi KIP Simeulue dan Panitia Pengawas Pemilihan Simeulue
 3. Penguatan peran pemerintah desa dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran Satpol PP dan WH
 5. Peningkatan pengawasan di wilayah perairan laut terhadap illegal fishing

- l. Peningkatan peran serta pelaku usaha menyiapkan dana pengembangan masyarakat;**
1. Penguatan pengendalian inflasi daerah.
 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
 3. Peningkatan Pajak Daerah
 4. Penguatan peran serta pelaku usaha menyiapkan dana pengembangan masyarakat, paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun yang dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah dan dananya tetap dikelola oleh perusahaan
- m. Peningkatan pembangunan Syariat Islam melalui optimalisasi peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia yang baik.**
1. Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, serta peningkatan melek Al Quran,
 2. Peningkatan Mutu dan Kemandirian Dayah
 3. Peningkatan Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal
 4. Peningkatan kapasitas Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Dinas Syariat Islam.
- n. Penguatan Peningkatan peran dan fungsi Lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Simeulue**
1. Penguatan kerukunan antar umat beragama, dan golongan
 2. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
 3. Penguatan upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan kebudayaan dan kesenian Simeulue
- o. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan**

1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
 2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
 3. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.
 4. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
- p. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan upaya pelestarian lingkungan hidup.**
1. Penguatan partisipasi masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan
 2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy
 3. Implementasi pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
 4. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung, hutan konservasi dan ekosistem alami.
- q. Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut yang ramah lingkungan**
1. Peningkatan sumberdaya energi listrik serta pengembangan energi terbarukan
 2. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
 3. Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); peningkatan inovasi dan teknologi pertanian; dan pengembangan benih lokal
- r. Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu**
1. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.

2. Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu
 3. Membangun kerjasama dengan pihak eksternal seperti organisasi lingkungan, lembaga riset, dan donor internasional untuk mendukung pembangunan berorientasi lingkungan dan energi terbarukan.
- s. Pengembangan kapasitas pemerintahan desa dalam perencanaan dan pengelolaan penataan ruang**
1. Penguatan kapasitas SDM dan regulasi penataan ruang
 2. Membangun kerjasama penyelenggaraan penataan ruang dengan pemerintahan desa dan masyarakat.
 3. Pengendalian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah selaras
- t. Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan yang diprioritaskan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru**
1. Pembangunan wilayah prioritas pada wilayah dengan potensi ekonomi tinggi atau wilayah terpencil berpenduduk.
- u. Pengembangan sarana dan prasarana konektivitas dan aksesibilitas yang terintegrasi dengan infrastruktur lainnya**
1. Peningkatan kemantapan jalan lingkar Simeulue
 2. Peningkatan kemantapan jalan kabupaten Simeulue
 3. Peningkatan pelayanan angkutan darat dan pelayaaran
- v. Pengembangan sarana dan prasarana dasar permukiman pada kawasan perkotaan**
1. Pembangunan dan peningkatan sarana utilitas umum kawasan permukiman, khususnya pada kawasan permukiman kumuh perkotaan
 2. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
 3. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
 4. Pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan
- w. Pengembangan pengusahaan sumber daya air oleh pemerintah, dan pemerintah desa dan Masyarakat**
1. Pengelolaan dan konservasi sumber daya air yang terintegrasi, efisien dan berkelanjutan
 2. Pengeolaan kawasan hutan konservasi (Tahura Simeulue) secara partisipatif dan adaptif

- x. **Peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam penghematan penggunaan energi listrik serta kepedulian masyarakat dalam menjaga infrastruktur ketenagalistrikan yang telah terbangun**
 - 1. Dukungan pengembangan energi listrik terbarukan skala mikro khususnya pada wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil berpenduduk
 - 2. Pemenuhan perangkat pendukung telekomunikasi pada wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil berpenduduk
- y. **Peningkatan cakupan sektor pembangunan yang memanfaatkan sumber dana non pemerintah, terutama investasi, CSR, LSM Funding.**
 - 1. Pemantapan dan perluasan cakupan sektor pembangunan yang menggunakan sumber dana non pemerintah, terutama investasi, CSR, LSM Funding

5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Periode 2040 – 2045

Pada tahap IV Periode Pembangunan Tahun 2040 – 2045 yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Simeulue yang Maju**”, merupakan tahapan terakhir dimana pencapaian pembangunannya dititik beratkan dengan fokus pada pengembangan masyarakat yang, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, inovasi dan berdaya saing global, Simeulue akan menjadi daerah yang maju, di mana setiap individu dapat hidup berkualitas, berdaya, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif.

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan daerah pada tahap IV periode tahun 2040 – 2045 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi**
 - a. Pemantapan akses dan mutu layanan kesehatan secara merata, serta kesadaran hidup sehat masyarakat.
 - b. Pemantapan layanan pendidikan yang merata berbasis digital.
 - c. Pemantapan upaya perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan,
 - d. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan
- 2. Mewujudkan Transformasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah.**
 - a. Modernisasi pertanian dan implementasi teknologi dalam pengembangan industri pertanian, perikanan dan pariwisata.
 - b. Pemantapan ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui penguatan riset dan penggunaan energi terbarukan secara berkelanjutan

- c. Perluasan pemanfaatan teknologi digital di berbagai aspek kehidupan, penguatan riset dan inovasi digital
- d. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
- e. Peningkatan aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal serta pengelolaan persampahan dan sanitasi yang terintegrasi di kawasan perkotaan.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang baik

- a. Penguatan kelembagaan yang adaptif serta peningkatan kompetensi SDM ASN.
- b. Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi, berintegritas dan adaptif

4. Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan pembangunan Syariat Islam

- a. Peningkatan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung stabilitas keamanan, ketertiban, dan stabilitas ekonomi daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb).
- c. Pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh melalui penegakan hukum syariat Islam.

5. Mewujudkan masyarakat Simeulue yang berketahanan sosial budaya dan ekologis

- a. Pemantapan upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan kebudayaan dan kesenian Simeulue
- b. Peningkatan adaptasi manusia, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam Pembangunan
- c. Akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup ketahanan pangan, air, dan energi.
- d. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.

- e. Peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim

6. Mewujudkan pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan

- a. Pemantapan peruntukan ruang sesuai dengan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang.
- b. Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan yang diprioritaskan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

- a. Pemantapan sarana dan prasarana konektivitas dan aksesibilitas yang terintegrasi dan adaptif terhadap kondisi lingkungan.
- b. Pemantapan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan yang ramah lingkungan
- c. Pemantapan pengusahaan dan konservasi sumber daya air yang terintegrasi dan ramah lingkungan
- d. Mendukung peningkatan proporsi penggunaan energi listrik terbarukan dan peningkatan upaya kemandirian energi.

8. Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Daerah

- a. Pemantapan dan perluasan cakupan sektor pembangunan yang menggunakan sumber dana non pemerintah, terutama investasi, CSR, LSM Funding.

Arah kebijakan pembangunan tersebut kemudian diuraikan kedalam arah kebijakan transformasi daerah sebagai berikut:

a. Pemantapan akses dan mutu layanan kesehatan secara merata, serta kesadaran hidup sehat masyarakat.

- 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar
- 2. Promosi Kesehatan melalui perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. Pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan, terutama sarana rekreasi dan olah raga.
- 3. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.
- 4. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.

5. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
6. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan
7. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
8. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan

b. Pemantapan layanan pendidikan yang merata berbasis digital.

1. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana.
2. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
3. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
4. Peningkatan iklim keamanan, iklim kebinekaan dan iklim inklusivitas di lingkungan sekolah dasar secara merata.
5. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
6. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
7. Dukungan Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).
8. Pemberian bantuan keuangan atau beasiswa bagi siswa yang ingin mengikuti pendidikan vokasi namun menghadapi kendala finansial

c. Pemantapan upaya perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan

1. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan
2. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas
3. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
4. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga,

bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat.

5. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.

d. Modernisasi pertanian dan implementasi teknologi dalam pengembangan industri pertanian, perikanan dan pariwisata:

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian,
2. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
3. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
4. Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
5. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
6. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam maupun wisata kultural, secara kolaboratif dan partisipatif.
7. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
8. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.
9. Peningkatan produktivitas BUMD.

e. Pemantapan ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui penguatan riset dan penggunaan energi terbarukan secara berkelanjutan

1. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
 2. Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.
 3. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
- f. Perluasan pemanfaatan teknologi digital di berbagai aspek kehidupan, penguatan riset dan inovasi digital**
1. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
 2. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.
 3. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
 4. Peningkatan kapasitas tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan peluang lapangan kerja digital.
- g. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global**
1. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang cukup untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (Jalan lingkaran Simeulue kewenangan kabupaten, sarana transportasi penyeberangan dan sarana transportasi darat yang memadai)

- h. Peningkatan aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal serta pengelolaan persampahan dan sanitasi yang terintegrasi di kawasan perkotaan**
1. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan
 2. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan
 4. Penguatan pengelolaan jalan Kabupaten dan jalan desa
- i. Penguatan kelembagaan yang adaptif serta peningkatan kompetensi SDM ASN;**
1. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi
 2. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- j. Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi, berintegritas dan adaptif.**
1. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 2. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN berbasis merit
 3. Penguatan peran pemerintah desa dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
 4. Penguatan tapal batas wilayah administrasi kecamatan dan desa
 5. Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan
- k. Peningkatan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung stabilitas keamanan, ketertiban, dan stabilitas ekonomi daerah;**
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi
 2. Peningkatan peran dan fungsi KIP Simeulue dan Panitia Pengawas Pemilihan Simeulue
 3. Perkuatan pemerintahan mukim dan gampong sesuai dengan kewenangan daerah
 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran SatpolPP dan WH

- l. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb);**
 1. Penguatan pengendalian inflasi daerah.
 2. Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
 3. Penguatan peran serta pelaku usaha menyiapkan dana pengembangan masyarakat, paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun yang dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah dan dananya tetap dikelola oleh perusahaan
- m. Pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh melalui penegakan hukum syariat Islam.**
 1. Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, serta peningkatan melek Al Quran,
 2. Peningkatan Mutu dan Kemandirian Dayah
 3. Peningkatan Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal
 4. Peningkatan kapasitas Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Dinas Syariat Islam.
- n. Pemantapan upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan kebudayaan dan kesenian Simeulue**
 1. Penguatan kerukunan antar umat beragama, dan golongan
 2. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
 3. Penguatan upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan kebudayaan dan kesenian Simeulue
- o. Peningkatan adaptasi manusia, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam Pembangunan**

1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
 2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
 3. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.
 4. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
- p. Akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup ketahanan pangan, air, dan energi.**
1. Penguatan partisipasi masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan
 2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy
 3. Implementasi pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
 4. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung, hutan konservasi dan ekosistem alami.
- q. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air**
1. Peningkatan sumberdaya energi listrik serta pengembangan energi terbarukan
 2. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
 3. Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); peningkatan inovasi dan teknologi pertanian; dan pengembangan benih lokal
- r. Peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim**
1. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.

2. Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu
 3. Membangun kerjasama dengan pihak eksternal seperti organisasi lingkungan, lembaga riset, dan donor internasional untuk mendukung pembangunan berorientasi lingkungan dan energi terbarukan.
- s. Pemantapan peruntukan ruang sesuai dengan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang**
1. Penguatan kapasitas SDM dan regulasi penataan ruang
 2. Membangun kerjasama penyelenggaraan penataan ruang dengan pemerintahan desa dan masyarakat
 3. Pengendalian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah selaras
- t. Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan yang diprioritaskan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru**
1. Pembangunan wilayah prioritas pada wilayah dengan potensi ekonomi tinggi atau wilayah terpencil berpenduduk.
- u. Pemantapan sarana dan prasarana konektivitas dan aksesibilitas yang terintegrasi dan adaptif terhadap kondisi lingkungan**
1. Peningkatan kemandapan jalan lingkar Simeulue
 2. Peningkatan kemandapan jalan kabupaten Simeulue
 3. Peningkatan pelayanan angkutan darat dan pelayaaran
- v. Pemantapan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan yang ramah lingkungan**
1. Pembangunan dan peningkatan sarana utilitas umum kawasan permukiman, khususnya pada kawasan permukiman kumuh perkotaan
 2. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
 3. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
 4. Pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan
- w. Pemantapan pengusahaan dan konservasi sumber daya air yang terintegrasi dan ramah lingkungan**
1. Pengelolaan dan konservasi sumber daya air yang terintegrasi, efisien dan berkelanjutan
 2. Pengeolaan kawasan hutan konservasi (Tahura Simeulue) secara partisipatif dan adaptif
- x. Mendukung peningkatan proporsi penggunaan energi listrik terbarukan dan peningkatan upaya kemandirian energi**

1. Dukungan pengembangan energi listrik terbarukan skala mikro khususnya pada wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil berpenduduk
 2. Pemenuhan perangkat pendukung telekomunikasi pada wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil berpenduduk
- y. **Pemantapan dan perluasan cakupan sektor pembangunan yang menggunakan sumber dana non pemerintah, terutama investasi, CSR, LSM Funding.**
1. Pemantapan dan perluasan cakupan sektor pembangunan yang menggunakan sumber dana non pemerintah, terutama investasi, CSR, LSM Funding
- Arah kebijakan pembangunan daerah pada tahap I, II, III dan IV RPJPD Kabupaten Simeulue periode tahun 2025 – 2045 dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1. Arah Kebijakan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
SIMEULUE MAJU, ISLAMI DAN BERKELANJUTAN	Mewujudkan Transformasi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	1. Penguatan infrastruktur dasar kesehatan, sdm dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat	1. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan secara merata, serta kesadaran hidup sehat di masyarakat.	1. Pengembangan akses dan mutu layanan kesehatan secara merata, serta kesadaran hidup sehat di masyarakat.	1. Pemantapan akses dan mutu layanan kesehatan secara merata, serta kesadaran hidup sehat masyarakat.
		2. Penguatan infrastruktur dasar pendidikan, sdm guru dan tenaga kependidikan serta akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak peserta didik,	2. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan secara merata di seluruh kecamatan	2. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan berbasis digital	2. Pemantapan layanan pendidikan yang merata berbasis digital;
		3. Penguatan upaya perlindungan sosial masyarakat yang adaptif dan merata	3. Peningkatan upaya perlindungan sosial bagi masyarakat yang adaptif dan merata	3. Percepatan upaya perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan,	3. Pemantapan upaya perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan,
	Mewujudkan Transformasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah	1. Penguatan kapasitas ilmu pengetahuan teknologi, inovasi serta produktifitas ekonomi	1. Peningkatan ilmu pengetahuan teknologi, inovasi , produktifitas dan daya saing ekonomi	1. 'Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, perikanan, industri pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Modernisasi pertanian dan implementasi teknologi dalam pengembangan industri pertanian, perikanan dan pariwisata

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		2. Penguatan pondasi dalam upaya penerapan ekonomi hijau	2. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan ekonomi daerah	Pengembangan Ekonomi hijau untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing dalam pola pembangunan berkelanjutan	2. Pemantapan ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui penguatan riset dan penggunaan energi terbarukan secara berkelanjutan
		3. Pemenuhan akses digital diseluruh wilayah kabupaten	3. Peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi)	3. Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).	3. Perluasan pemanfaatan teknologi digital di berbagai aspek kehidupan, penguatan riset dan inovasi digital
		4. Peningkatan Integrasi ekonomi domestik dan global	4. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif	4. Penerapan teknologi dan kemitraan usaha dalam upaya pengembangan peran UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global	4. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
		5. Pengembangan desa desa dan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	5. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pedesaan prioritas mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah	5. Pengelolaan kawasan perkotaan secara inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan kemandirian desa	5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal serta pengelolaan persampahan dan sanitasi yang terintegrasi di kawasan perkotaan.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Mewujudkan transformasi tata kelola yang baik	1. Panataan regulasi dan perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi	1. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi terkait pelayanan publik	1. Penguatan kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang proporsional, dan berkompeten.	1. Penguatan kelembagaan yang adaptif serta peningkatan kompetensi SDM ASN
		2. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	2. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi.	2. Percepatan digitalisasi layanan publik dan penguatan infrastruktur pemerintahan digital	2. Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi, berintegritas dan adaptif.
	Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan pembangunan Syariat Islam	1. Perkuatan Perdamaian, Ketentraman dan Ketertiban yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas demokrasi serta ketertiban umum terutama fungsi peran SatpolPP dan WH	1. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum, serta pengawasan khususnya di wilayah perairan laut terhadap illegal fishing	1. Peningkatan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung stabilitas keamanan, ketertiban, dan stabilitas ekonomi daerah
		2. Penguatan upaya perwujudan stabilitas ekonomi daerah	2. Penguatan pengendalian inflasi daerah dan peningkatan PAD	2. Peningkatan peran serta pelaku usaha menyiapkan dana pengembangan masyarakat	2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb)

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		3. Penguatan pondasi pembangunan syariat Islam melalui pembinaan aqidah dan akhlak di kelembagaan formal dan informal.	3. Peningkatan pembangunan Syariat Islam melalui penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.	3. Peningkatan pembangunan Syariat Islam melalui optimalisasi peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia yang baik;	3. Pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh melalui penegakan hukum syariat Islam. ;
	Mewujudkan masyarakat Simeulue yang berketahanan sosial budaya dan ekologis	1. Penguatan kerukunan beragama dan nilai kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat	1. Penguatan kerukunan antar umat beragama dan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	1. Peningkatan peran dan fungsi Lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Simeulue	1. Pemantapan upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan kebudayaan dan kesenian Simeulue
		2. Penguatan pembangunan keluarga berkualitas, masyarakat inklusif dan penurunan ketimpangan gender	2. Penguatan lingkungan pendukung keluarga agar dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif;	2. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	2. Peningkatan adaptasi manusia, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
		3. Penguatan kapabilitas kelembagaan dan instrument kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas;	3. Penguatan konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas	3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan upaya pelestarian lingkungan hidup.	3. Akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup ketahanan pangan, air, dan energi;

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		4. Penguatan instrumen kebijakan dalam mendukung ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	4. Peningkatan sumberdaya energi listrik serta pengembangan energi terbarukan	4. Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut yang ramah lingkungan	4. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
		5. Penguatan kapabilitas kelembagaan dan instrument kebijakan pengelolaan kebencanaan dalam mewujudkan pemerintah dan masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim.	5. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya bencana, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	5. Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu	5. Peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim;

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Mewujudkan pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Penataan Kawasan perkotaan dan pengembangan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	Penataan kawasan perkotaan serta pengembangan wilayah pedesaan yang memiliki potensi unggulan dan karakteristik yang kuat.	Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan yang diprioritaskan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan yang diprioritaskan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru
	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Penyediaan Sarana dan prasarana konektivitas dan aksesibilitas yang mantap dan terintegrasi dari pusat-pusat pelayanan menuju kawasan pengembangan	Peningkatan sarana dan prasarana konektivitas antar wilayah yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis tata ruang.	Pengembangan sarana dan prasarana konektivitas dan aksesibilitas yang terintegrasi dengan infrastruktur lainnya	Pemantapan sarana dan prasarana konektivitas dan aksesibilitas yang terintegrasi dan adaptif terhadap kondisi lingkungan
	Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan Daerah	Pembiayaan pembangunan melalui transformasi tata kelola pendapatan daerah, optimalisasi PAD serta pembangunan daerah oleh non pemerintah dengan CSR.	Optimalisasi sumber pendanaan pemerintah, terutama dana otonomi khusus dan telah berkembangnya sumber pendanaan non pemerintah, terutama investasi, CSR dan LSM Funding.	Peningkatan cakupan sektor pembangunan yang memanfaatkan sumber dana non pemerintah, terutama investasi, CSR, LSM Funding.	Pemantapan dan perluasan cakupan sektor pembangunan yang menggunakan sumber dana non pemerintah, terutama investasi, CSR, LSM Funding.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
SIMEULUE MAJU, ISLAMI DAN BERKELANJUTAN	Mewujudkan Transformasi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	1. Penguatan infrastruktur dasar kesehatan, sdm dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat	1. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan secara merata, serta kesadaran hidup sehat di masyarakat.	1. Pengembangan akses dan mutu layanan kesehatan secara merata, serta kesadaran hidup sehat di masyarakat.	1. Pemantapan akses dan mutu layanan kesehatan secara merata, serta kesadaran hidup sehat masyarakat.
		2. Penguatan infrastruktur dasar pendidikan, sdm guru dan tenaga kependidikan serta akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak peserta didik,	2. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan secara merata di seluruh kecamatan	2. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan berbasis digital	2. Pemantapan layanan pendidikan yang merata berbasis digital;
		3. Penguatan upaya perlindungan sosial masyarakat yang adaptif dan merata	3. Peningkatan upaya perlindungan sosial bagi masyarakat yang adaptif dan merata	3. Percepatan upaya perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan,	3. Pemantapan upaya perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan,
	Mewujudkan Transformasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah	1. Penguatan kapasitas ilmu pengetahuan teknologi, inovasi serta produktifitas ekonomi	1. Peningkatan ilmu pengetahuan teknologi, inovasi, produktifitas dan daya saing ekonomi	1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, perikanan, industri pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Modernisasi pertanian dan implementasi teknologi dalam pengembangan industri pertanian, perikanan dan pariwisata

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		2. Penguatan pondasi dalam upaya penerapan ekonomi hijau	2. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan ekonomi daerah	Pengembangan Ekonomi hijau untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing dalam pola pembangunan berkelanjutan	2. Pemantapan ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui penguatan riset dan penggunaan energi terbarukan secara berkelanjutan
		3. Pemenuhan akses digital diseluruh wilayah kabupaten	3. Peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi)	3. Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).	3. Perluasan pemanfaatan teknologi digital di berbagai aspek kehidupan, penguatan riset dan inovasi digital
		4. Peningkatan Integrasi ekonomi domestik dan global	4. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif	4. Penerapan teknologi dan kemitraan usaha dalam upaya pengembangan peran UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global	4. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
		5. Pengembangan desa desa dan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	5. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pedesaan prioritas mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah	5. Pengelolaan kawasan perkotaan secara inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan kemandirian desa	5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal serta pengelolaan persampahan dan sanitasi yang terintegrasi di kawasan perkotaan.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Mewujudkan transformasi tata kelola yang baik	1. Panataan regulasi dan perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi	1. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi terkait pelayanan publik	1. Penguatan kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang proporsional, dan berkompeten.	1. Penguatan kelembagaan yang adaptif serta peningkatan kompetensi SDM ASN
		2. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	2. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi.	2. Percepatan digitalisasi layanan publik dan penguatan infrastruktur pemerintahan digital	2. Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi, berintegritas dan adaptif.
	Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan pembangunan Syariat Islam	1. Perkuatan Perdamaian, Ketentraman dan Ketertiban yang tangguh, dan Demokrasi Substansial	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas demokrasi serta ketertiban umum terutama fungsi peran SatpolPP dan WH	1. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum, serta pengawasan khususnya di wilayah perairan laut terhadap illegal fishing	1. Peningkatan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung stabilitas keamanan, ketertiban, dan stabilitas ekonomi daerah
		2. Penguatan upaya perwujudan stabilitas ekonomi daerah	2. Penguatan pengendalian inflasi daerah dan peningkatan PAD	2. Peningkatan peran serta pelaku usaha menyiapkan dana pengembangan masyarakat	2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb)

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		3. Penguatan pondasi pembangunan syariat Islam melalui pembinaan aqidah dan akhlak di kelembagaan formal dan informal.	3. Peningkatan pembangunan Syariat Islam melalui penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.	3. Peningkatan pembangunan Syariat Islam melalui optimalisasi peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia yang baik;	3. Pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh melalui penegakan hukum syariat Islam. ;
	Mewujudkan masyarakat Simeulue yang berketahanan sosial budaya dan ekologis	1. Penguatan kerukunan beragama dan nilai kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat	1. Penguatan kerukunan antar umat beragama dan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	1. Peningkatan peran dan fungsi Lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Simeulue	1. Pemantapan upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan kebudayaan dan kesenian Simeulue
		2. Penguatan pembangunan keluarga berkualitas, masyarakat inklusif dan penurunan ketimpangan gender	2. Penguatan lingkungan pendukung keluarga agar dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif;	2. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	2. Peningkatan adaptasi manusia, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
		3. Penguatan kapabilitas kelembagaan dan instrument kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas;	3. Penguatan konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas	3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan upaya pelestarian lingkungan hidup.	3. Akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup ketahanan pangan, air, dan energi;

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		4. Penguatan instrumen kebijakan dalam mendukung ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	4. Peningkatan sumberdaya energi listrik serta pengembangan energi terbarukan	4. Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut yang ramah lingkungan	4. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
		5. Penguatan kapaisatas kelembagaan dan instrument kebijakan pengelolaan kebencanaan dalam mewujudkan pemerintah dan masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim.	5. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya bencana, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	5. Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu	5. Peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim;
	Mewujudkan pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan	1. Penguatan kelembagaan dan instrumen regulasi daerah yang lengkap dalam pengelolaan penataan ruang	1. Peningkatan peran serta pemerintahan desa dan masyarakat dalam pengelolaan penataan ruang	1. Pengembangan kapasitas pemerintahan desa dalam perencanaan dan pengelolaan penataan ruang.	1. Pemantapan peruntukan ruang sesuai dengan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		2. Pembangunan wilayah prioritas pada wilayah dengan potensi ekonomi tinggi atau wilayah terpencil berpenduduk.	2. Penataan kawasan perkotaan serta pengembangan wilayah pedesaan yang memiliki potensi unggulan dan karakteristik yang kuat.	2. Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan yang diprioritaskan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	2. Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan yang diprioritaskan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru
	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	1. Penyediaan sarana dan prasarana konektivitas dan aksesibilitas yang merata dari pusat-pusat pelayanan menuju kawasan pengembangan	1. Peningkatan sarana dan prasarana konektivitas antar wilayah yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis tata ruang.	1. Pengembangan sarana dan prasarana konektivitas dan aksesibilitas yang terintegrasi dengan infrastruktur lainnya	1. Pemantapan sarana dan prasarana konektivitas dan aksesibilitas yang terintegrasi dan adaptif terhadap kondisi lingkungan
		2. Penyediaan infrastruktur dasar permukiman yang memadai meliputi rumah layak huni, air minum layak, sanitasi aman dan pengelolaan persampahan	2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman	2. Pengembangan sarana dan prasarana dasar permukiman pada kawasan perkotaan	2. Pemantapan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan yang ramah lingkungan
		3. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air yang memadai dan ramah lingkungan	3. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air yang memadai dan ramah lingkungan	3. Pengembangan pengusahaan sumber daya air oleh pemerintah, dan pemerintah desa dan masyarakat	3. Pemantapan pengusahaan dan konservasi sumber daya air yang terintegrasi dan ramah lingkungan serta Pengelolaan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		4. Mendukung ketersediaan sarana dan perasarana energi listrik dan jaringan telekomunikasi yang memadai dan menjangkau ke seluruh desa	4. Mendukung upaya pengembangan energi listrik terbarukan skala mikro serta pemenuhan perangkat pendukung telekomunikasi pada wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil berpenduduk	4. Peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam penghematan penggunaan energi listrik serta kepedulian masyarakat dalam menjaga infrastruktur ketenagalistrikan yang telah terbangun.	4. Mendukung peningkatan proporsi penggunaan energi listrik terbarukan dan peningkatan upaya kemandirian energi
	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah	1. Pembiayaan pembangunan melalui transformasi tata kelola pendapatan daerah , optimalisasi PAD serta pembangunan daerah oleh non pemerintah dengan CSR.	1. Optimalisasi sumber pendanaan pemerintah, terutama dana otonomi khusus dan telah berkembangnya sumber pendanaan non pemerintah, terutama investasi, CSR dan LSM Funding.	1. Peningkatan cakupan sektor pembangunan yang memanfaatkan sumber dana non pemerintah, terutama investasi, CSR, LSM Funding.	1. Pemantapan dan perluasan cakupan sektor pembangunan yang menggunakan sumber dana non pemerintah, terutama investasi, CSR, LSM Funding.

5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi “Simeulue Maju, Islami dan Berkelanjutan”.

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 dirumuskan dari Arah Pembangunan hasil penyelarasan RPJPD Kabupaten Simeulue dengan RPJPD Provinsi Aceh dan RPJPN Tahun 2025-2045, Arah Kebijakan Transformasi Daerah berupa arah kebijakan transformasi menurut Provinsi sesuai buku II SEB Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan Arah Kebijakan Transformasi sesuai karakteristik daerah dalam melaksanakan keotonomiannya, serta Indikator Utama Pembangunan (IUP) berupa indikator hasil penyelarasan RPJPN-RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan Indikator Daerah sesuai karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah pada RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 dirumuskan berdasarkan hasil penyelarasan RPJPN dan RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025-2045, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2. Penyelarasan Arah Pembangunan Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025 - 2045			RPJPD Provinsi Aceh 2025-2045		RPJPD Kabupaten Simeulue 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan		Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
1	Transformasi Sosial	EI1.	Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial	Kesehatan untuk Semua Sosial	Transformasi Sosial	Kesehatan untuk semua
		EI2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pendidikan Berkualitas dan merata		Pendidikan Berkualitas dan Merata
		EI3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif		Perlindungan Sosial yang adaptif		Perlindungan sosial yang adaptif
2	Transformasi Ekonomi	EI4.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Iptek, inovasi dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Produktivitas Ekonomi Iptek, dan Inovasi
		EI5.	Penerapan Ekonomi Hijau		Penerpan Ekonomi Hijau		Penerapan Ekonomi Hijau

No	RPJPN 2025 - 2045		RPJPD Provinsi Aceh 2025-2045		RPJPD Kabupaten Simeulue 2025-2045		
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	
		EI6.	Transformasi Digital		Transformasi digital	Transformasi Digital	
		EI7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Integrasi ekonomi domestik dan global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
		EI8.	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	
3	Transformasi Tata Kelola	EI9.	Regulasi yang Adaptif dan Taat Asas Kelola yang Berintegritas, Tangkas, dan Kolaboratif	Transformasi Tata Kelola	Regulasi dan tatakelola yang berintegritas dan adaptif	Transformasi Tata Kelola	Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi	EI10.	Hukum Berkeadilan, Ketahanan Berdaya Gentar Kawasan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi	Hukum yang berkeadilan, keamanan nasional Tangguh dan demokrasi substansial	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi	Perkuatan Perdamaian, Ketentraman dan Ketertiban yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial
		EI11.	Stabilitas Ekonomi Makra		Stabilitas ekonomi makro		Stabilitas ekonomi daerah
		EI12.	Ketangguhan Diplomasi		Ketangguhan Diplomasi dan pertahanan berdaya gentar dan kawasan		Syariat Islam
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	EI13.	Beragama Maslahat dan Berbudaya Maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		EI14.	Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender		Keluarga berkualitas, kesadaran gender dan masyarakat inklusi		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		EI15.	Lingkungan Hidup Berkualitas		Lingkungan Hidup berkualitas		Lingkungan Hidup Berkualitas
		EI16.	Berketahanan Energi, Air, dan		Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

No	RPJPN 2025 - 2045			RPJPD Provinsi Aceh 2025-2045		RPJPD Kabupaten Simeulue 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan		Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
			Kemandirian Pangan				
		EI17.	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Resilien terhadap bencana perubahan iklim		Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
6						Pembangunan Kewilayaahn yang Merata dan Berkeadilan	Kawasan perkotaan yang tertata dan berkembangnya desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru
7						Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Sarana dan prasarana konektivitas dan aksesibilitas yang mantap dan terintegrasi
8						Kesinambungan Pembangunan Daerah	Pendapatan Asli Daerah dan pendanaan non pemerintah semakin meningkat

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi Daerah

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penjabaran dari arah kebijakan RPJPN dan RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan karakteristik daerah Kabupaten Simeulue dan mendukung tercapainya visi Kabupaten Simeulue.

Arah kebijakan transformasi daerah Kabupaten Simeulue tahun 2025-2045 dirumuskan berdasarkan hasil penyesuaian arah kebijakan RPJPN dan RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025-2045, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3. Penyesuaian Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
1	Transformasi Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Transformasi Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui Memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang pentingnya pola hidup sehat, pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan, terutama sarana rekreasi dan olah raga.	1. Transformasi Sosial	Promosi Kesehatan melalui perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal, terutama pemeriksaan kesehatan rutin, vaksinasi, perawatan kesehatan masyarakat, obat-obatan esensial, dan fasilitas kesehatan yang memadai, biaya terjangkau, meratanya fasilitas kesehatan dan berkualitas, dan berkeadilan.		Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas sesuai standar pada FKTP dan FKTR
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.		Peningkatkan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang aman dan adaptif berupa mendukung peningkatan sumber daya manusia dan sistem digital di puskesmas, posyandu, poliklinik, dan praktek dokter umum dalam hal kemampuan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, diagnosis		Peningkatan Ketersediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang memenuhi standar

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				sederhana, perawatan dasar, dan manajemen penyakit kronis ringan. dan rujukan terutama berfungsinya rumah sakit regional di Meulaboh, Takengon, Bireun, Langsa dan Tapak Tuan, serta penambahan rumah sakit swasta, klinik spesialis, unit gawat darurat, dan fasilitas kesehatan yang menyediakan perawatan intensif dan spesifik.		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya, terutama melakukan kampanye imunisasi dan pencegahan penyakit menular lainnya, bahasa dan konteks budaya yang dipahami oleh masyarakat setempat, Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan tokoh budaya lainnya, Melakukan pelatihan kepada tenaga kesehatan lokal, termasuk bidan dan petugas kesehatan masyarakat, dalam menyampaikan informasi yang benar dan mendukung masyarakat dalam mendapatkan imunisasi dan perawatan kesehatan yang diperlukan.		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
		Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.		Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.		
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
		Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).		Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP		Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan
				Investasi pelayanan kesehatan masyarakat, eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberculosis, malaria, HIV dan kusta).		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP		
		Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.		Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting		Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.		
		Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.		Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.		Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
				Peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti: Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Diabetes melitus, Gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tuberkulosis dan respirasi.		Peningkatan Status Rumah Sakit Daerah Simeulue menjadi Rumah Sakit Type B

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.		Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.
				Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan		Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan
				Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan		
				Memperkuat sistem kesehatan dimana setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya		
				Perkuatan keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam bidang kesehatan.		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olah raga rekreasi		
				Meningkatkan akses masyarakat terutama ibu hamil, bayi, dan anak-anak ke makanan bergizi seimbang. promosi praktik pemberian makanan tambahan kepada bayi dan anak, edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, dan penyediaan suplemen gizi bagi kelompok rentan. meningkatkan akses masyarakat terutama ibu hamil dan anakanak ke pelayanan kesehatan maternal dan anak yang berkualitas		
				Meningkatkan akses masyarakat terutama di pedesaan ke sanitasi yang layak dan airbersih.		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga internasional, organisasi nonpemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting dalam upaya menurunkan stunting.		
				Meningkatkan akses masyarakat terutama di daerah pedesaan atau terpencil terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pelayanan antenatal, imunisasi, layanan kesehatan reproduksi, dan penanganan penyakit menular dan tidak menular. Ini melibatkan pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan tenaga medis yang terlatih, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat		Penyediaan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Pratama Wilayah Simeulue Bagian Tengah

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga internasional, organisasi nonpemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting dalam upaya menurunkan stunting.		
		Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).		Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).		
		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar
		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana.
		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.		Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan secara merata
		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).		
		Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.		Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.		
		Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.		Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.		
		Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.		Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.		Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).		Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP.		Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP.		
		Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).		Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).		Dukungan Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.		Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.		
		Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).		Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP.		
		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP.		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama
				Meningkatkan olah raga prestasi yang menjadi kewenangan provinsi melalui penyediaan sarana dan prasarana olah raga		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Memberikan akses yang lebih luas dan setara terhadap pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat Aceh, terutama di daerah-daerah pedalaman atau terpencil		
				meningkatkan investasi dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendidikan vokasi seperti laboratorium, workshop, dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran praktis dan keterampilan, mengembangkan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional.		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Membangun kemitraan yang erat dengan industri dan perusahaan lokal untuk memastikan bahwa program pendidikan vokasi mencerminkan kebutuhan industri dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman kerja praktis melalui magang dan kerja sama proyek		
				Memberikan bantuan keuangan atau beasiswa bagi siswa yang ingin mengikuti pendidikan vokasi namun menghadapi kendala finansial		
				Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendidikan vokasi sebagai jalur yang mempersiapkan individu untuk masuk ke pasar kerja		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Melakukan evaluasi rutin terhadap program pendidikan vokasi untuk mengevaluasi keefektifan dan relevansinya serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Pemantauan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan vokasi tercapai dengan baik		
				Pengembangan Promosi Literasi, peningkatan Akses terhadap Bahan Bacaan, peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Buku, Integrasi Literasi dalam Kurikulum Pendidikan, Pembangunan Keterampilan Literasi Digital, Kolaborasi dengan Pihak-pihak Terkait, pengembangan Inisiatif Inovatif dalam promosi literasi, seperti penggunaan teknologi digital untuk		Promosi Literasi, peningkatan Akses terhadap Bahan Bacaan, dan Ketersediaan dan Kualitas Buku, Integrasi Literasi dalam Kurikulum Pendidikan serta Pembangunan Keterampilan Literasi Digital,

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				membantu akses terhadap bahan bacaan, pelatihan keterampilan literasi, atau platform berbagi cerita dan informasi. membangun budaya membaca yang kuat dan berkelanjutan melalui promosi nilai-nilai literasi di masyarakat, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ini melibatkan peran aktif orang tua, guru, dan pemimpin masyarakat dalam mempromosikan kebiasaan membaca di kalangan anak-anak dan generasi mendatang.		
				Mendukung pemenuhan Gizi, kecukupan Gizi peserta didik		Mendukung pemenuhan Gizi, kecukupan Gizi peserta didik
						Peningkatan iklim keamanan, iklim kebinekaan dan iklim inklusivitas di lingkungan sekolah dasar secara merata

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).		Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).		Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan
		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP.		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas
		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).		masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.		
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.		
		Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue) melalui bertambahnya demand.		Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue) melalui bertambahnya demand.		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).		Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Aceh		Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, PMKS dan masyarakat.

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).		Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.		Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
		Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.		Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.		Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
		Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.		Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.		Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
		Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.		Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.		
				Bantuan sosial, Pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap layanan dasar, Pemberdayaan sosial dan partisipasi masyarakat, perbaikan tata Kelola, pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pariwisata		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Memperkuat bantuan sosial kepada PMKS dan penyandang disabilitas, termasuk pemberian santunan, pelayanan kesehatan, pendidikan inklusif, dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Mengembangkan program rehabilitasi fisik, mental, dan sosial bagi penyandang disabilitas untuk membantu mereka mengembangkan potensi dan meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Memperkuat aksesibilitas fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas dengan meningkatkan akses terhadap transportasi publik, fasilitas umum, dan informasi.		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Mendorong implementasi pendidikan inklusif di Aceh untuk memastikan bahwa anak-anak dengan disabilitas mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas.		
				Mendorong pemberdayaan ekonomi bagi PMKS, penyandang disabilitas, dan perempuan dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, dan dukungan untuk memulai usaha mikro.		
2	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Aceh Utara, Aceh	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	2. Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui dengan pendekatan sapta (7) usaha tani (olah tanah, penggunaan bibit unggul, pemupukan tepat, pengendalian hama dan penyakit, pengairan yang baik, penanganan pasca panen, dan pemasaran hasil).

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Timur, Aceh Barat, dan Aceh Tengah.				
		Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).		Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).		Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
		Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.		Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.		Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
						Pemantapan kelembagaan untuk mewujudkan petani yang kuat, dinamis, mandiri, dan berdaya saing
		Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian		Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian		Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian
						Penguatan daya saing produk ternak
						Pengembangan kawasan ternak melalui pendakatan klaster
		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan,		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan,		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.		dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.		
		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.		
		Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.		Pengembangan <i>closed loop model</i> perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market, bank</i> , dan asuransi perikanan.		Pengembangan <i>closed loop model</i> perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market, bank</i> , dan asuransi perikanan.
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
		Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.		Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.		Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)				Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang cukup untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (Jalan lingkar Simeulue kewenangan kabupaten , sarana transportasi penyeberanga dan sarana transfortasi darat yang memadai)

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.		Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh.		Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan		Penguatan dan peningkatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan
		Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).		Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan
		Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.		Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.		Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.		
		Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.		Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.		Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.
		Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.		Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.		
		City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.		City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Banda Aceh-Sabang.		Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Banda Aceh-Sabang.		Pengembangan industri pariwisata unggulan dengan menerapkan nilai-nilai kearifan budaya masyarakat, prinsip pengelolaan pariwisata halal, berwawasan lingkungan, serta berstandar nasional dan internasional
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.		Pengembangan daya tarik wisata berbasis keunggulan bahari, keanekaragaman hayati dan sejarah berstandar nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas pengalaman berwisata
		Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.		Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.		Peningkatan promosi investasi yang intensif untuk meningkatkan investasi pariwisata berskala nasional dan internasional
		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.		strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.		
						Peningkatan infrastruktur pariwisata dan Pengembangan Destinasi Wisata
						Pengembangan kegiatan wisata olahraga, ekowisata, dan wisata edukatif pada daya tarik wisata dalam rangka mengembangkan produk pariwisata yang berkualitas
						Pengembangan masyarakat sadar wisata yang menjunjung nilai-nilai budaya lokal dan berwawasan lingkungan
		Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra.		Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra.		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.		Penguatan pengelolaan jalan provinsi dan jalan desa.		Penguatan pengelolaan jalan Kabupaten dan jalan desa
		Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Aceh untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama ruas: - Banda Aceh-Jantho-Sigli-Meureudeu-Bireuen-Lhokseumawe; - Lhokseumawe-Idi Rayeuk-Langsa-Karangbaru-Stabat-Binjai-Medan; - Banda Aceh-Calang-Meulaboh-Sukamakmue-Blangpidie; - Lhokseumawe-Simpang Tiga Redelong-Takengon; - Blangkejeren-Kutacane-Kabanjahe-Medan; - Tapaktuan-Subulussalam-Salak-Sidikalang-Kabanjahe; dan - Subulussalam-Singkil.		Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Aceh untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama ruas: - Banda Aceh-Jantho-Sigli-Meureudeu-Bireuen-Lhokseumawe; - Lhokseumawe-Idi Rayeuk-Langsa-Karangbaru-Stabat-Binjai-Medan; - Banda Aceh-Calang-Meulaboh-Sukamakmue-Blangpidie; - Lhokseumawe-Simpang Tiga Redelong-Takengon; - Blangkejeren-Kutacane-Kabanjahe-Medan; - Tapaktuan-Subulussalam-Salak-Sidikalang-Kabanjahe; dan - Subulussalam-Singkil.		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan.		Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan.		
		Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Banda Aceh-Lhokseumawe-Medan.				
		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul, terutama Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Lhokseumawe, dan Pelabuhan Meulaboh.		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul, terutama Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Lhokseumawe, dan Pelabuhan Meulaboh.		
		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Simeulue.		Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Simeulue.		
		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata, terutama di Sabang.		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata, terutama di Sabang.		
		Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan pelabuhan-pelabuhan utama, terutama dari Simeulue.		Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan pelabuhan-pelabuhan utama, terutama dari Simeulue.		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama pada Bandar Udara Sultan Iskandar Muda.		Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama pada Bandar Udara Sultan Iskandar Muda.		
		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya Simeulue).		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP		
		Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah		Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Simeulue.		Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Simeulue.		
		Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Lhokseumawe-Banda Aceh.		Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Lhokseumawe-Banda Aceh.		
				Akselerasi pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik		
		Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global				
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.		Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon untuk pemulihan lingkungan hidup dan penurunan emisi karbon		Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon.
				Ekonomi hijau untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan		Pengembangan Ekonomi hijau untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing dalam pola pembangunan berkelanjutan
				Memperkuat pengelolaan sumber daya alam Aceh yang berkelanjutan, termasuk hutan, perairan, dan lahan pertanian, untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi hijau.		
		Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.		Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.		Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah serta penguatan proses bisnis dan kelembagaan.
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.		
		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.				terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
		Peningkatan produktivitas BUMD.		Peningkatan produktivitas BUMD.		Peningkatan produktivitas BUMD.
				Identifikasi dan mendorong pengembangan sektor ekonomi unggulan Aceh yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan		
				Investasi dalam pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi akan membuka aksesibilitas dan konektivitas wilayah Aceh		
				Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Aceh		Peningkatan upskilling dan re-skilling tenaga kerja melalui pengembangan Balai Latihan Kerja

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
						Peningkatan kapasitas tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan peluang lapangan kerja digital
				Memberikan Dukungan bagi UMKM dalam bentuk akses modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk akan membantu meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Aceh		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
				Meningkatkan promosi pariwisata Aceh baik di tingkat nasional maupun internasional dengan menggarisbawahi potensi pariwisata alam, budaya, dan sejarahnya. Pembangunan infrastruktur pariwisata yang mendukung serta peningkatan kualitas layanan		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				pariwisata juga harus diperhatikan		
				Menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Aceh. Ini melibatkan peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah.		
				Mendorong diversifikasi perekonomian Aceh dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang memiliki potensi pertumbuhan, serta mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi pasar		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Membangun budaya inovasi dan kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh dengan mengadakan acara-acara, kompetisi, dan program edukasi yang mendorong kreativitas dan kolaborasi dalam menghasilkan solusi untuk tantangan lokal		
				Investasi dalam pembangunan infrastruktur,		
				Pelatihan keterampilan, dan akses terhadap pasar yang lebih luas, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja,		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi lokal dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal		
				Mengimplementasikan kebijakan dan insentif untuk menarik investasi ke daerah tersebut. Investasi dalam sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perkebunan, industri manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi informasi dan komunikasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.		
				Mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan proyek-proyek ekonomi dan		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				infrastruktur dapat menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan investasi		
				Pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan industri terkaitnya, serta memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat lokal.		
				Pengembangan ekonomi berbasis komunitas seperti pertanian organik, kerajinan lokal, dan pariwisata berbasis masyarakat dapat membantu menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru dan meningkatkan produktivitas sektor-sektor yang sudah ada.		
				Mendukung pengembangan UMKM sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor formal dan memperluas kesempatan kerja.		
				Mendorong peningkatan pendapatan perkapita melalui kebijakan pembangunan ekonomi inklusif yang memungkinkan masyarakat Aceh untuk lebih mandiri secara finansial.		
				Memberikan akses yang lebih mudah terhadap modal usaha dan teknologi bagi industri pengolahan di Aceh		
				Menjadikan Aceh sebagai Industri pariwisata Halal		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk(i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia;(ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik;(iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik;(iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan;(iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan		Percepatan pengembangan jaringan listrik cerdas (smart grid) dan jaringan transmisi antarwilayah untuk mendukung peningkatan keandalan layanan ketenagalistrikan, kestabilan sistem, dan dekarbonisasi sumber tenaga listrik.		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik;(v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas;(vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi;(viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan(ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.				

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu:(i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok;(ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta(iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan				Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk mendukung percepatan transformasi digital. Dan Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).				
3	Transformasi Tata Kelola	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	Transformasi Tata Kelola	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di provinsi Aceh dan penguatan regulasi otonomi khusus Aceh	3. Transformasi Tata Kelola	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di Daerah Kabupaten
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, disabilitas, kelompok rentan dan masyarakat adat terpencil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.		Percepatan digitalisasi pelayanan publik keterbukaan informasi publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan, terutama bidang pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan fungsionalisasi dan berbasis kebutuhan		
		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Aceh, Efisiensi dan efektifitas belanja birokrasi		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
		Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah Aceh, menuju penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang		Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Aceh, menuju penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang		Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN berbasis merit

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		profesional dan bebas korupsi.		profesional dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme		
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE dan keamanan informasi untuk penguatan aspek pemerintahan digital		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.		Pengembangan karir ASN melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
		Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.		Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, harmonisasi partai lokal dan partai nasional serta lembaga demokrasi lainnya		Penguatan peran pemerintah desa dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Penguatan tapal batas wilayah administrasi Provinsi Aceh		Penguatan tapal batas wilayah administrasi kecamatan dan desa
				Meningkatkan peran dan fungsi budgeter, legislasi dan pengawasan DPRA serta fungsi fungsi lain yang sudah ditetapkan UUPA		
				Meningkatkan kepatuhan kepada seluruh pihak, terutama lembaga pemerintah Aceh untuk menjalankan amanah dari setiap dokumen perencanaan		Peningkatan kepatuhan seluruh pihak, terutama lembaga pemerintah untuk menjalankan amanah dari setiap dokumen perencanaan
				Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik, termasuk anggaran dan kontrak pemerintah		Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan
				Memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian Inspektorat Aceh dan Bappeda Aceh untuk memastikan		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				penggunaan sumber daya publik sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku		
				Meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dan pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah.		
				Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal etika, integritas, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.		
				Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintahan		
				Mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi untuk memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Membangun komitmen kuat dari pemimpin pemerintah Aceh untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan		
				Penguatan sistem data terpilah dan terpadu yang terintegrasi		
		Penguatan integritas partai politik		Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi		Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi
				Meningkatkan peran dan fungsi KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh		Peningkatan peran dan fungsi KIP Simeulue dan Panitia Pengawas Pemilihan Simeulue
				Memantapkan sistem pemilihan langsung aceh		
				Memperkuat partai politik lokal Aceh		
				Memperkuat pelaksanaan dan implemetasi Hak Azazi Manusia		Memperkuat pelaksanaan dan implemetasi Hak Azazi Manusia
				Memperkuat pemerintahan mukim dan gampong sesuai dengan kewenangan propinsi		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				memperkuat implementasi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi khusus Aceh, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.		
				Meningkatkan kapasitas institusi pemerintahan di Aceh dalam mengelola urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sesuai dengan otonomi khusus.		
				Mengembangkan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi Aceh serta memperhitungkan aspek-aspek otonomi khusus		
				Menyusun qanun yang mendukung implementasi otonomi khusus Aceh dan menjaga konsistensi dengan hukum nasional		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Mendorong partisipasi aktif masyarakat Aceh dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan otonomi khusus		
				Membangun kerjasama yang baik antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dalam mengimplementasikan otonomi khusus Aceh.		
		Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.				Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran SatpolPP dan WH
4	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah		4. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum, serta pengawasan di wilayah perairan laut terhadap <i>illegal fishing</i>

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
		Penguatan pengendalian inflasi daerah.		Penguatan pengendalian inflasi daerah.		Penguatan pengendalian inflasi daerah.
				Peningkatan Pajak Daerah (Intensifikasi, ekstensifikasi, dan Fiscal Cadaster)		Peningkatan Pajak Daerah

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha pertambangan menyiapkan dana pengembangan masyarakat, paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun yang dibahas bersama dengan Pemerintah Aceh dan dananya tetap dikelola oleh perusahaan		Peningkatan peran serta pelaku usaha menyiapkan dana pengembangan masyarakat, paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun yang dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah dan dananya tetap dikelola oleh perusahaan
				melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar transfer dari pemerintah pusat		
				Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Aceh secara optimal dan berkelanjutan		
				Memperkuat pengumpulan pajak dan retribusi daerah dengan melakukan reformasi perpajakan, peningkatan administrasi pajak, dan penegakan hukum terhadap pajak yang tidak dibayar		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan meminimalkan pemborosan.		
				Mendorong pengembangan sistem perekonomian daerah yang mandiri dengan meningkatkan investasi, kewirausahaan, dan daya saing sektorsektor ekonomi lokal		
				Membangun kerjasama dan sinergi antara kabupaten/kota di Aceh untuk memperkuat kemandirian fiskal secara bersama-sama.		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Aceh dalam bidang keuangan, perpajakan, dan pengelolaan sumber daya alam. Pelatihan dan pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola fiskal daerah secara efektif		
				Menggalakkan promosi investasi dan pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan insentif bagi investor, mendorong kemitraan publik-swasta, serta mendukung pengembangan UMKM dan industri kreatif di Aceh		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pulau Simeulue).				
				Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, meleak Al Quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah di Aceh dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, sarana dan prasarana lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan kegiatan di Aceh		Pembinaan aqidah dan akhlak melalui penguatan peran dan fungsi mesjid serta pendidikan islami

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah melalui peningkatan kualitas wilayahul hisbah, APH (Aparat Penegak Hukum) pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan Syariat Islam		Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam
				Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal melalui sosialisasi dan pembangunan sistem yang terpadu dalam pengumpulan zakat, dan produksi dalam penyalurannya serta bukan hanya bertumpu kepada muzakki ASN namun juga masyarakat luas.		Peningkatan Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Mutu dan kemandirian dayah, peningkatan mutu dayah melalui manajemen yang profesional, pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah.		Peningkatan Mutu dan Kemandirian Dayah
				Pengembangan Dayah Vokasi di wilayah sentra dayah		
				Penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.		Penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.
				Penguatan pelaku usaha UMKM produk halal melalui sertifikasi yang terintegrasi/terpadu		
				Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi syariat Islam di Aceh, seperti MahkamahSyariah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Dinas Syariat Islam.		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Melakukan kebijakan pendidikan dan penyuluhan syariat Islam kepada masyarakat Aceh untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang ajaran Islam serta implementasi hukum Islam.		
				Meningkatkan implementasi hukum syariat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang peradilan, ekonomi, sosial, dan moral		
				Membangun kerjasama dengan lembagalembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan institusi pendidikan Islam lainnya untuk mendukung implementasi syariat Islam yang mengayomi		
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan nilai luhur kebudayaan Aceh dalam sendi kehidupan masyarakat,	5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		dengan berasaskan kepada Pancasila.		dengan berasaskan keislaman dan Pancasila.		
		Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.		Penguatan kerukunan antar umat beragama, dan golongan, terutama di daerah perbatasan		Penguatan kerukunan antar umat beragama, dan golongan
				Memperkuat lembaga wali nanggroe dalam kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacaraupacara adat lainnya.		
				Memperkuat peran dan fungsi Lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang		Memperkuat peran dan fungsi Lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Simeulue di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.		
				Penguatan upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam dengan mengikutsertakan masyarakat dan lembaga sosial, mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan seni kelompok etnik di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal. mengusahakan pengembalian benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dan merawatnya sebagai warisan budaya Aceh sesuai dengan peraturan perundang-		Penguatan upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan kebudayaan dan kesenian Simeulue

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				undangan. Aceh KKW, MAA, Budpar, Disdik, DPMG, Arpus Pasal 221 UUPA 6 Mendorong promosi daerah		
				Mendorong promosi dan pelestarian budaya Aceh sebagai bagian dari identitas dan kekhasan daerah		
				Menggalakkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap budaya Aceh yang Islami.		
				Mengembangkan industri pariwisata berbasis syariah yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dan mempromosikan kekayaan budaya dan alam Aceh. Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat Aceh untuk menjalankan agama dan budaya mereka sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				berlaku, termasuk dalam kerangka otonomi khusus Aceh.		
				Memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan		Penguatan dan peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan
		Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.		Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis, keanekaragaman hayati, konservasi, dan partisipatif dengan mengikutsertakan para pihak lainnya		Implementasi pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
		Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.		Peningkatan upaya perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari hutan lindung dan ekosistem alami terutama pada Kawasan Ekosistem Leuser wilayah Aceh dan penambahan kawasan lainnya.		Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung, hutan konservasi dan ekosistem alami.

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api, banjir, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal yang mendukung penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, kelompok rentan dan Inklusi		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.		Promosi, pemenuhan hak, Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, kelompok rentan, dan perlindungan anak melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.		Promosi, pemenuhan hak, Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, kelompok rentan, dan perlindungan anak melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.		Penguatan pengarusutamaan gender, disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan.		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
				Meningkatkan peran dan fungsi pemuda anak, perempuan, disabilitas, masyarakat adat, kelompok rentan dalam kehidupan sosial, kemandirian ekonomi, kreatif dan inovatif		
				Memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Melakukan program pendidikan dan kesadaran gender untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender, mengatasi stereotip gender, dan mempromosikan peran aktif perempuan dalam pembangunan		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Meningkatkan keterampilan parenting, dan mempromosikan hubungan yang sehat dan harmonis di dalam keluarga		
				Memberikan bantuan finansial dan pendampingan kepada pemuda yang ingin memulai usaha atau proyek kewirausahaan		
				Meningkatkan akses pemuda terhadap pendidikan formal maupun pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal		Peningkatan akses pemuda terhadap pendidikan formal maupun pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal
				Membangun fasilitas publik seperti lapangan olahraga, taman, pusat pemuda, dan pusat kegiatan remaja dapat membantu memperkuat hubungan sosial di antara pemuda dan memberikan mereka tempat yang aman dan positif untuk berkumpul dan beraktivitas.		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Mendorong pemuda untuk terlibat dalam kegiatan sukarela dan kemanusiaan, serta mendukung program penggalangan dana untuk proyek-proyek pembangunan yang melibatkan pemuda		
				Mendorong partisipasi pemuda dalam proses politik lokal dan memberikan mereka kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dapat memberikan rasa memiliki terhadap pembangunan daerah mereka		
				Memfasilitasi pengembangan bakat seni dan budaya pemuda melalui program-program pelatihan, festival, dan pertunjukan dapat memperkuat identitas lokal dan meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya daerah.		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				menyediakan layanan informasi dan konseling yang mudah diakses oleh pemuda terkait dengan berbagai hal, seperti pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan masalah sosial lainnya		
						Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
				Memperkuat ketersediaan, ketahanan dan kedaulatan Energi; meningkatkan persentase pemanfaatan energi baru terbarukan terhadap total konsumsi Energi; menyediakan infrastruktur guna peningkatan ketersediaan Energi; mendukung pembangunan Energi baru		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				terbarukan bagi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota: melindungi masyarakat tidak mampu terutama masyarakat di daerah terpencil dan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan Gampong atau nama lain mandiri Energi; memfasilitasi kemitraan dengan pemerintah daerah dan dunia usaha untuk melaksanakan pembangunan sektor Energi; dan mendukung penelitian dan pengembangan Energi baru terbarukan.		
				Konservasi Energi; Peningkatan dan pengembangan energi terbarukan.		Peningkatan sumberdaya energi listrik serta pengembangan energi terbarukan

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); peningkatan inovasi dan teknologi pertanian; dan pengembangan benih lokal.		Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); peningkatan inovasi dan teknologi pertanian; dan pengembangan benih lokal.
				Memberikan dukungan kepada petani dan nelayan dengan menyediakan akses terhadap teknologi pertanian yang modern		
				mendorong penguatan sektor pertanian dengan memberikan dukungan kepada petani dalam hal teknologi pertanian, akses terhadap pasar, dan pengembangan infrastruktur pertanian		Peningkatan ketahanan pangan yang diarahkan pada keragaman sumberdaya pangan, peningkatan produktivitas hasil pertanian, penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				meningkatkan investasi dalam pertanian berkelanjutan dengan memberikan dukungan kepada petani dalam hal penyediaan sarana produksi, teknologi pertanian yang ramah lingkungan, dan pendidikan tentang praktikpraktik pertanian yang berkelanjutan. Membangun dan meningkatkan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jaringan saluran air, jalan, dan pasar tradisional untuk meningkatkan aksesibilitas dan distribusi produk-produk pertanian. Memberikan bantuan langsung dan pembiayaan kepada petani untuk memperoleh bibit unggul, pupuk organik, pestisida alami, dan alat-alat pertanian modern yang mendukung praktik		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				pertanian ramah lingkungan. Mendorong pengembangan pertanian organik sebagai alternatif untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan dan meminimalkan penggunaan bahan kimia sintetis		
				Mendorong pengembangan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan biomassa sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk kebutuhan pertanian dan industri di Aceh.		
				Melakukan program edukasi dan sosialisasi kepada petani dan masyarakat tentang pentingnya praktik pertanian berkelanjutan dan perlindungan lingkungan		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Mendorong investasi dalam pengembangan sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, energi biomassa, dan energi mikrohidro		
				Mendorong peningkatan efisiensi energi di berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, dan pemukiman.		
				Mendorong pengembangan transportasi berkelanjutan seperti transportasi umum, sepeda, dan transportasi berbasis jalan kaki.		
		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .
				Pengelolaan sumberdaya alam berbasis energi		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				terbarukan untuk menuju kemandirian pangan dan air.		
				Setiap pelaku kegiatan usaha bertanggung-jawab untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi		
				Penguatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut yang berkelanjutan dan partisipatif dengan mengikutsertakan para pihak lainnya; perizinan budidaya; pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya; pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut; dan keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Negara Kesatuan Republik Indonesia.		
				mengembangkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial.		
				Melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan hidup.		
				Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan penggunaan energi terbarukan		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Membangun kerjasama dengan pihak eksternal seperti organisasi lingkungan, lembaga riset, dan donor internasional untuk mendukung pembangunan berorientasi lingkungan dan energi terbarukan.		Membangun kerjasama dengan pihak eksternal seperti organisasi lingkungan, lembaga riset, dan donor internasional untuk mendukung pembangunan berorientasi lingkungan dan energi terbarukan.
				Mengembangkan rencana tata ruang yang berkelanjutan untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan		
				Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Penanganan Darurat Bencana, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.		
				Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu		Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu
				Memperkuat keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam program perbaikan, pemulihan psikososial, dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana alam.		
				Membuat dan melaksanakan Rencana Penanggulangan Bencana yang komprehensif dan terpadu untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko bencana di seluruh wilayah Aceh.		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				Meningkatkan infrastruktur dan sistem peringatan dini untuk memantau dan memberi peringatan dini tentang ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor.		
				Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana, tindakan darurat, dan persiapan untuk menghadapi bencana.		
				Melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan lahan yang rawan bencana seperti daerah pesisir, lereng gunung, dan daerah aliran sungai		
				Meningkatkan infrastruktur kedaruratan seperti rumah sakit, pos evakuasi, shelter, dan jalur evakuasi yang mampu bertahan dalam situasi bencana.		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
				meningkatkan pengelolaan air dan drainase untuk mengurangi risiko banjir di daerah perkotaan dan pedesaan.		
				Meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana, termasuk penyusunan kebijakan, perencanaan, dan implementasi program-program pengurangan risiko bencana		
				Membangun kerjasama dan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengurangi risiko bencana.		
					6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
						Penataan kawasan perkotaan yang berkelanjutan sesuai RDTR
						Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
						Peningkatan pembangunan desa, yang diprioritaskan pada desa yang berada dalam kawasan terpencil
						Peningkatan dan pengembangan kawasan transmigrasi
					7. Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Peningkatan kemantapan jalan lingkar Simeulue
						Peningkatan kemantapan jalan kabupaten Simeulue
						Peningkatan pelayanan angkutan darat dan pelayaaran
						Pembangunan dan peningkatan sarana utilitas umum kawasan permukiman, khususnya pada kawasan permukiman kumuh perkotaan

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
						Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
						Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
						Pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan
						Pengelolaan dan konservasi sumber daya air yang terintegrasi, efisien dan berkelanjutan
						Pengelolaan kawasan hutan konservasi (Tahura Simeulue) secara partisipatif dan adaptif
						Dukungan pengembangan energi listrik terbarukan skala mikro khususnya pada wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil berpenduduk
						Pemenuhan perangkat pendukung telekomunikasi pada wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil berpenduduk

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
					8. Kesenambungan Pembangunan Daerah	Pembiayaan pembangunan melalui transformasi tata kelola pendapatan daerah , optimalisasi PAD serta pembangunan daerah oleh non pemerintah dengan CSR.
						Pemantapan dan perluasan cakupan sektor pembangunan yang menggunakan sumber dana non pemerintah, terutama investasi, CSR, LSM Funding.
6	Implementasi Transformasi	Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Implementasi Transformasi		Implementasi Transformasi	
		Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).				Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.				Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
		Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas				

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor- sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor- sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.				Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor- sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor- sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
		Percepatan pelaksanaan reforma agraria.				Dukungan percepatan pelaksanaan reforma agraria.

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.				Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
		Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.				
		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.				
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.				

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Lampiran SEB Buku II Bagian III) Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025 - 2045		Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025 - 2045	
	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan	Transformasi	Arah kebijakan
		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.				
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.				Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
		Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.				
		Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.				Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan (IUP)

Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 mengacu pada hasil penyelarasan Indikator Utama Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025-2045 dan disesuaikan dengan karakteristik daerah. IUP dan target tahun 2045 ditetapkan untuk mengukur keberhasilan arah pembangunan dan sasaran pokok yang akan dicapai sebagai penjabaran visi dan misi. Adapun Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.4 Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok			
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah					
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Mewujudkan Transformasi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	Kesehatan untuk semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74.4	80	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,28	78.45	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	68,10	78,45	Meningkatny a Derajat Kesehatan Masyarakat
			2	Kesehatan Ibu dan Anak:			2	Kesehatan Ibu dan Anak:			2	Kesehatan Ibu dan Anak:			
			a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	16	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122	17	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	250	16				

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok													
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah															
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng														
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	13											
				b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13.5	5		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	25,5	9,0											
				3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	274		76	3	Penanganan Tuberkulosis :				3		Penanganan Tuberkulosis:									
			a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment																	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment	91	100	b) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment	71	95

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok			
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah					
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng				
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	13	
				coverage) (%)				coverage) (%)				coverage) (%)			
				b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)				b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91	100		c) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	92,29	95	
											d) Angka keberhasilan penanganan penyakit tidak menular	92,29	95		
			4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	99,5	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,5	99,5	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	96,5	99,5	
		Pendidikan Berkualitas	5	Hasil Pembelajara n:			5	Hasil Pembelajara n:			5	Hasil Pembelajara n:			Terwujudnya Pendidikan

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah		
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dan Merata										Berkualitas dan Merata
			a) Rata-rata nilai PISA			a) Persentase kabupaten/k ota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
			i) Lietrasi Membaca	396	485	i) Lietrasi Membaca	9,09 – 11,09	69,66 – 71,66				
			ii) Numerasi	404	490	ii) Numerasi	0,00 – 2,00	69,66 – 71,66				

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah		
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									a. Angka Partisipasi Sekolah			
									- Usia 5-6 Tahun untuk SD/Setara	85,24	100	
									- Usia 7-15 Tahun untuk SMP/ Setara	99,60	100	
									- Usia 7-18 Tahun untuk PNF/Setara	99,73	100	
			iii) Scien	416	487	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat			

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok	
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah			
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							nasional untuk:				nasional untuk:		
							i) Lietrasi Membaca	20,81 – 22,81	64,65 – 66,65	i) Literasi Membaca	20,81- 22,81	64,65 - 66,65	
							ii) Numerasi	13,01 – 15,01	58,98 – 60,98	ii) Numerasi	13,01- 15,01	58,98 - 60,98	
				c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9.14	12	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,20 – 10,21	12,94 – 13,06	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	'9,95	13,06	
				d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13.37	14.81	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,66 – 14,68	16,24 – 16,32	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14.87	18	
										iii) Skor Literasi SD (%)	48,42- 50,42	100	

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah		
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									iv) Skor Literasi SMP	51,82-53,82	100	
									v) Skor Numerasi SD	38,96-41,96	100	
									vi) Skor Numerasi SMP	50,24-52-24	100	
									e. Indeks leterasi digital (Digital Skil,Digital Culture,Digital Ethics,Digital Safety)	3,75	5,00	
									f) Indeks Iklim Keamanan, Iklim Kebhinekaan , Iklim Inklusifitas SD dan SMP.	67,99	100	

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045				IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah					
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng				
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	13	
											g. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pendidikan	Puas	Puas		
			6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	33.94	60	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikas i Pendidikan Tinggi (%)	13,58	13,58 – 14,80	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	13,58		14,80
			7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian	61.87	75	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian	58,19	75,00	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian	47,8		78

NO	Misi	Arah Pembangunan	IUP RPJPN 2025 - 2045				IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah					
				Baseline 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenbang				
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11	12	13
				Menengah Tinggi (%)				Menengah Tinggi (%)				Menengah Tinggi (%)			Terwujudnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif
		Perindungan sosial yang adaptif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	06-07	0.5-.08	8	Tingkat Kemiskinan (%)	10,78-11,28	0,08-0,58	8	Tingkat Kemiskinan (%)	15,32	0,5	
			9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	44.1	99.5	9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	25,86 (2022)	85,16	9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	13,00	85,00	
			10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	20	60	10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	22	55	10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	22	55	
2	Mewujudkan Transformasi Peningkatan Pembangunan	Produktivitas Ekonomi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	20.8	28	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	5,17 – 5,19	6,94 – 7,11	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	1,5	3,00	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi,

NO	Misi	Arah Pembangunan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok			
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah					
				Baseline 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenbang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Ekonomi Daerah	Iptek, dan Inovasi								Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPt) Nilai Tukar Nelayan (NTN) & Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi)	104,2 NA 116,78	132,32 110 164.73	Inovasi Dan Ipetak		
			12	Pengembangan Pariwisata			12	Pengembangan Pariwisata			12	Pengembangan Pariwisata			
				a)Rasia PD8 Pariwisata (%)	4.5	8		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,69	2,87		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*		1,75	2,91

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok			
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah					
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng				
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11	12	13
				b) Devisa Pariwisata (miliar USD)	18	100		b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegar a (Ribu Orang)*	11,73	29,33		b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegar a (Ribu Orang)*	5,00	12,50	
			13	Proporsi PDB Ekanomi Kreatif (%)	7.9	11	1 3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembanguna n (ie) yang sama			1 3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembanguna n (ie) yang sama	0,5	1,5	
			14	Produktivitas UMKM,			1 4	Produktivitas UMKM,			1 4	Produktivitas UMKM,			

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok			
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah					
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng				
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	13	
				Koperasi, BUMD				Koperasi, BUMD				Koperasi, BUMD			
				a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1.3	5		a) Proposi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	11,84	18,24		a) Proposi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	13,12	15,32	
								b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	1,67	4,00		b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	1,00	2,25	
				b) Rasio Kewirausaha an	2.9	8		c) Rasio Kewirausaha an	3,33	6,80		c) Rasio Kewirausaha	3,33	6,80	

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok	
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah			
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							an Daerah (%)				an Daerah (%)		
			c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1.1 (2020)	10		d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,22	7,50		d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,03	7,50
			d) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	3.4	5.1		e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,92	4,82		e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,92	4,82
			15 Tingkat Penganggura n Terbuka (%)	5	4	1 5	Tingkat Penganggura n Terbuka (%)	4,7 – 5,5	3,5 – 4,5	1 5	Tingkat Penganggura n Terbuka (%)	4,77	4,5
			16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55.4	70	1 6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	52,8	62,7	1 6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan(%)	46,52	62,7
												Tingkat Partisipasi	64,44

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045				IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah					
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng				
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	13	
												Angkatan Kerja (%)			
			17	Tingkat Penguasaan IPTEK:			17	Tingkat Penguasaan IPTEK:			17	Tingkat Penguasaan IPTEK:			
				a) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0.28 (2020)	2.2-2.3		a) Presentase Dana untuk Inovasi dari APBA							
				b) Peringkat Inovasi Global	75 (2022)	30 Besar		b) Peringkat Inovasi Daerah	13	5	a) Peringkat Inovasi Daerah	270	100		
											b) Indeks Inovasi Daerah	38,00 (inovatif)	70,00 (Sangat Inovatif)		
		Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Meningkatny a Penerapan Ekonomi Hijau

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok			
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah					
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng				
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	13	
			a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	70.8	90.65	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	63,58	87,21	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	63,58	87,21				
			b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	70	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	29,55	62,94	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	29,55	62,94				
		Transformasi Digital	19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	51	20 Besar	19	Indeks Pembanguna n Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,7	7,3	19	Indeks Pembanguna n Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,7	7,3	Mewujudkan Tranformasi Digital
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Biaya Logistik (%PDB)	16.9 (2019)	8	20	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	6,17	4,33	20	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Kecamatan	17,00	4.33	Meningkatny a Integrasi Ekonmi Domestik Dan Global
			21	Pembentuka n Modal	29.8	27.2	21	Pembentuka n Modal	31,0	30,8	21	Pembentuka n Modal		30,80	

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok			
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah					
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng				
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	13	
				Tetap Bruto (% PDRB)				Tetap Bruto (% PDRB)				Tetap Bruto (% PDRB)			
			22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	26	40	2 2	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	6,0	9,3	2 2	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1,00	3,00	
		Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbu han Ekonomi	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjuta n			2 3	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjuta n			2 3	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjuta n			
				a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%) Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam	44.58	48.92		a) Proposi kontribusi PDRB Wiayah Kota Terhadap Propinsi (%)	20.5- 22.5	29.5- 32.5		a) Proposi kontribusi PDRB Wiayah Kota Terhadap Propinsi (%)	20.5	32.5	

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok			
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah					
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng				
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	13	
				rumpun Arah Pembanguna n (IE) yang sama											
				b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkay dan berkelanjuta n (%)	64	100		b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkay dan berkelanjuta n (%)	73	100		b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjuta n (%)	49,4		100
				c) Persentase Desa Mandiri				c1) Persentase Desa Mandiri	6.15	26		c1) Persentase Desa Mandiri	2.90		22
								c2) Rerata Indeks Desa Membangun	0.67	0.86		c2) Rerata Indeks Desa Membangun	0.69		0.87
3	Mewujudkan transformasi	Regulasi dan Tata Kelola	24	Indeks Materi Hukum	0.25	0.49	24	Indeks Reformasi Hukum	39.93	65.93	24	Indeks Reformasi Hukum	39.93	65.93	Terbangunya regulasi dan tata kelola

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok			
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah					
				Baselin e 2025	Sasara n 2045		Baseli ne 2025	Sasara n 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng				
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11	12	13
	tata kelola yang baik	Yang Berintegrit as dan Adaptif	25	Indeks Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik	2.34	5	25	Indeks Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik	2.76 (2022)	5	25	Indeks Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik	2,76	5,00	pemerintah an yang berintegritas dan adaptif
			26	Indeks Pelayanan Publik	3.87	5	26	Indeks Pelayanan Publik	4.01 (2022)	5	26	Indeks Pelayanan Publik	3	5,00	
			27	Indeks Anti Korupsi			27	Indeks Integritas Nasional	70.2	84.56	27	a.) Indeks Integritas Nasional	70.2	84.56	
				a) Indeks Integritas Nasional	71.94 (2022)	96.98									
				b) Indeks Persepsi Korupsi	34	60						b.) Indeks Profesional ASN	3	4	
												c) level Maturitas SPIP	3,16 (level 3)	4,34 (level4)	

NO	Misi	Arah Pembangunan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok			
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah					
				Baseline 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenbang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	Mewujudkan Kemanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi dan Pembangunan Syariat Islam	Perkuatan Perdamaian, Ketentraman dan Ketertiban yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial	28	Indeks Pembangunan Hukum : disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun arah pembangunan (IE) yang sama	0.6 (2021)	0.84	28	Jumlah peraturan pelaksana UUPA yang sudah diterbitkan dengan yang dibutuhkan	34.8	100.0	28	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	100	Meningkatnya perdamaian ketentraman dan ketertiban yang tangguh dan demokrasi yang substansial
							Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial	29.0	95.0						

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok			
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah					
				Baselin e 2025	Sasara n 2045		Baseli ne 2025	Sasara n 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng				
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11	12	13
			29	Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	62.8 (2020)	80	29	Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	61.17 (2020)	78.55	29	Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	61,00	80,00	
			30	Indeks Demokrasi Indonesia	60-70 (Sedang)	>80 (Tinggi)	30	Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	30	Indeks Demokrasi Indonesia	82,00	88,00 (tinggi)	
		Stabilitas ekonomi daerah	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	10.0- 12.0	18.0- 20.0	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,2	1,4	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,34	0,54	Meningkatny a Stabilitas Ekonomi Daerah
			32	Tingkat Inflasi (%)	2.5+/-1	2.0+/- 1	32	Tingkat Inflasi (%)	2,5 – 3,4	0,8 – 2,7	32	Tingkat Inflasi (%)	2	2	
			33	Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan			33	Pendalaman /Intermedias i Sektor Keuangan			33	Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan			

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah		
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			a) Aset Perbankan/P DB (5)	66.9	200	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	18,9	59,2	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	18,9	59,2	
			b) Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7.6	60	b) Aset Dana Pensiun/PDR B (%)	0,43	0,86	b) Aset Dana Pensiun/PDR B (%)	0,43	0,86	
			c) Aset Asuransi/PD B (5)	9.1	20	c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	1.251,30 b)	6.861,28 b)	c) Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	18,1	6.861,28 b)	
			d) Total Kredit/PDRB (%)	37.8	80-90	d) Total Kredit/PDRB (%)	18,1	55,9	d) Total Kredit/PDRB (%)	18,1	55,9	
			34 Inklusi Keuangan (%)	91	98	34 Inklusi Keuangan (%)	94,91	99,07	34 Inklusi Keuangan (%)	65,51	70,00	

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok			
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah					
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Pelaksana an Syariat Islam	35	Asia Power Index (Diplomatic Influence): Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembanguna n (IE) yang sama	60.4 (2023)	75.0- 80.0	3 5	Indeks Pembanguna n Syariat	80,00 - 87,00	90,00 - 95,00	3 5	Indeks Pembanguna n Syariat	80	95	Meningkatny a Pembanguna n Syariat Islam
			36	Asia Power Index (Military Capability): Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah	14.6	45.0	3 6	Persentase dayah yang mandiri	44,00	95	3 6	Persentase dayah yang mandiri	5,8	95	

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045				RPJPD Kab. Simeulue				Sasaran Pokok	
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah					
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng				
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11	12	13
				Pembanguna n (IE) yang sama											
5	Meningkatkan Ketahanan Sosial budaya dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebuda yaan Maju	37	Indeks Pembanguna n Kebudayaan (IPK)	55.7	68.15	3 7	Indeks Pembanguna n Kebudayaan (IPK)	53,45 - 53,46	65,4 - 65,57	3 7	Indeks Pembanguna n Kebudayaan (IPK)	46	65.57	Terwujudnya kehidupan beragama yang rukun dan berkebudaya an maju
			38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75.19	84.2	3 8	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73,7 - 73,81	79,76 - 80,95	3 8	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73,7 - 73,81	80,95	
		Keluarga Berkualitas , Kesetaraa n Gender, dan Masyaraka t Inklusif	39	Indeks Pembanguna n Kualitas Keluarga	58.49 (2022)	80	3 9	Indeks Pembanguna n Kualitas Keluarga	73,7 - 73,81	79,76 - 80,95	3 9	Indeks Pembanguna n Kualitas Keluarga	73,7 - 73,81	80,95	Meningkatny a pembanguna n keluarga, kesetaraan gender dan

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045				IUP RPJPA 2025 - 2045				RPJPD Kab. Simeulue				Sasaran Pokok
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah					
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng				
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11	12	13
															masyarakat yang inklusif
			40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.458	0.15	40	Indeks Ketimpanga n Gender (IKG)	0,47	0,24 - 0,22	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.207	0,117	
		Lingkunga n Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaraga man Hayati Daerah	0.35 (2020)	0.75	41	Indeks Pengelolaan Keanekaraga man Hayati Daerah	0,592	0,656	41	Indeks Pengelolaan Keanekaraga man Hayati Daerah	0,592	0,656	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
												d) Persentase pengelolaan Tahura Simeulue	45	70	
			42	Kualitas Lingkungan Hidup			42	Kualitas Lingkungan Hidup			42	Kualitas Lingkungan Hidup			

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah		
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72.42 (2022)	76.12	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	79,56	81,1	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	78,82 (Baik)	81,1 (Baik)	
			b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12.5	70	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	20,00	60,00	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	10,00	60,00	
			c) Timbilan sampah terolah di fasilitas pengolahan samph (%)	15 (13% terdaur Ulang)	70 (15% terdau r ulang)	c) Timbilan sampah terolah di fasilitas pengolahan samph (%)	5.20 (2022)	89.54	c) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	5	50	
						43 d)Proposi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh	21.98 (2022)	100	d) Proposi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh	37,75	100	

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah				
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
							pengumpula n sampah (% RT)				pengumpula n sampah (% RT)			
		Berketaha nan Energi, Air, dan Kemandiri an Pangan		a) Ketahanan Energi	6.61	8.24		a) Ketahanan Energi			4 3 a) Ketahanan Energi			Meningkatny a Ketahanan Energi, Air Dan Kemandirian Pangan
							- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	700	1940		- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	150	500	
							- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	149	90		- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*		90	

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah		
				Baselin e 2025	Sasara n 2045		Baseli ne 2025	Sasara n 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			b) Prevalensi Ketidakcuku pan Pangan (Prevalence of Undernouris hment (%))	6.2	2.1	c) Prevalensi Ketidakcuku pan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernouris hment (%))	10.9	2.26	c) Prevalensi Ketidakcuku pan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernouris hment (%))	10.9	2.26	
			c) Ketahanan Air			c) Ketahanan Air			c) Ketahanan Air			
			-Kapasitas Air Baku (m3/kapita)	63.45	200	-Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0.19	7.53	-Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,065	0,22	
			-Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipa an (%)	39	100	-Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipa an (%)	30.47	100	-Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipa an (%)	0	100	

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045				IUP RPJPA 2025 - 2045				RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok	
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah					
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng				
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	13	
											- Akses Air Minum Layak (%)	52,38	100	Meningkatny a Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim	
											- Persentase layanan irigasi	42.1	75.00		
		Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Proposi Kerugian Ekonomi langsung akibat bencana realtif PDB (%)	0.14	0.11	4 4	Indeks Risiko Bencana (IRB)	149.1	121.51 -97.95	4 4	a) Indeks Risiko Bencana (IRB)	160,00		97.95
												b) Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,30		3,50
												c). Cakupan wilayah penanganan kebakaran (%)	30,00	70,00	

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok			
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah					
				Baselin e 2025	Sasara n 2045		Baseli ne 2025	Sasara n 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng				
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11	12	13
			45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
				a. Kumulatif	28.12	51.51		a. Kumulatif	18.54	42.17		a. Kumulatif	18.54	42.17	
				b. Tahunan	32.65	80.96		b. Tahunan	29.56	75.38		b. Tahunan	29.56	75.38	
6	Mewujudkan pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Kawasan perkotaan yang tertata dan berkembangnya desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru									46	46. Pengelolaan Agraria & Penataan Ruang			Terwujudnya penataan kawasan perkotaan serta berkembangnya desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
												a) Tingkat Ketaatan terhadap	100	100	

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah		
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)			
									b. Tingkat penataan kota Sinabang sesuai RDTR (%)	3	75	
									c. Tingkat Pelaksanaan Reforma Agraria (%)	5.00	100.00	
									4 7 Pembanguna n Pedesaan, Transmigrasi dan Kawasan strategis daerah			
									a) Persentase desa maju (%)	25.00	75.00	

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045			IUP RPJPA 2025 - 2045			RPJPD Kab. Simeulue			Sasaran Pokok	
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah			
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
										b) Indeks pembanguna n transmigrasi (%)	Berke mbang	Mandiri	
										c) Tingkat pengembang an kawasan strategis daerah (%)	20.00	75.00	
7	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Sarana dan prasarana konektivitas yang mantap dan terintegrasi								48 Indeks Konektivitas			Tersedianya sarana dan prasarana konektivitas dan aksesibilitas yang mantap dan terintegrasi
										Indeks Konektivitas Intra Wilayah Kabupaten	3	7	

NO	Misi	Arah Pembang unan	IUP RPJPN 2025 - 2045				IUP RPJPA 2025 - 2045				RPJPD Kab. Simeulue				Sasaran Pokok
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah					
				Baselin e 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasar an 2045		Baseli ne 2025	Sasaran 2045 revisi Musrenba ng				
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11	12	13
											Indeks Konektivitas Antar Wilayah Kabupaten	7	10		
8	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Daerah	Pendapata n Asli Daerah dan pendanaa n non pemerinta h semakin meningkat									49	a. Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	8.65	13.65	Meningkatny a Pendapatan Asli Daerah dan pendanaan non pemerintah untuk kebutuhan pembanguna n daerah
											50	b. Proporsi dana CSR dalam pendanaan pembanguna n	0.5%	2%	

5.2.4. Perumusan Sasaran Pokok

Berdasarkan hasil penyelarasan Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) diatas, maka dapat dirumuskan Sasaran Pokok pembangunan RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 yang dapat dilihat pada tabel berikut: Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok.

Tabel 5.5. Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
1	Mewujudkan Transformasi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	Kesehatan untuk semua	Promosi Kesehatan melalui perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	67,61	78,45	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	
			Penyediaan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Pratama Wilayah Simeulue Bagian Tengah					
			Peningkatan Status Rumah Sakit Daerah Simeulue menjadi Rumah Sakit Type B					
			Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP					

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas sesuai standar pada FKTP dan FKTR					
			Peningkatan Ketersediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang memenuhi standar					
			Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.					
			Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.					
			Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.	2 Kesehatan Ibu dan Anak:				
				a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	250	16		
				c) Angka Kematian Bayi	11,48	0		
			Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	25,5	9,0		

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	3 Penanganan Tuberkulosis & Penyakit tidak menular				
				a) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	126	76		
			Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	b) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	71	95		
				c) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	92,29	95,00		
				d) Angka keberhasilan penanganan penyakit tidak menular	92,29	95,00		
			Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	4 Cakupan kepesertaan	96,5	99,5		

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
				jaminan kesehatan nasional (%)				
		Pendidikan Berkualitas dan Merata	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan dasar	5 Hasil Pembelajaran:			Terwujudnya Pendidikan Berkualitas dan Merata	
				a. Angka Partisipasi Sekolah				
			Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana.	- Usia 5-6 Tahun untuk SD/Setara	85,24	100		
				- Usia 7-15 Tahun untuk SMP/ Setara	99,60	100		
				- Usia 7-18 Tahun untuk PNF/Setara	99,73	100		
			Mendukung pemenuhan Gizi, kecukupan Gizi peserta didik					
			Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama					
			Pemenuhan Kebutuhan Guru dan tenaga kependidikan	b. Meningkatnya Angka Harapan	14.87	18		

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
				Lama Sekolah (HLS) (Tahun)				
			Dukungan Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).	c. Meningkatnya Angka Rata -Rata lama Sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun	'9,95	13,06		
			Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan secara merata	d. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
			Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	i) Literasi Membaca	20,81-22,81	64,65 - 66,65		
				ii) Numerasi	13,01-15,01	58,98 - 60,98		
			Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	iii) Skor Literasi SD (%)	48,42-50,42	100		
				iv) Skor Literasi SMP	51,82-53,82	100		
				v) Skor Numerasi SD	38,96-41,96	100		
			Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta	vi) Skor Numerasi SMP	50,24-52-24	100		

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			pengembangan sekolah berbasis asrama	e. Indeks literasi digital (Digital Skil,Digital Culture,Digital Ethics,Digital Safety)	3,75	5,00		
			Peningkatan iklim keamanan, iklim kebinekaan dan iklim inklusivitas di lingkungan sekolah dasar secara merata	f) Indeks Iklim Keamanan, Iklim Kebhinekaan, Iklim Inklusifitas SD dan SMP.	67,99	100		
				g. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pendidikan	Puas	Puas		
			Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	13,58	14,80		
				7 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang	47,8	78		

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
				Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)				
		Perlindungan sosial yang adaptif	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	15.32	0.5	Terwujudnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif	
			Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat					
			Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.					
			Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.					
			Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah					
			Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan					

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Peningkatan akses infrastruktur energi/listrik)					
			Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	13,00	85,00		
			Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	22	55		

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, PMKS dan masyarakat.					
2	Mewujudkan Transformasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah	Produktivitas Ekonomi Iptek, dan Inovasi	Pengembangan komoditas unggulan dan diversifikasi produk dengan menggali potensi wilayah secara optimal sesuai peluang pasar guna meningkatkan pendapatan petani	11 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	1.50	3.00	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi, Inovasi Dan Ipetak	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang cukup untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (Jalan lingkaran Simeulue kewenangan kabupaten, sarana transportasi penyeberangan dan sarana transportasi darat yang memadai)					
			Penguatan pengelolaan jalan Kabupaten dan jalan desa					
			Pemantapan kelembagaan untuk mewujudkan petani yang kuat, dinamis, mandiri, dan berdaya saing	a.) Nilai Tukar Petani (NTP)	104,2	132,32		
			Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui dengan pendekatan sapta (7) usaha tani (olah tanah, penggunaan bibit unggul, pemupukan tepat, pengendalian hama dan penyakit, pengairan yang baik, penanganan pasca panen, dan pemasaran hasil).					

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).					
			Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan					
			Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.					
			Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.					
			Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.					
			Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya					

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			dengan market, bank, dan asuransi pertanian					
			Penguatan daya saing produk ternak	b) Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPt)	NA	110		
			Pengembangan kawasan ternak melalui pendakatan klaster					
			Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	c) Nilai Tukar Nelayan (NTN) & Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi)	116,78	164.73		
			Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.					
			Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.					

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.					
			Pengembangan daya tarik wisata berbasis keunggulan bahari, keanekaragaman hayati dan sejarah berstandar nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas pengalaman berwisata	12 Pengembangan Pariwisata				
			Pengembangan kegiatan wisata olahraga, ekowisata, dan wisata edukatif pada daya tarik wisata dalam rangka mengembangkan produk pariwisata yang berkualitas	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,75	2,91		
			Pengembangan masyarakat sadar wisata yang menjunjung nilai-nilai budaya lokal dan berwawasan lingkungan	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)*	5,00	12,50		

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Peningkatan promosi investasi yang intensif untuk meningkatkan investasi pariwisata berskala nasional dan internasional					
			Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.					
			Peningkatan infrastruktur pariwisata dan Pengembangan Destinasi Wisata					
			Pengembangan industri pariwisata unggulan dengan menerapkan nilai-nilai kearifan budaya masyarakat, prinsip pengelolaan pariwisata halal, berwawasan lingkungan, serta berstandar nasional dan internasional Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	13 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) terhadap PDB ekonomi Kreatif Nasional	0,5	1,5		
				14 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD				
			Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	a) Proposi Jumlah Usaha Kecil dan	13,12	15,32		

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
				Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)				
				b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	1,00	2,25		
				c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,33	6,80		
			Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah serta penguatan proses bisnis dan kelembagaan.	d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,03	7,5		
			Peningkatan produktivitas BUMD.	e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,92	4,82		
			Peningkatan kapasitas tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan peluang lapangan kerja digital.	15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik				

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
				a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,77	4,5		
			Peningkatan upskilling dan re-skilling tenaga kerja melalui pengembangan Balai Latihan Kerja	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	30,0	80		
				16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan(%)	46,52	62,7		
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64,44	72,20		
			Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	17 Tingkat Penguasaan IPTEK:				
				a) Peringkat Inovasi Daerah	270	100		
				b) Indeks Inovasi Daerah	38,00 (inovatif)	70,00 (Sangat Inovatif)		
		Penerapan Ekonomi Hijau	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.					
				a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	63,58	87,21		
			Pengembangan Ekonomi hijau untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing dalam pola pembangunan berkelanjutan	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	29,55	62,94		
		Transformasi Digital	Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk mendukung percepatan transformasi digital.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,7	7,3	Terwujudnya Tranformasi Digital	
			Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).					

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.					

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.					
			Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.					

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.					
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Kecamatan	17,00	4.33	Meningkatnya Integrasi Ekonmi Domestik Dan Global	
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	41,39	40,00		
				Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1,00	3,00		
		Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan	23 Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Berkembangnya desa-desa dan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Pengembangan dan penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan peningkatan daya saing komoditas unggulan secara berkelanjutan	a) Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten Terhadap Propinsi (%)	20.5	32.5		
			Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	49,4	100		
			Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	c1) Persentase Desa Mandiri	2.90	22		
			Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.	c2) Rerata Indeks Desa Membangun	0.69	0.87		
3	Mewujudkan transformasi tata kelola yang baik	Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif	Menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat	Indeks Reformasi Hukum	39.93	65.93	Terbangunya regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Penguatan tapal batas wilayah administrasi kecamatan dan desa					
			Meningkatkan kepatuhan kepada seluruh pihak, terutama lembaga pemerintah untuk menjalankan amanah dari setiap dokumen perencanaan					
			Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE dan keamanan informasi untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,76	5,00		
			Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.					
			Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.					
			Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN	b.) Indeks Profesional ASN	3	4		

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Pengembangan karir ASN melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.					
			Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di Daerah Kabupaten	Indeks Pelayanan Publik	3	5,00		
4	Mewujudkan Kemanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi dan Pembangunan Syariat Islam	Perkuatan Perdamaian, Ketentraman dan Ketertiban yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum, serta pengawasan di wilayah perairan laut terhadap illegal fishing	Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	61,00	80,00	Meningkatnya perdamaian ketentraman dan ketertiban yang tangguh dan demokrasi yang substansial	
			Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran SatpolPP dan WH					
			Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	82,00	88,00 (tinggi)		

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Meningkatkan peran dan fungsi KIP Simeulue dan Panitia Pengawas Pemilihan Simeulue					
			Memperkuat pelaksanaan dan implemetasi Hak Azazi Manusia					
			Memperkuat pemerintahan mukim dan gampong sesuai dengan kewenangan daerah					
		Stabilitas ekonomi daerah	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Tingkat Inflasi (%)	2,0	2,0	Meningkanya Stabilitas Ekonomi Daerah	
			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	33 Pendalaman/Inter mediasi Sektor Keuangan				
			Peningkatan Pajak Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,34	0,54		
			Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD),	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	18,9	59,2		
			penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD,	b) Aset Dana Pensium/PDRB (%)	0,43	0,86		

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	c) Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	18,1	6.861,28 b)		
				d) Total Kredit/PDRB (%)		55,9		
			Meningkatkan peran serta pelaku usaha menyiapkan dana pengembangan masyarakat, paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun yang dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah dan dananya tetap dikelola oleh perusahaan	Inklusi Keuangan (%)	65,51	70,00		
		Pelaksanaan Syariat Islam	Pembinaan aqidah dan akhlak melalui kelembagaan formal dan informal.	Indeks Pembangunan Syariat	80	95	Meningkatnya Pembangunan Syariat Islam	
			Peningkatan angka melek Al-Quran					
			Penguatan peran dan fungsi mesjid					
			Peningkatan lembaga keuangan syariah.					

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Penegakan hukum syariah Islam					
			Peningkatan kepatuhan membayar zakat di Baitul Mal					
			Penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.					
			Peningkatan Mutu dan Kemandirian Dayah	Persentase dayah yang mandiri	5.8	95		
5	Meningkatkan Ketahanan Sosial budaya dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73,7 - 73,81	80,95	Terwujudnya kehidupan beragama yang rukun dan berkebudayaan maju	
			Penguatan kerukunan antar umat beragama, dan golongan					
			Memperkuat peran dan fungsi Lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Simeulue di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	46	65.57		

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Penguatan upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan kebudayaan dan kesenian Simeulue					
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,7 - 73,81	80,95	Meningkatnya pembangunan keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif	
			Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.					
			Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.207	0,117		
			Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.					

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
		Lingkungan Hidup Berkualitas	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis	41 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,592	0,656	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	
			Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami	a) Tingkat pengeolaan kawasan konservasi (TAHURA) (%)	45	70		
				42 Kualitas Lingkungan Hidup				
				a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Baik	Baik		
			Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	10,00	60,00		
				c) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	5	50		

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan	d) Proposi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	37.75	100		
		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Peningkatan sumberdaya energi listrik serta pengembangan energi terbarukan	a) Ketahanan Energi			Terwujudnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	
				- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	150	500		
				- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*				
			Peningkatan ketahanan pangan yang diarahkan pada keragaman sumberdaya pangan, peningkatan produktivitas hasil pertanian, penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan	b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%))	10.9	2.26		
			Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)					
				c) Ketahanan Air				

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	-Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,065	0,22		
				-Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	0	69.53		
				- Akses air minum layak (%)	80	100		
				- Tingkat layanan irigasi	42.1	75.00		
		Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api, banjir, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	a) Indeks Risiko Bencana (IRB)	160,00	97.95	Terbangunnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	
				b) Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,30	3,50		
				c). Cakupan wilayah penanganan kebakaran (%)	30,00	70,00		

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)				
				a. Kumulatif	18.54	42.17		
				b. Tahunan	29.56	75.38		
6	Mewujudkan pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Kawasan perkotaan yang tertata dan berkembangnya desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Tingkat ketaatan terhadap RTRW (%)	100.00	100.00	Terwujudnya penataan kawasan perkotaan serta berkembangnya desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.	
			Penataan kawasan perkotaan yang berkelanjutan sesuai RDTR	Tingkat penataan kota sesuai RDTR (%)	2.90	18.12		
			Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria	Tingkat Pelaksanaan Reforma Agraria (%)	50.00	100.00		
			Peningkatan pembangunan desa, yang dirpioritaskan pada desa yang berada dalam kawasan terpencil	Persentase desa maju (%)	25.00	75.00		

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Peningkatan dan pengembangan kawasan transmigrasi	Indeks pembangunan transmigrasi (%)	Berkembang	Mandiri		
7	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Sarana dan prasarana konektivitas yang mantap dan terintegrasi	Peningkatan sarana dan prasarana konektivitas intra dan antar wilayah Kabupaten yang ramah lingkungan	Indeks Konektivitas Intra Wilayah Kabupaten	3	7	Tersedianya sarana dan prasarana konektivitas yang mantap dan terintegrasi	
				Indeks Konektivitas Antar Wilayah Kabupaten	7	10		
8	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Daerah	Pendapatan Asli Daerah dan pendanaan non pemerintah semakin meningkat	Transformasi tata kelola pendapatan daerah dan optimalisasi PAD	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	8.65	13.65	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan pendanaan non pemerintah untuk kebutuhan pembangunan daerah	
			Pemantapan dan perluasan cakupan sektor pembangunan yang menggunakan sumber dana non pemerintah, terutama investasi, CSR, LSM Funding.	Proporsi dana CSR dalam pendanaan pembangunan	0.5%	2%		

Berdasarkan Tabel 5.5 Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045, Sasaran pokok pembangunan jangka panjang adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke – 20 (dua puluh). Sasaran pokok menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Simeulue yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan;
2. Terwujudnya Pendidikan Berkualitas Yang Merata;
3. Terwujudnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif;
4. Meningkatkan Produktivitas Ekonom, Inovasi Dan Ipetak;
5. Meningkatkan Penerapan Ekonomi Hijau;
6. Mewujudkan Tranformasi Digital;
7. Meningkatkan Integrasi Ekonmi Domestik Dan Global;
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Dan Perdesaan;
9. Meningkatkan Penerapatan Regulasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif;
10. Meningkatkan Penguatan Otonomi Aceh, Perdamaian, Ketentraman Dan Ketertiban Yang Tangguh Dan Demokrasi Yang Subtansial;
11. Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Mako;
12. Meningkatkan Syariat Islam;
13. Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Maslahat Dan Berkebudayaan Maju;
14. Meningkatkan Kualitas Berkeluarga, Kesenjangan Gender Dan Masyarakat Yang Inklusif;
15. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
16. Meningkatkan Ketahanan Energi, Air Dan Kemandirian Pangan;
17. Meningkatkan Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana tersebut diatas dapat diukur melalui capaian indikator sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.6. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Kesehatan untuk Semua	1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	68,10	78,45	
			2 Kesehatan Ibu dan Anak:			
			a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	250	16	
			b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	25,5	9,0	
			c) Angka Kematian Bayi	11,48	0	
			3 Penanganan Tuberkulosis & Penyakit tidak menular			
			a) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	126	76	
			b) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	71	95	
			c) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	92,29	95,00	
			d) Angka keberhasilan penanganan penyakit tidak menular	92,29	95,00	
			4 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	96,5	99,5	
2	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas Yang Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5 Hasil Pembelajaran:	0	0	
			a. Angka Partisipasi Sekolah			
			- Usia 5-6 Tahun untuk SD/Setara	85,24	100	
			- Usia 7-15 Tahun untuk SMP/Setara	99,60	100	
			- Usia 7-18 Tahun untuk PNF/Setara	99,73	100	
			b. Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	14,87	18	
			c. Meningkatkan Angka Rata -Rata lama Sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	9,95	13,06	
			d. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
			i) Literasi Membaca	20,81-22,81	64,65 - 66,65	
			ii) Numerasi	13,01-15,01	58,98 - 60,98	
			iii) Skor Literasi SD (%)	48,42-50,42	100	
			iv) Skor Literasi SMP	51,82-53,82	100	
			v) Skor Numerasi SD	38,96-41,96	100	
			vi) Skor Numerasi SMP	50,24-52-24	100	
			e. Indeks leterasi digital (Digital Skil,Digital Culture,Digital Ethics,Digital Safety)	3,75	5,00	
			f) Indeks Iklim Keamanan, Iklim Kebhinekaan, Iklim Inklusifitas SD dan SMP.	67,99	100	
			g. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pendidikan	Puas	Puas	
			6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	13,58	14,80	
			7 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	58,19	80,00	
3	Terwujudnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	8 Tingkat Kemiskinan (%)	15,32	0,5	
			9 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	13,00	85,00	
			10 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	22	55	
4	Meningkatnya Produktivitas Ekonom,	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	1.50	3.00	
			a) Nilai Tukar Petani (NTP)	104,2	132,32	
			b) Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPt)	NA	110	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
	Inovasi Dan Ipetak		c) Nilai Tukar Nelayan (NTN) & Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi)	116,78	164.73	
			12 Pengembangan Pariwisata			
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,75	2,91	
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)*	5,00	12,50	
			13 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) terhadap PDB ekonomi Kreatif Nasional	0,5	1,5	
			14 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	0	0	
			a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	13,12	15,32	
			b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	1,00	2,25	
			c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,33	6,80	
			d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,03	7,5	
			e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,92	4,82	
			15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			
			a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,77	4,5	
			b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	30,0	80	
			16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	46,52	62,7	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64,44	72,20	
			17 Tingkat Penguasaan IPTEK:			
			a) Peringkat Inovasi Daerah	270	100	
			b) Indeks Inovasi Daerah	38,00 (inovatif)	70,00 (Sangat Inovatif)	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
5	Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	18 Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
			a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	63,58	87,21	
			b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	29,55	62,94	
6	Mewujudkan Tranformasi Digital	Transformasi Digital	19 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,7	7,3	
7	Meningkatnya Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Kabuapten	17,00	4.33	
			21 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	41,39	40,00	
			22 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1,00	3,00	
8	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Dan Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23 Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan	0	0	
			a) Proposi kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten Terhadap Propinsi (%)	20.5	32.5	
			b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	49,4	100	
			c1) Persentase Desa Mandiri	2.90	22	
			c2) Rerata Indeks Desa Membangun	0.69	0.87	
9	Meningkatnya Penerapatan Regulasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang	Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif	24 Indeks Reformasi Hukum	39.93	65.93	
			25 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,76	5,00	
			26 Indeks Pelayanan Publik	3	5,00	
			27 Indeks Integritas Nasional	70.2	84.56	
			b.) Indeks Profesional ASN	3	4	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
	Berintegritas Dan Adaptif		c) level Maturitas SPIP	3,16 (level 3)	4,34 (level4)	
10	Meningkatnya Penguatan Otonomi Aceh, Perdamaian, Ketentraman Dan Ketertiban Yang Tangguh Dan Demokrasi Yang Subtansial	Perkuatan Otonomi Aceh, Perdamaian, Ketentraman dan Ketertiban yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial	28 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	100	
			29 Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	61,00	80,00	
			30 Indeks Demokrasi Indonesia	82,00	88,00 (tinggi)	
11	Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Mako	Stabilitas Ekonomi Makro (nomenklatur dapat disesuaikan)	31 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,34	0,54	
			32 Tingkat Inflasi (%)	2,0	2,0	
			33 Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	0	0	
			a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	18,9	59,2	
			b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,43	0,86	
			c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten (Rupiah)	18,1	6.861,28	
			d) Total Kredit/PDRB (%)	18,1	55,9	
12	Meningkatkan Syariat Islam	Pelaksanaan Syariat Islam	34 Inklusi Keuangan (%)	65,51	70,00	
			35 Indeks Pembangunan Syariat	80	95	
			36 Persentase dayah yang mandiri	5,8	95	
13	Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Maslahat Dan	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	46	65.57	
			38 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73,7 - 73,81	80,95	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
	Berkebudayaan Maju					
14	Meningkatkan Kualitas Berkeluarga, Kesetaraan Gender Dan Masyarakat Yang Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,7 - 73,81	80,95	
			40 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.207	0,117	
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Berkualitas	41 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,592	0,656	
			a) Tingkat pengeolaan kawasan konservasi (TAHURA) (%)	45	70	
			42 Kualitas Lingkungan Hidup			
			a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Baik	Baik	
			b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	10,00	60,00	
			c) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	5	50	
			d) Proposi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	40	100	
16	Meningkatnya Ketahanan Energi, Air Dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43 Ketahanan Energi, Air dan Pangan			
			a) Ketahanan Energi			
			- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	150	500	
			- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	0	90	
			b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%))	10.9	2.26	
			c) Ketahanan Air			
			- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,065	0,22	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	0	100	
			- Akses air minum layak (%)	80	100	
			- Tingkat layanan irigasi	42.1	75.00	
17	Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44 Indeks Risiko Bencana (IRB)	160,00	97.95	
			a) Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,30	3,50	
			b) Cakupan wilayah penanganan kebakaran (%)	30,00	70,00	
			45 Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	0	0	
			a. Kumulatif	18.54	42.17	
			b. Tahunan	29.56	75.38	
18	Terwujudnya penataan kawasan perkotaan serta berkembangnya desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.	Kawasan perkotaan yang tertata dan berkembangnya desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	46. Pengelolaan Agraria & Penataan Ruang			
			a) Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	100.00	100.00	
			b) Tingkat penataan kota sesuai RDTR (%)	2.90	75.00	
			c) Tingkat Pelaksanaan Reforma Agraria (%)	50.00	100.00	
			47. Pembangunan Pedesaan, Transmigrasi dan Kawasan strategis daerah			
			a) Persentase desa maju (%)	25.00	75.00	
			b) Indeks pembangunan transmigrasi (%)	Berkembang	Mandiri	
19	Tersedianya sarana dan prasarana konektivitas yang mantap dan terintegrasi	Sarana dan prasarana konektivitas yang mantap dan terintegrasi	48. Indeks Konektivitas			
			a) Indeks Konektivitas Intra Wilayah Kabupaten	3	7	
			b) Indeks Konektivitas Antar Wilayah Kabupaten	7	10	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
20	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan pendanaan non pemerintah untuk kebutuhan pembangunan daerah	Pendapatan Asli Daerah dan pendanaan non pemerintah semakin meningkat	49. Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	8.65	13.65	
			50. Proporsi dana CSR dalam pendanaan pembangunan	0.5%	2%	

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan pedoman pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan. RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 harus dijadikan acuan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Simeulue sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan

6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku Pembangunan.

6.1.1.1. Keterkaitan RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Simeulue.

Konsistensi antara RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut:

- 1) Sinkronisasi periodisasi dan substansi RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 mengikuti dan memedomani muatan RPJPN dan RPJPA Tahun 2025-2045.
- 2) RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya transformatif untuk mencapai Visi Kabupaten Simeulue Tahun 2045.
- 3) Arah (Tujuan) pembangunan Kabupaten Simeulue dan indikator dalam RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 memedomani RPJPN dan RPJPA Tahun 2025-2045 dan menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan Kabupaten Simeulue dalam RPJMD.
- 4) Sasaran dan indikator prioritas daerah pada RPJMD menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan Kabupaten Simeulue pada RKPD, sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis SKPK (Renstra SKPK), serta tujuan dan sasaran pada Renja SKPK.
- 5) Sasaran dan indikator strategis/program Renstra SKPK menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja SKPK (Renja SKPK), sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Simeulue menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun sasaran program RKPD.
- 6) Sasaran dan indikator prioritas pembangunan Kabupaten Simeulue pada RKPD juga dipedomani dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja SKPK. Indikator prioritas pembangunan Kabupaten Simeulue dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPK yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja SKPK.
- 7) Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral kabupaten seperti rencana induk/Master Plan/Grand strategi Kabupaten Simeulue, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan Kabupaten Simeulue.

- 8) Dokumen RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045 menjadi pedoman Visi, Misi, dan Program bagi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue

6.1.1.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.

- 1) Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- 2) Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- 4) Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
- 5) Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

6.1.1.3. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Simeulue dalam RPJPD, RPJMK, dan RKPK, perlu didukung dengan sinkronisasi antara perencanaan dan pendanaan pembangunan. Selain itu optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah perlu dilakukan secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan

efektivitas dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, hibah, dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

6.1.2. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka pendek dan menengah yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan terbagi menjadi dua bagian.

a) Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Pengendalian jangka menengah mencakup :

- 1) Penjabaran perencanaan RPJPD Simeulue Tahun 2025-2045 ke RPJMD, integrasi dokumen RPJMD ke dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- 2) Kesiapan desain proyek prioritas pembangunan Kabupaten Simeulue termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan
- 3) Konsistensi perencanaan dan penganggaran
- 4) Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka pendek mencakup :

- 1) Penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD, integrasi dokumen RKPD ke dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah.
 - 2) Kesiapan desain proyek prioritas pembangunan Kabupaten Simeulue termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan
 - 3) Konsistensi perencanaan dan penganggaran
 - 4) Identifikasi risiko pembangunan dan mitigasinya.
- b) Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek.

6.1.3. Analisis Risiko Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan Visi “Simeulue Maju, Islami dan Berkelanjutan”, diperlukan pengelolaan risiko pembangunan yang responsif terhadap konteks lokal. Risiko-risiko ini perlu diidentifikasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti dengan strategi mitigasi yang adaptif agar pencapaian Visi Kabupaten Simeulue Tahun 2045 dapat terjaga secara berkelanjutan.

Kabupaten Simeulue memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang khas, sehingga pendekatan terhadap risiko pembangunan harus berbasis pada kondisi riil di lapangan. Analisis risiko berikut ini menitikberatkan pada enam aspek utama yang dinilai strategis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah:

- 1) Risiko sosial, kesenjangan sosial antar wilayah dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menghambat transformasi sosial. Diperlukan pendekatan partisipatif dan pengembangan desa inovatif.
- 2) Risiko ekonomi, ketergantungan pada sektor primer membuat struktur ekonomi rentan. Solusinya adalah diversifikasi ekonomi lokal, penguatan UMKM, dan pengembangan klaster unggulan.
- 3) Risiko lingkungan dan kebencanaan, ancaman bencana alam seperti gempa, banjir, dan tsunami berpotensi mengganggu capaian pembangunan. Diperlukan sistem mitigasi bencana dan perencanaan tata ruang yang responsif.

- 4) Risiko tata kelola pemerintahan, lemahnya koordinasi dan akuntabilitas dapat menurunkan efektivitas pembangunan. Solusinya adalah penerapan *e-governance* dan pengawasan berbasis digital.
- 5) Risiko SDM dan pendidikan, ketidaksesuaian keterampilan SDM dengan kebutuhan masa depan memperlambat inovasi. Diperlukan revitalisasi pendidikan vokasi dan beasiswa di bidang strategis.
- 6) Risiko infrastruktur dan konektivitas, keterbatasan infrastruktur dasar dan digital membatasi pertumbuhan wilayah. Solusinya adalah pembangunan konektivitas dan internet desa.

Dengan memahami dan mengantisipasi risiko-risiko tersebut sejak dini, diharapkan Kabupaten Simeulue dapat membangun fondasi pembangunan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Pengelolaan risiko yang terintegrasi ke dalam perencanaan jangka panjang akan memperkuat resiliensi daerah dalam menghadapi dinamika perubahan, sekaligus menjaga arah transformasi menuju Kabupaten Simeulue 2045 yang maju dan inovatif.

6.1.4. Sistem Intensif

Sistem intensif dalam rangka mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku Pembangunan meliputi unsur pemerintah dan non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga penelitian, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya.

6.1.5. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran Pembangunan jangka Panjang, target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.

Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

6.1.6. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

6.2. Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 sangat ditentukan pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kabupaten Simeulue. Untuk itu, perlu sinergi dan kerjasama guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045: **“SIMEULUE MAJU, ISLAMI DAN BERKELANJUTAN”**.



The image shows a blue ink signature over a circular official stamp. The stamp contains the text "BUPATI SIMEULUE" at the top and "MOHAMMAD NASRUN MIKARIS, S.H., M.H." at the bottom. The signature is written in a stylized, cursive manner across the stamp.